

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 07 TAHUN 2013
TENTANG PANDUAN PENINGKATAN PARTISIPASI
POLITIK PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF
KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

MERRY AMILIA

NIM 145030101111036



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2018

MOTTO

“Jika anda mendidik seorang pria, maka seorang pria akan terdidik.
Tapi jika mendidik seorang perempuan, sebuah generasi akan terdidik”

(Brigham Young)

Menjadi perempuan itu sebuah kodrat,
namun menjadi pemimpin itu sebuah pilihan.
Tidak masalah perempuan menjadi pemimpin di ranah publik,
karena *mindset* perempuan tidak boleh memimpin,
adalah sebuah kontruksi sosial yang harus dipatahkan.

(Merry Amilia)

“yakinkan dengan iman, sampaikan dengan ilmu, usahkan dengan amal”. Yakusa!

(Himpunan Mahasiswa Islam)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun
2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik
Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang.

Disusun oleh : Merry Amilia

NIM : 145030101111036

Fakultas : Ilmu Administrasi

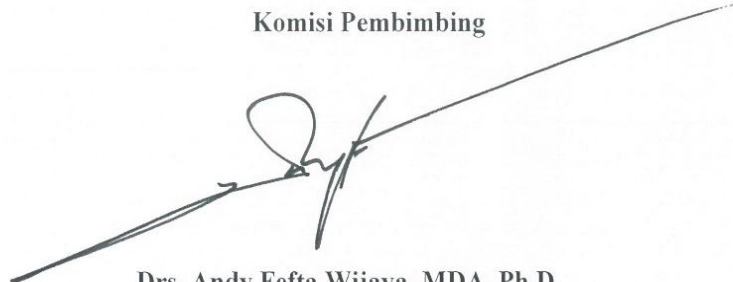
Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 04 April 2018

Komisi Pembimbing



Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA.,Ph.D.

NIP. 196702171991031010

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

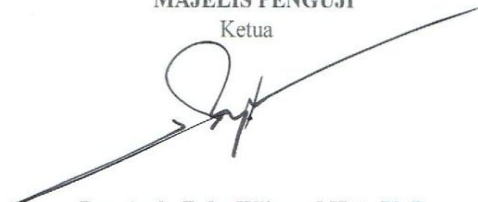
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 15 Mei 2018
Waktu : Pukul 11.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Merry Amilia
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang

**Dan dinyatakan
LULUS**

MAJELIS PENGUJI

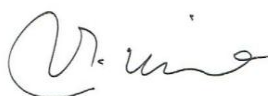
Ketua



Drs. Andv Fefta Wijaya, MDA, Ph.D
NIP. 19670217 199103 1 000

Anggota

Anggota



Wike, S.Sos., M.Si., DPA
NIP. 19701126 200212 2 005



I Gede Eko Putra Sri Sentanu, M.AP., Ph.D
NIP. 2011078312041000

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 04 April 2018

Mahasiswa



Nama : Merry Amilia

NIM : 145030101111036

Merry Amilia. 2018. **Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing: Drs. Andy Fefta Wijaya,MDA.,Ph.D.. Halaman 295+xvi

RINGKASAN

Implementasi kebijakan merupakan mentranformasikan sebuah rencana ke dalam praktek. Implementasi Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang bertujuan untuk membantu penyusunan program dan kegiatan peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif agar lebih sistematis, terukur dan akuntabel. Partisipasi politik perempuan dibutuhkan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, meningkatkan kesetaraan gender, adanya penyelesaian permasalahan terhadap perempuan, perubahan di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan umum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kota Malang, sedangkan situsnya berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Malang, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Malang, Women's Crisis Center Dian Mutiara Malang, Partai Politik Demokrat, PDIP, Hanura, Golkar, PPP dan Gerindra. Sumber data primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik tersebut. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi dokumen dan materi audio visual. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, catatan lapangan dan perangkat penunjang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif Kota Malang sudah cukup baik walaupun belum maksimal ditinjau dari analisis teori implementasi Merilee S. Grindle. Kepentingan dalam kebijakan ini agar perempuan lebih diprioritaskan, tipe manfaat untuk melakukan sosialisasi pentingnya perempuan di legislatif, meningkatkan kesetaraan gender, derajat perubahan pembuatan formulasi kebijakan berpihak pada perempuan, kedudukan pembuatan kebijakan sudah tepat kurang perguruan tinggi, pelaksana kebijakan sudah cukup kapabel. Strategi sudah tepat dengan pendidikan dan pelatihan, karakteristik melalui sosialisasi, penguatan sayap organisasi, mengakomodir perempuan di kepengurusan. Responsivitas pelaksana kebijakan hal ini sudah cukup tepat.

Kata Kunci: Kebijakan, Perempuan, Partisipasi, Politik, Legislatif

Merry Amilia. 2018. **The Implementation of the Ministerial Regulations of the State of Women's Empowerment and Child Protection No 07 Year 2013 on Guidance of Increasing Women's Political Participation in Malang Legislative Institutions.** Undergraduate Thesis. Science Departement of Public Administration, Faculty of Administration Science, Brawijaya University. Advisor: Drs.Andy Fefta Wijaya, MDA.Ph.D. Pages. 295+xvi

SUMMARY

Implementation of the policy is to transform a plan into practice. Implementation Guidance on Increasing Women's Political Participation in Malang Legislative Institution aims to assist the preparation of programs and activities to increase women's participation in the legislative institutions to be more systematic, measurable, and accountable. Women's political participation is needed to increase gender equality, addressing issues concerning women, changes in education, health and general welfare.

This research uses descriptive research type with qualitative approach located in Malang City, while the site is in The Departement of Women Empowerment, Child Protection, Population Control, Malang City Planning (DP3AP2KB), Women's Coalition Malang Branch, Women's Crisis Center Dian Mutiara Malang, Political Partai Demokrat, PDIP, PPP, Hanura, Gerindra and Golkar. Primary data sources were obtained from interviews from related information, while secondary data, were obtained from documents relating to the topic. A Technique of collecting data through an interview, observation, document study and audiovisual material. While the instrument research is the researchers themselves, interview guides, field notes, and supporting devices.

The results showed that the implementation of policies to increase women's political participation in the legislative institution of Malang is good enough, although not maximally reviewed from the analysis of Merilee S. Grindle implementation theory. The interest in this policy is for women to be prioritized, the types of benefits to socializing the importance of women in the legislature, to increase gender equality, the degree of changes in the formulation of women-pro-formulation policy, the position of policy-making is appropriately lacking in universities, policy implements are quite capable. The Strategy is appropriate for education and coaches, characteristics through socialization, strengthening of an organizational wing, accommodating women in stewardship. The responsiveness of the policy implemented is quite appropriate.

Keywords: Policy, Women, Participation, Politics, Legislative

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan



sebagai bentuk rasa syukur atas kehendak dan pertolongan Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufiq, hidayah-Nya kepada penulis dalam setiap untaian kata dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Saya mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya. Untuk Sang Motivator dan Inspirator dalam perjuangan hidup saya, Bapak Kumala. Kepada Bapak yang bekerja pagi hingga pagi kembali demi membiayai kuliahku dan selalu mengajarkanku tentang menghargai waktu serta menyukai membaca. Untuk Malaikat tak bersayap yang selalu memberikan semangat kehidupan, Ibu Aminah. Kepada ibu yang setiap hari selalu mendoakan kesuksesan, keselamatan dan kebahagiaan anaknya, serta bisa mendidik saya menjadi perempuan yang kuat.

terimakasih, tanpa ada ibu dan bapak, kata dan ide ini tidak akan bisa tertulis dalam seni menulis tentang kewajiban menjadi mahasiswa. tanpa semangat yang ibu dan bapak berikan, ini hanya menjadi lembaran tak bermakna dan tak berguna. aku menyadari bahwa beruntungnya memiliki kesempatan untuk bisa menjadi putri dari kedua orang tua yang selalu berjuang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi publik pada prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak khususnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Bambang Supriyono,MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Drs.Andy Fefta Wijaya.,MDA.Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan juga sebagai Komisi Pembimbing yang telah bersedia membimbing, mengarahkan, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin,M.AP.,Ph.D Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya yang telah mendidik dan membimbing dalam mendapatkan ilmu bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Pengurus Partai Politik Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang yang senantiasa

- mengarahkan, mendampingi, membimbing dan memberikan informasi kepada penulis dalam penelitian.
6. Bapak dan Ibu Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang senantiasa mengarahkan dan memberikan informasi kepada penulis dalam penelitian berlangsung.
 7. Bapak dan Ibu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang yang senantiasa membimbing dan memberikan informasi kepada penulis dalam penelitian.
 8. Keluarga Besar Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Malang dan Wilayah Jawa Timur yang menjadi rumah dalam mendidik, membimbing, mengarahkan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
 9. Keluarga Besar *Women's Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang yang senantiasa membimbing dan mendidik dalam bidang pemberdayaan perempuan terutama advokasi.
 10. Kakak tercinta yaitu Saras Dumasari, yang telah memberikan semangat, motivasi, dukungan, dan doa.
 11. Sahabatku yaitu Ryka Widyaningtyas, S.Kep, Mita Valianda, Wildatan Aprillia, Irfan Effendi dan Intan Annisa Irma yang selalu memberikan semangat serta doa.
 12. Keluarga besar HMI Komisariat Ilmu Administrasi Brawijaya Cabang Malang kakak-kakak dan adik-adikku yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, pengalaman dan semangat perjuangan dalam kampus.
 13. Keluarga besar LSMI HMI Cabang Malang (David Alfian Diktara, Alfarinduani Rumagorong, Dicky Dwi Wibowo, Yusuf Kelirey) yang setia memberikan motivasi dan dukungan terhadap penulisan setiap kata dalam lembaran kalimat ini.
 14. Adik-adikku Pengurus Kohati Komisariat Ilmu Administrasi Brawijaya Ikavik, Putri, Dyas, Apsari yang selalu menjadi teman

diskusi dalam bidang pemberdayaan perempuan serta Shela, Eva, Icha, Sarah, Ojat, Nadgol yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa.

15. Keluarga besar HMI Brawijaya khususnya teman-teman Forsilader 2014 dan HMI-Wati Brawijaya yang telah memberikan dukungan, dan semangat kepada penulis.
16. Keluarga besar SEC FIA UB, BEM FIA UB 2015, EM UB 2015, BEM FIA 2016, dan EM UB 2016 yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat.
17. Teman-temanku Program Studi Ilmu Administrasi Publik 2014 yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada penulis
18. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 04 April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Kontribusi Penelitian.....	20
E. Sistematika Pembahasan.....	21

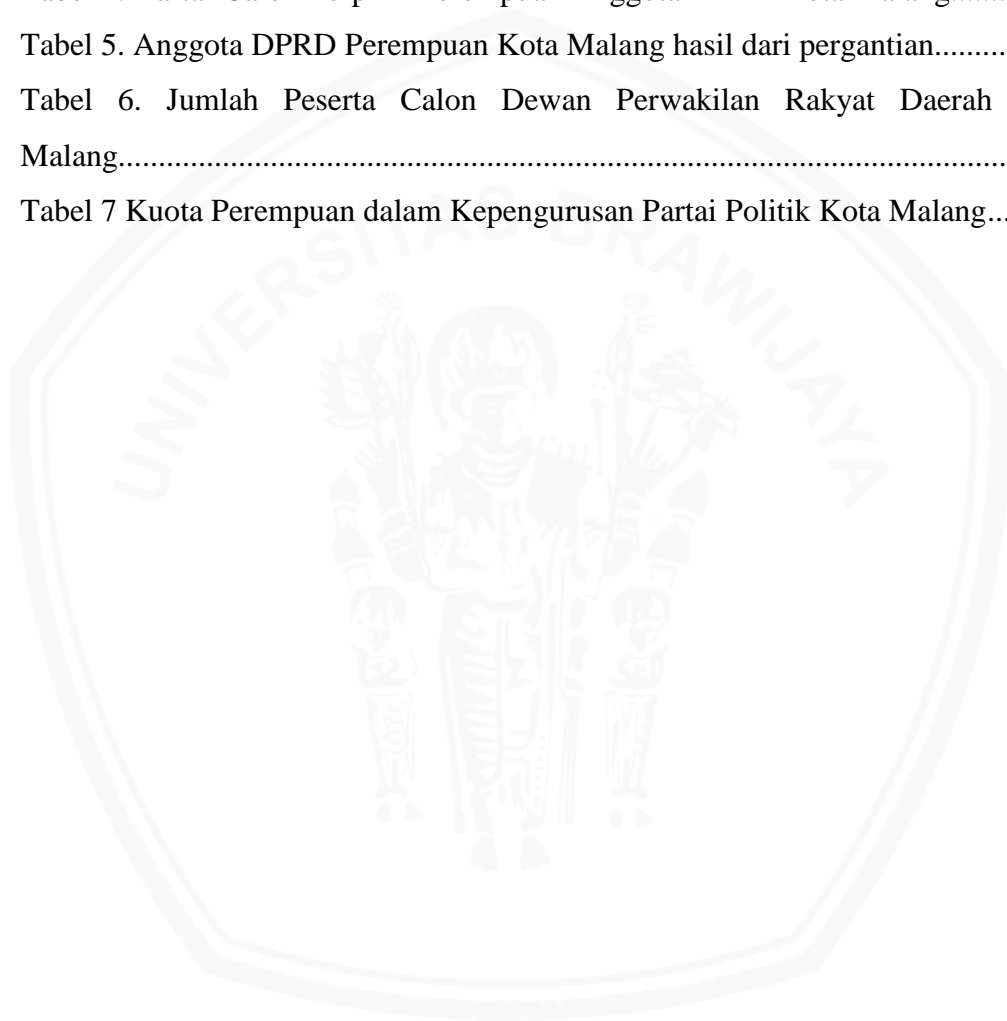
BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	23
B. Administrasi Publik.....	29
1. Pengertian Administrasi Publik.....	29
2. Ruang Lingkup Administrasi Publik.....	31
C. Kebijakan Publik.....	32
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	32
2. Proses Kebijakan Publik.....	35
D. Implementasi Kebijakan Publik.....	36
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	36
2. Unsur-unsur Implementasi Kebijakan Publik.....	39
3. Model Implementasi Kebijakan Publik.....	41
4. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Publik.....	53
E. Politik.....	56
1. Definisi Politik.....	56
2. Pengertian Partai Politik.....	57
3. Fungsi Partai Politik.....	58

4. Pengertian Partisipasi Politik.....	60
5. Bentuk Partisipasi Politik.....	62
6. Cara dan Tipe Partisipasi Politik.....	57
F. Perempuan dalam Politik.....	64
1. Perempuan dalam Parlemen.....	64
2. Hambatan Perempuan dalam Politik.....	65
3. Affirmative Action.....	67
G. Gender.....	69
1. Definisi Gender.....	69
2. Ketidakadilan Gender.....	71
3. Pengarusutamaan Gender (PUG).....	72
4. Pendekatan Pemberdayaan Perempuan.....	75
H. Pemilihan Umum.....	79
I. Kerangka Implementasi Kebijakan	80
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	87
B. Fokus Penelitian.....	88
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	90
D. Jenis dan Sumber Data.....	93
E. Teknik Pengumpulan Data.....	95
F. Instrumen Penelitian.....	98
G. Analisis Data.....	99
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum.....	104
B. Penyajian Data.....	147
C. Analisis Data.....	234
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	286
B. Saran.....	290
 DAFTAR PUSTAKA.....	293

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Anggota DPR RI Periode 1997-2014.....	2
Tabel 2. Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3. Definisi Partisipasi Politik.....	61
Tabel 4. Daftar Calon Terpilih Perempuan Anggota DPRD Kota Malang.....	154
Tabel 5. Anggota DPRD Perempuan Kota Malang hasil dari pergantian.....	154
Tabel 6. Jumlah Peserta Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.....	203
Tabel 7 Kuota Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik Kota Malang.....	212



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Persentase Anggota DPR RI 1997-2014 menurut Jenis Kelamin.....	3
Gambar 2. Peraturan Perundang-undangan terkait Partai Politik dan Pemilihan Umum Legislatif.....	9
Gambar 3. Data Pemilih DPRD Provinsi Jawa Timur 2014.....	15
Gambar 4. Jumlah anggota DPRD Perempuan Kota Malang 2014-2019.....	16
Gambar 5. Model Pendekatan The Policy Implementation Process.....	42
Gambar 6. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Sebagai Proses Administratif dan Politis.....	44
Gambar 7: Model Pendekatan A Framework for Implementation Analysis.....	48
Gambar 8: Model Pendekatan Direct and Indirect Impact on Implementation.....	52
Gambar 9: Proses Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif.....	81
Gambar 10: Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Creswell.....	102
Gambar 11: Lambang Kota Malang.....	110
Gambar 12: Seminar Peran Perempuan Jelang Pilkada Kota Malang.....	165
Gambar 13 : Rapat Paripurna DPRD Kota Malang pembahasan Kawasan Tanpa Rokok.....	174
Gambar 14: Wawancara dengan Ibu Wiwik dari Partai Demokrat.....	182
Gambar 15: Diskusi Publik dalam rangka Internasional Women's Day dengan mengundang Bapak Sutiaji Calon Walikota Malang periode 2018-2022.....	184
Gambar 16 : Ketua DPC Hanura Kota Malang dalam sosialisasi pentingnya politik perempuan	202
Gambar 17: Seminar KPI Jatim dan KPI Cabang Malang dalam Kepemimpinan Perempuan dalam Mewujudkan Perubahan	204
Gambar 18: Acara Pendidikan Politik DPC PPP Kota Malang.....	206
Gambar 19 : Wawancara dengan Ibu Dwi (Kader KPI Cab Malang).....	211

Gambar 20: Bakti Sosial Perempuan Indonesia Raya Malang.....	224
Gambar 21: Proses Implementasi Kebijakan Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang.....	233



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Tujuan dari alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketertiban dunia yang salah satunya didasarkan kepada keadilan sosial. Kemudian keadilan sosial juga disebutkan dalam Pancasila, sila ke 5 berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dasar Negara ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus menaati hierarki peraturan perundang-undangan yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Sesuai isi Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila maka Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menjalankan keadilan sosial tanpa melihat kedudukan, ras, suku, jenis kelamin, dan agama. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum dan Pancasila sebagai ideologi negara belum mampu memberikan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selaras dengan hal itu, Iedarwati dalam Sastriyani (2009: 90) berpendapat bahwa

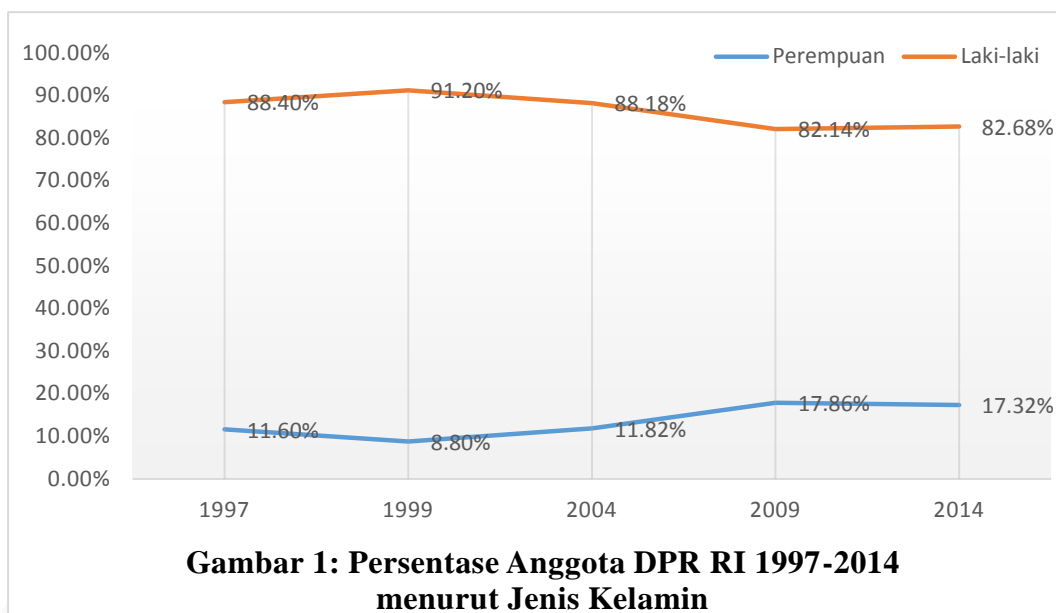
“Indonesia sebagai negara bangsa memiliki cita-cita mencapai tujuan negara yang memberikan nuasa kehidupan lahir dan kehidupan batin yang sejahtera bagi seluruh warga bangsa baik laki-laki maupun perempuan. Namun dalam alam kemerdekaan Indonesia lahir dan suasana batin rakyat perempuan Indonesia menghadapi kegamangan. Kolektivitas Pancasila yang katanya menjamin ruang hidup bersama dalam suasana damai, adil dan sejahtera tak kunjung dialami rakyat perempuan Indonesia. Inklusi sosial Pancasila yang menjamin kebebasan dan keterlibatan warga bangsa menentukan arah masa depan bangsa justru meniadakan keberadaan dan eksistensi rakyat perempuan Indonesia untuk menghirup suasana alam demokrasi. Modal sosial Pancasila dalam setiap ayat-ayatnya justru menjadi lahan suburnya nilai-nilai patriaki yang nyata-nyata memasung dan memperdaya rakyat perempuan Indonesia.”

Menurut pendapat tersebut bahwa dasar negara Indonesia ini belum mampu mengatasi kondisi ketidakadilan sosial, hal ini membuat kondisi perempuan Indonesia semakin terpuruk dikarenakan tidak adanya implementasi yang baik dari dasar negara Indonesia. Kondisi perempuan yang mengalami ketidakadilan sosial karena nilai-nilai patriaki ini merupakan masalah krusial diberbagai bidang, tidak terkecuali bidang politik. Salah satu indikatornya adalah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Keterwakilan perempuan dalam ranah politik di lembaga legislatif Indonesia kurang begitu nampak terlihat, hal ini dibuktikan dengan jumlah anggota DPR RI Periode 1997-2014 pada dibawah ini:

Tabel 1
Jumlah Anggota DPR RI Periode 1997-2014

Tahun Pemilu	Laki-Laki		Perempuan		Laki-laki&Perempuan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1997	442	88,40	58	11,60	500	100%
1999	456	91,20	44	8,80	500	100%
2004	485	88,18	65	11,82	560	100%
2009	460	82,14	100	17,86	560	100%
2014	463	82,68	97	17,32	560	100%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia 2015



Sumber : Komisi Pemilihan Umum Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia 2015

Jumlah anggota DPR-RI diatas menggambarkan bahwa adanya kurang pilihan masyarakat terhadap calon anggota perempuan DPR-RI masih kurang. Sehingga jumlah terpilihnya perempuan di kursi DPR kurang dari 20% (dua puluh persen). Masyarakat yang hanya sedikit memilih perempuan bisa dikatakan sebagai bentuk diskriminasi atau penomerduaan perempuan ini, menurut Nantri dalam Sastriyani (2009:200) ada dua faktor yang menyebabkan persentase perempuan di politik masih kecil, yaitu:

1. Faktor internal, yaitu faktor dari diri perempuan itu sendiri, seperti sumber daya perempuan, adanya pandangan bahwa politik itu keras dan adanya streatipe yang dilabelkan pada wanita.
2. Faktor eksternal, yaitu faktor dari luar perempuan seperti sistem pemilu, peran organisasi partai politik dan nilai budaya.

Faktor-faktor diatas mampu menimbulkan diskriminasi yang dialami perempuan sehingga menghambat partisipasi perempuan dalam proses politik. Perlu adanya regulasi untuk mengatasi partisipasi politik perempuan yang masih rendah. Jika ada regulasi yang tepat maka dapat menjadi tindakan preventif dalam partisipasi politik. Tindakan untuk menghargai partisipasi politik ini merupakan penghargaan terhadap kedudukan hak asasi manusia khususnya perempuan. Dengan ini Indonesia meratifikasi beberapa konvensi Internasional, seperti yang dikutip dari Jurnal Konstitusi Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bahwa konvensi yang diratifikasi di Indonesia adalah:

1. Konvensi tentang Hak-hak Politik Wanita Tahun 1952 menjadi Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.
2. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita Tahun 1979 (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*) menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.
3. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman of Degrading Treatment or Punishment*) menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

4. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 beserta protokolnya.
5. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*Covenant on Economic, Sosial, and Cultural Rights*) menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 beserta protokolnya.

Berbagai konvensi yang di ratifikasi oleh Indonesia adalah sebagai upaya untuk menghapuskan tindakan diskriminasi kepada perempuan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, maupun adanya kekerasan terhadap perempuan. Ratifikasi berbagai konvensi ini adalah sebagai bentuk usaha pemerintah Indonesia untuk meningkatkan derajat kaum perempuan. Salah satunya ratifikasi yang disebutkan diatas yaitu Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita Tahun 1979 (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman/ CEDAW*) menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang berbunyi:

1. Pasal 1: Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah ‘diskriminasi terhadap perempuan’ berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya antara laki-laki dan perempuan.

2. Pasal 7: Negara-negara Pihak wajib melakukan langkah-tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan publik di negaranya, khususnya menjamin bagi perempuan atas dasar persamaan dengan lelaki, hak:
- a. untuk memilih dalam semua pemilihan umum dan referendum publik, dan dipilih untuk duduk dalam lembaga/badan perwakilan.
 - b. untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat;
 - c. untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Kebijakan yang sudah diratifikasi oleh Indonesia harus dilakukan sehingga seluruh rakyat Indonesia juga turut serta menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai bidang termasuk politik yang menjamin perempuan untuk memilih dan dipilih dalam badan perwakilan. Perempuan harus turut serta dalam kehidupan politik agar mampu menyampaikan suaranya di ranah legislatif maupun eksekutif. Tidak ada pelarangan perempuan untuk dapat ikut serta proses politik, hal ini juga sudah ditetapkan sebelumnya oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui penempatan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan”. Sesuai pada Undang-Undang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat 1 maka kedudukan perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilu

tidak ada pengecualian dan perbedaan. Namun pada kenyataan perempuan mengalami diskriminasi pada keterwakilan perempuan terutama dalam politik. Menurut Sastriyani (2009,166-167) hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain

1. Nilai sosial budaya yang lebih mengutamakan laki-laki
2. Pembagian kerja berdasarkan gender dalam masyarakat agraris-tradisional
3. Citra perempuan sebagai kaum yang lemah lembut
4. Ajaran agama yang ditafsirkan secara sempit dan parsial
5. Kurangnya *political will* pemerintah
6. Kekurangan dalam kualitas individu perempuan dan kaderisasi politik

Berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik diatas mengakibatkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender kepada kaum perempuan. Secara singkat dari beberapa faktor diatas, hal utama yang menyebabkan keterwakilan perempuan minim adalah hegemoni budaya patriaki, kurangnya peran pemerintah dan tanggung jawab partai politik dalam melakukan pendidikan politik kepada kaum perempuan. Sehingga hal ini membuat kaum perempuan tidak ikut berpartisipasi dalam ranah politik. Apabila kondisi ini dibiarkan terlalu lama maka kesadaran kaum perempuan terhadap ranah politik semakin minim. Upaya untuk mendorong kesadaran partisipasi kaum perempuan dalam keterwakilan di ranah legislatif adalah masuk ke dalam partai politik. Hal ini disebabkan karena partai politik mempunyai aktivitas yang berjuang untuk kepentingan anggota politik, masyarakat dan bangsa. Selaras dengan itu, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik berbunyi

“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Partai politik akan menjadi jalan kaum perempuan untuk bisa menghilangkan tindakan diskriminasi melalui cara pencalonan di pemilihan umum agar bisa di posisi legislatif ataupun eksekutif. Sehingga apabila kaum perempuan sudah duduk dalam ranah legislatif maupun eksekutif melalui tahap pemilihan umum akan lebih mudah untuk membuat kebijakan yang berdampak baik kepada perempuan. Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan keterwakilan perempuan melalui penerapan *Affirmative Action* (Kebijakan Afirmasi) .

Menurut Soetjipto (2005:85) *Affirmative Action* sebagai “langkah strategis untuk mengupayakan kemajuan dalam posisi-posisi yang menentukan di masyarakat”. Pendapat yang selaras juga disampaikan dalam Jurnal Konstitusi Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bahwa *Affirmative Action* merupakan perlakuan khusus kepada kaum perempuan dalam meningkatkan keterwakilannya di DPR, *Affirmative Action* juga merupakan sebuah tindakan diskriminatif positif (*reverse discrimination*) yang dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum HAM internasional dan UUD 1945. Peraturan didalam UUD 1945 Pasal 28H ayat 2 “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Perlakuan khusus berhak untuk didapatkan kaum perempuan dikarenakan kontruksi masyarakat yang menomerduakan kaum perempuan.

Sebagai salah satu bentuk penjabaran UUD 1945, pemerintah memformulasikan beberapa kebijakan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan.



Gambar 2: Peraturan Perundang-undangan terkait Partai Politik dan Pemilihan Umum Legislatif

Sumber: Hasil olahan penulis (2018)

Kebijakan dari Pemerintah yang berusaha untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan sesuai dengan gambar diatas. Sebagai salah bentuk penjabaran dari UUD 1945 Pasal 28H ayat 2 dan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menerapkan *Affirmative Action* maka dirumuskan peraturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Dalam Undang-Undang tersebut berbunyi “Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum masyarakat partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.” Berdasarkan Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa partai politik

sebagai organisasi yang mengusahakan kebaikan masyarakat secara luas juga harus mengikutsertakan kaum perempuan dalam kepengurusan sehingga hal ini akan mendorong kesetaraan gender dalam partai tersebut. Keterwakilan perempuan didalam partai politik juga akan menjadi ujung tombak dalam mengikuti pesta demokrasi setiap lima tahun sekali.

Setelah adanya Undang-Undang Partai Politik, Pemerintah semakin berupaya meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender melalui penerapan kebijakan *Affirmative Action*. Kebijakan ini mulai dituangkan pada Undang-Undang No 12 Tahun 2003 Pasal 65 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.” Undang-Undang ini mendorong keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2004 , namun hasil yang didapatkan belum menunjukkan jumlah yang signifikan. Seperti yang dikutip dari Komisi Pemilihan Umum Data dari Publikasi Statistik Indonesia 2015 yaitu dari 560 anggota DPR RI hanya terpilih 65 anggota perempuan atau sekitar 11,82 %.

Setelah dari Undang-Undang No 12 Tahun 2003, lembaga legislatif berupaya kembali untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 53 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD berbunyi “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”. Selain itu kebijakan ini juga dipertegas dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2008 Pasal 55 ayat 2 berbunyi “ Di dalam daftar bakal calon

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”.

Kebijakan *Affirmative Action* juga terus dilakukan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pasal 55 “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”. Upaya Pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini belum begitu menghasilkan jumlah yang signifikan, seperti yang dikutip Komisi Pemilihan Umum Data dari Publikasi Statistik Indonesia 2015 yaitu dari 560 anggota DPR RI hanya terpilih 97 anggota perempuan atau sekitar 17,32 %. Hal ini menunjukkan dari tahun 2003-2014 jumlah keterwakilan perempuan masih dibawah 20% (dua puluh persen). Sehingga dapat dilihat bahwa setiap Pemilihan Umum, dorongan partai politik hanya pada pendaftaran bakal calon saja yaitu minimal 30%. Pada saat jalannya pemilihan, kekuasaan untuk menentukan yang duduk di kursi DPR adalah masyarakat secara umum. Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partai politik belum mampu mendorong masyarakat untuk memberikan suaranya untuk kaum perempuan. Ketentuan menetapkan kuota 30% harus dipenuhi oleh Partai Politik sebagai syarat untuk mengikuti Pemilu. Dalam hal ini fungsi partai politik untuk ikut serta dalam pemilihan umum menurut Gatara (2009: 198) adalah:

1. Sosialisasi politik, yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah, para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

2. Pendidikan politik, yaitu proses penyadaran dan pendewasaan politik para anggota masyarakat. Di sini, para anggota masyarakat diharapkan menjadi senantiasa “melek politik”.
3. Partisipasi politik, yaitu mengajak atau mengikutsertakan para anggota masyarakat untuk terlibat dalam berbagai macam dan tingkatan kehidupan politik.
4. Agregasi kepentingan, yaitu sebagai jembatan(bridge) antara rakyat dan pemerintah melalui upaya menampung dan mengombinasikan tuntutan-tuntutan individu-individu dari para anggota masyarakat menjadi proposal (usulan) kebijakan publik yang signifikan.
5. Rekrutmen politik, yaitu proses seleksi calon-calon pemimpin yang akan mengisi berbagai jabatan publik atau jabatan politik.

Sejalan dengan fungsi tersebut, maka partai politik harus menyiapkan amunisi sebelum, saat dan setelah pemilu. Hal ini berarti sebelum pemilu partai politik harus melakukan sosialisasi dan rekrutmen politik kepada masyarakat umum untuk dijadikan anggota partai politik. Kedua, setelah sudah menjadi anggota partai politik maka partai politik mempunyai tugas untuk melakukan pendidikan politik kepada anggotanya. Setelah itu saat pemilu berlangsung, partai politik harus melakukan partisipasi politik yaitu dengan cara mengajak anggota partai dan masyarakat agar ikut serta dalam agenda pemilu. Kegiatan terakhir adalah agregasi kepentingan yaitu menghubungkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

Melalui keseluruhan proses kegiatan tersebut, partai politik mempunyai tanggung jawab yang berat di pendidikan politik dan partisipasi politik dikarenakan partai politik harus melakukan pemahaman wawasan yang luas mengenai politik serta harus mampu untuk ikut andil dalam kegiatan demokrasi tersebut. Dengan kondisi ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pihak dari Pemerintah telah berupaya membuat kebijakan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif. Maksud dan tujuan kebijakan tersebut tertuang dalam pasal 3 dan pasal 4 berbunyi

Pasal 3:

Maksud penyusunan Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif adalah sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar program dan kegiatan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif mencapai hasil yang telah ditetapkan.

Pasal 4:

Tujuan Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif adalah untuk membantu penyusunan program dan kegiatan peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif agar lebih sistematis, terukur dan akuntabel.

Partisipasi perempuan melalui kebijakan Peraturan Menteri Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif pada BAB II harus dilakukan oleh berbagai lembaga meliputi:


1. Partai Politik
2. Penyelenggara Pemilu
3. Pemerintah
4. Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Organisasi Kemasyarakatan

Sehingga dengan peraturan tersebut maka berbagai pihak diatas untuk diharapkan untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam lembaga legislatif. Peningkatan partisipasi politik perempuan ini perlu dilakukan dengan sinergitas semua pihak agar keterwakilan perempuan

dalam partisipasi politik tidak rendah. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD maka jumlah partisipasi perempuan minimal 30% setiap partai politik dalam pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, namun pada kedudukannya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif belum mencapai angka yang berimbang. Dalam kondisi pemilihan berlangsung bukan menjadi tugas utama dari partai politik untuk menyuruh masyarakat memilih namun lebih diletakkan pada tugas setiap individu calon yang harus menghimbau dan menyakinkan kepada masyarakat untuk memilih dirinya.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum akan menentukan para calon legislatif di kursi keterwakilan selama lima tahun. Jumlah keterwakilan perempuan yang rendah diakibatkan dari kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap anggota legislatif perempuan. Persepsi ini muncul dikarenakan konstruksi gender bahwa perempuan adalah seorang yang lembut dan halus dianggap tidak cocok di zona politik yang dipenuhi oleh aroma konspirasi. Padahal seorang perempuan memiliki keunggulan daripada laki-laki mengenai cara pandang dan berfikir ke depan. Selaras dengan pendapat tersebut maka Manurung dalam Sastriyani (2009:285) menyampaikan bahwa “perempuan memiliki kelebihan berfikir, bernalar jauh ke depan, memimpin dengan hati sehingga lebih peka dengan keadaan masyarakat, perempuan memiliki daya tahan untuk merasakan penderitaan lebih tinggi dan perempuan lebih memiliki nyali lebih kuat”. Walaupun perempuan dengan ciri khas tersebut, perempuan belum mampu mendorong masyarakat untuk bisa calon anggota legislatif perempuan. Jumlah

Anggota DPR RI 1997-2014 memperlihatkan bahwa perempuan di DPR RI masih dibawah 20% dari jumlah seluruhnya. Partisipasi masyarakat untuk memilih anggota legislatif perempuan masih kurang, partisipasi masyarakat ini dibuktikan dari jumlah masyarakat dan jumlah pemilih yang tidak seimbang, salah satu daerah yang mengalami kondisi ini adalah Kota terbesar kedua di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.


KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR **KOTA MALANG JAWA TIMUR** **DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR 5**

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI TAHUN 2014
ditis berdasarkan formulir Model DA-1-DPRD PROPINSI

NO.	URAIAN	RINCIAN PEROLEHAN SUARA					
		BLIMBING	KLOJEN	KEDUNGKAN DANG	SUKUN	LOWOKWARU	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
A. DATA PEMILIH							
1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	65.103	38.832	67.433	69.061	57.351	297.780
	PR	67.717	41.918	69.360	70.655	58.945	308.595
	JML	132.820	80.750	136.793	139.716	116.296	606.375
2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK	643	250	100	401	1.231	2.625
	PR	101	257	124	360	1.076	1.918
	JML	744	507	224	761	2.307	4.543
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	731	66	108	72	105	1.082
	PR	56	53	117	106	94	426
	JML	787	119	225	178	199	1.508
4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya	LK	714	489	950	1.100	973	4.226
	PR	879	560	1.111	1.218	1.153	4.921
	JML	1.593	1.049	2.061	2.318	2.126	9.147
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK	67.191	39.637	68.591	70.634	59.660	305.713
	PR	68.753	42.788	70.712	72.339	61.268	315.860
	JML	135.944	82.425	139.303	142.973	120.928	621.573
B. PENGGUNA HAK PILIH							
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	41.168	23.854	45.323	44.994	36.882	192.221
	PR	47.524	27.862	49.730	50.333	41.476	216.925
	JML	88.692	51.716	95.053	95.327	78.358	409.146
2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain	LK	643	224	90	353	763	2.073
	PR	97	220	114	331	699	1.461
	JML	740	444	204	684	1.462	3.534
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	392	45	59	41	40	577
	PR	36	38	62	74	44	254
	JML	428	83	121	115	84	831
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya	LK	714	489	950	1.100	973	4.226
	PR	879	560	1.111	1.218	1.153	4.921
	JML	1.593	1.049	2.061	2.318	2.126	9.147
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	42.917	24.612	46.422	46.408	38.658	199.097
	PR	48.536	28.680	51.017	51.956	43.372	223.561
	JML	91.453	53.292	97.439	98.444	82.030	422.658

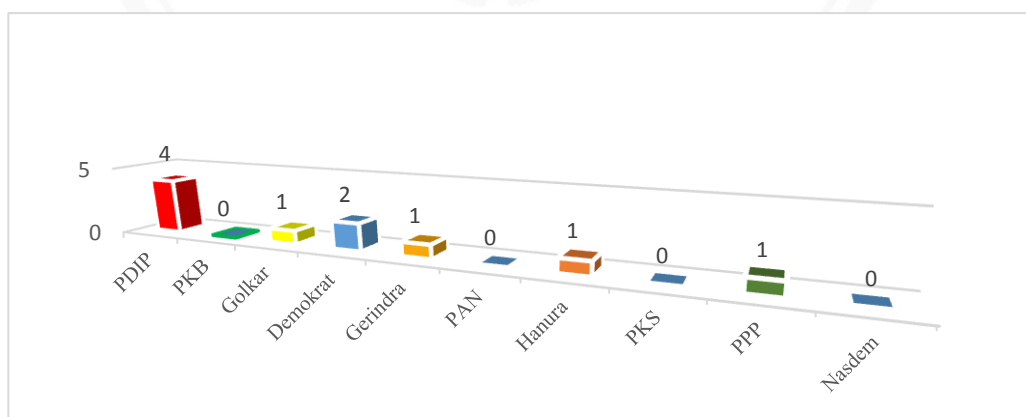
Gambar 3 Data Pemilih DPRD Provinsi Jawa Timur 2014

Sumber: kpud.go.id (13 November 2017)

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah pemilih saat pemilihan umum Tahun 2014 legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga sama datanya dengan jumlah pemilih DPRD Kota Malang 621.115 jiwa sedangkan jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 410.929 jiwa. Apabila dipresentasikan maka hanya ada 66,1 % dari jumlah total 621.115 yang menggunakan hak pilih. Selain itu jumlah pemilih perempuan yang menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum

berkisar 217.336 jiwa dari jumlah 410.929, apabila dipresentasikan hanya sekitar 52%. Walaupun jumlah pengguna hak suara perempuan setengah dari jumlah total, namun hal ini tidak memiliki dampak yang begitu signifikan terhadap hasil penetapan anggota DPRD Kota Malang. Menurut Nanda dalam Afandi (diikutip dari *mediacenter.malangkota.go.id* diakses pada 13 November 2017) bahwa penekanan disini bukan memaksa pemilih perempuan untuk memilih calon legislatif perempuan, namun partisipasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang belum percaya terhadap keterwakilan perempuan

Daftar calon tetap pemilihan umum DPRD Kota Malang Tahun 2014 adalah 501 orang dari 12 partai politik. Namun hasil dari proses pemilihan umum belum bisa mewakili suara keterwakilan perempuan atau belum ada jumlah yang hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan. Informasi yang diberikan Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Malang hanya terdapat 11 orang perempuan dari jumlah 45 orang anggota DPRD Kota Malang seluruhnya serta dari 11 partai politik pemenang pemilu hanya 6 partai politik yang memiliki keterwakilan perempuan.



Gambar 4: Jumlah anggota DPRD Perempuan Kota Malang 2014-2019

Sumber: Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Malang

Partisipasi politik perempuan sebagaimana dari data diatas menunjukkan bahwa ternyata masih rendah jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Proses pada sebelum dan saat pemilihan umum harus dianalisis, sehingga mengetahui strategi dan langkah yang diambil dalam mengajukan calon perempuan. Apabila strategi dan langkah yang diambil sesuai maka jumlah anggota parlemen yang terpilih tidak minim seperti data tersebut. Padahal jika perempuan menjadi anggota parlemen akan lebih mudah untuk merekomendasikan kebijakan mengenai kebutuhan perempuan, ini dikarenakan bahwa anggota legislatif perempuan akan lebih memahami permasalahan yang dirasakan oleh perempuan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Thomas dan Welch (dalam Subono, jurnal sosial demokrasi 2009:60) bahwa “Anggota parlemen perempuan memiliki kecenderungan untuk memberikan prioritas yang besar dibandingkan dengan anggota parlemen laki-laki dalam kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu seperti keluarga, anak-anak, pendidikan, kesehatan dan perempuan”.

Demi mewujudkan adanya partisipasi politik perempuan agar mampu menyuarakan permasalahan perempuan maka dibentuklah berbagai regulasi untuk mendorong perempuan untuk berpartisipasi di bidang politik. Sesuai dengan kebijakan diatas dari Peraturan Menteri Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 bahwa ada berbagai komponen yang turut serta dalam mendorong partisipasi perempuan, fase utama ketika pemilihan umum yaitu sebelum, saat dan setelah pemilihan umum.

Pelaksanaan proses pencalonan ini dalam Peraturan Menteri Negeri

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tersebut terdapat beberapa lembaga, setiap lembaga memiliki peranan dalam peraturan tersebut. Pertama, partai politik hal ini dikarenakan partai politik merupakan pintu utama untuk memasuki lembaga legislatif. Setiap kandidat calon legislatif harus menjadi anggota partai politik untuk mencalonkan diri menjadi DPRD maka partai politik harus melakukan seleksi kepada kader-kadernya dalam proses pencalonan agar menemukan kandidat calon yang militan. Kedua, penyelenggara pemilu atau komisi pemilihan umum memiliki peran dalam rangka sosialisasi kegiatan pemilihan umum. Ketiga, Pemerintah atau diwakili Organisasi Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang memiliki peran dalam memberdayakan masyarakat. Keempat yaitu Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki peran untuk melakukan advokasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang politik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mempunyai keinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai Implementasi Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 dalam berbagai partai politik agar mengetahui partisipasi politik perempuan tahapan proses pencalonan di partai politik Kota Malang yang dituangkan dalam tulisan berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang”**

B. Rumusan Masalah

Partisipasi politik perempuan masih minim di lembaga legislatif sehingga perlu ada peningkatan jumlah calon legislatif untuk bisa mewakili berbagai permasalahan perempuan. Jika demikian berbagai lembaga memiliki peran dan tanggung jawab dalam proses pencalonan di lembaga legislatif sesuai Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2013 harus mampu meningkatkan keterwakilan perempuan. Proses kegiatan ini didasarkan pada proses implementasi kebijakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Di Lembaga Legislatif Kota Malang, sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran setiap elemen kelembagaan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya adalah:

1. Manfaat Akademis

- a. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pembanding bagi penelitian-penelitian yang telah ada. Selain itu dapat memberikan pemahaman teori implementasi kebijakan pada praktiknya dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian yang sama pada kedepannya.

- b. Bagi Instansi terkait

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan sumbangsih pemikiran baru bagi berbagai instansi terkait.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Partai Poitik dan menambah wawasan masyarakat umum mengenai partisipasi politik perempuan dalam proses pencalonan.

E. Sistematika Pembahasan

Upaya untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi ini secara logis, menyeluruh dan sistematis, maka peneliti mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat deskripsi latar belakang masalah yang mengemukakan mengenai alasan latar belakang penelitian, perumusan masalah yang muncul mengenai implementasi kebijakan dalam proses pencalonan, tujuan penelitian yang mennguraikan hasil yang ingin didapatkan dalam penelitian ini, manfaat penelitian dalam kontribusinya ke masyarakat dan sistematika penulisan untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Memuat uraian tentang teori yang terkait dengan implementasi kebijakan partisipasi politik perempuan dalam proses pencalonan legislatif. Bab ini menguraikan tentang teori-teori dalam disiplin ilmu sosial yang berhubungan dengan penelitian ini. Teori-teori yang digunakan antara lain Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Politik, Gender, Keterwakilan Perempuan dan Pemilihan Umum

BAB III :METODE PENELITIAN

Metode penelitian meliputi jenis penelitian adalah deskriptif dan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian terhadap Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Legislatif Kota Malang. Sumber data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Teknik Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah metode Creswell.

BAB IV :PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil penelitian, analisis data, dan interpretasi data mengenai analisis Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Legislatif Kota Malang, dimana hasil pembahasan ini akan menjawab rumusan masalah.

BAB V :PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang diberikan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jumlah terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

Judul/ Tahun Terbit	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Partisipasi Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Studi Tentang Partisipasi Anggota DPRD Perempuan Kota Malang Periode Tahun 2014-2019). Tahun Terbit: 2016	Zihadi Adrian Wiratama	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian: Deskriptif • Pendekatan penelitian: Kualitatif • Analisis data: Model interaktif Miles, Huberman dan Saldana 	Bahwa terdapat partisipasi yang sangat baik yang dilakukan oleh anggota dewan perempuan DPRD Kota Malang dalam menjalankan fungsi legislasinya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sebuah peraturan daerah yang sudah dibentuk oleh DPRD Kota Malang dari hasil penggunaan hak inisiatif yang diupayakan oleh anggota dewan

			perempuan Kota Malang, dimana peraturan daerah tersebut tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Bentuk peraturan daerah tersebut menjadi bukti bahwa adanya keterlibatan perempuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD Kota Malang.
Analisis Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pencalonan Anggota Legislatif di DPRD Kabupaten Pelalawan Tahun 2009. Tahun Terbit: 2011	Nurhayati	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitian: Survei • Analisis Data: deskriptif 	Berdasarkan jawaban responden tentang tingkat pendidikan formal yang dimiliki perempuan yang merupakan calon legislative adalah tamatan SMA dan diploma kemudian berdasarkan jawaban responden tentang pengalaman organisasi menyatakan kurang baik karena pengalaman organisasi yang dimiliki kurang dari lima tahun. Sistem rekrumen yang diterapkan belum sepenuhnya baik karena didasarkan system informal sehingga kaum perempuan tidak terwakili di lembaga legislatif dan akibatnya 30% perempuan di lembaga legislatif tidak tercapai serta aspirasi perempuan di DPRD Kabupaten Pelalawan tidak tersalurkan secara baik, kemudian system

			<p>patriaki yang memandang perempuan kurang dapat berperan di lembaga legislatif dan pemimpin jabatan perempuan kurang dapat berperan di lembaga legislatif dan pemimpin jabatan politik lainnya, sehingga kaum perempuan tersebut termajinalkan baik dari segi formal maupun non formal- padahal kedudukan perempuan sejajar dengan laki-laki dan berhak untuk menjadi pemimpin.</p>
Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga. Tahun Terbit: 2016	Ukhti Raqim	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan penelitian: Kualitatif • Analisis Data: Model interaktif Miles, Huberman dan Saldana 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <p>1) Ketentuan kuota 30% sudah diimplementasikan akan tetapi belum tercapai. Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga mampu mencapai 28% pada pemilu 2014. Meskipun belum mencapai 30%, anggota DPRD Kota Salatiga meningkat dari periode tahun 2004-2009 mampu mencapai 5 perempuan, periode 2009-2014 ada 7 perempuan dan 2014-2019 masih bertahan 7 orang.</p> <p>2) Kendala yang dihadapi adalah masih kurang maksimalnya</p>

			partai dalam menjalankan, melaksanakan dan memperjuangkan kegiatann dan kepentingan kaum perempuan, sehingga kegiatan tersebut kurang berjalan, dan kontruksi social yang masih kuat pada masyarakat terutama kaum perempuan itu sendiri yang memandang bahwa perempuan tidak mampu bersaing dengan laki-laki, sehingga untuk menjalankan peran di ruang public dianggap tidak mampu. Hal ini menjadikan <i>mindset</i> pada perempuan yang tidak mudah untuk dirubah, sehingga ia merasa tidak yakin dan tidak percaya pada diri sendiri bahkan pada perempuan lain.
Partisipasi Politik Elit Politik Perempuan Kota Semarang dalam Pemilu Tahun 2004. Tahimm Terbit: 2007	Bambang Wahyudi	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian: Deskriptif • Pendekatan penelitian: Kualitatif • Analisis data: Model interaktif Miles dan Huberman 	Bahwa partisipasi politik elit politik perempuan ditunjukkan dalam bentuk memberikan suara dalam pemilu, mengikuti kampanye, aktif dalam diskusi informan, menjadi juru kampanye, menjadi pengurus partai politik, menjadi saksi dalam pemilu, dan menjadi penyelenggara pemilihan umum (KPU). Partisipasi

			politik elit politik dalam pemilu tahun 2004 tidak dapat dilepaskan dari adanya motif yang mendorong elit politik perempuan dalam berpartisipasi. Adapun motif tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya keyakinan dalam diri individu, orientasi pemimpin dan agama, dan juga karena adanya kesadaran diri sebagai warga Negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk turut memberikan kontribusi bagi perkembangan bangsa.
Perempuan Dalam Partai Politik (Strategi Mempertahankan Eksistensi Perempuan dalam Partai Gerindra Kota Malang	Novi Karina Sari	<ul style="list-style-type: none"> •Pengolahan data: Deskriptif •Analisis data: Kualitatif 	Mengenai strategi partai Gerindra dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Partisipasi politik perlu memberikan program kerja yang jelas dan dan strategi yang tepat. Strategi partai Gerindra untuk menjangkau partisipasi politik perempuan dan representasi keterwakilan perempuan dengan menggunakan komunikasi politik di semua level melibatkan media massa, Jaringan Gerindra Dan Sarjana Penggerak Desa merupakan salah satu produk komunikasi politik Partai Gerindra Malang. Keterlibatan perempuan di partai

			<p>masih belum membentuk keseimbangan karena masih adanya persaingan melibatkan posisi maskulin yang mendominasi. Hasil dari strategi segmentasi, pengelompokan yang dibuat Gerindra melalui PIRA (Perempuan Indonesia Raya) menghasilkan keterlibatan kelompok pengusaha yang sebelumnya menjadi sasaran partai dalam menjaring partisipasi politik perempuan. Target strategi ini adalah untuk mencapai kuantitas dan kualitas perempuan dalam representasi politiknya, lalu penempatan posisi atau kedudukan yang sesuai dengan individu kader perempuan di Gerindra Malang.</p>
--	--	--	---

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2018)

Berbagai penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa permasalahan partisipasi politik perempuan terjadi di berbagai daerah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas bahwa sama-sama membahas tentang partisipasi politik perempuan. Perbedaanya dengan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian, metode analisis data dan pengambilan judul yang lebih ke partisipasi politik secara umum sedangkan penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang.

B. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik mempunyai definisi yang beragam dan dikemukakan oleh beberapa ahli di dunia. Menurut Dimock, Dimock dan Koenig dalam Pasolong (2013:7) mengatakan bahwa “administrasi publik adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuatan politiknya”. Menurut Pfiffner dan Presthus dalam Syafie (2010:23) mengenai administrasi publik adalah:

- a. *Public Administration involves the implementation of public policy which has been determine by representative political bodies.* (Administrasi Publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik)
- b. *Public Administration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out public policy. It is mainly accupied with the daily work of governments.* (Administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah)
- c. *In sum public administration is a process concerned with crying out public policies, encompassing innumerable skilss and techniques larga numbers of people.* (Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Pendapat lain dikemukakan oleh Pasolong (2013:8) administrasi publik adalah “kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif”. Menurut Waldo dalam Syafie (2010: 25)

“Administrasi Publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah”. Menurut Siagian dalam Syafri (2012:23) “Administrasi publik didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara”. Lebih lanjut menurut Syafri (2012:24) administrasi publik didefinisikan sebagai:

“Menjelaskan bahwa rumusan administrasi publik atau negara adalah proses kerjasama kelompok orang yang terdiri dari aparatur negara, anggota legislatif, partai politik, lembaga swadaya masyarakat/LSM, kelompok kepentingan (*interest group*), organisasi profesi, media massa, atau masyarakat sipil lain dalam merumuskan, mengimplementasikan (melaksanakan) berbagai kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pencapaian tujuan negara secara efisien dan berkeadilan sosial”.

Kesimpulan dari pendapat para ahli diatas bahwa administrasi publik adalah proses kerjasama dari berbagai pihak dengan tujuan melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan efektif dalam mengimplementasikan kebijakan serta program yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum dipenuhi oleh privat atau swasta. Hubungan administrasi publik dengan penelitian ini adalah implementasi kebijakan salah satu pemahaman yang bersumber dari administrasi publik sesuai dengan pendapat Pfiffner dan Presthus dalam Syafie (2010:23) yaitu implementasi kebijakan publik adalah bagian dari administrasi publik yang lebih menjelaskan mengenai penerapan peraturan yang dibuat oleh badan-badan perwakilan politik.

2. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Pendefinisian Administrasi Publik yang beragam terkadang membingungkan masyarakat untuk memahami administrasi Publik. Penggunaan kata “publik” bisa bermakna luas dan menyulitkan untuk fokus terhadap ruang lingkup administrasi publik. Untuk mengatasi hal tersebut Henry dalam Pasolong (2013:19-20) memberikan rujukan tentang ruang lingkup administrasi yang dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas antara lain:

“(a) Organisasi publik, pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi, (b) Manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia, dan (c) Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi”

Menurut Syafie (2010:27-29) ruang lingkup administrasi publik meliputi:

- a. Di bidang hubungan, peristiwa dan gejala pemerintahan yang banyak ditulis para pakar pemerintahan, meliputi: Administrasi pemerintahan pusat, administrasi pemerintahan pemerintahan daerah, administrasi pemerintahan kecamatan, administrasi pemerintahan kelurahan, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan kotamadya, administrasi pemerintahan kota administratif, administrasi departemen dan administrasi non departemen.
- b. Di bidang kekuasaan yang banyak ditulis oleh para pakar Ilmu Politik meliputi: administrasi politik luar negeri, administrasi politik dalam negeri, administrasi partai politik posisi masyarakat LSM dan administrasi kebijaksanaan pemerintah, *policy*, *wisdom*, kondisi, peran pemerintah.
- c. Di bidang peraturan perundang-undangan yang banyak ditulis para pakar Ilmu Hukum Tata Negara, meliputi: Landasan Idiil, Landasan Konstitusional dan Landasan Operasional.
- d. Di bidang kenegaraan yang banyak ditulis oleh para pakar ilmu negara meliputi: tugas dan kewajiban negara, hak dan kewenangan negara, tipe dan bentuk negara, fungsi dan prinsip negara, unsur-unsur negara, tujuan negara dan tujuan nasional.

- e. Di bidang pemikiran hakiki yang banyak ditulis oleh para pakar ilmu filsafat meliputi: etika administrasi publik, estetika administrasi publik, logika administrasi publik dan hakikat administrasi publik.
- f. Di bidang ketatalaksanaan yang banyak ditulis oleh para pakar ilmu administrasi publik meliputi: administrasi pembangunan, administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kemiliteran, administrasi kepolisian, administrasi perpajakan, administrasi pengadilan, administrasi kepenjaraan dan administrasi perusahaan.

Hubungan dengan penelitian ini adalah implementasi kebijakan publik dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang erat kaitannya dengan partai politik sehingga implementasi kebijakan ini termasuk ruang lingkup administrasi publik dibidang kekuasaan.

C. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Hendaknya kebijakan dibedakan dengan kebijaksanaan, menurut Pasolong (2013:38) “kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu sedangkan kebijaksanaan berkenaan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang berdasarkan alasan-alasan tertentu”. Dye dalam Syafie (2010:105) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “*Whatever government choose to do or not to do*” (segala sesuatu atau apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Dari pandangan lain, Anderson dalam

Abidin (2012:22-23) mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan sebagai berikut:

- a. *Public policy is purposive, goal oriented behaviour rather than random or chance behaviour.* Setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan.
- b. *Public policy consist of course of action-rather than separate, discrete. decision ,or actions-performed by government officials.* Artinya, suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun, ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat dan berorientasi pada implementasi, interpretasi dan penegakan hukum.
- c. *Policy is what government do-not what they say will do or what they intend to do.* Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah.
- d. *Public policy may either negative or positive.* Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.
- e. *Public policy is based on law and is authoritative.* Kebijaksanaan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat mengikutinya.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Anderson dalam Hamdi (2014:36) mengartikan “kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan bertujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok aktor berkenaan dengan suatu masalah atau suatu hal yang menarik perhatian”. Menurut Hoogerwerf dalam Syafie (2010:105-106) “kebijakan publik sebagai unsur penting dari politik, dapat diartikan sebagai usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu”. Budiardjo (2008: 20) mendefinisikan kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Pasolog (2013:40) mengemukakan jenis-

jenis kebijakan publik dapat ditelusuri melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 menjelaskan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Undang-Undang/Peraturan, Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (3) Peraturan Pemerintah, (4) Peraturan Presiden (5) Peraturan Daerah. Menurut Abidin (2012:25-31) memaparkan kebijakan jika dilihat dari segi strukturnya bahwa terdapat lima unsur kebijakan yaitu:

- a. Unsur pertama, tujuan kebijakan. Kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang baik. Tujuan yang baik itu sekurang-kurangnya memenuhi empat kriteria yaitu diinginkan untuk dicapai, rasional atau realitis (*rational or realitic*), jelas (*clear*), dan berorientasi ke depan (*future oriented*).
- b. Unsur kedua dalam studi kebijakan adalah masalah. Masalah merupakan unsur sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah yang tepat, dapat menimbulkan kegagalan total dalam sebuah proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan jika pemecahannya dilakukan terhadap masalah yang tidak benar. Dengan cara lain dapat dikatakan jika suatu masalah telah dapat diidentifikasi secara tepat, berarti sebagian pekerjaan dapat dianggap sudah dikuasai.
- c. Unsur ketiga dari kebijaksanaan adalah tuntutan. Tuntutan muncul karena salah satu dari dua sebab. Pertama, karena terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka. Kedua, karena munculnya kebutuhan baru yang menyusul setelah suatu tujuan tercapai atau suatu masalah terpecahkan.
- d. Unsur keempat dari suatu kebijakan adalah dampak. Dampak ini merupakan tujuan lanjutan yang muncul sebagai pengaruh dari pencapaian suatu tujuan.
- e. Unsur kelima dari kebijakan adalah sarana atau alat kebijakan. Suatu kebijakan diimplementasikan dengan menggunakan sarana seperti kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis dan perubahan kebijakan itu sendiri.

Berbagai pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahawa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan-pililhan yang direkomendasikan oleh individu, kelompok masyarakat atau pemerintah untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menangani suatu masalah yang terjadi dimana tujuannya untuk kehidupan masyarakat kedepannya lebih baik dan outputnya melalui pembuatan program ataupun keputusan. Langkah kebijakan publik harus mampu memanfaatkan sumber daya yang ada melalui cara-cara yang strategis. Sehingga kebijakan publik diharapkan mampu menyelesaikan berbagai masalah yang dialami masyarakat. Hubungan dengan penelitian ini maka implementasi kebijakan publik yang digunakan sebagai fokus penelitian berasal dari keilmuan kebijakan publik. Sehingga dasar-dasar implementasi kebijakan publik tidak boleh jauh dari pembahasan kebijakan publik.

2. Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik dalam menyelesaikan masalah-masalah publik melalui berbagai tahapan. Menurut Anderson dalam Widodo (2017:16) membedakan lima langkah dalam proses kebijakan yaitu (a) *agenda setting* (Penyusunan agenda), (b) *policy formulation* (formulasi kebijakan), (c) *policy adaption* (penentuan kebijakan), (d) *policy implementation* (implementasi kebijakan), (e) *policy assessment/evaluation* (evaluasi kebijakan). Menurut Dunn dalam Pasolong (2013:41) proses memecahkan masalah-masalah adalah (a) penetapan agenda kebijakan (b) adopsi kebijakan (c) implementasi kebijakan (d) evaluasi kebijakan. Menurut Dye dalam Widodo (2017:16-17) proses kebijakan publik meliputi:

- a. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)
Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.
- b. Penyusunan agenda (*agenda setting*)
Penyusunan agenda (*agenda setting*) merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
- c. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)
Perumusan (*formulation*) merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.
- d. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)
Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden dan kongres.
- e. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)
Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.
- f. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)
Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers dan masyarakat (publik).

D. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan adalah salah satu proses tahapan dalam kebijakan publik. Menurut Hinggis dalam Pasolong (2013:57) mendefinisikan “implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi”. Menurut Wijaya dan Supardo (2013:57) mengatakan bahwa “implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik”. Menurut Grindle dalam Pasolong (2013:57-58) “implementasi sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka

yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya”. Menurut Widodo (2017:88) “implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan”. Pendapat yang lain dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2017:87) yaitu:

“To understand what actually happens after a programs is enacted or formulated is the subject of policy implementation. Those events and activities that occur after the issuing of authoritative public policy directives, which in cluded both the effort to administer and the substantive impacts on people and events”. (Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tadi mencakup usaha-usaha untuk mengadminstrasikannya dan untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Pendapat lain disampaikan Darwin dalam Widodo (2017:89) “persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan ada empat hal yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada pada publik. Sedangkan menurut Wahab (2015:136) implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab kepada semua kelompok sasaran melainkan juga kepada jaringan-jaringan politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi pihak yang terlibat. Pendekatan implementasi kebijakan membongkar stagnasi kebijakan untuk mendekatinya dalam kerangka pendekatan politik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Santoso (2010:130) dalam merumuskan asumsi implementasi kebijakan dalam perspektif politik yaitu

“Implementasi sebuah kebijakan bisa jadi telah direncanakan secara cermat menurut organisasi prosedur, dan manajemen yang tepat, dan menghasilkan perilaku sebagaimana diharapkan. Tetapi jika itu semua mengabaikan realitas kekuasaan, misalnya: kemampuan kelompok-kelompok yang menentang kebijakan tersebut untuk ‘mengganggu’ kebijakan tersebut, maka kebijakan itu bisa jadi akan gagal.”

Pendapat tersebut mendeskripsikan bahwa pemaknaan terhadap implementasi kebijakan dalam era zaman sekarang lebih pada mensistesisikan antara implementasi sebagai proses administrasi juga sebagai proses politik. Menurut Santoso (2010:126-127) pembahasan mengenai implementasi kebijakan menyangkut dua hal. Pertama, soal *Policy Content* yang dimaknai sebagai produk kebijakan yang memuat tujuan dan misi kebijakan yang telah dirumuskan dari *policy making* ; kedua, sedangkan *Policy Context* dimaknai segala representasi lingkungan di mana suatu proses kebijakan, termasuk implementasi berlangsung. Kesimpulan dari pendapat ahli diatas bahwa implementasi kebijakan adalah proses mentransformasikan peraturan atau rencana ke praktik yang menyangkut administrasi dengan muatan politik serta melibatkan manusia, dana, dan kemampuan organisasional. Hubungan dengan penelitian ini maka implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap kebijakan publik yang digunakan sebagai dasar penelitian ini untuk mengetahui keadaan nyata di lapangan tentang Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang.

2. Unsur-unsur Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Smith dalam Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada adalah:

- a. Unsur pelaksana (*implementor*)
Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik pada setiap tingkat pemerintahan.
- b. Adanya program yang dilaksanakan
Pada hakekatnya, implementasi kebijakan adalah implementasi program. Di dalam kebijakan terdapat program-program sebagai sebuah strategi dalam pencapaian tujuan daripada kebijakan itu sendiri.
- c. Kelompok Sasaran (*Target group*)
Sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan.

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan menurut Dimock dan Dimock dalam Tachjan (2006:27-28) adalah pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian. Menurut Tachjan (2006:28) ada tiga fase dalam pelaksanaan kebijakan publik. Pertama, fase yang harus dilakukan oleh administrator adalah menetapkan tujuan dan sasaran dari rencananya, lalu dari hasil analisis perumusan kebijakan ditentukan kebijakan administratif yang bersifat ke dalam sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Rencana- rencana yang dirumuskan terdiri

dari hasil penjabaran kebijakan dan berbagai keputusan yang diambil dan selanjutnya rencana-rencana yang disusun diturunkan/dijabarkan lagi melalui program-program operasional, sehingga terbentuk struktur program.

Fase kedua yang harus dilaksanakan administrator dari unit-unit administratif ialah pengorganisasian. Melalui pengorganisasian, tenaga manusia, alat, tugas, wewenang, tanggung jawab dan tata kerja ditata sedemikian rupa sehingga dapat digerakkan untuk melaksanakan kegiatan, salah satunya yakni melalui proses memotivasi individu-individu yang didalamnya dalam bersikap dan komitmen terhadap pelaksanaan program. Ketiga, fase yang harus dilakukan adalah administrator harus mengembangkan metode-metode dan prosedur-prosedur yang dibutuhkan, salah satunya cara-cara untuk secara kontinyu meninjau hasil-hasil sewaktu program itu dalam proses pelaksanaan. Menurut Siagian dalam Tachjan (2006:31) fase penilaian yang menjadi objek seluruh segi kegiatan antara lain:

- a. Hasil yang dicapai dalam satu kurun waktu tertentu.
- b. Biaya yang nyata dikeluarkan oleh satu organisasi untuk mencapai hasil itu dibandingkan dengan biaya yang tersedia.
- c. Tenaga yang dipergunakan.
- d. Sarana dan prasana yang dimanfaatkan, termasuk cara pemanfaatannya.
- e. Efektivitas mekanisme dan prosedur kerja yang telah ditetapkan.
- f. Sarana dan prasarana yang dimanfaatkan, termasuk cara pemanfaatannya.

Unsur yang kedua yakni, unsur program. Esensi dalam implementasi kebijakan implementasi program. Terry dalam Tachjan (2006:31) mengemukakan bahwa program ialah rencana yang bersifat komprehensif menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu

kesatuan. Program harus menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metoda, standar, *budget*. Grindle dalam Tachjan (2006:32) juga mengungkapkan isi program harus menggambarkan:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh program;
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan;
- c. Derajat perubahan yang diinginkan;
- d. Status pembuat keputusan;
- e. Siapa pelaksana program;
- f. Sumber daya yang diprogram.

Unsur yang terakhir yakni unsur Kelompok sasaran (*target groups*) yakni sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Seberapa jauh mereka dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan bergantung pada kesesuaian isi dari kebijakan (program) dengan harapan atau kebutuhan mereka. Disamping itu juga ditentukan oleh faktor keefektivan komunikasi berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran tersebut dan efektivitas implementasi, dan sebaliknya. Kelompok sasaran mempunyai karakteristik seperti: besar kelompok sasaran, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia dan keadaan sosial-ekonomi, hal itu mempengaruhi efektivitas implementasi.

3. Model Implementasi Kebijakan Publik

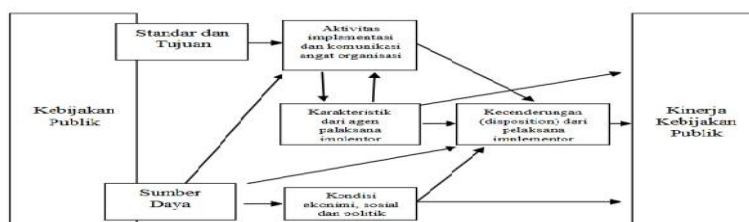
a. Model Donald Van Mater dan Carl Van Horn

Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Wahab (2015:164-165) adalah model dengan istilah *a model of the polcy*

implementation process Model ini didasarkan pada perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Pendapat dari dua ahli untuk menawarkan pendekatan yang menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dengan suatu model konsep yang menghubungkan kebijakan dengan kinerja.

Konsep-konsep yang penting dalam hal ini mengenai perubahan, kontrol, kepatuhan bertindak dalam implementasi kebijakan. Menurut kedua pakar hal-hal yang perlu dianalisis adalah mengenai hambatan-hambatan dalam mengenalkan perubahan organisasi, efektivitas mekanisme kontrol, menyangkut kekuasaan, rasa keterikatan, kepatuhan. Sehingga model implementasi kebijakan ini dalam menghubungkan kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan. Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Wahab (2015:164-165) Variabel-variabel bebas yang dimaksud adalah:

- 1) Standar/ukuran dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber-sumber kebijakan
- 3) Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana
- 4) Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- 5) Sikap para pelaksana
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik



Gambar 5 Model Pendekatan The Policy Implementation Process

Sumber: Van Metter dan Van Horn dalam Agustino 2016:136

Variabel-variabel di atas berhubungan dengan tujuan-tujuan yang telah disesuaikan dengan sumber-sumber. Titik fokus pada badan-badan pelaksana meliputi organisasi dan beserta kegiatannya antara stakeholder dengan sasaran. Titik fokus para pelaksana mengaitkan pada orientasi di lapangan.

b. Model Grindle

Model yang dikembangkan oleh Grindle dalam Ali dkk (2012:95-96) yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi dan konteks implementasinya. Kedua hal tersebut harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang dilaksanakan.

Indikator isi kebijakan menurut Grindle dalam Ali dkk (2015:96) adalah (1) kepentingan yang dipengaruhi; (2) Tipe manfaat; (3) Derajat perubahan yang diharapkan; (4) Letak pengambilan keputusan; (5) Pelaksana program; (6) Sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan konteks implementasi, indikator-indikatornya adalah (1) Kekuasaan, strategi aktor yang terlibat (2) Karakteristik lembaga dan penguasa; (3) Kepatutan daya tanggap.



Gambar 6 Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Sebagai Proses Administratif dan Politis

Sumber: Grindle dalam Agustino (2016:146)

Memahami implementasi kebijakan sebagai sebuah hubungan antara dunia konsep (*Policy Content*) dengan dunia realita (*Policy Context*). Implementasi kebijakan tidak lagi sekedar berada dalam dimensi yang bersifat prosedural dan cenderung “memaksakan konteks sosial”. Menurut Grindle dalam Agustino (2016:142) “Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

- 1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan dua faktor yaitu:
 - a) Impak (Sic!) atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.

- b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Menurut Grindle juga dalam Agustino (2016:143-145) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*:

- 1) Isi kebijakan (*Content of Policy*) menurut Grindle adalah:
 - a) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (*Interest Affected*)
Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.
 - b) Tipe manfaat (*Type of Benefits*)
Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
 - c) Derajat perubahan yang ingin Dicapai (*Extent of Change Envision*)
Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
 - d) Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
 - e) Pelaksana Program (*Program Implementation*)
Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.
 - f) Sumber-sumber daya yang Digunakan (*Resources Committed*)
Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
- 2) Lingkungan Implementasi Kebijakan (*Context of Policy*) menurut Grindle adalah:

- a) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*)
Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.
- b) Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Bekuasa (*Institution and Regime Characteristic*)
Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
- c) Tingkat Kepatuhan dan adanya respon dari Pelaksana (*Compliance and Responsiveness*)
Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan yang dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi. Hubungan dengan penelitian ini adalah kesamaan memandang implementasi kebijakan dari segi administratif dan politik. Sehingga peneliti menggunakan model implementasi kebijakan Grindle dalam melakukan penelitian.

c. Model Mazmania dan Sabatier

Model Mazmanian dan Sabatier adalah model yang dikembangkan Hogwood dan Sabatier dalam Ali dkk (2012:94-95), model yang disusun

atas dasar proses implementasi kebijakan. Sebagai suatu proses kebijakan, ditegaskan bahwa dalam tahap implementasi kebijakan terdapat tiga variabel bebas yang dapat berpengaruh, yaitu: (1) Mudah/tidaknya masalah dikendalikan, (2) Kemampuan kebijaksanaan untuk menstukturkan proses implementasi, dan (3) variabel di luar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi.

Namun, di antara ketiga variabel bebas, variabel (1) berpengaruh secara langsung terhadap variabel (2) dan (3). Sedangkan variabel tergantung adalah tahapan-tahapan dalam proses implementasi yang akan terjadi. Tahapan kegiatan bawah dari *output*, kemudian diikuti oleh keadaan kesediaan kelompok sasaran. Untuk kemudian memberikan dampak nyata. Selanjutnya dipersepsi yang berakhir pada tahapan perbaikan yang mendasar dalam undang-undang. Adapun yang menjadi indikator dari variabel mudah/tidaknya masalah kebijakan adalah terdiri dari:

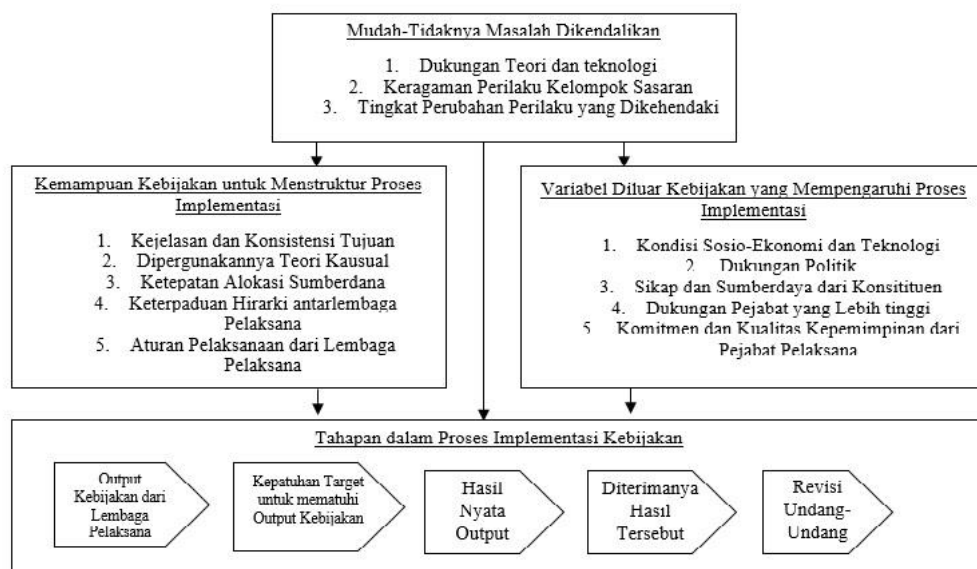
- 1) Kesukaran-kesukaran teknis keragaman perilaku kelompok sasaran.
- 2) Prosentasi kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk.
- 3) Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.

Sedangkan pada variabel kemampuan kebijakan, indikatornya dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Kejelasan dan konsistensi tujuan;
- 2) Digunakannya teori kasual yang memadai;
- 3) Ketetapan alokasi sumber dana;
- 4) Keterpaduan hierarki dalam dan di antara lembaga pelaksana;
- 5) Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana.
- 6) Rekrutmen Pejabat pelaksana.

7) Akses formal pihak luar.

Variabel di luar kebijakan, indikatornya adalah: (1) Kondisi sosial ekonomi dan teknologi; (2) Dukungan publik; (3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok; (4) Dukungan dari pejabat atasan; (5) Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.



Gambar 7: Model Pendekatan A Framework for Implementation Analysis

Sumber: Mazmanian & Sabatier dalam Agustino (2016:152)

d. Model Hogwood dan Gunn

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2015:167-1760) tergolong model *top-down*. Menurut kedua pakar ini, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna diperlukan beberapa persyaratan tertentu, syarat-syarat yang dimaksud adalah: (1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh

instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan yang serius (2) Untuk pelaksanaan program, tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai (3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia (4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal (5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya (6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil (7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan (8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat (9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna (10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

e. Model Thomas R.Dye

Model implementasi kebijakan dari Dye disebut juga dengan istilah ‘Model Implementasi Interaktif’. Model ini menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap proses yang dinamis, karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika kebijakan dianggap kurang memenuhi harapan *stakeholders*. Ini berarti bahwa berbagai tahap implementasi program atau kebijakan publik akan dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan setiap fase pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan.

a. Model Edwards III

Model implementasi kebijakan George Edwards III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Menurut Edwards III yang dikutip dari Widodo (2017:96-106) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor model implementasi kebijakan menurut Edwards III antara lain:

1) Faktor Komunikasi

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isu, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Sumber Daya

a) Sumber daya manusia

Menurut Edwards III (2017:98) menegaskan bahwa “*Probably the most essential resources in implementing policy is staff*” (Sumber daya manusia (*staff*) harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Edwards III dalam Widodo (2017:98) menegaskan bahwa “*No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter accurately they are transmitted, if the personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementation will not effective*” (Jika demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (*aparatur*) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Sekalipun aturan main pelaksanaan kebijakan jelas dan kebijakan telah ditransformasikan dengan tepat, namun manakala sumber daya manusia terbatas baik dari jumlah maupun kualitas (keahlian) pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif.

Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (*pimpinan*). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan

antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya.

b) Sumber daya anggaran

Sumber daya keuangan (anggaran), akan memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Di samping program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah, bahkan akan terjadi *goal displacement* yang dilakukan oleh pelaku kebijakan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mengubah perilaku (disposisi) pelaku kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu ditetapkan atau disertakan suatu sistem insentif dalam sistem akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus menyertakan atau menyediakan sistem insentif bagi para petugas pelayanan, manajer program dan mungkin juga masyarakat yang dilayani.

c) Sumber daya peralatan

Menurut Edwards dalam Widodo (2017:102) menegaskan bahwa *“physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he is supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies, and even green space implementation won't succeed”*. Dengan demikian, terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Mengapa demikian karena dengan terbatasnya fasilitas (apalagi yang sudah usang terutama teknologi informasi) sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Terbatasnya fasilitas yang tersedia, kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku dalam melaksanakan kebijakan.

d) Sumber daya informasi dan kewenangan

Informasi ini penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi agar di antara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Kewenangan sangat diperlukan, terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.

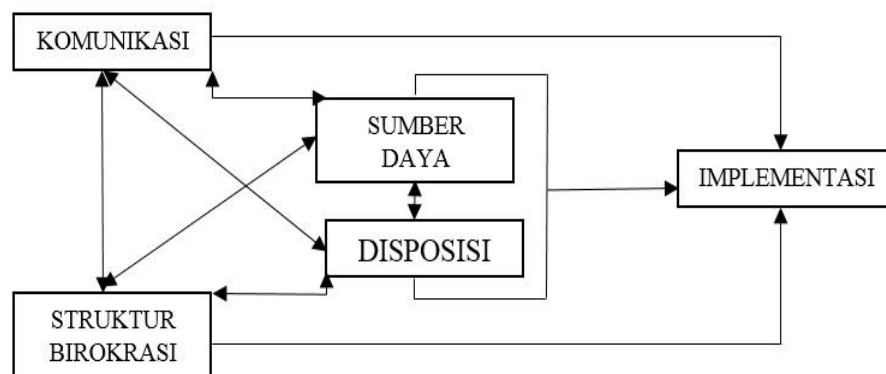
2) Disposisi

Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul di antara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya. Menurut Van Mater dan Van Horn dalam Widodo (2017:105) terdapat tiga macam elemen respons yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu

kebijakan, antara lain terdiri atas pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan; arah respons mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*); intensitas terhadap kebijakan.

3) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standar prosedur operasi operasi (*standart operating procedure*) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.



Gambar 8: Model Pendekatan Direct and Indirect Impact on Implementation

Sumber: *Edwards III dalam Agustino (2016:142)*

g. Model Charles O.Jones

Menurut Jones dalam Agustino (2016:154-155) dalam melaksanakan kegiatan implementasi kebijakan atau program, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni:

- f. Organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
- g. Interpretasi: Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

- h. Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Secara lebih rinci mengenai organisasi, interpretasi, dan penerapan maka memiliki makna masing-masing. Aktivitas organisasi merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan. Kedua, aktivitas interpretasi merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Ketiga, rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

4. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana kebijakan ini akan berhasil atau gagal karena kejelasan isi dari suatu kebijakan serta tujuan, target dan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Implementasi kebijakan merupakan proses yang paling penting dalam struktural kebijakan karena yang menentukan suatu kebijakan tersebut dapat dirasakan dampaknya untuk masyarakat serta dapat diketahui mengenai penyelesaian masalah di masyarakat sekitar. Menurut Sabatier dalam Parson (2008:487) terdapat enam syarat yang mencukupi dan harus ada implementasi yang efektif yaitu:

- 1) Tujuan yang jelas dan konsisten, sehingga dapat menjadi standar evaluasi legal dan sumber daya.

- 2) Teori kasual yang memadai, dan memastikan agar kebijakan itu mengandung teori yang akurat tentang bagaimana cara melahirkan perubahan.
- 3) Struktur implementasi yang disusun secara legal untuk membantu pihak-pihak yang mengimplementasikan kebijakan dengan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.
- 4) Para pelaksana implementasi yang ahli dan berkomitmen yang menggunakan kebijakan mereka untuk mencapai tujuan kebijakan.
- 5) Dukungan dan kelompok kepentingan dan 'penguasa' di legislatif dan eksekutif.
- 6) Perubahan dalam kondisi sosio-ekonomis yang tidak melemahkan dukungan kelompok dan penguasa atau tidak meruntuhkan teori kausal yang mendasari kebijakan.

Demi mencapai kebijakan efektif tentu saja ada faktor-faktor yang mempengaruhi ketika diimplementasikan. Faktor-faktor tersebut yang memperlihatkan keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi kebijakan. Terdapat dua faktor dalam menentukan keberhasilan implementasikan yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Kegagalan kebijakan menurut Hogwood dan Gunn dalam Winarno (2012:102) membagi kegagalan kebijakan (*policy failure*) terdapat dua kategori yaitu:

- a. *Non Implementation*, yang artinya bahwa suatu kebijaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana. Hal ini terjadi karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan yang terjadi.
- b. *Unsuccesful Implementation*, yang artinya suatu kebijaksanaan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan kebijaksanaan tersebut, tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijaksanaan yang memiliki resiko untuk gagal tersebut disebabkan faktor-faktor pelaksanaannya yang jelek (*bad excution*), kebijaksanaan yang jelek (*bad policy*) dan kebijakan itu bernasib jelek (*bad luck*).

Implementasi kebijakan walaupun memiliki faktor penghambat sehingga mengalami kegagalan kebijakan seperti yang disebutkan diatas namun tentu

saja juga ada faktor pendukung untuk mencapai keberhasilan kebijakan. Pengukuran keberhasilan kebijakan bisa dari berbagai faktor yaitu isi kebijakan dan proses implementasinya. Perlu dicatat menurut Agustino (2016:129) bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Pendapat ini sama seperti yang disampaikan oleh Grindle dalam Agustino (2016:129) bahwa “Pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual *projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut dapat tercapai”. Setiap implementasi kebijakan selain mempunyai faktor penghambat juga mempunyai faktor pendukung seperti yang dikemukakan oleh Anderson dalam Islamy (2009:108-110) bahwa terdapat sebab-sebab anggota masyarakat melaksanakan suatu kebijakan yaitu:

4. *Respect* anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan badan-badan pemerintah.
5. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.
6. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan.
7. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan-kebijakan kontroversial yang lebih banyak mendapatkan penolakan warga masyarakat dalam implementasinya.

E. Politik

1. Definisi Politik

Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni *polis* yang berarti kota yang berstatus negara kota (*city state*). Menurut Plato dalam Hidajat (2009:3) mengatakan bahwa “politik merupakan sistem kekuasaan pemerintahan yang dijalankan dan dipegang oleh kaum Aristokrat (kaum bijak) yang dipilih lewat proses keputusan bersama, dan di dalamnya tidak ada kediktatoran”. Sedangkan menurut Aristoteles dalam Gatara (2009:37) konsep utama tentang politik, yaitu: “manusia sebagai makhluk rasional yang memiliki kehendak bebas; politik adalah ilmu praktis; ada hukum moral universal yang harus dipatuhi semua manusia; dan negara adalah institusi alamiah”.

Menurut Merkl dalam Hidajat (2009:9) mengatakan bahwa “politik adalah usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik dari yang dihadapi atau usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan keadilan”. Menurut Bentley dalam Gatara (2009:42) terdapat dua sumbangan terbesar bagi perkembangan ilmu politik yaitu (a) gagasan tentang “kelompok”, sebagai tingkat kenyataan yang tepat bagi pemahaman serta penelitian politik (b) konsep tentang proses, sebagai satu-satunya pendekatan yang andal untuk memahami realitas politik. Pendapat lain dikemukakan oleh Easton dalam Arifin (2015: 5) menyebutkan kebijakan umum sebagai pusat kajian ilmu politik dengan merumuskan definisi: “Ilmu politik adalah studi mengenai

terbentuknya kebijakan umum”. Definisi lain dikemukakan oleh Gatara (2009:43) dalam lima pandangan mengenai konsep politik yaitu:

- a) Politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama.
- b) Politik adalah macam-macam kegiatan suatu lembaga politik atau negara. Ini artinya segala hal yang berkaitan dengan penyelenggara negara dan pemerintahan.
- c) Politik adalah segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan.
- d) Kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.
- e) Konflik dalam rangka mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

2. Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan suatu instrumen atau bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses demokrasi di dunia termasuk di Indonesia. Partai politik Menurut Epstein dalam Gatara (2009:91) “*political party is any group, however loosely organized, seeking to elect governmental officeholders under a given label*” (Partai Politik adalah setiap kelompok-kelompok, meskipun terorganisasi secara sederhana, yang bertujuan mendapatkan jabatan publik dalam pemerintahan, dengan identitas-identitas tertentu). Menurut Amal dalam Arifin (2015:93) menulis bahwa “partai politik merupakan suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah”. Pengertian partai politik menurut Labolo dan Ilham (2017: 15) adalah “organisasi politik resmi yang dibentuk oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dengan cara menempatkan anggota-anggota mereka dalam

pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum”.Pakar politik Miriam Budiarjo (2007:160-161) mengemukakan mengenai partai politik

“suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka”.

Pengertian partai politik juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan hendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Fungsi Partai Politik

Partai politik sebagai organisasi yang turut serta dalam demokrasi di Indonesia mempunyai peranan penting dalam proses pemilu. Dengan definisi partai politik diatas sebenarnya fungsi partai politik ialah mencari kekuasaan, memenangkan pemilu dan mempertahankan tahta. Fungsi partai politik untuk ikut serta dalam pemilihan umum menurut Gatara (2009: 198) adalah:

- a. Sosialisasi politik, yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah, para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.
- b. Pendidikan politik, yaitu proses penyadaran dan pendewasaan politik para anggota masyarakat. Di sini, para anggota masyarakat diharapkan menjadi senantiasa “melek politik”.
- c. Partisipasi politik, yaitu mengajak atau mengikutsertakan para anggota masyarakat untuk terlibat dalam berbagai macam dan tingkatan kehidupan politik.
- d. Agregasi kepentingan, yaitu sebagai jembatan(*bridge*) antara rakyat dan pemerintah melalui upaya menampung dan mengombinasikan

tuntutan-tuntutan individu-individu dari para anggota masyarakat menjadi proposal (usulan) kebijakan publik yang signifikan.

- e. Rekrutmen politik, yaitu proses seleksi calon-calon pemimpin yang akan mengisi berbagai jabatan publik atau jabatan politik

Fungsi partai politik yang lain juga dikemukakan oleh Labolo dan Teguh

Ilham (2017: 17):

- a. Rekrutmen politik
Menurut Gabriel Almond dalam Labolo dan Teguh Ilham (2017:17) “proses rekrutmen merupakan kesempatan rakyat untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan latihan”.
- b. Sosialisasi Politik
Menurut Ramlan Surbakti dalam Labolo dan Teguh Ilham (2017:20) “sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat”. Sosialisasi politik terdapat dua metode penyampaian pesan yaitu:
 - 1) Melalui Pendidikan Politik
Pendidikan politik ialah suatu proses yang mengajarkan kepada masyarakat mengenai nilai-nilai, norma-norma, serta simbol-simbol politik melalui media berupa sekolah, pemerintah, dan juga partai politik. Proses pendidikan politik dapat dilakukan melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi dan seminar serta keikutsertaan dalam forum pertemuan.
 - 2) Melalui Indoktrinasi Politik
Indoktrinasi politik ialah proses yang dilakukan secara sepihak oleh penguasa untuk menanamkan nilai, norma dan simbol yang dianggap baik oleh pihak penguasa tersebut kepada masyarakat.
- c. Komunikasi Politik
Menurut Ramlan Subakti dalam Labolo dan Teguh Ilham (2017:23) “komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah”. Partai politik berfungsi sebagai komunikator sekaligus komunikasi politik yang menyampaikan segala informasi tidak hanya dari pemerintah yang terkait regulasi, keputusan-keputusan, dan kebijaksanaan, tetapi juga aspirasi yang mereka tampung dari masyarakat.
- d. Pengendali Konflik
Pada sistem politik di negara yang demokratis, pengendalian konflik tersebut merupakan fungsi dari partai politik. Konflik jangan dianggap sebagai penghalang dalam mencapai suatu tujuan akan tetapi hendaknya konflik dipahami sebagai jalan untuk mencapai kebaikan

bersama. Kebaikan bersama akan tercapai apabila partai politik mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul melalui cara-cara yang dialogis. Cara yang dialogis dapat ditempuh melalui musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat untuk mencapai solusi. Agar didapatkan solusi yang terbaik, para wakil rakyat dari masing-masing partai harus mau berkompromi dan meletakkan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai.

e. Kontrol Terhadap Pemerintah

Kontrol terhadap pemerintah merupakan suatu bentuk kontrol politik yang dilakukan oleh partai politik untuk memastikan bahwa kebijakan ataupun pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan baik dan semestinya. Ketika partai politik menemukan adanya suatu penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah, maka terdapat dua mekanisme yang dapat dilakukan oleh partai politik tersebut dalam menyalurkan sikap kritis terhadap pemerintah yaitu:

1) Melalui Parlemen

Sikap kritis disalurkan dan dicerminkan oleh wakil-wakil partai politik yang sedang duduk di lembaga perwakilan rakyat (legislatif). Lembaga legislatif ini memiliki beberapa fungsi, bisa sebagai partner pemerintah dan sekaligus mengusulkan rancangan undang-undang yang dapat mengubahnya.

2) Melalui Non Parlemen

Partai politik dapat menyuarakan analisis dan sikap kritisnya melalui jalan non parlementer. Misalnya dengan melakukan diskusi dan debat dialog dengan media massa untuk pembentukan opini publik sehingga mendapatkan dukungan politis publik tentang kebijakan pemerintah. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan dialog media massa untuk pembentukan opini publik sehingga mendapatkan dukungan politis publik.

4. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik memiliki makna yang penting dalam Ilmu Politik karena sebagai bentuk dari perilaku politik. Hal selaras dikemukakan oleh Gatara (2009:309) “salah satu wujud perilaku politik adalah partisipasi politik”. Menurut Harold D. Lasweel dalam Nimmo (2000:89) memperkenalkan suatu rumus yang dikenal dalam “kepuustakaan ilmu politik, dengan sebutan *rumus manusia politik* yaitu Politik: **p|d|r| P**. Artinya pribadi (p) ditransformasikan (1) dan dipindahkan (d) ke gelanggang politik, kemudian dirasionalkan (r)

menurut kepentingan publik dan atau nilai komunitas yang diterima secara luas”. Definisi lain dikemukakan oleh para pakar dibawah ini, antara lain:

Tabel 3
Definisi Partisipasi Politik

Sarjana	Definisi	Indikator
Samuel P Huntington & Joan M. Nelson	Partisipasi politik... kegiatan warga preman (<i>private citizen</i>) yang bertujuan memengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • Berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan • Memiliki tujuan memengaruhi kebijakan publik
Michael Rush & Philip Althoff	Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada macam-macam tingkatan di dalam sistem politik.	<ul style="list-style-type: none"> • Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik • Memakai tingkatan-tingkatan partisipasi
Herbert Mc Closky	Partisipasi politik ialah kegiatan-kegiatan sukarela (<i>voluntary</i>) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum.	<ul style="list-style-type: none"> • Berupa kegiatan-kegiatan sukarela • Dilakukan oleh warga negara • Warga negara terlibat dalam proses-proses politik.
Kevin R Hardwic	Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah • Terdapat usaha warga negara untuk memengaruhi pejabat publik
Miriam Budiarto	Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Berupa kegiatan individu atau kelompok • Bertujuan ikut serta secara aktif dalam kehidupan

	pemerintah (<i>public policy</i>)	politik, memilih pinjaman publik atau memengaruhi kebijakan publik.
Ramlan Subakti	Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau memengaruhi hidupnya. sesuai dengan istilah partisipasi (politik) berarti keikutsertaan warganegara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.	<ul style="list-style-type: none"> • Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. • Dilakukan oleh warga negara biasa.

Sumber: *Faturahman dan Sabari dalam Gatara* (2009:309-311)

5. Bentuk Partisipasi Politik

Pemahaman partisipasi politik sangat banyak menurut beberapa ahli. Individu atau warga negara yang ikut serta dalam kegiatan politik disebut partisipan politik. Hal selaras dikemukakan oleh Arifin (2015:80) “partisipan politik merupakan warga negara secara individu yang bukan politikus atau bukan pemimpin politik yang melakukan partisipasi politik.” Pakar komunikasi politik Nimmo dalam Arifin (2015:80) menyatakan

“Partisipan politik adalah “anggota khalayak” yang tidak acuh, tak acuh, melainkan aktif, bukan saja memerhatikan pesan politik dari para komunikator politik, aktor politik atau politikus, tetapi juga menanggapi dan melakukan dialog dengan para politikus itu. Bahkan partisipan politik bekerja sama dan bersama dengan politikus atau aktor politik, sehingga ia berperan juga sebagai komunikator politik. Justru itu partisipasi politik dalam perspektif komunikasi politik, dilaksanakan oleh partisipasi politik”.

Partisipasi politik menurut Rosenau dalam Arifin (2015:80) terdiri atas dua bentuk yaitu:

“Pertama, para pengamat yang memerhatikan politik tidak hanya selama pemilihan umum, melainkan di antara pemilihan umum yang satu dengan pemilihan umum yang lain. Mereka pada umumnya warga negara yang merupakan khalayak media (pembaca surat kabar, pendengar radio dan pemirsa televisi), serta aktif dalam diskusi politik, seminar dan memberikan komentar melalui media massa. Kedua, adalah khalayak yang bukan saja mengamati, tetapi giat melakukan komunikasi (lobi) dengan para pemimpin politik atau politikus, baik di pemerintahan maupun di parlemen dan di luar parlemen”.

6. Cara dan Tipe Partisipasi Politik

Partisipasi politik sebagai komponen yang penting dalam politik karena sebagai bentuk perilaku politik dalam keikutsertaan dalam kehidupan politik. Cara berpartisipasi bermacam-macam namun titik tekannya tetap pada setiap individu yang mau untuk berperan dalam proses politik. Cara berpartisipasi dalam proses politik dikemukakan oleh Nimmo dalam Arifin (2015:84) misalnya yang menyatakan bahwa “partisipasi politik menggunakan tiga cara, yaitu “gaya partisipasi, motif partisipasi dan konsekuensi politik”. Menurut Nimmo dalam Arifin (2015:84) penjelasannya sebagai berikut:

“Gaya partisipasi meliputi gaya langsung atau wakilan, kentara atau tidak kentara; individual atau kolektif; sistematis atau acak; terbuka atau tersembunyi; berkomitmen atau tak berkomitmen; dan derita atau kesenangan. Sedang motif berpartisipasi terdiri atas disengaja atau tidak disengaja; rasional atau emosional; kebutuhan psikologis atau sosial; diarahkan dari dalam atau dari luar; dan berpikir atau tidak berpikir. Kemudian, konsekuensi partisipasi mencakupi; fungsional atau disfungsional; bersinambungan atau terputus; dan mendukung atau menuntut”.

Menurut Arifin (2015:84-85) tipe partisipasi politik ada dua yaitu:

“political disaffection dan political efficacy. Political disaffection yaitu tingkah laku dan perasaan negatif seseorang terhadap sesuatu kehidupan politik atau sistem politik dalam suatu negara sebagai efek negatif dari media massa terutama siaran televisi. Sedangkan political efficacy yaitu tindakan seseorang atau kelompok dalam melakukan partisipasi politik yang berubah-ubah. Artinya ikut atau tidak ikut sertanya seseorang bergantung kepada perasaannya bahwa tindakan politik yang dilakukan dapat memiliki pengaruh terhadap proses politik”.

F. Perempuan dalam Politik

1. Perempuan dalam Parlemen

Teori keterwakilan perempuan yang digunakan dalam hal ini adalah teori yang dituliskan oleh Karam dan Lovenduski dalam buku berjudul *Women in Parliament: Beyond Number* (1999) Lovenduski dan Karam tidak hanya melihat perempuan di parlemen dari segi kuantitas saja namun lebih menitikberatkan pada kinerja perempuan dan parlemen. Menurut kedua penulis tersebut, perempuan mempelajari aturan main, dan menggunakan pengetahuan dan pemahaman ini untuk mengangkat isu dan persoalan perempuan dari dalam legislatif.

Sebagaimana yang ditulis Lovenduski dan Karam menekankan bahwa apabila hanya satu kehadiran perempuan pun di dalam parlemen, maka diyakini ia mampu membawa satu perubahan. Perubahan yang dibawa oleh kaum perempuan berbeda dengan kaum laki-laki dari konten dan permasalahan yang akan diselesaikan. Perempuan akan lebih cenderung pada permasalahan kemasyarakatan seperti pelayanan, hak jaminan sosial, isu anak-anak maupun perempuan serta kehidupan rumah tangga. Sedangkan laki-laki

mendominasi arena politik: laki-laki lebih memprioritaskan terhadap proses mendapatkan kekuasaan.

Menurut Lovenduski dan Karam (1999) anggota parlemen akan melalui tiga tahap untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Langkah pertama yang dilakukan anggota parlemen perempuan adalah memahami cara bekerja anggota dewan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuannya sehingga dapat bekerja lebih cepat. Langkah kedua, yakni dengan mempelajari cara menggunakan aturan-aturan yang ada, sehingga perempuan dapat meraih peluang untuk ikut serta dalam posisi dan komite-komite kunci, membuat diri mereka didengar dalam pembahasan dan debat. Langkah ketiga adalah mengawal perubahan struktur dan aturan yang ada untuk melakukan regenerasi. Setelah langkah tersebut dapat dilakukan maka akan mampu melakukan perubahan secara bertahap.

2. Hambatan Perempuan dalam Politik

Representasi partisipasi keterwakilan perempuan sebenarnya sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selain itu juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui penempatan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan”.

Keterwakilan perempuan yang rendah atau timpang bukan disebabkan oleh perbedaan seks melainkan oleh perbedaan gender di masyarakat. Hal ini karena ada persepsi yang menyebabkan akses perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik rendah. Menurut Sastriyani (2009,166-167) keterwakilan perempuan rendah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Nilai sosial budaya yang lebih mengutamakan laki-laki
- b. Pembagian kerja berdasarkan gender dalam masyarakat agraris-tradisional
- c. Citra perempuan sebagai kaum yang lemah lembut
- d. Ajaran agama yang ditafsirkan secara sempit dan parsial
- e. Kurangnya *political will* pemerintah
- f. Kekurangan dalam kualitas individu perempuan dan kaderisasi politik

Menurut Nantri dalam Sastriyani (2009:200) ada dua faktor yang menyebabkan persentase perempuan dalam politik masih kecil, yaitu:

- a. Faktor internal, yaitu faktor dari diri perempuan itu sendiri, seperti sumber daya perempuan, adanya pandangan bahwa politik itu keras dan adanya stereotipe yang dilabelkan pada wanita.
- b. Faktor eksternal, yaitu faktor dari luar perempuan seperti sistem pemilu, peran organisasi partai politik dan nilai budaya.

Menurut Azis (2013: 196) menjelaskan bahwa dalam bidang politik perempuan mengalami hambatan-hambatan seperti model maskulin politik, kurang adanya dukungan partai, kurangnya kerjasama dengan lembaga organisasi perempuan serta kendala dalam pemilihan umum. Diperjelas pula bahwa pada kenyataannya partai politik belum mampu menunjukkan komitmen dan rumusan kebijakan mengenai kesetaraan bagi kader perempuan agar terpilih sebagai fungsionari partai dan anggota DPRD. Pengaturan kegiatan partai seperti *event*, dan rapat, seringkali bertabrakan dengan agenda rumah tangga perempuan itu sendiri apalagi jika agenda tersebut waktunya

adalah malam hari yang tentunya juga dapat membahayakan perempuan. Dampaknya adalah hak suara atau hak berpendapat bagi perempuan tersebut bisa saja hilang karena ketidakhadirannya. Sehingga keterlibatan perempuan dalam partai politik, belum mendapatkan dukungan secara maksimal dari partai ataupun masyarakat. Bahkan kompetensi perempuan juga belum mendukung eksistensinya. Suatu hal yang diharapkan dengan adanya keterlibatan perempuan dalam partai politik melalui proses pengkaderan dapat menyumbang terhadap reformasi partai politik secara menyeluruh.

3. *Affirmative Action*

Secara umum masyarakat berfikir bahwa makna dari *affirmative action* adalah hanya pemberian kuota 30% kepada perempuan dalam ranah legislatif. Namun sebenarnya *affirmative action* mempunyai makna yang lebih luas bukan hanya mengenai kuota. Menurut Soetjipto (2005:134) “kebijakan *affirmative action* adalah tindakan strategis yang harus diambil sebagai *temporary special measures* (tindakan khusus yang bersifat sementara) untuk percepatan peningkatan representasi perempuan dalam politik”. Menurut Napsiah dalam Sastriyani (2009:174) ada beberapa alasan yang muncul oleh para feminis ketika ada *affirmative action*

- a. Diperlukan intervensi struktural sebagai tindakan darurat untuk mengatasi ketimpangan gender dalam waktu yang cepat.
- b. Keterwakilan perempuan di bidang politik masih sangat rendah sehingga dibutuhkan kuota bagi perempuan.
- c. Nilai-nilai hidup perempuan mempunyai diri khas tertentu, misalnya kepedulian pada isu kesejahteraan keluarga, pendidikan kesehatan, anti kekerasan dan lain-lain.

Selain itu menurut Suryakusuma dalam Soetjipto (2015:104) menyampaikan bahwa

affirmative action dalam praktik pelaksanaannya adalah tidak selalu berkaitan dengan kuota, tetapi banyak kalangan sering mengasosikannya dengan kuota. *Affirmative action* lebih memberi tekanan pada *opportunity* (kesempatan). Kuota seringkali diartikan sebagai memaksakan jumlah tertentu atau persentase tertentu bagi kelompok tertentu (perempuan). *Affirmative action* di sini harus dipahami sebagai mementingkan kualifikasi tertentu sebagai dasar pertimbangan, bagi pemberian kesempatan bagi kelompok tertentu (perempuan).

Pendapat lain dikemukakan kembali oleh Suryakusuma dalam Soetjipto (2015:105) mengenai dua sasaran kebijakan *affirmative action*:

- a. Memberi dampak positif kepada suatu institusi agar lebih cakap memahami dan sekaligus mengeliminasi berbagai bentuk rasisme dan sekasisme di tempat kerja.
- b. Agar institusi tersebut mampu mencegah terjadinya bias gender maupun bias ras dalam segala kegiatannya.

Kebijakan *affirmative action* bermakna sebagai tindakan sementara untuk perempuan dalam representasi politik berbeda dengan kebijakan kuota. Menurut Suryakusuma dalam Soetjipto (2015:106) Kebijakan kuota sebenarnya adalah jalan masuk untuk perempuan agar bisa bersaing dalam partai politik atau parlemen. Kebijakan kuota adalah salah satu bentuk dari kebijakan *affirmative action*. Menurut Asosiasi Ilmu Politik Indonesia dalam Soetjipto (2015:177) ada tiga alasan utama dibalik perlunya mempromosikan kebijakan kuota sebagai berikut:

- a. Angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif ternyata sangat rendah, dan terjadi di berbagai tingkatan...
- b. Berkaitan dengan kerangka transisi demokrasi di Indonesia. Transisi demokrasi menciptakan peluang bagi munculnya banyak organisasi nonpemerintah yang mempunyai kepedulian untuk peningkatan kesadaran politik perempuan...

- c. Berhubungan dengan situasi ekonomi dan sosial yang memburuk paska krisis ekonomi yang menimpa Indonesia sejak tahun 1977. Dampak krisis ekonomi paling dirasakan oleh perempuan dan anak-anak...

Ada berbagai keterbatasan dan tantangan terhadap penggunaan kuota, menurut Suryakusuma dalam Soetjipto (2015:106) tantangan tersebut meliputi:

- a. Keterbatasan perempuan dalam hal keahlian, pengetahuan, dan proses politik serta sumber dana untuk mengelola suatu kampanye politik yang berhasil. Walaupun kuota telah digunakan, tetapi tanpa sistem pemilu yang mendukung tetap saja peningkatan representasi perempuan sulit dicapai...
- b. UU tentang kuota juga bisa menghasilkan situasi di mana wanita yang terpilih hanya untuk kepentingan klasik saja yang tidak mempunyai kekuasaan politik dan ekonomi yang signifikan, dan bahkan hanya dijadikan 'boneka' oleh kekuatan politik/dinasti politik tertentu...
- c. Tuduhan bahwa kuota anti-demokrasi dan tidak konstitusional karena sistem ini mendiskriminasi dan bias terhadap laki-laki. Penyisihan sejumlah persentase tertentu menghalangi hak rakyat dan partai untuk memilih kandidat yang mereka rasa lebih cocok untuk mengisi jabatan tertentu.

G. Gender

1. Definisi Gender

Pemahaman gender terkadang dikaitkan dengan usaha emansipasi kaum perempuan, namun tafsiran gender yang begitu luas sering mengakibatkan kesalahpahaman kepada masyarakat. Menurut Nugroho (2008:17-18) gender dalam Bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu 'gender'. Jika dilihat dalam kamus bahasa Inggris tidak secara jelas dibedakan pengertian *sex* and *gender*. Sering kali gender dipersamakan dengan seks (jenis kelamin laki-laki dan perempuan). Pendapat lain dikemukakan Wilson dalam Umar (1999:34) mengartikan "jender sebagai

suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan”. Sementara itu, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, mengartikan “gender adalah peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab dan kesempatan laki-laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh keduanya (laki-laki dan perempuan)”. Pendapat selaras dikemukakan oleh Nugroho (2008:32)

“Perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin (*sex*) adalah kodrat Tuhan yang secara permanen berbeda dengan pengertian gender. Gender merupakan behavioral differences (*perbedaan perilaku*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (bukan kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Jadi, perbedaan perilaku antara perempuan dan laki-laki bukanlah sekedar biologis, namun melalui proses kultural dan sosial. Dengan demikian, gender dapat berubah dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin biologis akan tetap tidak berubah”.

Sedangkan menurut Fakih (1999) mengemukakan bahwa

“analisis gender dalam sejarah pemikiran manusia tentang ketidakadilan sosial dianggap suatu analisis baru yang tidak kalah mendasar dibanding analisis ilmu sosial lainnya, bahkan analisis gender justru ikut mempertajam analisis kritis yang sudah ada, misalnya analisis kelas yang dikembangkan oleh Karl Marx ketika melakukan kritik terhadap kapitalisme akan lebih tajam jika pertanyaan tentang gender dikemukakan”.

Sehingga dapat disimpulkan oleh penulis bahwa gender adalah konstruksi sosial yang dibentuk oleh masyarakat umum mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Gender bukan bentuk dari kodrat Tuhan sehingga gender bisa berubah tidak terbatas ruang dan waktu. Hal ini yang membuat peran perempuan dan laki-laki sering dilegalitaskan oleh masyarakat. Padahal apabila konstruksi sosial dibentuk secara terus-menerus

dan menjadi budaya maka akan membuat ketidakadilan maupun ketidaksetaraan kepada masing-masing pihak.

2. Ketidakadilan Gender

Isu ketidakadilan gender muncul dari kesadaran masyarakat mengenai adanya ketimpangan peran antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan di masyarakat. Pendapat ini diperkuat dengan pendapat dari Nugroho (2008:40) yang mengemukakan *Gender Inequalities* (ketidakadilan gender) merupakan sistem dan struktur di mana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Agar mampu memahami gender perlu dipelajari lima bentuk ketidakadilan gender yang dikemukakan oleh Nugroho (2008:40), yaitu sebagai berikut:

- a) *Marginalisasi*. Timbulnya kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat dan negara merupakan sebagai akibat dari proses marginalisasi yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh berbagai kejadian. *Gender differences* ini sebagai akibat dari beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat, dan waktu, serta mekanisme dari proses marginalisasi kaum perempuan. *Gender differences* ini ditinjau dari sumbernya dapat berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan tafsir agama, keyakinan tradisi, dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.
- b) *Subordinasi*. Subordinasi atau penomerduaan timbul sebagai akibat pandangan gender terhadap kaum perempuan. Sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting muncul dari adanya anggapan bahwa perempuan itu emosional atau irasional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin merupakan bentuk dari subordinasi yang dimaksud.
- c) *Streotip*. Pelabelan atau penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu, secara umum dinamakan streotip. Akibat dari streotip biasanya timbul diskriminasi dan berbagai ketidakadilan gender. Salah satu bentuk streotip ini adalah yang bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali bentuk streotip yang terjadi di masyarakat yang dilekatkan kepada umumnya kaum perempuan sehingga berakibat menyulitkan, membatasi, memiskinkan dan merugikan kaum perempuan.

- d) *Violence* (kekerasan) merupakan *assaults* (invasi) atau serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender.
- e) *Beban Kerja*. Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dibanding kaum laki-laki.

3. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Menurut Razavi dan Miller dalam Jurnal Perempuan 50 (2006:12) PUG atau pengarusutamaan gender adalah proses teknis dan politis yang membutuhkan perubahan pada kultur atau watak organisasi, tujuan, struktur, dan pengalokasian sumberdaya. Sedangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan di Daerah PUG adalah salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Definisi di atas pada dasarnya memiliki makna yang sama, satu menggunakan istilah proses teknis dan politis, dan satu menggunakan istilah strategi, akan tetapi tujuannya sama-sama mengacu pada keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Sehingga, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan melalui proses perubahan pada kultur atau watak organisasi, tujuan, struktur, dan

pengalokasian sumberdaya melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga pengevaluasian kebijakan, kegiatan, program dan kegiatan.

Menurut Aida (2010:134) pengarusutamaan gender dalam kebijakan Indonesia adalah pengarusutamaan gender dalam kebijakan Indonesia adalah proses komitmen yang panjang dalam implementasinya, dimulai sejak Pembangunan Lima Tahun (Pelita) III yang difokuskan pada Perempuan Dan Pembangunan (PDP) strategi pembangunan yang meletakkan perempuan sebagai asset dan sasaran, bukan beban pembangunan (perempuan sebagai realitas biologis), lalu berubah menjadi Gender Dan Pembangunan (GDP) memfokuskan gerakannya pada hubungan gender dalam kehidupan social, dan kemudian berubah menjadi Pemberdayaan Perempuan (PP), akhirnya berubah menjadi Pengarusutamaan Gender (PUG) sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Tahun 2000 hingga sekarang.

Pengertian Pengarusutamaan Gender berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan Dalam Inpres Nomor 9 tahun 2000, disebutkan bahwa tujuan Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah:

- a) Membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender.
- b) Memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang mengalami marginalitas, sebagai akibat dari bias gender.
- c) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak, baik pemerintah maupun non pemerintah, untuk melakukan tindakan yang sensitif gender di bidang masing-masing.

Berdasarkan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 ini, pengarusutamaan gender memiliki tujuan untuk terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkekuarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender diamanatkan melalui Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 yang mengharuskan semua instansi pemerintah di tingkat nasional dan daerah untuk mengarusutamakan gender ke dalam berbagai bidang. Di bidang politik pengarusutamaan gender pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu yang mengharuskan nominasi sekurangnya 30% perempuan

4. Pendekatan Pemberdayaan Perempuan

Pada dasawarsa 70-an sampai dengan 90-an berkembang pesat tentang konsep dan pendekatan mengenai pemberdayaan perempuan . Hal ini timbul karena pentingnya perempuan dalam proses partisipasi pembangunan. Berikut adalah dua pendekatan penting dalam pemberdayaan perempuan:

a. Pendekatan WID (*Women in Development*)

Pada dasawarsa 70-an kesadaran mengenai peran perempuan mulai berkembang yang diwujudkan dalam arah pendekatan program yang memusatkan pada masalah "*Perempuan dalam Pembangunan*". Masalah ini didasarkan pada suatu pemikiran mengenai perlunya kemandirian bagi perempuan miskin agar pembangunan dapat dinikmati oleh semua pihak. Timbulnya pemikiran perempuan dalam pembangunan (*Women in Development/WID*) karena perempuan merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga sehingga yang posisinya yang termajinalisasi perlu diikutsertakan ke dalam pembangunan. Pendekatan WID memberikan perhatian pada peran produktif perempuan dalam pembangunan.

Tujuan dari pendekatan ini adalah menekankan pada sisi produktivitas tenaga kerja perempuan, khususnya berkaitan dengan pendapatan perempuan, tanpa terlalu peduli dengan sisi reproduktivitasnya. Sedangkan sasarannya adalah kalangan perempuan dewasa yang secara ekonomi miskin. Pendekatan ini dimulai dengan pembentukan proyek-proyek yang berusaha keras untuk meningkatkan akses perempuan khususnya perempuan dewasa miskin untuk dapat meningkatkan pendapatannya. Proyek yang dijalankan untuk

meningkatkan pendapatan perempuan ini contohnya melalui kegiatan-kegiatan keterampilan, seperti menjahit, menyulam dan lain sebagainya. (Nugroho, 2008: 137-138)

b. Pendekatan WAD (*Women and Development*)

Pendekatan WAD timbul pada pertengahan tahun 1970an dan dipengaruhi oleh neo Marxist *feminist approach*. Fokus utama dari pendekatan ini adalah melihat pada hubungan perempuan dalam proses pembangunan. Proses pembangunan sering menyebabkan marginalisasi kaum perempuan. Ini disebabkan adanya struktur social, ekonomi, dan politik yang tidak adil di masyarakat. Keterbelakangan perempuan dianggap akibat adanya struktur yang tidak adil tersebut. Proses marginalisasi, yang mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat dan Negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh beberapa kejadian misalnya penggusuran, bencana alam atau proses eksploitasi. Namun ada salah satu bentuk pemiskinan atau satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan, disebabkan oleh gender. Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender tersebut. Dari segi sumbernya bias berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. (Probosiwi, 2015: 46)

c. Pendekatan GAD (*Gender and Development*)

Pada dasawarsa 90-an muncul konsep pendekatan GAD. Pendekatan ini lebih didasarkan pada suatu pendekatan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan. Pendekatan ini lebih memusatkan gender dan tidak melihat pada masalah perempuan semata (Nugroho, 2008). Pendekatan GAD merupakan satu-satunya pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan dengan melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan baik kerja produktif, reproduktif, privat maupun public dan menolak upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga. Pendekatan ini dikenal sebagai “pemberdayaan” Menurut Julia Cleves Moss “Pemberdayaan ini lebih menekankan pada strategi pemberdayaan dari bawah ke atas (*bottom-up*) dan pada pemberdayaan dari atas ke bawah (*top-down*)” (Moss, 1996:209-210).

Pendekatan GAD merupakan pemberdayaan memahami tujuan pembangunan bagi perempuan adalah dalam hal kemandirian dan kekuatan internal. Dalam pendekatan pemberdayaan berpendapat bahwa perkembangan organisasi perempuan, yang mengarah pada mobilitas politik, peningkatan kesadaran dan pendidikan rakyat, merupakan syarat penting bagi perubahan social yang berkelanjutan (Moss, 1996:210)

d. Perbandingan antara WID dan GAD

Pendekatan merupakan hal yang penting dalam menentukan strategi dalam pemberdayaan perempuan. Dari kedua pendekatan yakni WID dan

GAD terdapat beberapa perbandingan dan sanggahan terhadap pendekatannya yang sekiranya gagal. Dalam pelaksanaanya WID mengalami beberapa kegagalan. Pertama, pelaksanaan proyek yang mengasumsikan bahwa semua perempuan pada dasarnya memiliki keterampilan-keterampilan seperti yang telah disebutkan pada pendekatan WID diatas, padahal kenyataannya tidak semua perempuan memiliki atau berkeinginan untuk terampil dengan keterampilan-keterampilan tersebut. Kedua, hasil kerajinan kurang mendapat respon yang baik dari pasaran, akibatnya produk-produk mereka tidak laku di pasaran, hal ini berkaitan karena pelaksana proyek kurang bias membaca selera pasar. Selain itu dalam pelaksanaanya, proyek ini kurang ditangani serius, sehingga kesannya hanya merupakan bersifat amal semata, bukan berdimensi pemberdayaan (Nugroho, 2008:138-139).

Konsep WID dalam realisasinya, ternyata gagal dalam menyertakan perempuan dalam proses pengambilan keputusan suatu proyek pembangunan, maka dari itu pendekatan GAD, sebagai *follow up*, tidak hanya kalangan perempuan harus disertakan dalam proses-proses pengambilan keputusan atas proyek pembangunan, tetapi kaum laki-laki harus juga bisa memahami dan memikirkan kebutuhan-kebutuhan kaum perempuan dalam setiap program atau proyek. Maka dapat disimpulkan, dampak WID hanya terhadap perempuan saja, sedangkan GAD tertuju kepada perempuan dan laki-laki. (Nugroho, 2008:140-141).

H. Pemilihan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukumnya pada pelaksanaan pemilu 2014 yang sudah terjadi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Pemilihan Umum atau yang sering disingkat oleh masyarakat Pemilu memiliki makna yang sangat luas. Secara konseptual, menurut Ibnu Tricahyono dalam Labolo dan Ilham (2017: 50) menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Sedangkan secara operasional menurut Labolo dan Ilham (2017: 50) pemilihan umum diartikan sebagai suatu lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan untuk terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan (*representative goverment*). Selain itu pendapat yang selaras namun lebih luas dikemukakan oleh Reynolds dalam Labolo dan Ilham (2017: 51) bahwa

“pemilu adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-

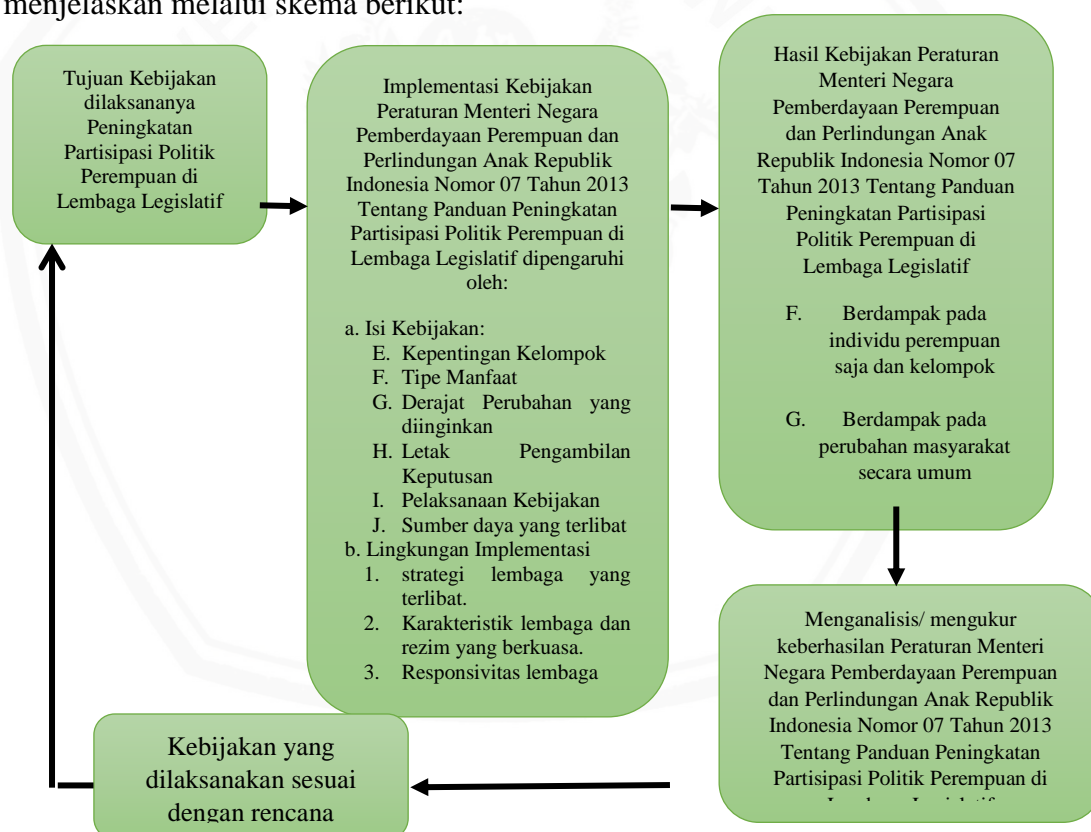
benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara”.

Setiap para ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai pemilihan umum. Menurut Masdar dalam Labolo dan Ilham (2017: 51) mengungkapkan bahwa pemilu adalah “pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat”. Menurut Pratikno dalam Labolo dan Ilham (2017:51) menyatakan bahwa “pemilu merupakan mekanisme politik untuk mengkonversi suara rakyat (*votes*) menjadi wakil rakyat (*seats*)”. Jadi apabila disimpulkan secara umum bahwa pemilihan umum merupakan suatu proses pergantian kekuasaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Pada prakteknya, pemilihan umum merupakan kegiatan politik suatu Negara dalam rangka mewujudkan suatu demokrasi.

I. Kerangka Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 menurut Grindle

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Merilee S.Grindle untuk mendeskripsikan pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik di Lembaga Legislatif Kota Malang. Perlu diketahui bahwa jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Malang hanya 11 orang yaitu 9 orang dari hasil perolehan suara dan 2 orang dari menggantikan

DPRD Kota Malang yang meninggal dunia dan terjerat kasus dari jumlah total anggota DPRD Kota Malang 45 orang. Banyak hal yang mengakibatkan jumlah tersebut sangat minim mulai faktor internal dan eksternal organisasi. Salah satu kebijakan yang berusaha untuk melindungi dan memberikan hak perempuan untuk mampu menjadi calon legislatif adalah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013. Maka untuk menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan tersebut dan partisipasi politik perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang, penulis akan menjelaskan melalui skema berikut:



Gambar 9 : Proses Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif

Sumber: Diolah berdasarkan model Implementasi Grindle dimodifikasi

Implementasi kebijakan memegang peranan penting dalam proses kebijakan publik. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan tersebut akan menunjukkan kebijakan tersebut dapat menjadi jawaban permasalahan yang terjadi di masyarakat atau tidak. Grindle menyampaikan bahwa implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal itu dapat dilihat dari dua hal yaitu dilihat dari prosesnya dan apakah tujuan kebijakan tercapai. Prosesnya akan mempertanyakan mengenai pelaksanaan kebijakan sudah sesuai atau belum sedangkan apakah tujuan kebijakan dapat dilihat dari faktor efeknya dan tingkat perubahan yang terjadi di masyarakat (Agustino, 2016:142). Masih pada Grindle, keberhasilan suatu implementasi kebijakan juga ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas Konteks isi kebijakan (*Content of Policy*) dan Konteks Implementasinya (*Context of Policy*), sebagai berikut:

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Kejelasan isi dari suatu kebijakan akan menentukan keberhasilan ataupun kegagalan suatu kebijakan. Kebijakan yang baru harus mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga anggaran yang dikeluarkan untuk mendanai pembentukan suatu kebijakan tersebut tidak terbuang sia-sia. Sementara itu, kebanyakan kebijakan yang baru tidak berhasil di lapangan karena kejelasan isi tersebut mendapat tindakan kontra sehingga menimbulkan konflik yang baru. Maka dari itu kejelasan isi dari suatu kebijakan harus bisa dipahami oleh setiap masyarakat. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan kelompok:Kepentingan setiap kelompok ini akan turut campur dalam keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Kepentingan kelompok ini merupakan orang-orang yang berada di belakang Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 dan juga kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Kepentingan kelompok ini meliputi berbagai kelembagaan yaitu partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah dan organisasi masyarakat. Sasaran kebijakan yang dituju meliputi perempuan dan masyarakat secara umum.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan oleh Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif.
3. Kebijakan ini akan memberikan manfaat pada banyak pihak selain perempuan juga memberikan manfaat untuk masyarakat umum, partai politik, pemerintah maupun organisasi masyarakat.
4. Derajat perubahan yang ingin dicapai:Konten ini bertujuan untuk adanya perubahan yang ingin dicapai melalui bertambahnya keterwakilan perempuan di bidang politik terutama di lembaga legislatif. Selain itu juga permasalahan-permasalahan mengenai kesejahteraan umum dapat diselesaikan.
5. Letak pengambilan keputusan:Dalam konten ini perlu dijelaskan kembali untuk mengambil keputusan dalam implementasi kebijakan ditentukan oleh

siapa misalnya oleh individu, hierarki kepengurusan maupun pihak-pihak lain. Penentuan untuk yang berhak mengambil keputusan ini akan memberikan efek terhadap keputusan yang diambil sehingga target yang ingin dicapai bisa berhasil. Pelaksana kebijakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif: Para pelaksana suatu kebijakan akan menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan ketika dilaksanakan. Peran pelaksana dengan strategi yang baik akan membantu kebijakan terlaksana dengan lancar.

6. Sumber daya yang terlibat: Jika ingin melakukan suatu perubahan tentu saja memerlukan sumber daya yang banyak sehingga akan lebih mudah untuk diimplementasikan. Sumber daya yang terlibat harus memiliki pemahaman tentang kebijakan agar ketika di pelaksanaannya akan memudahkan dalam memberikan masukan dan strategi.

2. Lingkungan Implementasi Kebijakan (*Context of Implementation*)

Proses pelaksanaan kebijakan dengan baik di masyarakat memerlukan lingkungan kondusif dan mendukung adanya perubahan. Lingkungan diimplementasikan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif harus memahami bahwa perempuan juga berhak untuk menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Malang. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kota Malang tentu

saja dipengaruhi oleh lingkungan entah dari partai politik, pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Grindle mengemukakan yang berpengaruh dalam lingkungan implementasi kebijakan meliputi:

1. Strategi yang digunakan oleh para kelembagaan: Pelaksanaan kebijakan harus melihat lingkungan yang ada di masyarakat, sehingga perlu menggunakan strategi yang tepat agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan secara baik. Bila strategi tidak diperhitungkan dengan benar maka kemungkinan besar Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tidak bisa membuat perubahan di masyarakat Kota Malang. Strategi yang digunakan harus mampu melihat situasi, aktor yang terlibat serta menggunakan taktik yang tepat. Situasi ini merupakan karakteristik di lembaga itu sendiri, aktor disini melibatkan pihak pemerintah, pihak badan hukum maupun organisasi kemasyarakatan.
2. Karakteristik lembaga dan Rezim yang berkuasa: Lingkungan pelaksanaan Peraturan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif akan mempengaruhi terhadap implementasi peraturan tersebut. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa merupakan lingkungan yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan kebijakan. Rezim adalah suatu yang mengatur perilaku setiap anggota kelembagaan. Di sebuah kelembagaan yang mengatur perilaku setiap anggota adalah struktural kelembagaan sedangkan di suatu negara, rezim adalah

pemerintah sebagai pemangku kekuasaan dengan pihak yang terlibat lainnya seperti legislatif selain itu juga dibantu oleh organisasi lainnya. Karakteristik dari rezim yang berkuasa akan menentukan terhadap pelaksanaan kebijakan. Rezim yang berkuasa pada kelembagaan harus mampu mengedepankan kepentingan masyarakat, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 harus dapat diimplementasikan dengan baik melalui kuasa yang baik dibawah rezim kepemimpinan kelembagaan yang terlibat.

3. Responsivitas Pelaksana: Tanggapan atau responsivitas kelembagaan dalam implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 merupakan suatu hal yang penting dalam implementasi kebijakan hal tersebut merupakan daya dukung dan pendorong terhadap berbagai langkah yang akan diambil. Dengan adanya responsivitas dapat diketahui tanggapan pihak-pihak terhadap adanya kebijakan ini, apakah setiap kelembagaan memberikan pendorong agar partisipasi perempuan di lembaga legislatif semakin meningkat atau sebaliknya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berisikan penggambaran suatu gejala atau masalah saat ini atau pun masalah aktual.

Menurut Cresswell dalam Herdiansyah (2010:8) penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan peneliti berfungsi langsung sebagai informan dalam mengumpulkan data. Dalam hal ini peneliti diharuskan objektif, konsisten dan sistematis dalam melakukan pengamatan. Fungsi peneliti dalam metode penelitian kualitatif menurut Herdiansyah (2011:28) terdapat tiga fungsi yaitu peneliti berfungsi sebagai instrumen atau alat, peneliti berfungsi sebagai peneliti itu sendiri, dan peneliti berfungsi sebagai evaluator.

Penelitian kualitatif banyak digunakan di ilmu sosial yang bertujuan untuk memahami kejadian atau peristiwa dengan proses interaksi komunikasi yang baik antara peneliti dengan kejadian yang diteliti. Penelitian kualitatif didasarkan pada pandangan rinci, sistematis, dan kompleks. Tujuan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif sebenarnya didasarkan pada observasi secara keseluruhan mengenai fenomena yang terjadi, kemudian mengumpulkan hasil-hasil data tersebut dan menarik kesimpulan melalui pengungkapan kata-kata yang didasarkan secara teoritis serta fakta lapangan. Peneliti memilih penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif agar mampu mendeskripsikan Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebenarnya adalah inti permasalahan yang menjadi titik tekan peneliti untuk dilakukan penelitian baik dalam kajian ilmu atau fenomena secara di lapangan. Fokus penelitian menurut Moelong (2007:97) adalah “segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian peneliti, dalam hal ini mengharuskan data-data, sehingga mempermudah peneliti menemukan serta memilah data-data yang diperlukan untuk suatu penelitian. Penggunaan fokus penelitian pada dasarnya untuk mempermudah peneliti untuk melakukan pengamatan dan pengolahan data sehingga tidak meluas. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka fokus penelitian yang telah ditetapkan dalam penelitian ini adalah Implementasi

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang melalui model Implementasi Kebijakan Grindle:

- a. Isi kebijakan (*Content of Policy*) yang mempengaruhi keberhasilan implementasi meliputi:
 - 1) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (*Interest Affected*) yaitu seberapa penting kelompok sasaran terhadap kebijakan ini.
 - 2) Tipe manfaat (*Type of Benefits*) yaitu manfaat apa saja yang akan didapatkan dari pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang.
 - 3) Derajat perubahan yang akan dicapai (*Extent of Change Envision*) yaitu seberapa besar harapan perubahan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang.
 - 4) Letak pengambilan keputusan (*Site of Decision Making*) yaitu bagaimana pihak-pihak dalam kelembagaan mampu mengambil keputusan dengan baik.
 - 5) Pelaksana Kebijakan yaitu seseorang atau aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

- 6) Sumber-sumber daya yang digunakan (*Resources Committed*) yaitu sumber daya yang terlibat baik struktural kepengurusan atau anggota kepengurusan dalam implementasi kebijakan.
- b. Lingkungan Implementasi Kebijakan (*Context of Policy*) meliputi:
 - 1) Strategi dari aktor yang terlibat (*Strategy of Actor Involved*) Konten ini untuk mendeskripsikan bentuk strategi yang digunakan oleh para pihak untuk melaksanakan kebijakan.
 - 2) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*Institution and regime characteristic*) yaitu kondisi berbagai pihak dalam pelaksanaan kebijakan baik dari internal maupun eksternal organisasi.
 - 3) Responsivitas Kelembagaan (*responsiviness*) mendeskripsikan mengenai tanggapan oleh pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Pemilihan lokasi menentukan keberhasilan penelitian karena untuk mendapatkan hasil yang akurat diperlukan lokasi yang sesuai dengan judul dipilih. Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian serta mengumpulkan data sesuai dengan judul yang dipilih. Sesuai dengan judul yang dipilih, maka lokasi penelitian ini adalah Kota Malang, Provinsi Jawa. Peneliti memilih lokasi tersebut dengan menggunakan pertimbangan yang jumlah anggota DPRD Perempuan Kota Malang Periode 2014-2019 yang hanya berjumlah 11 orang (9 orang dari perolehan suara dan 2 orang dari hasil pergantian) dari 45

orang. Situs penelitian yang dipilih sesuai dengan lokasi di Kota Malang terdiri dari:

1. Partai Politik di Kota Malang

- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): Alasan memilih partai ini dikarenakan pada pemilihan umum 2014 PDIP mampu mendistribusikan lima kader (4 perolehan suara dan 1 dari hasil pergantian) perempuannya dalam DPRD Kota Malang dan menduduki partai pertama yang anggota perempuannya terbanyak di parlemen.
- b. Partai Persatuan Pembangunan (PPP): Alasan memilih partai ini dikarenakan pada pemilihan umum 2014 mampu mendistribusikan dua kader perempuannya dalam DPRD Kota Malang.
- c. Partai Demokrat : Alasan memilih partai ini dikarenakan pada pemilihan umum 2014 Demokrat mampu mendistribusikan dua kader (satu perolehan suara terbanyak dan satu dari pergantian) perempuannya.
- d. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA): Alasan memilih partai ini dikarenakan pada pemilihan umum 2014 mampu mendistribusikan 1 kader perempuannya dalam DPRD Kota Malang.
- e. Partai Golongan Karya (Golkar): Alasan memilih partai ini dikarenakan pada pemilihan umum 2014 mampu mendistribusikan 1 kader perempuannya dalam DPRD Kota Malang.

- f. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra): Alasan memilih partai ini dikarenakan pada pemilihan umum 2014 mampu mendistribusikan 1 kader perempuannya dalam DPRD Kota Malang
2. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang
5. Organisasi Kemasyarakatan yakni *Women Crisis Center* (WCC) Dian Mutiara, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Malang

Terdapat dua alasan bagi peneliti untuk memilih situs penelitian tersebut yaitu:

1. Akademis

Yaitu situs penelitian tersebut merupakan bentuk peran kelembagaan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2013 dan kelima situs penelitian tersebut mempunyai peran untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam lembaga legislatif.

2. Non Akademis

Dalam hal ini jumlah partai politik baru mengalami perkembangan yang pesat dan memiliki potensi untuk mampu meningkatkan partisipasi politik perempuan. Selain itu pemilihan situs lembaga kemasyarakatan ini karena kedua lembaga ini tidak terikat dari Pemerintah sehingga perlu adanya penelitian spesifik mengenai cara peningkatkan partisipasi politik perempuan dari perspektif *Women's Crisis Center* Dian Mutiara dan KPI Cab Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai kebutuhan peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan demi mencapai hasil yang maksimal. Menurut Loeftland dalam Moleong (2007: 157) menjelaskan sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data yang dikumpulkan harus relevan dengan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, dalam hal ini sumber data yang digunakan ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan langsung dengan informan atau narasumber yang digunakan dalam proses kegiatan wawancara. Informan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pengurus Partai Politik di Kota Malang: PDIP, Demokrat, Hanura, Golkar, PPP dan Gerindra.
- b. Pegawai Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang
- c. Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang
- e. Pengurus Lembaga WCC Dian Mutiara
- f. Pengurus Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Malang

Dalam proses mendapatkan data selanjutnya, informan berkembang berdasarkan *snow ball sampling* artinya berkembang sesuai dengan data yang diperlukan atau dengan kata lain kepada informan yang lebih khusus lagi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data diperoleh secara tidak langsung dan dapat memberikan informasi tambahan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, media massa, arsip-arsip dan literasi yang memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang diratifikasi dari Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita tahun 1979 / CEDAW
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
- f. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang.

- g. Dokumen struktur kepengurusan dari Partai Politik (PDIP, PPP, Hanura, Golkar, Demokrat, Gerindra), DP3AP2KB Kota Malang, KPU Kota Malang, KPI Cabang Malang dan *Women Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang.
- h. Daftar Calon legislatif Pemilihan Legislatif Kota Malang Tahun 2014.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian tentu saja memerlukan teknik pengumpulan data yang sistematis dan relevan. Teknik pengumpulan data harus melalui cara-cara yang baik, hal ini dikarenakan kualitas hasil data yang diperoleh akan menentukan pembahasan pada penelitian. Dalam tahapan pengumpulan data harus dilakukan secara langsung melalui informan atau arsip-arsip yang terkait. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada 4 yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan peneliti kepada informan atau narasumber untuk mendapat informasi. Jenis wawancara menurut Sugiyono (2012: 138-142) adalah sebagai berikut:

a. Wawancara Terstruktur

Pada wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Dalam prakteknya selain membawa instrumen sebagai pedoman wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan atribut lain yang dapat membantu dalam wawancara

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur maksudnya adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan

datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Berdasarkan pemaparan diatas, jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dikarenakan peneliti menggunakan pedoman wawancara, alat tulis, handphone dan alat bantu lainnya. Beberapa pihak yang diwawancarai dalam penelitian adalah:

- a. Bapak A.H dari DPC PDI-Perjuangan Kota Malang.
- b. Bapak A.T dari DPC PPP Kota Malang
- c. Ibu A.I dari DPC PPP Kota Malang
- d. Bapak A.F dari DPC Demokrat Kota Malang
- e. Ibu W.H.A dari DPC Demokrat Kota Malang
- f. Ibu W.I dari DPC Gerindra Kota Malang
- g. Ibu Y.A.G dari DPC Hanura Kota Malang
- h. Bapak B.S dari DPD Golkar Kota Malang
- i. Ibu S.W dari DP3AP2KB Kota Malang
- j. Bapak F.S KPU Kota Malang
- k. Ibu A.A KPU Kota Malang
- l. Ibu D.R dari KPI Cabang Malang
- m. Ibu L.E dari WCC Dian Mutiara Kota Malang

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung yang dapat dilihat oleh mata, dapat didengar, dapat diukur dan dapat dihitung. Menurut Sugiyono (2012:145). Beberapa bentuk observasi yang digunakan dalam

penelitian kualitatif adalah observasi partisipatif, observasi tidak terstruktur dan observasi kelompok tidak terstruktur dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Observasi partisipasi (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.
- b. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guide* observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.
- c. Observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus.

Berdasarkan penjelasan diatas, jenis observasi yang digunakan peneliti dalam penelitian di lapangan adalah observasi tidak terstruktur, hal ini dikarenakan peneliti melakukan pengamatan langsung dan mengembangkan daya pengamatannya tanpa adanya *guide* observasi.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah salah satu metode dalam pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang sesuai dengan penelitian. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian adalah peraturan-peraturan perundang-undangan, jurnal dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian.

4. Materi Audio dan Visual

Menurut Creswell (2016:255) materi audio dan visual adalah data bisa berupa foto, objek seni, videotape atau segala jenis suara atau berbunyi. Dalam penelitian ini yang digunakan materi audio berupa hasil wawancara melalui handphone kemudian dikonversikan dengan melakukan pencatatan

secara tertulis. Selain itu juga menggunakan materi visual berupa gambar dari hasil wawancara maupun observasi.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam pengumpulan data untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam suatu penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Peneliti sendiri, salah satu ciri penelitian kualitatif adalah menggunakan peneliti sendiri sebagai alat pengumpulan data utama. Peneliti sendiri harus mampu mengandalkan kemampuannya dalam mengamati, menangkap dan mendengar fenomena yang terkait dengan permasalahan.
2. Pedoman Wawancara, hal ini berguna untuk mengarahkan dan membatasi peneliti dalam mencari data melalui informan atau narasumber sehingga pertanyaan yang diajukan masih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
3. Catatan Lapangan, Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2007:209) catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap dalam dalam penelitian kualitatif

4. Perangkat Penunjang yang digunakan meliputi: buku catatan, alat tulis, laptop, handphone sebagai rekaman dan alat mengambil gambar untuk membantu dalam penelitian di lapangan.

G. Analisis Data

Tahap analisis data kualitatif adalah menguraikan dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan serta dipahami secara sistematis, sehingga hasil data yang diperoleh diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap ini dapat dilakukan saat pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data. Apabila ternyata hasil dari pengumpulan data belum sesuai, maka bisa dilakukan pengumpulan data ulang hingga hasil yang dibutuhkan dapat ditemukan. Dalam proses analisis dilakukan dengan sesuatu dari umum ke khusus untuk mempermudah peneliti dalam menguraikan dan mengolah data yang diperoleh.

Langkah 1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Dalam langkah pertama, peneliti akan mempersiapkan data yang relevan dengan Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang.

Langkah 2. Membaca keseluruhan data. Langkah ini adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Pada langkah kedua, peneliti menulis catatan mengenai gambaran umum yang diperoleh tentang Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang.

Langkah 3. Menganalisis lebih detail dengan *meng-coding* data. Menurut Rossman dan Rallis dalam Creswell (2013: 276) “*Coding* merupakan proses mengorganisasikan data dengan mengumpulkan potongan (atau bagian teks atau bagian gambar) dan menuliskan kategori dalam batas-batas”. Langkah ini melibatkan beberapa tahap meliputi: mencari pemahaman umum, membuat daftar mengenai topik (topik utama, topik khusus, dsb), meringkas topik-topik menjadi kode-kode, mensegmentasi kalimat-kalimat atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, lalu meringkas kategori-kategori yang ada dengan mengelompokkan topik-topik yang saling berhubungan, dan terakhir meringkas semuanya menjadi istilah-istilah khusus. Pada langkah ini, peneliti memilah-milah data yang termasuk ke dalam Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang.

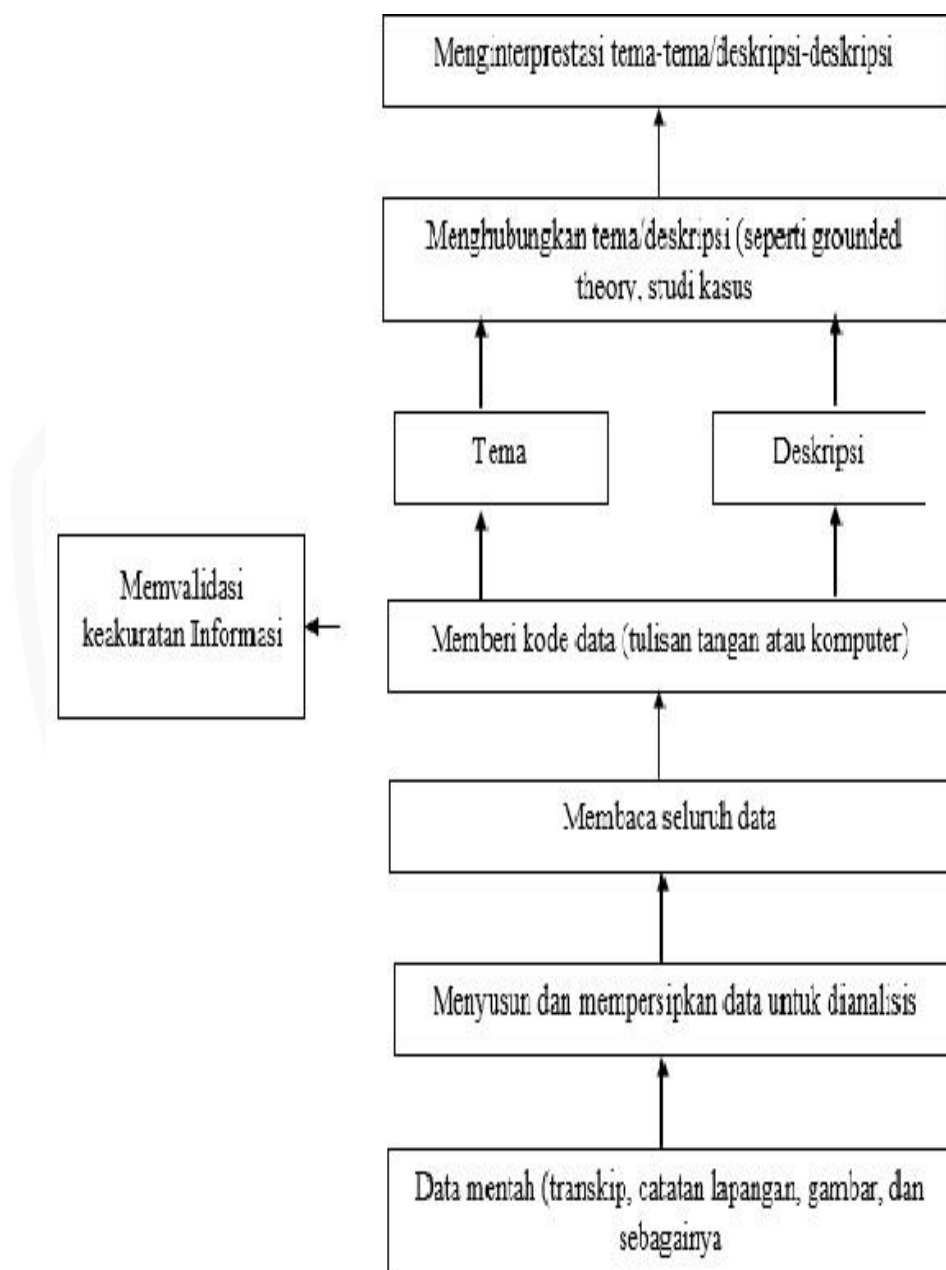
Langkah 4: Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Pada langkah

ini, peneliti menyampaikan informasi secara detail mengenai orang, lokasi atau peristiwa dalam keadaan tertentu yang ada di dalam proses penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang.

Langkah 5. Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema-tema tertentu (lengkap dengan sub tema-tema, ilustrasi-ilustrasi khusus, perspektif-perspektif, dan kutipan-kutipan), atau tentang keterhubungan antartema. Peneliti menyajikan hasil analisis melalui pendekatan naratif terkait Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang.

Langkah 6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Dalam hal ini, menurut Creswell (2014:268) peneliti menegaskan apakah hasil penelitiannya membenarkan atau justru menyangkal informasi sebelumnya. Interpretasi /pemaknaan ini juga bisa berupa pertanyaan baru yang ada perlu dijawab selanjutnya. pertanyaan yang muncul dari data dan analisis, serta bukan dari hasil ramalan peneliti. Dalam langkah ini, peneliti akan memberikan interpretasi pribadi dan mengkaitkannya dengan teori terkait Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

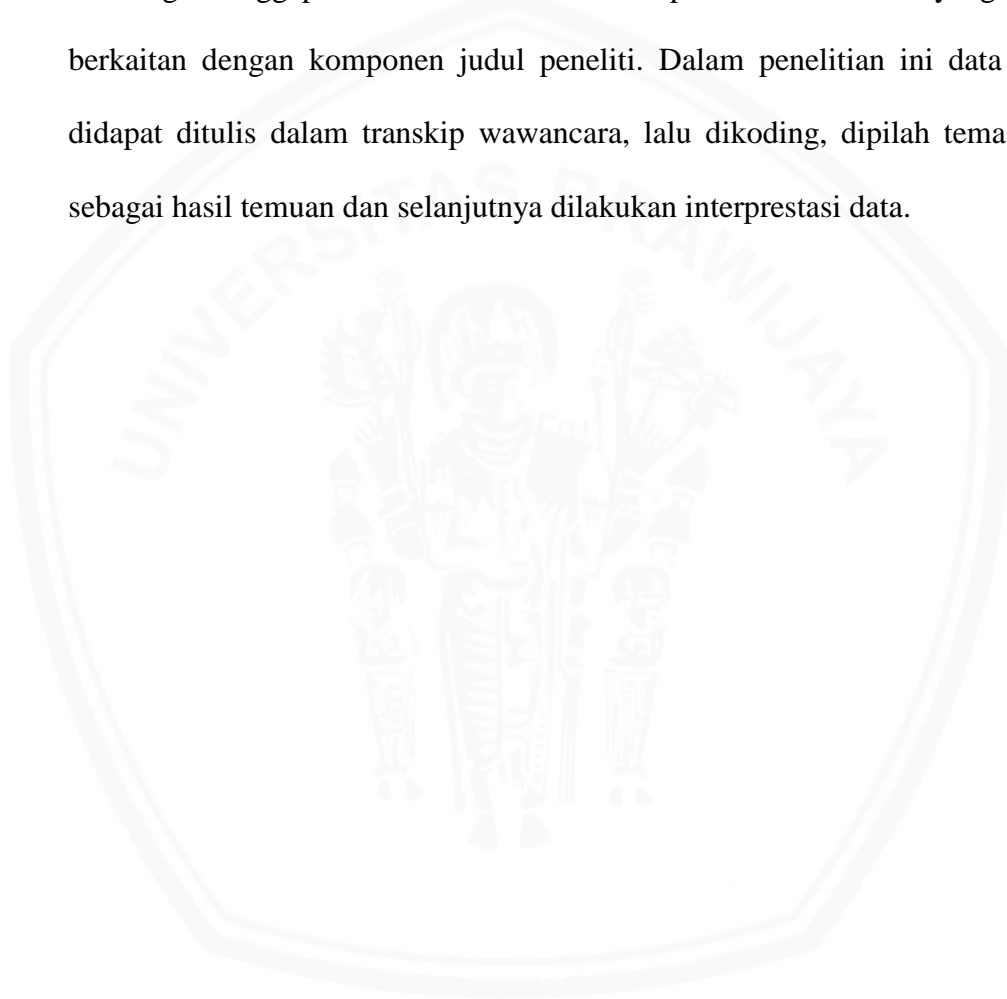
Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang.



Gambar 10 Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Creswell

Sumber: Creswell.2016: 263

Peneliti memilih model analisis data Creswell dikarenakan pada saat penelitian akan meneliti tentang *context* dan *content policy* Implementasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang. Metode analisis Creswell adalah bentuk analisis kualitatif yang memang dianggap sesuai untuk mendeskripsikan tema-tema yang akan berkaitan dengan komponen judul peneliti. Dalam penelitian ini data yang didapat ditulis dalam transkrip wawancara, lalu dikoding, dipilah tema-tema sebagai hasil temuan dan selanjutnya dilakukan interpretasi data.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Umum

1. Gambaran Umum Kota Malang

a. Sejarah Singkat Kota Malang

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum di rencanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misalnya Ijen Boeleward kawasan sekitarnya, hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya. Sementara penduduk pribumi harus bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim disana untuk bernostalgia.

Pada tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna lahan, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan perkembangan tersebut, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaanya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan.

Kota Malang dulunya merupakan sebuah kerajaan yang berpusat di Wilayah Dinoyo dengan rajanya Gajayana. Dalam Pemerintahannya sendiri mengalami banyak peristiwa. Pada tahun 1767 Kompeni memasuki Kota Malang, kemudian tahun 1821 kedudukan Pemerintahan Belanda di pindahkan di sekitar kali Brantas. Selain itu masih ditahun yang tidak jauh pada tahun 1824 Malang mempunyai asisten Residen dan pada tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat Kota Malang didirikan alun-alun. Kemudian pada tahun 1 April 1914 Kota Malang ditetapkan sebagai Kotaapraja, tidak berselang lama pada 8 Maret 1942 Malang diduduki oleh pasukan penjajah dari Jepang. Setelah 3,5 Tahun mengalami penjajahan, lalu pada 21 September 1945 Kota Malang masuk Wilayah Republik Indonesia. Namun kembali lagi Kota Malang diduduki oleh Belanda pada

tahun 22 Juli 1947, pada tahun 2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang. Akhirnya, pada 1 Januari 2001 menjadi Pemerintah Kota Malang.

Kota Malang memiliki banyak gelar yang disandang yaitu meliputi Kota Bunga, Kota Pesiar, Kota Peristirahatan, *Paris of Java*, Kota Pendidikan, Kota Militer, dan Kota Sejarah. Kota Malang diberi gelar Kota Bunga dikarenakan cita-cita yang merebak dihati setiap warga Kota senantiasa menyemarakkan sudut kota dan tiap jengkal tanah warga dengan warna-warni bunga. Pemberian gelar Kota Pesiar kepada Kota Malang dikarenakan kondisi alam yang elok, menawan, bersih, sejuk, tenang dan fasilitas wisata yang memadai merupakan ciri-ciri sebuah kota tempat berlibur. Gelar Kota Peristirahatan juga didapatkan oleh Kota Malang, hal ini disebabkan suasana kota yang damai sangat sesuai untuk beristirahatan, terutama bagi orang dari luar Kota Malang, baik sebagai turis maupun dalam rangka mengunjungi keluarga. *Paris of Java* juga merupakan gelar yang disandang oleh Kota Malang, pemberian nama gelar ini karena kondisi alamnya yang indah, iklimnya yang sejuk dan kotanya yang bersih, bagaikan Kota Paris di Jawa Timur.

Pemberian gelar Kota Pendidikan juga tak luput disandang oleh Kota Malang, hal ini dikarenakan situasi kota yang tenang, penduduknya yang ramah, harga makanan yang relatif murah, dan fasilitas pendidikan yang memadai sangat cocok untuk menempuh pendidikan. Gelar Kota Pendidikan juga diberikan karena Kota Malang memiliki Universitas

ternama di Indonesia yaitu Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN), dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Kota Militer termasuk salah satu pemberian gelar untuk Kota Malang dikarenakan terpilihnya sebagai kota kesatrian. Kota Malang ini didirikan tempat pelatihan militer, asrama dan mess perwira disekitar lapangan Rampal dan pada jaman Jepang dibangun lapangan terbang Sundeng di Kawasan Perumnas sekarang. Sebagai kota yang menyimpan misteri embrio tumbuhnya kerajaan-kerajaan besar, seperti Singosari, Kediri, Majapahit, Demak dan Mataram maka Kota Malang diberi sebutan Kota Sejarah. Awal kemerdekaan Republik Indonesia, Kota Malang tercatat masuk nominasi akan dijadikan Ibukota Negara Republik Indonesia, sehingga pemberian gelar Kota Sejarah di Kota Malang memiliki banyak makna.

b. Kondisi Geografis Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang, secara astronomis terletak pada posisi 112.06° - 112.07° Bujur Timur, 7.06° - 8.02° Lintang Selatan. Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter diatas permukaan air laut. Salah satu lokasi yang Batas wilayah Kota Malang yaitu:

1. Sebelah Utara: Kecamatan Singosri dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

2. Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
4. Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Kota Malang yang merupakan kota kedua terbesar di Jawa Timur setelah Kota Surabaya, memiliki wilayah 11.005,66 Ha yang terbagi dalam 5 Wilayah Kecamatan dan 57 Kelurahan;

1. Kecamatan Kedungkandang dengan 12 wilayah Kelurahan;
2. Kecamatan Klojen dengan 10 wilayah Kelurahan;
3. Kecamatan Blimbing dengan 11 wilayah Kelurahan;
4. Kecamatan Lowokwaru dengan 12 wilayah Kelurahan;
5. Kecamatan Sukun dengan 12 wilayah Kelurahan;

c. Kondisi Demografis dan Sosiologis Kota Malang

1) Jumlah Penduduk

Kota Malang memiliki luas kurang lebih 11.005.66 Ha. Kota dengan jumlah penduduk sampai tahun 2015 sebanyak 851.298 jiwa yang terdiri dari 419.713 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 431.585 jiwa yang tersebar di 5 Kecamatan yang terdiri 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT.

2) Komposisi

Etnik masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja, keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang (AREMA). Komposisi penduduk asli berbagai dari berbagai etnik (terutama suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina).

3) Agama

Masyarakat Malang sebagian besar adalah pemeluk Islam kemudian Kristen, Katolik, dan sebagian kecil Hindu dan Budha. Umat beragama di Kota Malang terkenal rukun dan saling bekerja sama dalam memajukan kotanya. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak jaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja (Alun-alun, Kayutangan dan Ijen) serta Klenteng di Kota Lama. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya pesantren dan Seminar Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara.

4) Seni Budaya

Kekayaan etnik dan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisional yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Tari Topeng, namun kini semakin terkikis oleh kesenian modern. Gaya kesenian ini adalah wujud pertemuan gaya kesenian Jawa Tengahan Jawa Timur-Selatan) dan gaya kesenian Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo dan Banyuwangi).

5) Bahasa

Bahasa Jawa dialek Jawa Timuran dan bahasa Madura adalah bahasa sehari-sehari masyarakat Malang. Dikalangan generasi muda berlaku dialek khas Malang yang disebut '*boso walikan*' yaitu cara pengucapan kata secara terbalik. Gaya bahasa di Malang terkenal kaku tanpa unggah-ungguh sebagaimana bahasa jawa kasar umumnya. Hal ini menunjukkan sikap masyarakatnya yang tegas, lulus dan tidak mengenal basa-basi.

6) Pendatang

Kebanyakan pendatang adalah pedagang, pekerja dan pelajar atau mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu akan kembali ke daerah asalnya. Sebagian besar berasal dari wilayah di sekitar Kota Malang untuk golongan pekerja dan pedagang. Sedang untuk golongan pelajar atau mahasiswa banyak yang berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur).

d. Arti Lambang Daerah



Gambar 11 Lambang Kota Malang

Sumber: malangkota.go.id, 7 Februari 2018

Motto “MALANG KUCECWARA” berarti Tuhan menghancurkan yang bathil, menegakkan yang benar.

Arti Warna:

- 1) Merah Putih, adalah lambang bendera nasional Indonesia
- 2) Kuning, berarti keluhuran dan kebesaran
- 3) Hijau, adalah kesuburan
- 4) Biru Muda, berarti kesetiaan pada Tuhan, Negara dan Bangsa
- 5) Segilima Berbentuk Perisai, bermakna semangat perjuangan kepahlawanan, kondisi geografis, pegunungan, serta semangat membangun untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.

e. Visi dan Misi Kota Malang

Pemerintahan Kota Malang dibawah pimpinan Ir. Mochammad Anton dan Drs. Sutiaji. Selama periode jabatan 2013-2018 menetapkan visi: **“MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”**. Visi BERMARTABAT dapat menjadi akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018, yakni: Bersih, Makmur, Adil, Religius-Toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri dan Terdidik. Adapun penjelasan dari akronim BERMARTABAT adalah:

- 1) Bersih: Kota Malang yang bersih adalah harapan seluruh warga Kota Malang. Lingkungan kota yang bebas dari tumpukan sampah dan

limbah adalah kondisi yang diharapkan dalam pembangunan Kota Malang sepanjang periode 2013-2018. Selain itu, bersih juga harus menjadi ciri dari penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang bersih harus diciptakan agar kepentingan masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya.

- 2) Makmur: Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang dipercayakan kepada pemerintah untuk diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dimiliki pemerintah. Dalam kaitannya dengan upaya mencapai kemakmuran, kemandirian adalah hal penting. Masyarakat makmur yang dibangun di atas pondasi kemandirian merupakan kondisi yang hendak diwujudkan dalam periode pembangunan Kota Malang 2013-2018.
- 3) Adil: Terciptanya kondisi yang adil di segala bidang kehidupan adalah harapan seluruh masyarakat Kota Malang. Adil diartikan sebagai diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajiban. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan posisi semua masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga dimaksudkan sebagai pemerataan distribusi hasil pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah Kota Malang juga akan menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.
- 4) Religius-Toleran: Terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran adalah kondisi yang harus terwujudkan sepanjang 2013-2018. Dalam

masyarakat yang religius dan toleran, semua masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk arah berpikir, bersikap dan berbuat. Apapun bentuk perbedaan di kalangan masyarakat yang berlandaskan Suku, Adat, Ras dan Agama (SARA) di Kota Malang.

- 5) Terkemuka: Kota Malang yang terkemuka dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia merupakan kondisi yang hendak diwujudkan. Terkemuka dalam hal ini diartikan sebagai pencapaian prestasi yang diperoleh melalui kerja keras sehingga diakui oleh dunia luas. Kota Malang selama lima tahun ke depan diharapkan memiliki banyak prestasi. Baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Terkemuka juga dapat berarti kepeloporan sehingga, seluruh masyarakat Kota Malang diharapkan tampil menjadi pelopor pembangunan di lingkup wilayah masing-masing.
- 6) Aman. Situasi kota yang aman dan tertib merupakan kondisi yang mutlak diperlukan oleh masyarakat. Situasi aman berarti masyarakat Kota Malang terbebas dari segala gangguan, baik berupa fisik maupun non-fisik, yang mengancam ketentraman kehidupan dan aktivitas masyarakat. Sehingga situasi masyarakat akan kondusif untuk turut serta mendukung jalannya pembangunan. Untuk itu, kondisi pemerintahan yang aman dan stabil juga akan diwujudkan demi suksesnya pembangunan di Kota Malang.

- 7) Berbudaya: Masyarakat Kota Malang yang berbudaya merupakan kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukkan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktivitas sehari-sehari di semua tempat. Masyarakat menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-sehari. Perilaku berbudaya juga ditunjukkan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan masa terdahulu dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan dimasa sekarang dan masa yang akan datang.
- 8) Asri: Kota Malang yang asri adalah dambaan masyarakat. Keasrian, keindahan, kesegaran dan kebersihan lingkungan kota adalah karunia Tuhan bagi Kota Malang. Namun, keasrian Kota Malang makin lama makin pudar akibat pembangunan kota yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Maka, Kota Malang dalam lima tahun ke depan harus kembali, asri, bersih, segar, dan indah. Sehingga, segala pembangunan Kota Malang, baik fisik dan non-fisik, diharuskan untuk menjadikan aspek kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan utama. Hal ini harus dapat diwujudkan dengan partisipasinya nyata dari seluruh masyarakat, tanpa kecuali.
- 9) Terdidik: Terdidik adalah kondisi dimana semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan perundangan. Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tahun bagi seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, diharapkan masyarakat akan mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang

sesuai dengan pilihan hidup dan profesi masing-masing. Masyarakat yang terdidik akan senantiasa tergerak untuk membangun Kota Malang bersama dengan Pemerintah Kota Malang.

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi pembangunan dalam Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel.
- 3) Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan, berkesinambungan, adil dan ekonomis.
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Malang sehingga bisa bersaing di era global.
- 5) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif.
- 6) Membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman dan berbudaya.
- 7) Mendorong pelaku ekonomi sektor informal agar lebih produktif dan kompetitif.
- 8) Mendorong produktifitas industri dan ekonomi skala besar yang berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan.

- 9) Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Gambaran Umum Partai Politik

a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)

Bahwa partai PDI Perjuangan merupakan partai politik yang sebenarnya adalah partai yang secara langsung memiliki tali kesejaaran dengan partai politik masa orde lama. PDI Perjuangan sebenarnya kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973. Partai Demokrasi Indonesia itu lahir dari hasil fusi 5(lima) partai politik. Kelima partai politik tersebut yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Murba,

b. Partai Demokrat

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif saudara Susilo Bambang Yudhoyono yang terilhami oleh kekalahan terhormat saudara Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan Calon Wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001. Dalam perolehan suara dalam pemilihan cawapres dan hasil *pooling public* yang menunjukkan popularitas yang ada pada diri Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut SBY). beberapa orang terpanggil nuraninya untuk memikirkan bagaimana sosok SBY bisa dibawa menjadi Pemimpin Bangsa dan bukan direncanakan untuk menjadi

Wakil Presiden RI tetapi menjadi Presiden RI untuk masa mendatang. Hasilnya adalah beberapa orang diantaranya saudara Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi Presiden, dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik. Perumusan konsep dasar dan platform partai sebagaimana yang diinginkan SBY dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutnya teknis administrasi dirampungkan oleh Tim yang dipimpin oleh saudara Vence Rumangkang. Juga terdapat diskusi-diskusi tentang perlunya berdiri sebuah partai untuk mempromosikan SBY menjadi Presiden, antara lain: Pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh SBY di apartemen Hilton. Rapat.

c. Partai Golkar

Sejarah partai golkar bermula pada tahun 1964 dengan berdirinya Sekber Golkar di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat (seperti Letkol Suhadirman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua Pertama Sekber Golkar adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan

Mayor Jenderal (Mayjen) Suprpto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.

Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber GOLKAR ini kemudian dikelompokkan berdasarkan karyaannya ke dalam 7(tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu: 1.Koperasi Serbagunan Gotong Royong (KOSGORO) 2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) 3.Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGRI) 4.Organisasi Profesi 5.Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM) 6.Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI) 7.Gerakan Pembangunan

d. Partai Gerindra

Bermula dari Keprihatinan, Partai Gerindra lahir untuk mengangkat rakyat dari jerat kemelaratan, akibat permainan orang-orang yang tidak peduli pada kesejahteraan. Dalam sebuah perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta terjadi obrolan antara intelektual muda Fadli Zon dan pengusaha Hashim djojohadikusumo. Ketika itu November 2007, keduanya membahas politik terkini, yang jauh dari nilai-nilai demokrasi sesungguhnya. Demokrasi sudah dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kapital besar. Akibatnya, rakyat

hanya jadi alat. Bahkan, siapapun yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi dan politik akan dengan mudah jadi korban.

Gagasan pendirian partai pun kemudian diwacanakan di lingkaran orang-orang Hashim dan Prabowo. Rupanya tidak semua setuju. Ada pula yang menolak, dengan alasan bila ingin ikut terlibat dalam proses politik sebaiknya ikut saja pada partai politik yang ada. Kebetulan, Prabowo adalah anggota Dewan Penasihat Partai Golkar, sehingga bisa mencalonkan diri maju menjadi Ketua Umum. Namun, ketika itu Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla adalah wakil presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pembentukan Partai Gerindra terbilang mendesak. Sebab dideklarasikan berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa kampanye pemilihan umum, yakni pada 6 Februari 2008. Dalam deklarasi itu, termaktub visi, misi dan manifesto perjuangan partai, yakni terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Pemberian nama Partai Gerindra berasal dari kata Gerakan Indonesia Raya, nama partai harus memperlihatkan karakter dan ideologi yang nasional dan kerakyatan sebagaimana manifesto Gerindra. Lambang yang digunakan Partai Gerindra adalah Kepala Burung Garuda menghadap ke kanan, melambangkan keberanian dalam bersikap dan bertindak. Sisik di

leher berjumlah 17, jengger dan jambul 8 buah, bulu telinga 4 buah, dan bingkai gambar segi lima yang mengandung arti hari kemerdekaan, 17-8-1945.

e. Partai Hanura

Pendirian Partai HANURA dirintis oleh Wiranto bersama tokoh-tokoh nasional yang menggelar pertemuan di Jakarta pada tanggal 12-14 November 2006. Forum tersebut melahirkan delapan kesepakatan penting sebagai berikut:

- 1) Dengan memperhatikan kondisi lingkungan global regional dan nasional serta kinerja pemerintahan RI selama ini., mengisyaratkan bahwa sejatinya Indonesia belum berhasil mewujudkan apa yang diamanatkan UUD 1945.
- 2) Memperhatikan kinerja pemerintahan sekarang ini maka kemungkinan tiga tahun yang akan datang akan sulit diharapkan adanya perubahan yang cukup signifikan, menyangkut perbaikan nasib bangsa.
- 3) Oleh sebab itu perjuangan untuk mewujudkan terjadinya siklus kepemimpinan nasional dan pemerintahan bukan lagi untuk memenuhi ambisi perorangan atau kelompok namun merupakan perjuangan bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa.
- 4) Perjuangan itu membutuhkan keberanian untuk menyusun strategi jangka panjang pada keseluruhan tatanan kehidupan berbangsa dan

bernegara guna mengembalikan kemandirian dan kebanggaan kita sebagai bangsa.

- 5) Untuk itu diperlukan kepemimpinan yang jujur, bijak, dan berani yang dapat menggalang persatuan, kebersamaan dan keikhlasan, sebagaimana dahulu para pendahulu kita “berhimpun bersama sebagai bangsa untuk mencapai kemerdekaan”. Sekarang saatnya kita berhimpun kembali sebagai bangsa guna menyelamatkan negeri kita.
- 6) Kita kembangkan semangat perjuangan “Semua untuk satu, satu untuk semua”. Artinya semua harus memberikan yang terbaik untuk satu tujuan bersama, yakni membentuk pemerintahan yang jujur dan berkualitas. Selanjutnya, pemerintahan itu benar-benar akan bekerja semata-mata untuk kepentingan rakyat Indonesia.
- 7) Perjuangan itu akan kita wadahi dalam sebuah partai politik.
- 8) Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan melindungi perjuangan yang tulus dan ikhlas ini demi masa depan Indonesia yang kita cintai bersama

Delapan kesepakatan itu kemudian ditindaklanjuti dalam wadah partai politik bernama Partai Hati Nurani Rakyat disingkat Partai HANURA. Pendeklarasian partai ini diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2006 di Jakarta. Komposisi dewan pendiri partai HANURA adalah Jend. TNI (Purn) Wiranto, Yus Usman Sumanegara, Dr. Fuad Bawazier, Dr. Tuti Alawiyah AS, Jend. TNI (Purn) Fachrul Razi, Laks TNI (Purn) Bernard

Kent Sondakh, Prof.Dr Achmad Sutarmadi, Prof.Dr. Max Wullur, Prod.Dr. Azzam Sam Yasin, Jend. TNI (Purn) Subagyo HS., Jend. TNI (Purn) Chaeruddin Ismail, Samuel Koto, LetJend TNI (Purn) Suaidi Marasabessy, Marsdya TNI (Purn) Budhy Santoso, Djafar Badjeber, Uga Usman Wiranto, Letjen TNI (Purn) Ary Mardjono, Elza Syarief, Nicolaus Daryanto, Anwar Fuadi, Dr.Teguh Samudra dan lain-lain.

f. Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu mempersatukan berbagai faksi dan kelompok dalam Islam. Untuk itulah wajar jika PPP kini memproklamkan diri sebagai Rumah Besar Umat Islam. PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua Kelompok Persatuan Persatuan Pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklarator tersebut adalah KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama; H. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi); H. Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII; H. Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan H. Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.

PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Pada Muktamar I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Setelah tumbang Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie, PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Ka'bah. Secara resmi hal itu dilakukan melalui Muktamar IV akhir tahun 1998. Walau PPP kembali menjadikan Islam sebagai asas, PPP tetap berkomitmen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 AD PPP yang ditetapkan dalam Muktamar VII Bandung 2011 bahwa: Tujuan PPP adalah “terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah Subhanahu Wataala”. Ketua Umum DPP PPP yang pertama adalah H. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH yang menjabat sejak tanggal 5 Januari 1973 sampai tahun 1978.

Deklarasi PPP melaluo keempat Partai Islam yaitu NU, PARMUSI, PSII, dan PERTI yang sampai sekarang ini tergabung dalam bentuk konfederensi kelompok Partai Persatuan Pembangunan, dalam Rapat Presidium Badan Pekerja dan Pimpinan Fraksi tanggal 5 Januari 1973,

telah memfusikan politiknya dalam satu partai politik bernama Partai Persatuan Pembangunan. Segala kegiatan yang bukan kegiatan politik, tetap dikerjakan organisasi masing-masing sebagaimana sediakala, bahkan lebih ditingkatkan sesuai dengan partisipasi dalam pembangunan spirituil/materiil. Untuk merealisasikan kesepakatan ini telah dibentuk team untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan oleh Partai Persatuan Pembangunan, baik organisatoris maupun politis.

5. Gambaran Umum DPRD Kota Malang

a. Dasar Hukum, Visi Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan DPRD Kota Malang

1) Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c) Peraturan DPRD Kota Malang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang

2) Sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah, DPRD Kota Malang mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

VISI:

Terjaminnya Aparatur Politis yang Kreatif, Kualitatif, Aspiratif, dan Perspektif terhadap Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Malang

MISI:

- a) Mewujudkan Anggota DPRD yang berwawasan luas, memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi.
- b) Mewujudkan DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat yang responsif, solutif dan aplikatif.
- c) Mewujudkan peran DPRD terhadap kemajuan dan perkembangan Kota serta kesejahteraan masyarakat.
- d) Menyelenggarakan fungsi pengawasan secara bertanggung jawab

3) Tujuan

- a) Meningkatkan Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran DPRD Kota Malang
- b) Meningkatkan hubungan yang sinergis antar anggota dan alat kelengkapan DPRD.
- c) Meningkatkan hubungan yang harmonis dan sinergis antara Lembaga DPRD dan Pemerintahan Daerah.
- d) Meningkatkan kualitas produk kebijakan publik dan keputusan publik.

- e) Mewujudkan anggota DPRD yang berkualitas, disiplin dan berdedikasi.

4) Sasaran

- a) Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam setiap kebijakan politik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- b) Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan politik.
- c) Terwujudnya produk-produk hukum yang aspiratif dan berkualitas.
- d) Terciptanya suasana yang demokratis dan penuh kebersamaan dalam setiap proses pengambilan kebijakan politik.
- e) Terwujudnya hubungan yang harmonis antara lembaga DPRD dengan Pemerintah Daerah.
- f) Terlaksananya kelancaran setiap proses pengambilan kebijakan politik.
- g) Terwujudnya peningkatan pengetahuan, wawasan, pengalaman, disiplin, dan dedikasi anggota DPRD.

5) Kebijakan

Meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang

b. Program Kegiatan DPRD Kota Malang

1) Peningkatan pelaksanaan rapat-rapat DPRD, melalui**kegiatan:**

- a) Rapat Paripurna
- b) Rapat Paripurna Istimewa
- c) Rapat Pimpinan DPRD
- d) Rapat Fraksi
- e) Rapat Konsultasi
- f) Rapat Badan Musyawarah
- g) Rapat Komisi
- h) Rapat Gabungan Komisi
- i) Rapat Badan Anggaran
- j) Rapat Badan Legislasi Daerah
- k) Rapat Badan Kehormatan
- l) Rapat Panitia Khusus
- m) Rapat Kerja
- n) Rapat Dengar Pendapat dan
- o) Rapat Dengar Pendapat Umum

2) Peningkatan pelaksanaan fungsi legislasi, melalui kegiatan:

- a) Penyusunan Program Legislasi Daerah
- b) Membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah
- c) Penyusunan RANPERDA Inisiatif DPRD
- d) Penyusunan Produk Hukum & Keputusan DPRD
- e) *Public Hearing* Rancangan Peraturan Daerah

- f) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah
- g) Evaluasi & Penyempurnaan Produk Hukum

3) Peningkatan pelaksanaan fungsi anggaran, melalui kegiatan:

- a) Penyusunan Anggaran DPRD
- b) Penyerapan Aspirasi Masyarakat
- c) Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD

4) Peningkatan pelaksanaan fungsi pengawasan, melalui kegiatan:

- a) Penyusunan hasil rapat dengar pendapat
- b) Penyusunan hasil rapat kerja
- c) Penyusunan Hak interpelasi
- d) Penyusunan Hak Angket

5) Pendidikan dan latihan, melalui kegiatan:

- a) Menyelenggarakan bimtek, workshop, diskusi, lokakarya, dll
- b) Mengikutsertakan anggota DPRD dalam kegiatan bimtek, workshop, diskusi, lokakarya
- c) Pelaksanaan Studi Banding dan Kunjungan Kerja
- d) Penyediaan Staf Ahli

6) Peningkatan hubungan harmonis antara DPRD dan Pemerintahan Daerah, melalui kegiatan:

- a) Dialog Interaktif
- b) Penyusunan hasil dialog

7) Peningkatan peran DPRD dalam pemilihan Kepala Daerah, melalui kegiatan:

- a) Pembentukan Panitia Pengawasan Pemilihan
- b) Pembentukan Tim Pengawas Laporan KPU
- c) Peninjauan ke Lapangan
- d) Pembahasan Laporan KPU dalam setiap pembahasan Pilkada
- e) Penyusunan dokumen Visi dan Misi serta program masing-masing calon Kepala Daerah, sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

c. Fraksi DPRD Kota Malang

Fraksi adalah pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik Pemilihan Umum. Fraksi bersifat mandiri dan dibentuk dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD dan optimalisasi dan keefektifan pelaksanaan tugas, wewenang dan hak DPRD. Fraksi-fraksi di DPRD Kota Malang Tahun 2014 berjumlah 8 Fraksi dari 10 Partai dengan jumlah anggota 45 orang, meliputi:

1) Fraksi PDI Perjuangan (Anggota 11 Orang)

Ketua : Suprpto, SH
Wakil Ketua : Tri Yudiani, S.Sos
Sekretaris : Hadi Susanto, SH
Bendahara : Diana Yanti, SAB
Anggota : 1. Moch. Arief Wicaksono, ST
2. Drs. Abd. Hakim
3. Arief Hermanto, ST
4. Tutuk Hariyani
5. Drs. Ec. RB Priyatmoko Oetomo, SH, MM, MAP
6. dr. Teguh Mulyono

7. Erni Farida

2) Fraksi Partai Golongan Karya (Anggota 6 Orang)

Ketua : Mulyanto, SH
Sekretaris : Imam Fauzi, Sag
Bendahara : H. Abd. Rahman
Anggota : 1. Abdurrochman, SH
2. Sahrawi Yazid, SS, M.Hum

3) Fraksi Demokrat (Anggota 5 Orang)

Penasehat : Hj. Wiwik Hendri Astuti
Ketua : Sony Yudiarto
Wakil Ketua : Hery Subianto
Sekretaris : Sulik Lestyowati, SH, M.Hum
Anggota : Ir. Indra Tjahyono, SH, M.Hum

4) Fraksi Partai Golongan Karya (Anggota 5 Orang)

Penasehat : Rahayu Sugiarti, S.Sos
Ketua : Sukarno, SE
Wakil Ketua : 1. Choroel Anwar, SP
2. Drs. Ribut Harianto, MM
Sekretaris : Ir. Bambang Sumarto

5) Fraksi Gerindra (Anggota 4 Orang)

Ketua : Drs.Salamet
Wakil Ketua : Dra.RM.Een Ambarsari
Sekretaris : Teguh Puji Wahyono, SE, MM
Bendahara : Letkol (Purn) Suparno HW

6) Fraksi Partai Amanat Nasional (Anggota 4 Orang)

Ketua : H.Mohan Katelu, SH
Wakil Ketua : H.Subur Triono, SH
Sekretaris : Harun Prasajo, SH
Bendahara : Saiful Rusdi, SPd, MKPd

7) Fraksi Nurani Keadilan (Anggota 6 Orang)

Ketua : Choirul Amri, SE
Wakil Ketua : Drs.Ec. Imam Ghozali

Sekretaris : Yaqud Ananda Gudban, SS. SST,Par,mm
Bendahara : Sugiarto
Anggota : 1. Bambang Triyoso, SE, MM
2. Afdhal Fauza, SE

8) Fraksi Persatuan Pembangunan Nasdem (Anggota 4 Orang)

Ketua : Dra.Hj. Heri Pudji Utami, MAP
Wakil Ketua : Asia Ariani, SE
Sekretaris : Moch. Fadli, S.Sos
Anggota : Syamsul Fajrih

d. Tugas dan Wewenang DPRD Kota Malang

- 1) Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah;
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh kepala daerah;
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- 5) Memilih wakil kepada daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;

- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- 10) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan;
- 11) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang

Awalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang bernama Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat lalu dirubah menjadi DP3AP2KB pada tahun 2016 semenjak ada perampingan Organisasi Perangkat Daerah. Kantor DP3AP2KB beralamat di Jalan Ki Ageng Gribig No.5 Kedungkandang, Kota Malang dengan Telepon (0341) 717744. Tugas pokok dari DP3AP2KB sama dengan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan.

Dasar Hukum dari DP3AP2KB Kota Malang adalah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah serta Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu tambahan dasar hukum bagi DP3AP2KB adalah PP Nomor 18 Tahun 2016 turunan dari UU No 23 Tahun 2014. Peraturan tersebut adalah peraturan tentang penggabungan dan pemisahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau sekarang bernama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Peraturan tersebut yang menjadi dasar perubahan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB),

a. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan.
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan.
- 3) Perumusan kebijakan teknis jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup, ibu, bayi, dan anak.

- 4) Pelaksanaan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
- 5) Pelaksanaan penyaluran bantuan program pengentasan kemiskinan.
- 6) Pemantauan tingkat *drop out* peserta keluarga berencana.
- 7) Penyediaan prasarana dan sarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman dan berkualitas.
- 8) Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat dan cara kkontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan sosial.
- 9) Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi.
- 10) Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya NAPZA..
- 11) Pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan kelurahan dan kelembagaan masyarakat.
- 12) Penyusunan pedoman dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, anak dan perempuan.
- 13) Penyuaunan pedoman dan pelaksanaan serta pengembangan bidang ekonomi, sosial budaya, pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna`

- 14) Pengelolaan administrasi secara umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepengawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keputakaan dan kearsipan.
- 15) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 16) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP)
- 17) Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan.
- 18) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan.
- 19) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait pelayanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah.
- 20) Penyelenggaraan UPT dan Jabatan Fungsional.
- 21) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

b. Visi Misi

Visi

Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam proses pembangunan.

Misi

- 1) Peningkatan ketahanan masyarakat;

- 2) Pemantapan nilai sosial budaya masyarakat;
- 3) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- 4) Peningkatan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan;
- 5) Peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai kebutuhan masyarakat.

7. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

a. Visi Misi

Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara

langsung umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;

- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

b. Tugas dan Kewenangan

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

- 1) Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- 2) Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- 3) Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari

tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS.

- 4) Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD, dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- 5) Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
- 6) Mengumpulkan dan mensistемasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- 7) Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

1. Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3(tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

8. Gambaran Umum Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Malang

a. Sejarah Koalisi Perempuan Indonesia

Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, disingkat Koalisi Perempuan Indonesia dikukuhkan melalui Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta pada Kamis, tanggal 17 Desember 1998. Koalisi Perempuan Indonesia pertama kali diumumkan berdirinya pada tanggal 18 Mei 1998 oleh sekelompok perempuan aktivis di Jakarta dengan dukungan 75 aktivis perempuan dari berbagai daerah yang menyetujui dibentuknya Koalisi Perempuan Indonesia. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan reformasi menurunkan Soeharto.

Kongres Nasional I diadakan di Yogyakarta 14-17 Desember 1998 yang dihadiri lebih dari 500 perempuan dari 25 propinsi dan Timor Leste. Kongres menghasilkan AD/ART, program kerja, Deklarasi Yogyakarta, 15 presidium yang mewakili kelompok kepentingan perempuan adat; lansia; jompo dan penyandang cacat; profesional; pekerja sektor informal; miskin kota; miskin desa; pemuda, pelajar dan mahasiswa; perempuan yang dilacurkan; buruh; janda, perempuan kepala rumah tangga & tidak menikah; anak marjinal; petani; nelayan; ibu rumah; lesbian, biseksual dan transeksual, juga memilih Nursyahbani Katjasungkana sebagai Sekretaris Jenderal dan Antarini Arna sebagai Koordinator Presidium Nasional.

Kongres II diselenggarakan pada 14-18 Januari 2005 di Jakarta. Kongres ini memilih lima presidium nasional dan menetapkan Masruchah sebagai Sekjend hasil pemilihan oleh anggota. Zohra Andi

Baso terpilih sebagai Koordinator Presidium Nasional. Dalam Kongres ini juga memutuskan penambahan dua kelompok kepentingan baru yaitu buruh migran dan pemisahan kelompok penyandang cacat (kemampuan fisik yang berbeda) dari kelompok lansia. Kongres ini dihadiri 600 perwakilan dari Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Utara. Koalisi Perempuan Indonesia adalah organisasi perempuan yang berjuang untuk mewujudkan keadilan dan demokrasi dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai dan prinsip kejujuran, keterbukaan, persamaan, kesetaraan, persaudarian (*sisterhood*), kebebasan, kerakyatan, kemandirian, keberagaman, non-sekretarian, non-partisan, nir kekerasan, berwawasan lingkungan dan solidaritas pada rakyat kecil dan yang tertindas.

Disamping itu, Koalisi Perempuan Indonesia juga menolak segala bentuk diskriminasi berdasar jenis kelamin, kelas sosial, agama, kepercayaan, ras, etnis, orientasi seksual, warna kulit, bentuk tubuh, kemampuan fisik yang berbeda (*diffable*), usi, status perkawinan, pekerjaan, pandangan politik, dan perbedaan-perbedaan lainnya, serta merawat lingkungan hidup

b. Visi Misi

Visi

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan *gender* menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab.

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut Koalisi Perempuan Indonesia mempunyai misi menjadi:

- 1) Agen perubahan yang membela hak-hak perempuan dan kelompok yang terpinggirkan.
- 2) Kelompok pendukung sesama perempuan,
- 3) Kelompok pengkaji, pengusul, penekan untuk perubahan kebijakan,
- 4) Pemberdaya hak politik perempuan,
- 5) Motivator dan fasilitator jaringan kerja antar organisasi, kelompok dan individu perempuan,
- 6) Unsur penting dalam gerakan masyarakat sipil untuk keadilan dan demokrasi.

c. Asas dan Tujuan

Asas organisasi ini adalah demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan *gender*, serta keberagaman dengan Feminisme sebagai landasannya. Asas organisasi ini adalah kesetaraan dan keadilan *gender*. Kesetaraan *gender* berarti suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya dalam semua bidang kehidupan. Keadilan *gender* berarti suatu kondisi

adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses kultural dan struktural yang menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi bagi pihak-pihak yang karena jenis kelaminnya mengalami hambatan-hambatan secara struktural maupun kultural.

Asas organisasi berikutnya adalah keberagaman, yang berarti mengakui, menghormati dan merayakan atau mensyukuri adanya perbedaan individu/kelompok atas dasar jenis kelamin, kelas sosial, agama, kepercayaan, ras, etnis, orientasi seksual, warna kulit, bentuk tubuh, kemampuan fisik yang berbeda (*diffable*), usia, status perkawinan dan pekerjaan, pandangan politik dan perbedaan lainnya, menghargai kemajemukan serta merawat kelestarian lingkungan hidup. Landasan Organisasi adalah feminisme yang berarti suatu kesadaran adanya penindasan serta ketidakadilan terhadap perempuan dan bertindak secara terorganisir untuk mengubahh kondisi tersebut. Tujuan Koalisi Perempuan Indonesia untuk mempejuangkan terpenuhinya hak-hak perempuan di bidang Politik, Ekonomi, Hukum, Seksual, Reproduksi, Pendidikan, Agama, Sosial, dan Budaya serta Lingkungan Hidup

9. Gambaran Umum *Women Crisis Center* (WCC) Dian Mutiara

a. Sejarah singkat *Women Crisis Center* (WCC) Dian Mutiara Kota Malang

Pendirian *Woman Crisis Center* awalnya dikarenakan banyak terjadi kekerasan pada perempuan dan anak namun belum banyak lembaga yang memberi pelayanan, maka Bu Sri Wahyu Ningsih, Ibu Mufida, Ibu Uni Hilmi berinisiatif untuk mendirikan *Women Crisis Center*. Untuk nama lembaga Ibu Wahyu memberikan rekomendasi nama DIAN, karena DIAN artinya pelita atau lentera yang memberi penerangan terhadap kegelapan. Ibu Mufida menambahkan MUTIARA, yang berarti permata berkilay, maka lembaga *Woman Crisis Center* (WCC) diberi nama Dian Mutiara. Lembaga dan nama tersebut dideklarasikan pada rapat di Jalan Jombang III A/1 Kota Malang pada tanggal 20 Mei 2002. Sejak saat itu WCC Dian Mutiara menerima klien yaitu perempuan korban kekerasan, baik di rumah tangga maupun di tempat kerja. Layanan pada awalnya berupa layanan hukum yang bersifat gratis hingga sekarang.

Pelayanan yang diberikan selain klien datang, WCC Dian Mutiara juga mensosialisasikan hukum perkawinan, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan lain-lain terkait dengan rumah tangga dan permasalahannya ke masyarakat melalui Radio atau pun ceramah Ibu-Ibu dosen saat mengisi seminar atau workshop di berbagai tempat,

baik di instansi maupun di PKK Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, RT/RW.

Lembaga *Women Crisis Center* mengurus akta pendirian di Notaris Dra. Tuminem, SH pada tahun 2005. Setelah itu WCC Dian Mutiara dipercaya oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan sosialisasi ke berbagai daerah di Jawa Timur dengan dibantu pendanaanya. Setelah selesai menyampaikan laporan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan karena para anggota berhenak, maka ada dana untuk membeli LCD dan Screen. Kemudian WCC dipercaya dan di beri bantuan dana oleh Dirjen Pendidikan Non Formal untuk melatih ibu-ibu di Desa Kedung Salam Kabupaten Malang untuk membuat abon ikan tuna.

Untuk menggalang dana, ibu Wahyu bersama anggota mengajukan proposal kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Masyarakat tentang pendidikan kewirausahaan untuk ibu-ibu rumah tangga RT.09 sampai RT 12 RW 3 Kelurahan Gadang Kasri Kecamatan Klojen. Dari beberapa bantuan dana tersebut, WCC Dian Mutiara dapat membangun ruang kantor dengan luas 45 M di tanah kosong rumah Jalang Jombang IIIA/1 tersebut. Dengan adanya kantor baru walaupun sederhana, WCC Dian Mutiara dapat beraktivitas. Diantaranya adalah sosialisasi Perundang-Undangan. Mengingat jumlah konsultasi yang semakin terbatas, karena ibu-ibu Dosen tersebut mendapat tugas mengajar, meneliti dari Universitasnya masing-masing yang akhir-

akhir ini menerima lebih banyak mahasiswa lagi. Maka WCC Dian Mutiara mengadakan *Traininf of Trainer* hukum dan psikologi dan diumumkan melalui internet yang diselenggarakan dua hari. Yang menndaftar ada delapan orang yang merupakan para sarjana (S1 dan S2) yang sangat berkualitas. Kemudian, 6 orang dari mereka direkrut menjadi konsultan muda di WCC Dian Mutiara. Setelah itu, dengan bekerjasama dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, WCC Dian Mutiara menyelenggarakan Training of Trainer kepada mahasiswa, diantaranya adalah mahasiswa Psikologi Universitas Wisnu Wardana, Universitas Merdeka, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sisi lain, WCC Dian Mutiara juga memberikan penyuluhan hukum di Radio Kanjuruhan pada hari Jum'at pukul 09.00-11.00 WIB. Pemberian peenyuluhan dikaitkan dengan masalah atau kasus aktual misalnya, masalah KDRT, trafficking terhadap TKW maupun Phedofilia. Tahun 2014, WCC Dia Mutiara menjadi salah satu lembaga yang bertugas melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual serta dampingan terhadap kelompok atau jejaring dari program MAMPU kerjasama antara Komnas Perempuan, Rifka Annisa, dan AUSE.

b. Program Women's Crisis Center Dian Mutiara Malang:**1. Layanan Preventif:**

Sosialisasi diskusi komunitas bedah kasus, siaran di radio, kampanye 16 HAKTP (Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan).

2. Layanan Penjagaan terhadap kelompok rentan: anak perempuan, *diffable*, pemulung, perempuan miskin kota.**3. Layanan Penanganan kasus:**

Memberikan pendampingan terhadap korban secara terpadu (aspek hukum, spikososial dan medikolegal) baik litigasi/ jalur hukum dan mediasi/ non litigasi) berjejaring dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan UPPA Polres di Malang Raya`

4. Advokasi Kebijakan Publik:

Penyusunan Peraturan Daerah diantaranya: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 9/2005 tentang Perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan, Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 3/2009 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 2/2013 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

B. Penyajian Data

Perempuan dan politik bukanlah sebuah dua hal yang saling memiliki kekuatan untuk mendominasi. Antara perempuan dan politik tidak ada dominasi atau kediktatoran, hal ini diperkuat dengan pendapat Plato dalam Hidajat (2009:3) yang mengemukakan bahwa “politik merupakan sistem kekuasaan pemerintahan yang dijalankan dan dipegang oleh kaum Aristokrat (kaum bijak) yang dipilih lewat proses keputusan bersama dan di dalamnya tidak ada kediktatoran. Melalui pendapat tersebut, maka politik hadir bukan sebagai dominasi atau kediktatoran melainkan sebagai sebuah cara untuk menjalankan sistem kekuasaan pemerintahan oleh kaum bijak entah jenis kelamin laki-laki atau perempuan.

Antara politik dan perempuan sesungguhnya tidak ada permasalahan, namun budaya dan ketidakpahaman *gender* atau kontruksi masyarakat yang mengerdilkan perempuan agar tidak masuk ke dunia politik. Jika demikian pemahaman partisipasi politik harus mampu dipahami secara luas oleh masyarakat antara laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan bukanlah menjadi sebuah jurang pembeda untuk tidak ikut serta dalam konstelasi partisipasi politik. Menurut Herbert Mc Closky dalam Gatara (2009:309-3011) “partisipasi politik ialah kegiatan sukarela (*voluntary*) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan, penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum”. Sehingga partisipasi politik

ini memiliki makna luas bukan hanya mengenai proses pemilihan (pencoblosan) ketika di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saja, namun juga partisipasi sebelum proses pemilihan berlangsung seperti pembuatan atau perumusan kebijakan umum.

Pembuatan atau perumusan kebijakan (*policy formulation*) yang dilakukan oleh masyarakat merupakan bentuk partisipasi politik. Menurut Thomas R.Dye dalam Widodo (2017:16-17) perumusan kebijakan merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif. Proses perumusan kebijakan yang melibatkan banyak pihak ini merupakan bentuk partisipasi politik. Setelah perumusan kebijakan tentu saja harus ada tindakan nyata untuk melaksanakan kebijakan tersebut atau bisa disebut implementasi kebijakan. Secara sederhana implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses mengefektifkan peraturan ke tindakan secara langsung. Implementasi kebijakan juga merupakan suatu proses menyeluruh yang mengandung banyak kepentingan. Sehingga implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai peraturan yang berisi muatan antara administrasi dan politik. Model implementasi kebijakan yang berhubungan antara administrasi dan politik adalah model implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle. Pendekatannya dikenal dengan nama *Implementation as A Political and Administrative Process*.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dari Merilee S.Grindle ini ditentukan dari dua hal yaitu *Content of Policy* (isi kebijakan) dan *Context of Policy*

(kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan). Pertama melingkupi isi kebijakan. Dalam isi kebijakan, Merilee S.Grindle ini mengemukakan enam variabel yang mempengaruhinya antara lain *interest affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), *type of benefits* (tipe manfaat), *extent of change* envision (derajat perubahan yang ingin dicapai), *site of decision making* (letak pengambilan keputusan), *program implementation* (pelaksana program) dan *resources committed* (sumber-sumber daya yang digunakan).

Kedua adalah *Context of Policy* (kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan) melingkupi *power, interest and strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat), *institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa), dan *compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana). Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung pada *Content of Policy* atau kejelasan isi dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 berdasarkan beberapa variabel model Merilee S.Grindle

1. Isi kebijakan (*Content of Policy*) yang mempengaruhi keberhasilan implementasi meliputi:

a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (*interest affected*)

Kepentingan yang mempengaruhi disini merupakan faktor-faktor tersirat yang melatarbelakangi kebijakan diimplementasikan. Kepentingan bisa berasal dari suatu

individu ataupun kelompok masyarakat. Selain itu kepentingan atau dikatakan prioritas ini memiliki peranan penting dalam penyampaian suatu kebijakan sebelum diimplementasikan. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi inilah yang akan menjadi faktor penentu implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 berjalan dengan baik. Merilee S. Grindle menyatakan bahwa setiap implementasi kebijakan pasti melibatkan banyak kepentingan dan sampai mana kepentingan-kepentingan tersebut mempengaruhi implementasi kebijakakan. Maka dari itu, peran setiap kelembagaan harus mampu memetakan kepentingan-kepentingan yang menjadi faktor berpengaruh dalam diimplementasikan peraturan ini. Terkait kepentingan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 yang salah satu pokoknya mengenai pembahasan 30% keterwakilan perempuan terdapat beberapa kepentingan yang dalam hal ini disebut peran dari kelembagaan sesuai dengan Bab II Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 Peran Kelembagaan yaitu meliputi: Partai Politik, Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Organisasi Kemasyarakatan sehingga jika dipersempit terdapat tiga kelompok yaitu Pemerintah meliputi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana serta Komisi Pemilihan Umum, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan meliputi *Women's Crisis Center* Dian Mutiara dan Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Malang.

1) Kelompok Kepentingan Pemerintah

Kelompok Pemerintah dalam peraturan ini meliputi penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah. Penyelenggara pemilu meliputi Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintah Daerah meliputi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DP3AP2KB Kota Malang. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang Ibu Sri Widayati SE.,Msi menyampaikan bahwa

“Kebijakan ini memiliki kepentingan untuk perempuan di pemilihan umum legislatif 2014 agar lebih di prioritaskan. Dari DP3AP2KB Kota Malang belum melakukan kegiatan dan belum menganggarkan kegiatan untuk itu. Kalau dulu sebelum pemilihan umum 2014 itu pernah melakukan kegiatan, tapi kalau yang kemarin belum ada kegiatan dari DP3AP2KB Kota Malang”. (Hasil wawancara pada tanggal 24 Januari 2018 pada pukul 13.13 WIB).

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga independen negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada pasal 22 E ayat (5) 1945 Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasionalis, tetap dan mandiri. Sehingga KPU menjadi lembaga mandiri dan tidak diikat oleh lembaga manapun. Tugas dari Komisi Pemilihan Umum yang diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- 1) Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- 2) Menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- 3) Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
- 4) Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- 5) Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II;
- 6) Mengumpulkan dan mensistемasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- 7) Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Peraturan tersebut dalam angka (1) Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum memiliki makna bahwa KPU mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi peraturan-peraturan namun Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 ini tidak bisa memerintahkan KPU dalam penyelenggaraan pemilu kecuali ada *Memorandum Of Understanding*. Hal ini dibenarkan karena KPU adalah lembaga independen yang mandiri seperti pasal 22 E ayat (5) UUD

1945. Seperti yang diungkapkan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Divisi Hukum yaitu Bapak Fajar Santosa, SH.MH:

“Sebenarnya peraturan menteri secara tidak langsung tidak masuk dalam perundang-undangan yang menjadi pedoman KPU. Tapi begini KPU menurut konstitusi pada pasal 22, pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Mandiri ini diterjemahkan bahwa produk peraturannya adalah peraturan KPU itu sendiri. Pedoman penyelenggaraan pemilu adalah peraturan KPU itu. Pedoman yang lain menjadi penunjang misal verifikasi ijasah calon maka KPU tunduk pada peraturan pendidikan, mengenai kekayaan calon KPU mengikuti peraturan atau standart Komisi Pemberantasan Korupsi penentuan standar kesehatan mempunyai peraturan sendiri tapi berkonsultasi pada Kementerian Kesehatan. Posisi KPU itu mandiri sehingga relatif mempunyai kemandirian dalam produk-produk hukumnya, tidak boleh ada lembaga negara manapun yang mengikat KPU. Tidak boleh mengikat dan memerintahkan KPU. Kalau dikatakan dalam peraturan ini bahwa KPU wajib membuat peraturan pelaksanaan pemilu yang bisa menjamin terlaksananya kebijakan. Tanpa harus ada peraturan menteri itu sendiri, KPU itu terikat dengan Undang-Undang. Jadi agak *offset* jika peraturan menteri memerintahkan KPU, karena bahasanya wajib disini. Namun berbeda jika kementerian berkoordinasi dengan KPU, itu bahasa *soft* yang bisa diterima dengan nalar hukum. Dalam konteks penganggaran, kita tunduk dengan Kementerian Keuangan. Kalau dalam penyelenggaraan pemilu tidak bisa diikut campur tangani”. (Hasil wawancara tanggal 7 Maret 2017 Pukul 09.20 WIB)

Pendapat yang disampaikan oleh Bapak Fajar menunjukkan bahwa Peraturan Kementerian tidak digunakan sebagai salah satu peraturan yang disosialisasikan karena Komisi Pemilihan Umum hanya melakukan sosialisasikan dari Undang-Undang dan Peraturan KPU. Sedangkan menurut Ibu Sri Widayati dari DP3AP2KB menyampaikan bahwa peraturan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 peraturan ini mempunyai kepentingan agar perempuan lebih

diprioritaskan, namun dari DP3AP2KB belum menganggarkan kegiatan tersebut. Kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa kepentingan yang mempengaruhi adalah untuk perempuan itu namun Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 ini belum bisa dijalankan oleh KPU karena peraturan ini tidak bisa memerintahkan kerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang karena sesuai hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan menteri tidak bisa memerintahkan KPU tanpa adanya perjanjian sedangkan DP3AP2KB Kota Malang belum menganggarkan kegiatan yang berhubungan dengan partisipasi politik pada tahun 2014 padahal jika dilihat dari struktur kepengurusan dari DP3AP2KB Kota Malang sudah ada bidang edukasi dan partisipasi perempuan.

2) Kelompok Kepentingan Partai Politik

Partai Politik sebagai organisasi yang turut serta dalam demokrasi di Indonesia mempunyai peranan penting dalam proses pemilu. Partai Politik tidak dapat dipisahkan dari proses demokrasi di Indonesia hal ini karena peserta dari pemilu terutama pemilihan legislatif harus berasal dari partai politik. Partai Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik adalah

“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan hendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Fungsi dari partai politik adalah sebagai agregasi kepentingan yaitu jembatan antara rakyat dan pemerintahan melalui upaya menampung dan mengombinasikan tuntutan-tuntutan individu-individu dari para anggota masyarakat untuk bisa diwujudkan melalui program dan kebijakan. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 memiliki agregasi kepentingan yaitu sebagai bentuk kebijakan yang mewadahi perempuan agar mampu berpartisipasi di ranah legislatif. Pernyataan ini disampaikan oleh pimpinan salah satu partai politik yaitu Ibu Dr. Ya'qud Ananda Gudban, SS., SST.Par., MM selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disebut DPC dari Partai Hanura Kota Malang mengenai kepentingan yang mempengaruhi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 menyampaikan bahwa

“Peraturan tersebut digunakan untuk mengakomodir kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan perempuan yang belum terjalankan di parlemen karena tidak banyak anggota perempuan di parlemen. Sesungguhnya diharapkan perempuan bisa memahami kebutuhan perempuan”. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 14.02)

Bahwasanya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 pada pasal 1 angka 1 dimaksud dengan tindakan khusus sementara (*affirmative action*) adalah

kebijakan sementara yang dikhususkan untuk perempuan dalam usaha mencapai keadilan gender dan kesetaraan gender bidang politik. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mencapai keadilan gender, hal yang sama disampaikan oleh Bapak Abu Thazid selaku Wakil Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang

“Kalau secara umum kan menginginkan tidak ada diskriminasi perempuan. Padahal malah kami melihat dengan adanya 30% ada diskriminasi karena seakan-akan diatur seperti itu. Meskipun sebenarnya peraturan ini baik tetap menjaga eksistensi perempuan termasuk isu-isu *gender*, kualitas dan marwah perempuan. Jadi menurut saya peraturan ini masih sangat efektif dan sangat cocok untuk diwujudkan dalam perkumpulan politik yang hari ini masih sangat kompleks”. (Hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2018 pada pukul 10.47 WIB)

Pendapat yang selaras jika kepentingan peraturan ini untuk kesetaraan gender adalah Bapak Achmad Anang Fatoni, SE selaku Wakil Sekretaris I DPC Partai Demokrat:

“Satu, jika kita mematuhi peraturan tersebut dan lebih banyak porsinya, sesuai dari awal disampaikan bahwa Partai Demokrat adalah partai terbuka dan modern, kita menginginkan kesetaraan *gender* sehingga tidak ada perempuan yang terbelakang. Kita melihat bahwasanya perempuan dan laki-laki saja serta bisa berperan di semua lini entah di kepengurusan atau legislatif”. (Hasil wawancara pada tanggal 12 Januari 2018 pukul 15.38 WIB)

Kemudian Sekretaris DPC Partai PDIP Perjuangan yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Malang Bapak Drs. Abd. Hakim menyatakan bahwa:

“Saya kira banyak itu kan permasalahan *gender*, bahwa profesi itu tidak harus dikuasai oleh laki-laki. Orang perempuan itu pun bisa bekerja pada tempat-tempat tertentu tergantung pada kemampuan. Akan tetapi tetap ada skala-skala prioritas yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Tetapi di profesi-profesi pemerintahan ini boleh dan setiap perempuan ini bisa

memimpin negara, memimpin daerah, memimpin wilayah. Tidak ada larangan di perundangan untuk itu”. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Januari 2018 pada pukul 09.30 WIB)

Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 sebenarnya untuk masyarakat dan terutama kesejahteraan para perempuan, hal ini diungkapkan oleh Ibu Wiwin Indriani, S.Sos selaku Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Malang:

“Kepentingannya tentu saja suara perempuan mbak, jika peraturan ini diimplementasikan dan perempuan dapat terpilih maka bisa membuat peraturan tentang anti kekerasan perempuan, peraturan perlindungan anak. Jika ada peraturan tersebut dan perempuan di legislatif maka perempuan tidak dintimidasi oleh laki-laki”. (Hasil wawancara pada tanggal 17 Januari 2018 pada pukul 15.54 WIB)

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu Asia Iriani, SE selaku Wakil Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan Nasdem DPRD Kota Malang bahwa sesungguhnya peraturan ini memiliki kepentingan yang mempengaruhi adalah untuk pemberdayaan perempuan itu sendiri

“Saya kan memang belum baca, jadi saya terus terang bahwa saya jadi calon anggota legislatif jadi saya belum detail membaca peraturan tersebut. Kalau menurut saya kepentingannya adalah Pemerintah dan KPU belum maksimal. Jadi banyak perempuan yang tidak paham. Kalau kita sebagai anggota perempuan tidak menyuarakan, masyarakat perempuan juga tidak paham kecuali bidang akademisi yang memang bergerak di bidang perempuan juga. Banyak orang sebagai pengusaha atau kinerja yang lain menganggap bahwa politik itu kotor. Politik itu adalah yang mengatur semua tentang jalannya roda organisasi. Indonesia tidak bisa melepas peran organisasi, bahwa perempuan itu mau tahu dengan politik. Pendidikan, kesehatan dan sebagainya diatur melalui politik”. (Hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2018 pada pukul 16.25 WIB).

Peraturan ini selain untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan namun juga untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan umum. Kepentingan tersebut yang mempengaruhi diimplementasikannya peraturan ini. Jika perempuan banyak di lembaga legislatif maka para perempuan ini yang lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat terutama fokus pada pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga disampaikan oleh Hj. Wiwik Hendra Astuti selaku Wakil Ketua DPRD Kota Malang dari partai Demokrat bahwa

“Menurut saya yah kepentingan di dalam bidang pendidikan itu. Kalau orang sudah menyadari bahwa ada permasalahan tentang pendidikan maka dia sebagai masyarakat umum akan pula sadar akan kesehatan untuk perempuan”. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2018 pada pukul 11.01 WIB)

Bapak Ir. Bambang Sumarto selaku Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang bahwa peraturan ini mempunyai kepentingan yang mempengaruhi yaitu

“Jadi keterwakilan perempuan di legislatif sangat penting, selama ini unsur perempuan dipandang sebelah mata. Contohnya di bidang pemberdayaan perempuan harus paham dengan berbagai permasalahan perempuan seperti kesejahteraan, posyandu dan bayi.” (Hasil wawancara pada tanggal 13 Maret 2018 pada pukul 12.15 WIB) .

Pemilihan keenam partai politik diatas diambil dari duabelas partai politik terpilih yang ada di DPRD Kota Malang dikarenakan keenam partai tersebut yang mempunyai anggota legislatif perempuan. Dari PDIP ada 4 orang, Demokrat dan PPP ada 2 orang, Serta Hanura, Golkar dan Gerindra masing-masing 1 orang. Kesimpulan dari kepentingan yang mempengaruhi di keenam partai politik tentang Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 adalah untuk meningkatkan jumlah perempuan di lembaga legislatif, kesetaraan *gender*, agar perempuan tidak diintimidasi serta jika adanya perempuan di lembaga legislatif maka permasalahan yang dekat dengan perempuan dapat diatasi seperti pendidikan,

kesehataan dan kesejahteraan umum. Padahal menurut peneliti sampai 3 tahun menjabat adanya perubahan secara signifikan belum dirasakan oleh masyarakat Kota Malang dikarenakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan”. belum mampu dirasakan dampaknya oleh masyarakat umum.

3) Kelompok Kepentingan Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 pasal 1 angka (2) Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela, berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi kemasyarakatan ini merupakan organisasi yang bukan hanya bergerak di bidang politik namun juga organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, dimana organisasi ini mampu mendorong para perempuan di masyarakat untuk dapat menjadi kader politik serta menyiapkan diri untuk menjadi perwakilan perempuan dari masyarakat ke lembaga legislatif. Pemilihan organisasi kemasyarakatan di Kota Malang adalah *Women's Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang dan Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Malang.

Koalisi Perempuan Indonesia yang mempunyai visi pada Anggaran Dasar pasal 9 berbunyi “Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera, dan beradab” ini digunakan pandangan organisasi untuk melakukan perubahan demi membela hak-hak perempuan. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 lahir merupakan peraturan yang lahir untuk membela hak-hak perempuan di bidang politik. Kehadiran peraturan ini tentu saja didukung oleh beberapa kelompok kepentingan. Presidium Wilayah Jawa Timur Kelompok Kepentingan Petani dua periode yaitu tahun 2008-2012 dan 2012-2016 Ibu Dwi Retnoningsih SP., MP., MBA menyampaikan bahwa:

“Saya membaca peraturan dari pemerintah yang kuota 30%, kita tahu itu sudah terimplementasi. Pada proses pemilu bahwa minimal kuota 30%, kita sudah berkomunikasi dengan partai politik melihat kesiapan dari masing-masing partai politik. Partai politik merasakan ada kesulitan bahkan ada partai politik memaksakan untuk memenuhi kuota tersebut. Sehingga banyak calon yang tidak memenuhi kapasitas, padahal di luar sana banyak yang memiliki kapasitas. Disini, cuma partai politik belum mampu memfasilitasi perempuan untuk bisa bergabung di partainya melalui pendidikan dan pelatihan. Karena itulah perlu ada kerjasama antara perguruan tinggi dan LSM dalam upaya pendataan untuk potensi menjadi wakil rakyat sehingga bisa merekomendasikan kebijakan, itu *problem* yang pertama. Untuk *problem* yang kedua setelah terpilih menjadi anggota legislatif ternyata memang calonnya pas 30% , yang terpilih perempuan ternyata minim karena pasti hanya 5% atau maksimal 10%. Fenomenanya ketika sudah menjadi wakil rakyat, banyak perempuan yang kurang menyuarakan tentang perempuan dan anak. Pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2013 sebenarnya adalah peraturan yang bagus, tapi ada kurang satu pihak yang belum dilibatkan yaitu perguruan tinggi. Padahal perguruan tinggi mempunyai jurusan ilmu politik yang merupakan cikal bakal artinya secara background mempunyai *basic* pendidikan yang baik. Tapi juga belum tentu orang yang mempunyai

basic pendidikan yang bagus secara formal, belum tentu dia menjadi wakil rakyat yang cukup. Malah ada yang bilang bahwa praktek dan pengalaman adalah yang membuat wakil rakyat baik karena pengalamannya. Paling tidak jika memiliki *background* pendidikan yang baik maka akan memiliki cikal bakal baik sehingga tinggal dicoba pada prakteknya. Maka dari itu di peraturan tersebut kurang satu pihak yang belum disebutkan yaitu perguruan tinggi, didalam peraturan tersebut pemerintah maupun partai politik sudah masuk”.(Hasil wawancara pada tanggal 24 Januari 2018 pada pukul 16.22 WIB)

Pendapat yang disampaikan oleh Ibu Dwi menggambarkan bahwa peraturan ini kurang melibatkan satu kepentingan yaitu pihak perguruan tinggi, padahal pihak perguruan tinggi adalah kelompok akademis yang mampu melahirkan cikal bakal calon legislatif dikarenakan ada jurusan ilmu politik di perguruan tinggi. Adanya perguruan tinggi padahal juga dapat membantu melakukan pendidikan mengenai partisipasi politik. Pendapat berbeda disampaikan oleh Dr. Lucky Endrawarti,SH.,MH selaku pengurus bidang pidana di Women’s Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang bahwa

“Kepentingannya tentu partai politiknya. Ada sesuatu yang tidak ada di Undang-Undang Pemilu yaitu kontrak politik. Jadi kontrak politik nantinya akan ada jaminan untuk pemilih, kepentingannya akan tersalurkan minimal seperti itu. Misalkan ketika dewan memberikan janji-janji politik ketika kampanye lalu ketika sudah menjabat bisa ditagih. Namun di Undang-Undang Pemilu kontrak politik itu tidak ada. Peran partai politik itu sangat besar, jangan sampai perempuan itu dijadikan komoditas politik dan jangan sampai hanya perempuan itu dilibatkan pada momen-momen pemilu”. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Januari 2018 pada pukul 11.28 WIB)

Pendapat yang disampaikan oleh Ibu Lucky mendeskripsikan bahwa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 kepentingan yang mempengaruhi adalah partai politik. Pada peraturan-peraturan terutama Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tidak ada pembahasan mengenai kontrak politik, padahal dengan adanya kontrak politik yang dilakukan oleh calon legislatif ketika masa kampanye dapat ditagih ketika sudah menjabat. Kontrak politik ini yang seharusnya dapat dibuat dalam peraturan untuk mampu menjaga elektabilitas para calon legislatif ketika sudah menjabat. Menurut dua pakar tersebut yang masing-masing menjadi pengurus di organisasi perempuan memiliki pandangan yang berbeda mengenai kepentingan yang mempengaruhi di satu sisi dari peraturan ini memiliki kelemahan yaitu belum dimasukkannya keterlibatan perguruan tinggi sedangkan di satu sisi peraturan ini merupakan kepentingan dari partai politik dan perlu adanya kontrak politik dalam masa kampanye untuk menyakinkan masyarakat terhadap calon legislatif yang dipilihnya.

b. Tipe Manfaat

Grindle menyatakan pada poin *content of policy* berupaya untuk menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan ketika hendak pelaksanaan kebijakan. Adanya peraturan ini agar perempuan mampu untuk memrepresentasikan suara keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, pernyataan ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Calon Walikota Malang periode 2018-2022 atau Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Malang yaitu Ibu Dr. Ya'qud Ananda Gudban, SS., SST.Par., MM menyampaikan bahwa

“Peraturan tersebut dibuat untuk memberi ruang kepada perempuan yang besar, artinya kalau diberi kesempatan yang normal cenderung agak sulit karena dunia ini dari dulu dianggap dunia laki-laki. Sehingga perlu percepatan dengan diberinya peraturan tersebut” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 14.02).

Selaras dengan pendapat tersebut Ibu Asia Iriani, SE selaku Wakil Ketua Fraksi

Persatuan Pembangunan Nasdem DPRD Kota Malang menyampaikan bahwa

“Kalau bermanfaat otomatis bermanfaat, bermanfaat itu antara peraturan itu atau usaha perempuan itu sendiri. Tetapi kalau dilindungi peraturan, semua masyarakat dilindungi oleh Undang-Undang. Kalau Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini perempuan harus diikutsertakan. Tapi sebenarnya ini tidak adil, kenapa perempuan hanya diberikan kuota 30% sedangkan jumlah penduduk Indonesia itu 50% lebih adalah perempuan. Jadi wakil rakyat adalah mewakili suara rakyat, kalau 51% penduduk perempuan maka anggota legislatif juga harus banyak perempuan. Diberikan kuota 30% tapi perempuan tidak memanfaatkan dan kalah bersaing dengan laki-laki”. (Hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2018 pada pukul 16.25 WIB)

Dampak positif juga ditunjukkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 bahwa kebijakan ini dapat memberikan manfaat untuk perempuan di Indonesia dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan umum. Menurut bendahara Partai Demokrat Kota Malang Hj. Wiwik Hendra Astuti yang juga menjabat Wakil DPRD Kota Malang menyampaikan bahwa “Untuk implementasinya kebermanfaatannya untuk pendidikan dan kesehatan”. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2018 pada pukul 11.01 WIB). Sejalan dengan pendapat tersebut, Bapak Ir.Bambang Sumarto Ketua Komisi C DPRD Kota Malang dan juga yang menjabat menjadi kader partai Golkar bahwa manfaat yang dihasilkan dari peraturan ini adalah “fungsinya untuk menyuarkan kepentingan perempuan itu sendiri” (Hasil

wawancara pada tanggal 13 Maret 2018 pada pukul 12.15 WIB). Selain dari sisi partai politik, kebermanfaatan peraturan ini juga berdampak pada organisasi kemasyarakatan, Presidium Wilayah Jawa Timur Kelompok Kepentingan Petani dua periode yaitu tahun 2008-2012 dan 2012-2016 Ibu Dwi Retnoningsih SP., MP., MBA menyampaikan bahwa

“Memang lebih baik peraturan ini diatur, kalo tidak diatur maka akan bebas perempuan yang menjadi legislatif misal 1 atau 2 bahkan tidak ada sama sekali. Tapi, saya melihat bahwa beberapa partai politik tidak perlu saya sebutkan yang memang sudah mempunyai berspektif *gender*. Di partai politik memang sangat penting untuk berkembang bahwa dalam keanggotaan harus ada laki-laki dan perempuan, tapi ada partai politik yang tidak memiliki anggota seperti itu. Sampai sekarang yang menjadi permasalahan politik adalah harus memiliki modal besar dan yang memiliki modal besar adalah laki-laki, baik biaya kampanye maupun pemilihan dsb. Sehingga dengan modal yang besar inilah yang terkadang membuat perempuan enggan di politik. Jadi tinggal bagaimana partai politik menjadikan peraturan tersebut bukan sebagai ancaman tapi mendorong agar perempuan mau masuk dalam politik”. (Hasil wawancara pada tanggal 24 Januari 2018 pada pukul 16.22 WIB)

Kebermanfaatan suatu kebijakan harus mampu dihasilkan dengan baik sehingga permasalahan di masyarakat dapat diselesaikan. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 harus mampu mengatasi permasalahan *subordinasi* yang melekat kepada perempuan bahwa perempuan menjadi nomor dua di lembaga legislatif. Partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif akan menentukan diwakilinya suara perempuan yang selama ini masih mengalami diskriminasi. Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai PDIP Kota Malang yaitu Bapak Drs. Abd Hakim mengungkapkan bahwa

“Tidak ada persoalan sebenarnya, kembali kepada pemimpin dari partai politik atau kembali kepada calon-calon legislatif agar diberi kesempatan yang sama. Bahkan lebih dari peraturan tersebut dijamin lagi keterwakilan-keterwakilan perempuan itu” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Januari 2018 pada pukul 09.30 WIB).

Sementara itu menurut bu Wiwin Indriani, S.Sos selaku Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Malang bahwa “peraturan ini bermanfaat agar nantinya mampu melindungi para kaum perempuan dari penindasan” (Hasil wawancara pada tanggal 17 Januari 2018 pada pukul 15.54 WIB). Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Malang divisi Umum, Keuangan dan Logistik Ibu Aminah Asminigtyas, SP. menyampaikan bahwa

“Bunyi Undang-Undang itu memberikan ruang kepada perempuan dan bisa dioptimalkan perempuan di partai politik maka yang diberikan keuntungan adalah perempuan itu sendiri. Sehingga wakil perempuan itu bisa menyuarakan suara perempuan, itu adalah harapannya. Kalau yang dipermasalahkan oleh masyarakat perempuan tidak terpenuhi haknya maka dicari wakil perempuan yang bisa memahami hal tersebut dan mencari partai yang bisa berafiliasi. Kemudian dari idealisme-idealisme, maka partai itu yang akan mengusung. Jadi partai itu yang akan mengusung perempuan tersebut dan bisa memperjuangkan suara tadi”. (Hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2018 pukul 11.00 WIB)



Gambar 12: Seminar Peran Perempuan Jelang Pilkada Kota Malang

Sumber: kpud-malangkota.go.id (Diakses 29 Maret 2018 pukul 21.02)

Kebijakan ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, Bapak Achmad Anang Fatoni, SE selaku Wakil Sekretaris I Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Malang mengemukakan bahwa “Satu jika kita mematuhi peraturan tersebut dan lebih banyak porsinya, sesuai di awal bahwa Partai Demokrat adalah partai terbuka dan modern, kita menginginkan kesetaraan *gender* sehingga tidak ada perempuan yang terbelakang. Kita melihat bahwasanya perempuan dan laki-laki saja serta bisa berperan di semua lini entah di kepengurusan atau legislatif. (Hasil wawancara pada tanggal 12 Januari 2018 pukul 15.38 WIB). Kebijakan dibentuk tentu saja harus memenuhi asas kebermanfaatan sehingga ketika pelaksanaannya tidak menjadi kebijakan yang gagal atau tidak bermanfaat untuk masyarakat. Juru bicara Anggota DPRD Fraksi Persatuan Pembangunan Nasdem yaitu Bapak Abu Thazid mengungkapkan bahwa

“Tetap bermanfaat peraturan ini, karena Undang-Undang disusun atas asas *utility*/asas kebermanfaatan lalu ada kebermanfaatan sosial. Tetap secara sosial ada kebermanfaatan karena memberi ruang yang lebar bagi perempuan untuk bisa ikut konstelasi di daerah-daerahnya dalam politik apapun. Sekarang banyak pimpinan daerah itu perempuan. Jadi tidak bermasalah dan masih sangat bermanfaat peraturan ini sehingga tetap dibutuhkan”. (Hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2018 pada pukul 10.47 WIB)

Kebijakan selain memiliki dampak positif namun juga memiliki kelemahan dalam kejelasan isi dan pelaksanaannya. Pelaksanaan kebijakan ini memiliki faktor penghambat seperti kurang sinkronisasi dari pihak-pihak yang terlibat sehingga dapat mengurangi nilai kebermanfaatannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013. Kurang sinkronisasi pihak-pihak disampaikan oleh Bapak Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Divisi Hukum yaitu Bapak Fajar Santosa, SH.MH mengemukakan bahwa

“Kalau bermanfaat ada, yaitu pemberdayaan perempuan di legislatif. Perlu ada sinkronisasi dengan peraturan lain. Perlu ada pembuatan MOU atau *Memorandum of Understanding* jika memang berkoordinasi dengan KPU. Hakim dan kejaksaan saja tidak bisa memerintahkan KPU begitu juga kepolisian, kecuali ada permasalahan. Harusnya kementerian bahasanya jangan ‘wajib’ tetapi melakukan dorongan untuk bekerja sama, kecuali menyuruh partai politik karena parpol adalah badan hukum yang tunduk pada peraturan perundang-undangan”. (Hasil wawancara tanggal 7 Maret 2017 Pukul 09.20 WIB)

Kurang bermanfaatnya kebijakan ini juga disampaikan oleh Pengurus Bidang Hukum Pidana Women’s Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang Dr. Lucky Endrawarti,SH.,MH yang juga dosen bidang hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

“Ketika berbicara kelembagaan kita harus memahami bahwa di Kementerian saja tidak ada alur yang jelas tentang peningkatan atau pemberdayaan peran perempuan di politik. Antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Sosial dan Menko. Dalam perempuan di politik di Bidang Kementerian Hukum dan HAM itu tidak ada koordinasi yang bagus. Membuat peraturan itu ada anggarannya, jika kementerian itu tidak mampu membuat anggaran maka kementerian itu akan dicap tidak bisa menyerap anggaran. *Mainstream* seperti ini kan menjadi tidak bagus. Kalau kementerian tidak bisa menyerap anggaran lalu kinerja yang dilakukan juga tidak ada. Peraturan ini sebenarnya bisa dikerjakan bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Sosial dan Menko agar koordinasinya lebih bagus serta terarah. Bahasa Peraturan itu terlalu idealis dan kaku, jadi nanti pendanaan sedikit-sedikit APBN atau APBD. Parameter melakukan kegiatan itu belum jelas. Ukuran keberhasilan juga belum jelas. Jadi peraturan ini hanya memperlihatkan yang bagus, dunia Undang-Undang itu semua bagus tapi sulit untuk diterjemahkan dan diterapkan. Seharusnya peraturan sekelas menteri harusnya peraturan itu bersifat teknis misalnya peningkatan panduan partisipasi politik melalui kegiatan a, b, c dst. Bahasa yang digunakan ini adalah bahasa Undang-Undang, seharusnya peraturan menteri itu teknis. Di struktur yang lebih rendah yaitu P2TP2A ataupun dinas terkait penanganan terlalu lama itu yang terjadi di tingkat daerah. Bahasa peraturan ini terlalu kaku dan dibaca oleh masyarakat biasa di daerah terlalu sulit. Kembali lagi bahwa peraturan ini bagus namun harusnya bukan peraturan menteri melainkan peraturan bersama sehingga pihak terkait yang di daerah bisa bekerjasama. Sekali lagi bahwa peraturan ini seharusnya peraturan bersama

dengan KPU, Bawaslu dll, jika seperti ini saja maka peraturan ini lemah. Peraturan ini terlalu bagus, sehingga hasil yang bagaimana yang diminta. Tidak jelas peraturan ini apabila diterapkan di daerah. Kalau menurut saya tidak bermanfaat peraturan ini. Peraturan ini bersifat sektoral dan di daerah terdapat ego kelembagaan untuk mengatasi permasalahan. Implementasinya di daerah kurang bermanfaat karena peran kelembagaan belum jelas, misal di dinas perempuan belum tentu mereka bisa menjawab” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Januari 2018 pada pukul 11.28 WIB)

Jenis manfaat yang dihasilkan dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 menunjukkan dampak positif namun disisi lain suatu kebijakan pasti memiliki kelemahan baik dari kejelasan isi maupun pada pelaksanaan kebijakan. Manfaat dari kebijakan ini harus lah selaras dengan Bab V bagian Strategi dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 yaitu sesuai dengan tahapan sebelum, saat dan setelah pemilu. Manfaat dari peraturan ini jika sebelum pemilu ada untuk mendorong beberapa lembaga untuk melakukan sosialisasi pentingnya keterwakilan perempuan namun menurut salah satu pendapat diatas bahwa peraturan ini kurang bermanfaat karena ketidakjelasan peran kelembagaan juga belum jelas. Selama pemilu yaitu pada proses pendaftaran mampu mendorong setiap partai politik untuk mengikutsertakan 30% perempuan dalam daftar calon anggota legislatif dan juga bisa mendorong terpilihnya anggota legislatif perempuan maka kebermanfaatan ini nampak karena telah terwakilkan suara perempuan dilembaga legislatif dengan jumlah 9 orang, walaupun sebenarnya anggota DPRD perempuan ada 11 orang namun 2 orang anggota

perempuan adalah hasil pergantian dari anggota DPRD Kota Malang yang meninggal dunia.

Tabel 3
Daftar Calon Terpilih Perempuan Anggota DPRD Kota Malang

No .	Nama Partai Politik	Nama Lengkap	Daerah Pemilihan
1.	Demokrat	Hj. Wiwik Hendri Astuti	Kecamatan KedungKandang
2.	PDI Perjuangan	Tutuk Hariyani	Kecamatan Sukun
3.	Hanura	Dr. Ya'qud Ananda Gudban, SS, SST.Par, MM	Kecamatan Sukun
4.	Gerindra	Dra. RM. Een Ambarsari	Kecamatan Sukun
5.	Partai Persatuan Pembangunan	Asia Iriani, SE	Kecamatan Sukun
6.	Golkar	Rahayu Sugiarti, S.Sos	Kecamatan Klojen
7.	PDI Perjuangan	Tri Yudiani, S.Sos	Kecamatan Blimbing
8.	PDI Perjuangan	Erni Farida	Kecamatan Blimbing
9.	Partai Persatuan Pembangunan	Dra. Hj. Heri Pudji Utami	Kecamatan Blimbing

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Malang (dimodifikasi)

Tabel 4
Anggota DPRD Perempuan Kota Malang hasil dari pergantian

No .	Nama Partai Politik	Nama Lengkap	Daerah Pemilihan
1.	PDI Perjuangan	Diana Yanti,SAB	Kecamatan Sukun
2.	Demokrat	Hj,Sulik Lestyowati, SH,MH	Kecamatan Sukun

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Malang (dimodifikasi)

Kedua nama anggota DPRD Kota Malang tersebut tidak termasuk sebagai anggota pemenang suara pemilihan umum legislatif KotaMalang. Pemilihan Ibu

Diana Yanti, SAB dikarenakan mengganti Bapak Drs. Eka Satriya Gautama, SH, MM karena meninggal dunia. Menurut Ibu Shanty dari DPC Demokrat Malang bahwa “untuk pemilihan Bu Hj.Sulik Lestyowati, SH, MH menggantikan Bapak Dr.H. Christina F. dikarenakan Bapak Dr.H.Christea F. terkena kasus pada saat kampanye, jadi perolehan suara urutan nomer 2 yang naik yaitu Hj. Sulik Lestyowati,SH,MH yang mendapatkan suara 1753 dan Bapak Dr.H. Christera F mendapatkan 2.521 yang mendominasi perolehan suara di Kecamatan Sukun.

Kebermanfaatan peraturan ini yaitu untuk memberikan ruang kepada perempuan di lembaga legislatif. Selain itu menurut berbagai pendapat kebermanfaatan peraturan ini jika perempuan sudah di lembaga legislatif maka berguna untuk memformulasikan regulasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umum. Adanya penganggaran terhadap kebutuhan-kebutuhan perempuan. Namun pada kenyataannya menurut peneliti DPRD perempuan belum mampu untuk membuat peraturan yang pro dengan perempuan. Hingga sampai saat ini hanya ada satu peraturan yaitu “Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan”. Selain itu dari segi pengawasan dengan dibentuknya regulasi “Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan” belum mampu melakukan penyusunan hak interpelasi untuk meminta kepada pemerintah untuk memberikan bantuan cepat tanggap kepada korban kekerasan.

c. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Setiap kebijakan tentu saja mempunyai sasaran, target dan tujuan yang hendak dicapai. Grindle menyatakan dalam poin *Content of Policy* yang ingin dijelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Maksud dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 pada pasal 3 berbunyi bahwa

“Maksud penyusunan Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif adalah sebagai acuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar program dan kegiatan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif mencapai hasil yang telah ditetapkan”.

Dewasa ini, penjelasan dari maksud penyusunan peraturan ini sudah jelas bahwa sebagai acuan untuk Pemerintah melakukan peningkatan partisipasi politik perempuan. Walaupun di pasal 3 disebutkan untuk acuan Pemerintah namun pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 Bab II juga menyebutkan peran kelembagaan lainnya yaitu partai politik, penyelenggara pemilu dan organisasi kemasyarakatan. Sehingga penyusunan kebijakan ini mencakup kelembagaan yang luas untuk bisa diterapkan. Tujuan peraturan ini disebutkan pada pasal 4 bahwa “Tujuan Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif adalah untuk membantu penyusunan program dan kegiatan peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif agar lebih sistematis, terukur, dan akuntabel”. Demi

mencapai tujuan tersebut maka perlu dilihat derajat perubahan yang dicapai ketika peraturan tersebut diimplementasikan yaitu ketika anggota legislatif perempuan terpilih sudah menjabat selama 3 tahun di DPRD Kota Malang. Perubahan dengan adanya jumlah perempuan 11 orang di lembaga legislatif harus mampu membuat masyarakat merasakan dampak adanya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Bapak Abu Thazid selaku Wakil Sekretaris Partai Persatuan Pembangunan dan Juru bicara Anggota DPRD Fraksi Persatuan Pembangunan Nasdem menyampaikan bahwa ada perubahan di masyarakat dengan adanya 2 anggota perempuan dari partai PPP di lembaga legislatif yaitu Ibu Asia Iriani, SE dan Bunda Dra.Hj Heri Pudji Utami, M.AP. Bapak Abu Thazid mengemukakan bahwa

“Ada perubahan yang sangat signifikan. Jadi saya sebagai staf ahli, menyusun pendapat umum serta pendapat ahli dan diajak diskusi ketika ada pembahasan-pembahasan khusus di dewan butuh berlatar belakang keilmuan karena saya juga berlatar belakang akademisi yang hari ini belajar berpolitisi. Jadi sangat diakui bahwa satu fraksi PPP dan Nasdem ada di tahap oposisi, karena kita tidak mau terjebak di fragmen-fragmen politik praktis yang diatur oleh eksekutif dan legislatif lainnya. Kita tetap berkonsentrasi untuk kepentingan rakyat. Coba tanyakan pada dewan-dewan yang lain, fraksi PPP dan Nasdem selalu konsisten menyuarakan tentang hal-hal yang tidak pernah dianggarkan seperti kesehatan di RSUD bahwa PPP sangat menekan serta kritis, kedua tentang DINIAH yaitu pendidikan formal dan ilmiah bahwa kesetaraan pendidikan sangat diperjuangkan apalagi yang paling menyuarakan adalah ketua fraksi yaitu Bunda Heri, kalau permasalahan anggaran adalah Bu Asia. Jadi kedua beliau ini adalah menjadi tim pemikir di fraksi selain saya juga memberikan tulisan-tulisan saya. Bunda Heri dan Bu Asia memberika *pressure* kepada saya. Jadi kita (PPP) harus berada pada satu titik, kalau pemerintah baik kita apresiasi tapi kalau memang harus ada hal-hal yang harus dikritisi maka di kritisi habis-habisan karena ini semua demi kepentingan rakyat Kota Malang. Menurut saya dua orang ini adalah srikandi, srikandi yang sangat tangguh atas segala tekanan. Ketika hari ini ada isu gonjang-ganjing KPK, relatif partai kami adalah partai yang tidak tersentuh. PPP masih kategori rendah, ada satu dua orang. Tapi kami saat ini dengan Bapak Muhammad Romahurmuziy sampai ke

bawah benar-benar penataan integritas. Kalau dulu ada Bapak Surya Darma Ali, namun sejak itu dosa-dosa itu kami perbaiki karena itu kami sempat down apalagi permasalahan penipuan jadi hari ini kami benar-benar memperbaiki total. Dua srikandi ini sangat signifikan menjadi nafas dan ruh partai”. Hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2018 pada pukul 10.47 WIB)

Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang Ibu Sri Widayati SE.,Msi menyampaikan bahwa

“Sosialisasi penyuluhan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang dalam peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik mendapatkan apresiasi dari lembaga legislatif”. (Hasil wawancara pada tanggal 24 Januari 2018 pada pukul 13.13 WIB)

Penyusunan suatu kebijakan tentu saja karena ada permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga perlu adanya regulasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka ketika peraturan diimplementasikan tentu harus ada perubahan yang dirasakan masyarakat. dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 untuk mendukung peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif. Saat peraturan sudah diimplementasikan pada tahun pemilihan umum tahun 2014 di Kota Malang maka terpilih 11 orang perempuan di lembaga legislatif dari 132 orang calon legislatif perempuan yang masuk dalam daftar calon tetap. Sudah 3 bertahun jalan maka tentu saja harus ada perubahan yang dihasilkan. Bapak Achmad Anang Fatoni,SE selaku Wakil Sekretaris I Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Malang menyampaikan bahwa ada perubahan yang dialami yaitu yang dilakukan oleh Ibu Hj. Sulik Lestyowati, SH,M.Hum selaku Ketua Pansus Peraturan Kawasan Tanpa

Rokok (KTR) DPRD Kota Malang dan juga sebagai Wakil Ketua II DPC Partai Demokrat Kota Malang menyampaikan bahwa

“Kita sebagai partai modern dan terbuka, sebelum ada peraturan pun , kita sudah memberikan kesempatan kepada para perempuan untuk ikut berpartisipasi di organisasi. Kalau ada perubahan pun tidak signifikan jika perempuan di legislatif. Dari awal kita sudah memberikan porsi seimbang antara perempuan dan laki-laki. Kalau sekarang Bu Sulik dari Partai Demokrat kan ketua Pansus Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Jadi sebenarnya untuk Peraturan Daerah Inisiatif Kawasan Tanpa Rokok, saya sebagai laki-laki menyetujui karena ada ketergangguan terhadap asap rokok baik laki-laki atau perempuan. Masyarakat lebih nyaman akan ada kawasan tanpa merokok, nanti justru yang tidak nyaman adalah para perokok”. (Hasil wawancara pada tanggal 12 Januari 2018 pukul 15.38 WIB).



Gambar 13 : Rapat Paripurna DPRD Kota Malang pembahasan Kawasan Tanpa Rokok

Sumber: <http://malangkota.go.id/2018/01/04/perda-cagar-budaya-dan-ktr-kota-malang-disahkan/> (Diakses pada 29 Maret 2018 Pukul 21.06)

Presidium Wilayah Jawa Timur Cabang Perempuan Indonesia Kelompok Kepentingan Petani dua periode yaitu tahun 2008-2012 dan 2012-2016 Ibu Dwi Retnoningsih SP., MP.,MBA yang sekarang menjabat sebagai anggota biasa kelompok kepentingan Petani Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Malang mengemukakan bahwa

“Koalisi Perempuan Indonesia bukan hanya di Kota Malang saja tetapi juga di daerah lain mencoba melakukan pendekatan bukan ingin mendikte tetapi lebih memberikan masukan. Terus terang kalau di Kota Malang berjejaring dengan anggota DPRD belum maksimal. Kalau di Provinsi Jawa Timur dan beberapa wilayahnya kita Koalisi Perempuan Indonesia sudah berjejaring. Di beberapa kegiatan KPI, selain mengundang eksekutif kita juga mengundang legislatif terutama yang perempuan namun bila tidak ada, kita dari KPI menggunakan laki-laki yang mempunyai perspektif perempuan dan anak. Namun mereka tidak mudah menerima kami karena kami dianggap LSM atau sebagai titik kontrol mereka, kami juga dianggap mencari kekurangan-kekurangan mereka. Sebenarnya pernah saat kami undang kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional, mereka dikenalkan dan dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Dari hasil kegiatan pertemuan tersebut, respon dari mereka sangat baik. Tujuan dari KPI adalah untuk memberikan masukan yang membuat mereka beranggapan ternyata ini sangat penting sehingga bisa menjadi bahan mereka untuk sidang paripurna atau sidang yang lainnya di DPR. Apalagi yang perempuan jika mengetahui sesuatu yang baru dan mereka bisa membawanya, mereka akan cukup senang. Maka dari itu, ini adalah strategi kami juga melakukan kegiatan lalu melibatkan mereka. Minimal kita sudah *open mind* dengan anggota DPR, karena selama ini sebelum-sebelumnya kita datang seakan-akan kita ingin menghakimi. Saat kita sudah melibatkan, kita mau berperan seperti apa mereka sudah mengerti. Lalu perkembangan dari tahun ke tahun mulai terbuka, yang awalnya kita dianggap mau ikut campur. Lambat laun, mereka sudah mau menerima kami dengan strategi melibatkan mereka dalam kegiatan kami”. (Hasil wawancara pada tanggal 24 Januari 2018 pada pukul 16.22 WIB).

Menurut Bapak Drs. Abd. Hakim selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selanjutnya disebut Partai PDIP menyampaikan bahwa

“Adanya Perubahan yang dialami ketika 3 tahun berjalan dengan adanya anggota legislatif perempuan aspirasi perempuan terus disampaikan dan diperjuangkan. Paling tidak mereka mewakili kader-kader perempuan. Hal ini sudah menunjukkan bahwa PDI Perjuangan memberikan kesempatan yang sama dan dia ternyata dipilih oleh masyarakat” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Januari 2018 pada pukul 09.30 WIB)

Sementara itu, menurut Ibu Asia Iriani, SE selaku Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengemukakan

“Saya baru masuk periode ini jadi untuk perubahan yang signifikan saya belum bisa berpendapat, tapi kira-kira dalam DPRD Kota Malang teman-teman anggota DPRD lainnya insyallah mendukung laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Selain itu kita antar anggota DPRD saling mendukung satu sama lain. Kebetulan saya anggota komisi di Bidang B bagian perekonomian, yang membidangi tentang perempuan adalah Komisi D. Sehingga untuk Perda tentang Perempuan adalah Komisi D dan yang lebih paham adalah Bunda Heri. Saya kurang faham peraturan tersebut adalah hak inisiatif atau bagaimana”. (Hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2018 pada pukul 16.25 WIB)

Perubahan harus bisa dilakukan oleh anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Malang. Perempuan yang lebih mampu merasakan permasalahan kehidupan rumah tangga sehari-hari sehingga perempuan juga yang mampu memperjuangkan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi seperti pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan umum merupakan permasalahan yang kompleks untuk segera dicarikan solusinya. Partai Golkar dengan hanya memiliki satu anggota perempuan di legislatif ingin memperjuangkan bidang kesehatan yang saat ini ada permasalahan tentang honor dari ibu-ibu pekerja di posyandu. Menurut Bapak Ir. Bambang Sumarto selaku Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang

“Tentu saja ada perubahan dengan adanya anggota legislatif perempuan dari Partai Golkar di DPRD Kota Malang walaupun hanya satu yaitu Ibu Rahayu Sugiarti. Ketika permasalahan honor kader posyandu yang akan dihapus, lalu pada saat rapat DPRD Kota Malang, hanya Partai Golkar yang memperjuangkan agar honor kader posyandu tidak terhapus terutama Bu Rahayu. Selain itu yang diperjuangkan Ibu Rahayu dan Partai Golkar adalah makanan balita ketika pemeriksaan di Posyandu agar hanya tidak kue Marie saja,

melainkan perlu diganti juga”. (Hasil wawancara pada tanggal 13 Maret 2018 pada pukul 12.15 WIB).

Selain di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan umum tentu saja dampak perubahan dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 juga pada bidang politik yaitu bertambahnya perempuan di partai politik. Hal ini dibenarkan oleh pendapat dari Ketua DPC Partai Hanura Kota Malang Ibu Dr. Ya’qud Ananda Gudban, SS., SST.Par., MM mengemukakan bahwa “Adanya perempuan di lembaga legislatif tentu saja ada derajat perubahan yaitu semakin banyak perempuan yang ikut di partai politik” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 14.02). Namun di sisi lain peraturan ini tidak mampu membuat derajat perubahan dikarenakan partai politik sekedar hanya ingin mengikuti peraturan saja bukan benar ingin melakukan peningkatan partisipasi politik perempuan. Hj. Wiwik Hendra Astuti selaku Wakil Ketua DPRD Kota Malang dari Partai Demokrat mengemukakan bahwa

Adanya peraturan ini tentu saja mempunyai dampak perubahan. Dampak dari peraturan ini yaitu jumlah pengurus perempuan di partai demokrat Kota Malang lebih dari 30%. Maka dari jumlah tersebut insyallah akan lebih ditingkatkan lagi jumlah perempuan di Partai Demokrat agar lebih sejajar”. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2018 pada pukul 11.01 WIB)

Menurut Dr. Lucky Endrawarti, SH., MH selaku pengurus bidang hukum pidana di Women’s Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang berpendapat bahwa

“Karena partai politik tidak mempunyai visi yang menjadikan perempuan sebagai isu strategis maka gara-gara adanya Undang-Undang partai politik maka para partai politik mau untuk memasukkan perempuan di lembaga legislatif. Peraturan ini bukan *bottom up* tapi *top down*. Ini semua hanya pesanan saja, coba kalo posisinya diganti maka akan kembali lagi peraturannya. Saya tidak yakin semua partai politik memiliki *mainstream* yang jelas untuk menempatkan perempuan di masyarakat”. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Januari 2018 pada pukul 11.28 WIB)

Berbagai pendapat diatas menunjukkan bahwa sebenarnya perubahan itu ada, dengan adanya 11 anggota legislatif perempuan di DPRD Kota, namun sebenarnya

jumlah itu sama dengan keterwakilan perempuan pada tahun 2009-2014. Pendapat berbeda disampaikan oleh Dr. Lucky Endrawarti,SH.,MH selaku pengurus bidang hukum pidana di Women's Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang bahwa partai politik belum memiliki *mainstream* yang jelas untuk menempatkan perempuan di masyarakat, sehingga belum ada perubahan yang signifikan ditunjukkan oleh DPRD Kota Malang. Pendapat tersebut benar adanya bahwa partai politik hanya menaati peraturan saja untuk memasukkan perempuan di anggota legislatif, bukan memang partai politik memahami tentang pentingnya perempuan di legislatif. Sehingga menurut peneliti bahwa derajat perubahan agar partai politik memiliki *mainstream* perempuan yang jelas. Sementara itu pendapat lain disampaikan bahwa dengan adanya anggota perempuan di lembaga legislatif ada perubahan yaitu memperjuangkan anggaran tentang kesehatan di RSUD, adanya honor untuk ibu-ibu posyandu, dan pembuatan perda Kawasan Tanpa Rokok yang ketuanya pansusnya perempuan yaitu Ibu Hj Sulik Lestyowati, SH.MH serta pembuatan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan” Menurut pendapat peneliti bahwa sampai sekarang anggota legislatif perempuan belum berusaha secara maksimal untuk mengawasi kinerja pemerintah sehingga balita di posyandu masih diberi kue *marie*/biskuit.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, karena pengambilan keputusan akan menentukan tindakan yang akan diambil ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Grindle mengemukakan bahwa dalam pengambilan keputusan harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Penentuan pengambilan keputusan ini akan berdampak pada citra organisasi, dikarenakan ketika pengambilan keputusan ini salah maka citra dari

organisasi tersebut juga tercemar. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 dimana kebijakan ini dibuat oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibawah kepemimpinan Menteri Linda Amalia Sari. Peran kelembagaan yang tertera pada peraturan tersebut masing-masing memiliki manfaat dalam pelaksanaanya, letak pengambilan keputusan dari kelembagaan tersebut yang akan juga menentukan sejauh mana partisipasi politik perempuan di Kota Malang. Pengambilan keputusan pada kelembagaan jika menurut struktural akan diputuskan melalui ketua pimpinan saja. Namun hal yang berbeda yang dilakukan oleh Partai Demokrat, sebagai partai modern dan terbuka, pengambilan keputusan dalam implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 ditentukan melalui rapat internal Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Malang. Bapak Achmad Anang Fatoni, SE selaku Wakil Sekretaris I Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Malang berpendapat bahwa

“Dari rapat internal Dewan Pimpinan Cabang akan menentukan siapa saja yang menjadi wakil perempuan di lembaga legislatif. Jika suatu daerah pemilihan (dapil) tidak mempunyai kuota 30% perempuan, kita carikan dapil lain atau cari yang kira-kita berpotensi. Contoh dari Dapil Klojen kemarin pada tahun 2014, yang diambil kader dari Dapil Sukun. Kita berikan keleluasaan kepada kader dapil mana yang mau dikerjakan, kalau kurang kita tawarkan ke dapil-dapil lain”. (Hasil wawancara pada tanggal 12 Januari 2018 pukul 15.38 WIB)

Abu Thazid selaku Wakil Sekretaris Partai Persatuan Pembangunan dan Juru bicara Anggota DPRD Fraksi Persatuan Pembangunan Nasdem mengemukakan bahwa

“Jadi istilah kami Bunda Heri Pudji Utami adalah orang yang demokratis. Ketika ada kebijakan penentuan pilkada maka budaya kami di Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang hari ini ada namanya kerja, ada namanya rapat. Di dalam segala hal kita diskusikan dengan DPC, PAC tingkat kecamatan, tim *cyber*, tim litbang lalu kita ajukan ke DPD tingkat Jawa Timur. Jadi mulai hari ini sistem kebijakan Bunda Heri menggunakan sistem diskusi dan tidak pernah menggunakan sistem otoriter. Pengambilan keputusan selalu diskusikan walaupun masalah sekecil apapun”. (Hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2018 pada pukul 10.47 WIB).

Ibu Wiwin Indriani, S.Sos selaku Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Malang menyampaikan bahwa

“Di kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Malang apabila ada pengambilan keputusan dalam berbagai hal termasuk mengenai keterwakilan perempuan di lembaga legislatif antara calon legislatif perempuan dan pengurus dilakukan di rapat kepengurusan Partai Gerindra”. (Hasil wawancara pada tanggal 17 Januari 2018 pada pukul 15.54 WIB)

Implementasi kebijakan dalam pelaksanaannya tentu saja melibatkan berbagai *stakeholder* untuk mampu diimplementasikan dengan baik dan mampu dirasakan oleh masyarakat secara umum. Dalam proses implementasi tersebut tentu saja ada fase pengambilan keputusan untuk menentukan strategi ataupun tujuan ke depan yang ingin dihasilkan. Pengambilan keputusan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 di beberapa lembaga dilakukan oleh rapat kepengurusan hal ini

dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Bapak Drs. Abd. Hakim sebagai Sekretaris DPC Partai PDIP Kota Malang menyampaikan bahwa

“Ketika akan mengambil keputusan dalam suatu permasalahan PDIP Kota Malang akan melakukan musyawarah dulu untuk menentukan hasil yang mufakat. Jadi misalnya dalam pengambilan keputusan suatu hal dan ketika diputuskan tentu saja tetap tidak boleh menyimpang dari peraturan perundangan yang ada”. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Januari 2018 pada pukul 09.30 WIB)

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Malang Ibu Dr. Ya’qud Ananda Gudban, SS., SST.Par., MM mengemukakan bahwa

“Di kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Malang dalam implementasi kebijakan dilakukan dalam musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak bisa diputuskan dalam musyawarah untuk mufakat lalu akan diputuskan dalam bentuk *voting* untuk mengambil keputusan”. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 14.02).

Bambang Sumarto selaku Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang menyampaikan bahwa

“Pengambilan keputusan dalam kepengurusan Partai Golkar Kota Malang untuk menentukan implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentu saja melalui rapat kepengurusan Partai Golkar”. (Hasil wawancara pada tanggal 13 Maret 2018 pada pukul 12.15 WIB)

Pengambilan keputusan pada suatu kelembagaan ataupun organisasi akan menentukan langkah dan target yang akan diambil oleh keseluruhan anggota dalam organisasi. Demi mencapai keterwakilan perempuan di lembaga sesuai Partai Golkar Kota Malang untuk menentukan implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07

Tahun 2013 dilakukan oleh struktural kepengurusan yaitu ketua, sekretaris, bendahara dan pimpinan lainnya. Anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan yang sekaligus pengurus di PPP Kota Malang Wakil Ketua Bidang Ekonomi, Pengembangan Koperasi dan Kewirausahaan yaitu Ibu Asia Iriani, SE berpendapat bahwa

“Pertama-pertama dalam pengambilan keputusan di Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang dilakukan oleh pengurus inti yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Sekarang ini kami dari PPP Kota Malang sedang menjaring calon anggota legislatif untuk pemilihan legislatif tahun 2019. Rata-rata itu kami mencari calon legislatif, jarang orang yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Hal ini dikarenakan dari PPP Kota Malang kurang melakukan sosialisasi ke masyarakat”. (Hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2018 pada pukul 16.25 WIB)

Bendahara DPC Partai Demokrat Kota Malang yaitu Hj. Wiwik Hendra Astuti selaku Wakil Ketua DPRD Kota Malang mengemukakan bahwa

“Pengambilan keputusan di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Malang melalui cara *voting*. Melalui cara *voting* kita sebagai kader partai bisa mengemukakan pendapat. Ketika pada proses pengambilan keputusan walaupun kita tidak setuju, harus menyebutkan alasannya. Kalau kita setuju dengan keputusannya juga disebutkan alasannya”. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2018 pada pukul 11.01 WIB).



Gambar 14: Wawancara dengan Ibu Wiwik dari Partai Demokrat
Sumber: Dokumentasi peneliti (9 Januari 2018 pada pukul 11.01)

Selain dari Partai Politik, pengambilan keputusan dari Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang juga menentukan implementasi dari Peraturan Menteri ini. DP3AP2KB sebagai perwakilan pemerintah juga harus mampu mendorong partisipasi perempuan dikarenakan salah satu fungsinya adalah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat anak dan perempuan, pemberdayaan bisa dilaksanakan dengan baik jika ada suara perempuan di lembaga legislatif. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang Ibu Sri Widayati SE.,Msi menyampaikan bahwa

“Dari sisi meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan di Kota Malang dalam pengambilam keputusan pada setiap bidang perempuan sehingga perempuan secara umum bisa ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum”.
(Hasil wawancara pada tanggal 24 Januari 2018 pada pukul 13.13 WIB)

Selain dari DP3AP2KB selaku organisasi perangkat daerah yang memang membidang pemberdayaan perempuan, namun juga ada organisasi masyarakat yaitu *Women's Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang. *Women's Crisis Center* merupakan organisasi bergerak pada permasalahan bantuan hukum dan advokasi bukan fokus di bidang politik. Namun *Women's Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang juga ikut melakukan dorongan untuk partisipasi perempuan dikarenakan evaluasi-evaluasi dari permasalahan selama ini dikarenakan adanya kesalahan dalam pemilihan eksekutif maupun legislatif. Dr. Lucky Endrawarti,SH.,MH selaku

pengurus bidang hukum pidana di Women's Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang mengemukakan bahwa

*“Women's Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang melakukan kampanye adalah hanya momentum saja. Jadi ketika kita menangani korban ada yang menghambat penanganannya lalu akan kita evaluasi. Lalu kita akan memetakan hambatan tersebut yaitu dari sisi psikologis atau yuridis. Jika dari yuridis ini berarti pemerintahnya tidak menjalankan kinerja dengan benar. Lalu kita menganalisis apa yang salah dari sistem pemerintahan kita. Seperti dulu waktu pemilihan tidak ada program seperti ini. Kedua, dulu kita mengundang para calon legislatif atau eksekutif lalu setiap kita undang tidak ada yang *ekspert*. Ketika kegiatan seperti itu maka masyarakat akan tahu karakteristik setiap calon, seperti kemarin kita mengadakan kegiatan tentang “Diskusi Publik dalam Rangka Internasional Women's Day, yang datang hanya 1 calon dan calon yang lain belum dimulai sudah pulang. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Maret 2018 pada pukul 11.28 WIB)*



Gambar 15: Diskusi Publik dalam rangka Internasional Women's Day dengan mengundang Bapak Sutiaji Calon Walikota Malang periode 2018-2022.

Sumber : *Dokumentasi Peneliti (2018)*

Letak pengambilan keputusan harus didasarkan pada landasan hukum yang atau memiliki dasar kebijakan dengan orientasi yang jelas. Sehingga memudahkan para kelompok dalam menentukan berbagai strategi untuk diputuskan dan lebih memudahkan untuk mencapai tujuan serta tepat sasaran. Harus dipahami hierarki

perundangan-undangan agar dalam pengambilan keputusan mengetahui dasar-dasar kebijakannya. Adapun peraturan di Indonesia yang mengatur tentang peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1), pasal 28H ayat (2)
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang diratifikasi dari Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita tahun 1979 (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*)
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 43 ayat 1
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Nasional

Adapun kebijakan lain yang digunakan sebagai landasan dasar hukum dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif. Dari berbagai sudut pandang diatas menunjukkan bahwa letak pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan berbeda seperti pada Partai Demokrat, Golkar dan

Gerindra ditentukan pada rapat internal kepengurusan, Sedangkan pendapat dari Bapak Hakim dari PDIP dan Ibu Ya'qud Ananda Gudban dari Hanura bahwa pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk Mufakat. Pengambilan keputusan melalui rapat kepengurusan ini menunjukkan bahwa adanya dengan pendapat diantara seluruh kepengurusan untuk mencapai musyawarah mufakat. Cara pengambilan keputusan seperti ini menurut peneliti efektif dan efisien dikarenakan setiap orang berhak untuk menyuarakan pendapatnya sehingga ada nilai demokrasi didalam penentuan arah keputusan di partai politik. Tidak ada pengambilan keputusan yang tidak diketahui oleh pengurus lainnya. Pendapat selaras disampaikan oleh Bapak Abu Thazid dari DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang melalui diskusi terlebih dahulu dan diserahkan kepada Bunda Heri Pudji Utami. Letak pengambilan keputusan di DPC PPP Kota Malang ini memang sudah sesuai yaitu adanya diskusi lalu diserahkan ke Bunda Heri, disini ada titik penekanan bahwa memang Ketua memegang hak secara struktural.

Sedangkan pendapat yang berbeda disampaikan oleh Hj. Wiwik Hendra Astuti bahwa di Partai Demokrat melalui *voting*. Pendapat yang disampaikan ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Achmad Anang Fatoni selaku pengurus di DPC Partai Demokrat juga, namun sebenarnya pengambilan keputusan di DPC Demokrat itu sama yaitu melalui proses rapat kepengurusan jika memang tidak menemukan hasil yang disepakati seluruhnya baru akan melakukan *voting*. Melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang bahwa jawaban yang diberikan melalui peningkatan partisipasi kemandirian ekonomi. Hasil wawancara ini

menurut peneliti kurang tepat dan tidak signifikan karena ini menunjukkan bahwa DP3AP2KB tidak melakukan sosialisasi dan pengembangan mengenai partisipasi politik perempuan. *Women's Crisis Center Kota Malang* sebenarnya tidak konsen pada politik sehingga pengambilan keputusan langsung dilakukan oleh seluruh pengurus dan dilakukan melalui kampanye melek politik. Menurut peneliti *Women's Crisis Center Kota Malang* ini sudah efektif karena untuk menjaga keobjektifannya maka tidak konsen pada politik melainkan advokasi, namun untuk memberikan masyarakat pemahaman tentang politik diberikannya kampanye melek politik sehingga pemilihan umum tidak salah memilih yang mengakibatkan terlantarnya korban dari pemerintah.

e. Pelaksana Kebijakan

Merilee S.Grindle menyampaikan bahwa dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini. Sesuai dengan Bab II Bagian Peran Kelembagaan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif di Kota Malang yaitu aktor tersebut meliputi:

- a. Partai Politik meliputi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
- b. Penyelenggara Pemilu meliputi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
- c. Pemerintah Daerah meliputi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang.
- d. Organisasi Kemasyarakatan yaitu Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Malang dan *Women's Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang.

Sebagai pelaksana kebijakan berbagai lembaga tersebut harus memahami mengenai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013. Kebijakan tersebut diimplementasikan untuk meningkatkan kesetaraan perempuan dalam bidang politik. Setiap lembaga yang disebutkan dalam bagian kelembagaan harus mengetahui, memahami dan menjalani kebijakan tersebut dengan baik. Hj. Wiwik Hendra Astuti selaku Wakil Ketua DPRD Kota Malang dari partai Demokrat menyampaikan bahwa

“Inysallah mengetahui peraturan tersebut. kalau peraturan 30% sudah sesuai, malah di dalam partai itu sendiri perempuan juga tidak mau kalah supaya untuk bisa mensejajarkan dengan kaum bapak-bapak. Dengan adanya Peraturan Menteri ini, alhamdulillah karena ada payung hukum. Kalau dulu kan diintimidasi, kalau sekarang disetarakan. Walaupun tidak sampai 50 yaitu 30% sudah bagus tapi nanti dari 30% harapannya nanti perempuan sejajar, itu harapan saya pribadi”. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2018 pada pukul 11.01 WIB)

Ketua DPC Partai Hanura Kota Malang Ibu Dr. Ya'qud Ananda Gudban,SS.,

SST.Par., MM menyampaikan bahwa

“Kami dari DPC Partai Hanura Kota Malang tentu menjalankan kebijakan partisipasi politik perempuan. Ketuanya saja perempuan, rekrutmen perempuan untuk menjadi pengurus tentu kami memperhatikan posisi perempuan di partai Hanura Kota Malang itu sendiri”. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 14.02

Wakil Sekretaris I Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Malang

Bapak Achmad Anang Fatoni,SE berpendapat bahwa

“Kalau dari Partai Demokrat kita memang sudah mengacu pada peraturan-peraturan tersebut yaitu aturan 30% perempuan. Alhamdulillah kepengurusan periode ini DPC Partai Demokrat yaitu 42% , kita mengantisipasi. Awal perekrutan pengurus kan mempunyai kesibukan masing-masing makanya dilebihkan jumlahnya”. (Hasil wawancara pada tanggal 12 Januari 2018 pukul 15.38 WIB).

Ketua DPRD Kota Malang Bapak Drs. Abd. Hakim dan juga sebagai

Sekretaris DPC PDIP Kota Malang menyampaikan bahwa

“Syarat kuota perempuan 30% harus dipenuhi oleh setiap partai. DPC PDIP Kota Malang pasti memenuhi syarat karena itu adalah syarat untuk didalam pencalonan, pemilihan legislatif dll. Tidak jadi masalah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif”. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Januari 2018 pada pukul 09.30 WIB)

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang, Ir. Bambang Sumarto

dan juga selaku Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai

Golkar Kota Malang mengemukakan bahwa

“Partai Golkar sebagai pelaksana kebijakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2013 sudah memenuhi kuota 30% tersebut. Keterwakilan perempuan di lembaga

legislatif semua terpenuhi karena berdasar aturan”. (Hasil wawancara pada tanggal 13 Maret 2018 pada pukul 12.15 WIB).

Bahwa partai politik sebagai pelaksana kebijakan sudah melaksanakan kebijakan tersebut. Hal itu dibuktikan bahwa partai politik sudah mentaati peraturan 30% perempuan, karena keenam partai politik tersebut bisa lolos verifikasi menjadi peserta pemilihan umum legislatif tahun 2014. Selain partai politik, pelaksana kebijakan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak ini adalah penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah kota. Penyelenggara pemilu disini adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dan pemerintah daerah ini diwakili oleh organisasi perangkat daerah terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang Ibu Sri Widayati SE.,Msi mengemukakan bahwa

“Dari DP3AP2KB Bidang Pemberdayaan Perempuan Kota Malang belum melakukan kegiatan dan belum menganggarkan kegiatan untuk peningkatan partisipasi politik perempuan itu. Kalau dulu sebelum pemilihan umum 2014 itu pernah melakukan kegiatan, tapi kalau yang kemarin belum ada kegiatan dari DP3AP2KB Kota Malang”. (Hasil wawancara pada tanggal 24 Januari 2018 pada pukul 13.13 WIB)

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Divisi Hukum yaitu Bapak Fajar Santosa, SH.MH menyampaikan bahwa

“KPU sebenarnya tunduk pada Undang-Undang dan dalam konteks pembentukan peraturan pemerintah *equal* pada peraturan pemerintah. Jadi kedudukan relatif *equal* antara peraturan pemerintah dan peraturan KPU. Selain itu peraturan KPU itu tidak bisa di negasikan dengan peraturan pemerintah apapun kecuali Undang-Undang. Peraturan KPU itu dibawah

Undag-Undang. Peraturan Menteri ini dibawah peraturan pemerintah”.
(Hasil wawancara tanggal 7 Maret 2017 Pukul 09.20 WIB)

Pemerintah dalam hal ini yang diwakili DP3AP2KB serta penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentu tidak sendiri dalam melaksanakan kebijakan peningkatan partisipasi politik perempuan, implementasi kebijakan tersebut dibantu oleh organisasi kemasyarakatan. Ormas yang membantu implementasi kebijakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2013 adalah *Women's Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang dan Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Malang. Presidium Wilayah Jawa Timur Koalisi Perempuan Indonesia Kelompok Kepentingan Petani dua periode yaitu tahun 2008-2012 dan 2012-2016 Ibu Dwi Retnoningsih SP., MP.,MBA mengemukakan bahwa

“Koalisi Perempuan Indonesia sebagai ormas tentu saja juga menjalankan kebijakan tersebut.Jadi sebelum pemilihan umum, Koalisi Perempuan Indonesia lebih menyadarkan bahwa politik bukan hanya urusan lelaki saja.Pada saat pemilihan berlangsung, di bidang pengorganisasian mencoba mengidentifikasi kader KPI yang mempunyai potensi melalui kesadaran, pendidikan dan keinginan kader di bidang politik. Tugas KPI agar kader yang tertarik di bidang politik melalui berbagai jaringan yang dimiliki KPI. Menjadi wakil rakyat harus mampu berbagai hal secara praktis termasuk mengenai kebijakan, pengetahuan mengorganisir karena itu KPI berjejaring dengan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). KPI harus berjejaring karena memang fokus dari KPI bukan di bidang politik saja”. (Hasil wawancara pada tanggal 24 Januari 2018 pada pukul 16.22 WIB)

Pengurus bidang hukum pidana di *Women's Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang , Dr. Lucky Endrawarti,SH.,MH menyampaikan bahwa

“Women’s Crisis Center Dian Mutiara melaksanakan kebijakan tersebut salah satunya dengan diskusi komunitas. Sebenarnya kita 2 minggu sekali ada kegiatan komunitas, diskusi tersebut dengan tema-tema yang berbeda. Kita tidak fokus pada partai politik, karena terkadang WCC dimanfaatkan partai politik untuk sponsor. Kita tidak apa-apa dimanfaatkan tetapi programnya harus jalan semua”. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Januari 2018 pada pukul 11.28 WIB)

Berbagai pendapat diatas jika disimpulkan bahwa lembaga yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2013 telah melaksanakan kebijakan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif Kota Malang walaupun secara maksimal. Kedua belas partai politik yang terverifikasi menjadi peserta pemilihan legislatif tahun 2014 sudah melaksanakan untuk mendaftarkan 30% anggota perempuan. Namun hanya 6 partai politik yang mampu berjuang sehingga ada perwakilan anggota perempuannya yang berhasil lolos ke DPRD Kota Malang yaitu Partai Demokrat, PPP, PDIP, Gerindra, Hanura dan Golkar. DP3AP2KB pada tahun 2014 belum menganggarkan untuk kegiatan peningkatan partisipasi politik, padahal DP3AP2KB sudah memiliki 3 seksi yang bisa membantu untuk edukasi peningkatan partisipasi politik perempuan. KPU Kota Malang sebagai penyelenggara pemilu memang melaksanakan kebijakan untuk mensosialisasikan peraturan UU tentang pemilu, namun Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tidak digunakan sebagai peraturan utama yang disosialisasikan. Ormas WCC Dian Mutiara Kota Malang sebagai salah satu ormas juga melaksanakan kebijakan, namun bidang politik bukan menjadi bidang yang utama di bahas sehingga

memang WCC Dian Mutiara hanya melaksanakan melalui kampanye melek politik ataupun diskusi. KPI Cabang Malang sebagai pelaksana kebijakan melakukan dorongan kepada masyarakat umum agar memahami bahwa politik bukan hanya urusan laki-laki saja dan KPI Cabang Malang dalam menjalankan kebijakan ini juga membutuhkan para jejaring organisasi.

f. Sumber-sumber Daya yang Digunakan

Dalam suatu kebijakan tentu saja ada pihak-pihak yang terlibat untuk membuat suatu kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Grindle menyatakan bahwa dalam pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik atau dengan kata lain ada *resources committed* yang memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaga untuk melaksanakan proses pelaksanaan kebijakan. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentu saja memiliki *resources committed* atau sumber-sumber daya yang digunakan agar peraturan ini dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Isi dari peraturan yaitu mengenai tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat umum terutama beberapa lembaga yang tertera pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 BAB II yaitu Partai Politik, Penyelenggara Pemilu, Pemerintahan Daerah Provinsi,

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Organisasi Kemasyarakatan. Sumber daya yang terlibat dan mendorong agar peraturan ini dapat diimplementasikan tentu saja merupakan struktural dari partai itu sendiri. Wakil Sekretaris Partai Persatuan Pembangunan dan Juru bicara Anggota DPRD Fraksi Persatuan Pembangunan Nasdem, Bapak Abu Thazid berpendapat bahwa

“Menurut saya Bunda karena Bunda Heri Pudji Utami berada di Komisi D DPRD Kota Malang. Bunda Heri sangat teliti dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 termasuk peraturan daerah perlindungan dan anak. Apalagi data di Jawa Timur terutama Kota Malang menunjukkan sebagai salah satu daerah dengan nilai tertinggi dalam pelecehan perempuan dan anak. Kota Layak Anak yang disuarakan Abah Anton ini benar-benar kami tagih apalagi Bunda Heri ada di Komisi D dan juga sebagai Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan Nasdem. Meskipun semua diambil dalam diskusi tapi secara personal Bunda berjuang di komisi tentang mencapai tujuan perda”.

Ketua DPRD Kota Malang Bapak Drs. Abd. Hakim selaku Sekretaris DPC PDIP Kota Malang mengemukakan bahwa

“Dalam implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 yang digunakan adalah musyawarah mufakat. Untuk sumber daya yang berpengaruh bahwa setiap anggota memiliki hak yang sama. Dari bawah dibawa ke atas, lalu dibawa ke struktural paling atas yaitu DPC Kota Malang. Tetapi tetap tidak meninggalkan aspirasi dari bawah”. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Januari 2018 pada pukul 09.30 WIB)

Ir. Bambang Sumarto selaku Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang menyampaikan bahwa

“Sumber daya yang berpengaruh dalam kebijakan ini yaitu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tetap saja formatuer dan ketua terpilih, tokoh

Partau Golkar lama, serta pendapat dan saran dari kepengurusan Partai Golkar lama”. (Hasil wawancara pada tanggal 13 Maret 2018 pada pukul 12.15 WIB)

Peraturan ini ketika diimplementasikan selain berasal dari internal partai politik, namun juga dari pembuat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2013. Mengenai sumber daya yang terlibat menurut Ketua Partai Hanura Kota Malang adalah para pengusul. Ibu Dr. Ya'qud Ananda Gudban, SS., SST.Par., MM selaku Ketua DPC Partai Hanura Kota Malang mengemukakan bahwa

“Mengenai sumber daya yang berpengaruh dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2013 adalah pengusul, pemerintah kemudian juga parlemen. Tetapi untuk pengusul bisa dari salah satu. Dalam hal ini saya melihat dari pemerintah yang mengusulkan dan parlemen menyetujui sehingga jadi peraturan”. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 14.02)

Bendahara DPC Partai Demokrat Kota Malang yaitu Hj. Wiwik Hendra Astuti selaku Wakil Ketua DPRD Kota Malang menyampaikan bahwa

“Untuk sumber daya yang berpengaruh dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2013 tentu saja perempuan dan masyarakat umum yang nantinya akan berguna untuk pendidikan dan kesehatan”. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2018 pada pukul 11.01 WIB).

Sumber daya selain sebagai aktor yang terlibat dibelakang namun juga pihak yang menjadi target dalam peraturan ini. Pihak yang menjadi target dalam peraturan ini tentu perempuan. Untuk meningkatkan kapasitas dari perempuan itu sendiri sehingga sumber daya yang berpengaruh atau kelompok yang dituju tentu saja kaum

perempuan. Ibu Wiwin Indriani, S.Sos selaku Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Malang menyampaikan bahwa

“Sumber daya yang berpengaruh dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 menurut saya dari Partai Gerindra Kota Malang tentu saja itu perempuan sendiri”. (Hasil wawancara pada tanggal 17 Januari 2018 pada pukul 15.54 WIB)

Ibu Asia Iriani, SE selaku Wakil Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan Nasdem DPRD Kota Malang Wakil Ketua Bidang Ekonomi, Pengembangan Koperasi dan Kewirausahaan menyampaikan bahwa

“Hemat saya, bahwa sumber daya yang berpengaruh dalam implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 di Kota Malang tentu saja adalah untuk perempuan dan keluarga. (Hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2018 pada pukul 16.25 WIB)

Bahwasanya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 ini lahir sebagai jawaban dari permasalahan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Perlu adanya sinkronisasi dari setiap elemen masyarakat untuk mendorong keterwakilan perempuan. Apabila setiap elemen masyarakat baik antara pemerintah, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat bisa bekerja sama maka semakin lama akan membantu perempuan untuk berani menyuarakan pendapat di lembaga legislatif. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang Ibu Sri Widayati SE.,Msi berbicara bahwa

“Sumber daya yang berpengaruh dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Nomor 07 Tahun 2013 adalah para *stakeholder* dan lembaga legislatif Kota Malang. Antara *stakeholder* dan lembaga legislatif Kota Malang ini melakukan kerja sama”. (Hasil wawancara pada tanggal 24 Januari 2018 pada pukul 13.13 WIB)

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam pembuatannya tentu saja melibatkan Perguruan Tinggi. Adanya pelibatan perguruan tinggi dikarenakan adanya pihak akademis yang juga membantu membuat naskah akademik. Anggota Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Malang Dwi Retnoningsih SP., MP.,MBA yang juga menjadi Dosen Pertanian Universitas Brawijaya berpendapat bahwa

“Tentu saja pasti melalui proses pembuatan peraturan seperti ini berdasarkan naskah akademik. Pada pembuatan peraturan ini pasti perguruan tinggi terlibat, tapi saya tidak tahu kenapa di peraturan ini perguruan tinggi tidak termasuk dalam lembaga yang berperan. Karena saya yakin dalam naskah akademik pasti orang akademis dilibatkan mungkin dari orang fakultas hukum, tapi saya tidak tahu orang dari fakultas hukum mana selain itu juga dari orang fakultas politik, bisa juga bidang sosial karena berhubungan kemasyarakatan ataupun juga dengan NGO. Tapi saya tidak tahu kenapa di lembar lembaga, perguruan tinggi terlewat dalam peranannya mendorong keterwakilan perempuan 30%. Menurut saya, selama ini perguruan tinggi ikut andil dalam pembuatannya maupun implementasinya”. (Hasil wawancara pada tanggal 24 Januari 2018 pada pukul 16.22 WIB)

Dosen Hukum bidang Pidana Dr. Lucky Endrawarti,SH.,MH serta selaku pengurus bidang hukum pidana di Women’s Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang mengemukakan bahwa

“*Women’s Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang sebagai organisasi perempuan yang independen maka untuk sumber daya yang berpengaruh tentu saja korban karena ntuk menjaga keobjektifan *Women’s Crisis Center*. Pada saat ada kasus jadi korban akan menceritakan siapa yang menghambat ketika kasus sedang berjalan, di lapangan yang menghambat biasanya yaitu para birokrasi. Korban berjalan sendiri tidak ada lembaga, dinas atau pihak pemerintah”. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Januari 2018 pada pukul 11.28 WIB)

Namun pendapat berbeda yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Malang bahwa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 ini belum ada aktor. Pengurus Partai DPC Partai Demokrat bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Calon yang didaftarkan Partai Demokrat pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 memiliki presentase 34% lebih dari kuota yang ditentukan. Wakil Sekretaris I Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Malang Bapak Achmad Anang Fatoni, SE mengemukakan bahwa

“Dari kacamata saya, saya belum melihat aktornya. Jadi begini setiap pengurus di DPC Partai Demokrat Kota Malang bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Ketika ada peraturan kuota 30% tentu saja kita mengisi kuotanya bahkan lebih dari kuota 30%”. (Hasil wawancara pada tanggal 12 Januari 2018 pukul 15.38 WIB)

Berbagai macam sudut pandang diatas dapat disimpulkan bahwa banyak sekali sumber daya terlibat. Hal ini didasarkan pada para aktor dibalik pembuatan kebijakan tersebut maupun pihak yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut. Ibu Ya’qud Ananda Gudban dari Partai Hanura dan Ibu Sri Widayati dari DP3AP2KB Kota Malang selaras bahwa sumber-sumber daya yang digunakan dalam pembuatan

kebijakan yaitu para pengusul ataupun *stakeholder* baik itu legislatif maupun eksekutif. Menurut peneliti bahwa kedua pendapat tersebut menunjukkan fakta bahwa memang dalam implementasi kebijakan diperlukan kerjasama antara *stakeholder* dalam pelaksanaan kebijakan namun di sisi lain hubungan antara DPRD, Pemerintah dan masyarakat tentang pelaksanaan kebijakan belum selaras sehingga masyarakat yang memilih anggota legislatif perempuan hanya sedikit.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Ibu Dwi dari Koalisi Perempuan Indonesia bahwa ada sumber daya yang terlibat dalam pembuat kebijakan tentu saja perguruan tinggi sebagai pihak yang terlibat dalam pembuatan naskah akademik. Menurut peneliti kebijakan ini memang kurang melibatkan satu pihak lagi satu perguruan tinggi, padahal perguruan tinggi adalah salah satu lembaga yang mampu meningkatkan jumlah partisipasi politik perempuan dalam memilih calon legislatif sehingga perlu adanya pelibatan perguruan tinggi dan mengajarkan melek politik. *Women's Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang menyampaikan untuk menjaga keobjektifannya maka sumber daya yang digunakan ialah para korban yang mendapat hambatan dari pemerintah. Peneliti berpendapat bahwa korban adalah pihak yang tepat untuk dijadikan sosok yang merasakan adanya implementasi kebijakan, karena dengan adanya kebijakan ini diharapkan adanya keterwakilan perempuan untuk mampu mendengarkan suara wakil rakyat dan membuat regulasi yang melindungi kaum perempuan. Namun nyatanya DPRD Kota Malang memformulasikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Korban Kekerasan belum mampu melindungi semua korban karena didalam Perda tsb akan melindungi perempuan jika sudah menjadi korban kekerasan.

Jika dari Bapak Abu Thazid dari Partai Persatuan Pembangunan berpendapat bahwa sumber daya yang terlibat tentu saja Bunda Heri Pudji Utami sebagai Ketua Fraksi PPP Kota Malang. Ini menunjukkan bahwa adanya struktural yang mengutamakan Bunda Heri disetiap kebijakan, menurut peneliti ini kurang tepat karena perlu ada sinkronisasi diseluruh pengurus agar mampu mengambil keputusan yang tepat dan mampu mengkaderisasi seluruh anggota PPP Kota Malang dengan tepat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Abd. Hakim dari PDIP Kota Malang sumber daya yang digunakan adalah semua anggota dari partai, ini menunjukkan bahwa di DPC PDIP Kota Malang melakukan kaderisasi terhadap seluruh anggota. Sedangkan menurut Bapak Ir. Sumarto bahwa sumber daya yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan adalah pendapat dan saran dari pengurus lama DPD Partai Golkar Kota Malang, ini memperlihatkan bahwa selain dari internal kepengurusan partai namun juga masih ada keterikatan dengan pengurus lama sehingga hubungan di DPD Partai Golkar tidak lepas antar generasi. Keterikatan ini menunjukkan bahwa DPD Partai Golkar masih menjalin kaderisasi dengan baik. Dari DPC Partai Demokrat Malang menyampaikan hal yang berbeda dari keseluruhan bahwa belum melihat aktor dari implementasi kebijakan ini. Peneliti menilai bahwa DPC Partai Demokrat Kota Malang belum mampu menggambarkan tentang adanya keterlibatan dari beberapa pihak, sehingga perlu adanya pendalaman untuk menjalin kerjasama

dengan *stakeholder* maupun menentukan sasaran sehingga tujuan meningkatkan partisipasi politik perempuan bisa dicapai.

2. Lingkungan Implementasi Kebijakan (*Context of Policy*) meliputi:

a. Strategi dari Aktor yang Terlibat

Kegiatan pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 perlu adanya kerjasama yang baik oleh berbagai aktor. Demi mencapai suksesnya kebijakan tersebut yang tertera pada Pasal 4 bahwa “Tujuan Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif adalah untuk membantu penyusunan program dan kegiatan peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif agar lebih sistematis, terukur dan akuntabel maka perlu adanya kekuatan dan strategi berbagai pihak. Grindle menyampaikan bahwa dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api. Strategi yang digunakan harus mampu masuk ke dalam setiap elemen sehingga bisa menarik masyarakat perempuan ke partai hingga mau mencalonkan diri menjadi legislatif. Ketua DPC Partai Hanura Kota Malang Ibu Dr. Ya’qud Ananda Gudban, SS., SST.Par., MM menyampaikan bahwa.

“Strategi yang digunakan oleh DPC Partai Hanura Kota Malang dalam implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2013 tentu saja melalui sosialisasi semuanya dan merekrut secara terbuka calon-calon kader dan calon-calon legislatif di Kota Malang”. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 14.02).



Gambar 16 : Ketua DPC Hanura Kota Malang dalam sosialisasi pentingnya politik perempuan

Sumber: <https://malangtoday.net/malang-raya/kota-malang/pendidikan-politik-perempuan-penting/> (Diakses pada 29 Maret 2018 Pukul 20.21 WIB)

Pengurus DPC Partai Golkar Ir. Bambang Sumarto dan juga sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang

“Partai Golkar ketika akan mengimplementasikan peraturan tentang yang berhubungan dengan perempuan terutama Undang-Undang Partai Politik dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 strategi yang dilakukan melalui meminta saran pendapat ketua dan wakil bidang pemberdayaan perempuan”. (Hasil wawancara pada tanggal 13 Maret 2018 pada pukul 12.15 WIB)

Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Malang Ibu Wiwin Indriani, S.Sos yang pada tahun 2014 pernah mencalon diri menjadi anggota legislatif namun belum berhasil menyampaikan bahwa

“Strategi DPC Partai Gerindra Kota dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui perekrutan sebanyak-banyaknya anggota untuk menjadi anggota Partai Gerindra itu sendiri. Apabila anggota tersebut mampu dan berkompeten untuk di daftarkan sebagai calon legislatif mewakili Partai Gerindra dalam membela suara perempuan di parlemen nantinya”. (Hasil wawancara pada tanggal 17 Januari 2018 pada pukul 15.54 WIB)

Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 perlu didukung oleh kinerja Pemerintah Kota Malang serta kemandirian kaum perempuan sendiri. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di berbagai bidang terutama di bidang politik merupakan fungsi yang sangat penting untuk mendorong jumlah partisipasi perempuan di lembaga legislatif. Kapabilitas perempuan di Kota Malang perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan perempuan lainnya baik di tingkat daerah pemilihan atau Kota Malang seluruhnya. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang Ibu Sri Widayati SE.,Msi menyampaikan bahwa

“Strategi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang agar peraturan ini dapat diimplementasikan yaitu bunyi dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 ialah dengan meningkatkan sumber daya manusia perempuan di bidang politik”. (Hasil wawancara pada tanggal 24 Januari 2018 pada pukul 13.13 WIB).

Presidium Wilayah Jawa Timur Koalisi Perempuan Indonesia Kelompok Kepentingan Petani dua periode yaitu tahun 2008-2012 dan 2012-2016 Ibu Dwi Retnoningsih SP., MP.,MBA yang sekarang sudah demisioner dan menjadi anggota biasa Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Malang menyampaikan bahwa

“Jadi satu, dari awal kita melakukan pendidikan politik. Peraturan-peraturan ini harusnya hanya tidak dibaca oleh lembaga-lembaga yang di peraturan itu saja termasuk masyarakat harus tahu bahwa peraturan ini ada dan kenapa harus ada perwakilan perempuan. Hal tersebut menjadi sebuah bagian yang kita sosialisasikan, strateginya melalui balai perempuan yaitu pendidikan politik bahwa sebenarnya sudah ada peraturan dan pemerintah mendorong perwakilan perempuan. Selain itu juga menggambarkan tentang keadaan partai yang masih minim perempuan padahal perwakilan perempuan tersebut merupakan gambaran perwakilan dari masyarakat. Disisi lain agar mereka mempunyai kesadaran bahwa para perempuan diberi porsi, artinya tidak hanya saya (para perempuan) namun juga partai butuh perempuan untuk bagaimana bisa memenuhi mengimplementasi peraturan minimal memenuhi kuota perempuan padahal kepentingannya tidak hanya itu. Harapannya kedepannya bisa ideal bukan hanya standart. Kita dari KPI mempunyai strategi bahwa dari awal, kita berhadap ada dorongan dari bawah dan dari bawah ada sumber daya yang mempunyai kapasitas yang baik lalu bisa kita *support* . Bahwa nantinya bisa mencalonkan diri sendiri ataupun temannya”. (Hasil wawancara pada tanggal 24 Januari 2018 pada pukul 16.22 WIB)



Gambar 17: Seminar KPI Jatim dan KPI Cabang Malang dalam Kepemimpinan Perempuan dalam Mewujudkan Perubahan

Sumber: Dokumentasi KPI (2016)

Bendahara DPC Partai Demokrat Hj. Wiwik Hendra Astuti selaku Wakil

Ketua DPRD Kota Malang mengemukakan bahwa

“Kepengurusan DPC Partai Demokrat Kota Malang membuat strategi melalui pemberdayaan perempuan, seperti peningkatan pemahaman tentang pentingnya pendidikan, kesehatan dan mengajarkan budaya bahwa seorang perempuan juga bisa menjadi pemimpin”. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2018 pada pukul 11.01 WIB).

Strategi yang dilakukan oleh kelembagaan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan harus dilakukan secara terus-menerus dan konsisten sehingga mampu melakukan perubahan di Kota Malang. Sosialisasi peraturan perundangan-undangan diperlukan agar perempuan memahami bahwa perempuan memiliki hak untuk mampu duduk di kursi parlemen karena selama ini perempuan merasakan *subordinasi* dalam bidang politik. Ketika perempuan sudah menyadari dan memahami posisinya maka diharapkan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Sekretaris DPC PDIP Kota Malang Drs.Abd Hakim menjelaskan bahwa

“Partai PDIP Cabang Malang dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif tetap harus mengacu pada peraturan perundangan, nantinya anggota legislatif akan menjelaskan itu pada kaum perempuan juga. Kita tetap sesuai pada peraturan perundangan-perundangan dan tentu saja sesuai hasil rapat-rapat yang disampaikan”. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Januari 2018 pada pukul 09.30 WIB)

Wakil Sekretaris Partai Persatuan Pembangunan dan Juru bicara Anggota

DPRD Fraksi Persatuan Pembangunan Nasdem Abu Thazid berpendapat bahwa

“Pertama kami dari DPC PPP Kota Malang selalu menggunakan untuk mencontoh diri kami sendiri, kami selalu mensosialisasikan bahwa

perempuan kami adalah perempuan tangguh. Partai kami juga peka terhadap perempuan, kepengurusan kami baik tim cyber dan tim litbang tidak mendikotomikan gender. Itu selalu kami push di KPU dan diskusi dengan KPU. Ketika ada diskusi-diskusi juga kita juga mengajak perempuan”. (Hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2018 pada pukul 10.47 WIB)



Gambar 18: Acara Pendidikan Politik DPC PPP Kota Malang
Sumber: Dokumentasi DPC PPP Kota Malang (2017)

Wakil Sekretaris I Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Malang

Bapak Achmad Anang Fatoni, SE menyampaikan bahwa

“Jadi seperti di awal Partai Demokrat sebagai partai modern dan partai terbuka tentu saja kita tidak membedakan perempuan. Hal ini berarti tanpa harus diberikan iming-iming, maka alhamdulillah pengurus DPC Partai Demokrat Kota Malang terutama perempuan merasa lebih nyaman untuk berorganisasi disini. Kalau di DPC Partai Demokrat Kota Malang, perempuan di kepengurusan *enjoy* karena memang dari awal kami tidak membedakan perempuan”. (Hasil wawancara pada tanggal 12 Januari 2018 pukul 15.38 WIB)

Sementara itu menurut penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Malang bahwa peraturan ini pada Bab II Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 pada bagian Peran Kelembagaan yaitu di penyelenggara pemilu, bahasa

yang digunakan menggunakan kata “wajib” sehingga seperti memerintahkan KPU. Padahal KPU adalah lembaga pemerintah yang independen, tidak bisa diperintahkan oleh sembarang pihak kecuali ada MOU. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Divisi Hukum yaitu Bapak Fajar Santosa, SH.MH menjelaskan bahwa

“Strategi peraturannya bisa dilakukan melalui sosialisasi tapi peraturan KPU dan Undang-Undang. Namun sebenarnya peraturan ini bisa disosialisasikan jika bunyi dalam peraturan ini adalah koordinasi atau melakukan MOU. Bahasanya harus koordinasi bukan perintah. Harusnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan bersinergi dengan penyelenggaraan pemilu. Kesalahan mendasar peraturan ini adalah karena bahasanya mengharuskan KPU. Dengan adanya alokasi dana seharusnya bisa membuat SKPD-SKPD terkait bersinergi untuk melakukan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi perempuan”. (Hasil wawancara tanggal 7 Maret 2017 Pukul 09.20 WIB).

Dosen Hukum bidang Pidana Universitas Brawijaya Dr. Lucky Endrawarti,SH.,MH serta selaku pengurus bidang hukum pidana di Women’s Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang menyampaikan bahwa

“*Women’s Crisis Center* Dian Mutiara ketika akan melakukan dorong partisipasi politik perempuan agar mau berperan di keterwakilan kursi anggota legislatif DPRD Kota Malang dengan melalui mengadakan diskusi rutin 2 minggu sekali ataupun sesuai kebutuhan, kampanye di *Car Free Day*, dan menyelipkan jadwal-jadwal pemilihan umum ketika ada acara di *Women’s Crisis Center* Dian Mutiara”. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Januari 2018 pada pukul 11.28 WIB).

Strategi aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dan kepentingan untuk upaya mencapai target yang diinginkan. Dalam lingkungan implementasi kebijakan ini strategi yang digunakan oleh Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai PDIP, dan Partai PPP ialah melakukan sosialisasi perundangan-undangan dan merekrut anggota

perempuan. Menurut peneliti strategi yang yang digunakan sudah tepat karena sosialisasi termasuk dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Bab V Pelaksanaan Program dan Kegiatan bagian sosialisasi. Sosialisasi adalah pertemuan yang perlu diketahui oleh kelompok tertentu yang berkepentingan. Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif, kegiatan sosialisasi misalnya dapat digunakan untuk menjelaskan peraturan-peraturan. Sosialisasi ini sesuai seperti yang dilakukan oleh Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai PDIP, dan Partai PPP. Begitu juga dengan *Women's Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang dan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan maka diadakan sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan pemilu untuk mendorong partisipasi politik.

Pendapat lain disampaikan oleh Bapak Ir. Bambang Sumarto dari DPD Partai Golkar Kota Malang bahwa strategi dalam implementasi kebijakan melalui meminta saran dan pendapat dari Ketua dan Wakil Bidang Pemberdayaan Perempuan DPD Partai Golkar Kota Malang. Menurut peneliti strategi yang dilakukan oleh DPD Partai Golkar kurang efektif, karena strategi tersebut belum mampu untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan jika hanya meminta saran dan pendapat. Sehingga perlu adanya pendidikan, pelatihan dan sosialisasi juga agar mampu menarik minat para perempuan di Partai Golkar dan masyarakat secara umum.

Selain adanya sosialisasi tentunya juga harus melalui peningkatan sumber daya perempuan agar kualitas ketika menjadi wakil rakyat tidak diragukan lagi kemampuannya. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Bab V bagian pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Pendidikan dan pelatihan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif. Pendidikan dan pelatihan bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan menjaring pemilih di daerah pemilihan, meningkatkan kemampuan lobi politik, meningkatkan kemampuan berkampanye, meningkatkan mengawasi proses perhitungan suara dan meningkatkan kemampuan menghadapi gugatan hasil pemilu. Partai Demokrat Kota Malang, Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Malang dan DP3AP2KB Kota Malang melakukan strategi dalam implementasi kebijakan menggunakan peningkatan sumber daya perempuan melalui pendidikan politik. Menurut peneliti kegiatan yang dilakukan oleh Partai Demokrat, Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Malang dan DP3AP2KB Kota Malang sudah tepat karena pendidikan politik adalah kegiatan yang perlu dilakukan karena dengan cara tersebut masyarakat akan mampu memahami pentingnya perempuan di lembaga legislatif.

b. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang berkuasa

Lingkungan tentu saja juga berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Merilee S.Grindle menyampaikan bahwa lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga dan rezim yang berkuasa akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa ini apabila dari sudut organisasi kemasyarakatan dilihat dari strategi sebelum, saat dan setelah pemilihan umum 2014. Presidium Wilayah Jawa Timur Koalisi Perempuan Indonesia Kelompok Kepentingan Petani dua periode yaitu tahun 2008-2012 dan 2012-2016 Ibu Dwi Retnoningsih SP., MP.,MBA menyampaikan bahwa

“Di Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) ada bidang pengorganisasian lalu juga ada bidang pendidikan politik. Di bidang pengorganisasian itu mengatur kegiatan internal sedangkan di bidang pendidikan politik bisa mengatur kegiatan internal dan eksternal. Di bidang pengorganisasian kita mempunyai *database* anggota termasuk kelompok kepentingan, KPI adalah organisasi massa yang terdiri dari berbagai kelompok kepentingan seperti ibu rumah tangga, buruh migran, petani, nelayan, pemuda pelajar mahasiswa, informal, profesional, anak marjinal sedangkan di nasional akan lebih banyak kelompok kepentingan. Di bidang pengorganisasian setiap kelompok kepentingan mempunyai dewan kelompok kepentingan yang struktur paling kecil adalah di balai perempuan, databasenya berdasarkan kelompok kepentingan setiap anggota. Dari *database* tersebut dapat dilihat anggota yang memiliki ketertarikan ke bidang politik walaupun itu kecil sekali, apalagi balai perempuan adalah struktur organisasi yang paling kecil atau berada di tingkatan desa. Sepahaman anggota KPI di balai perempuan bahwa politik itu hanya sekedar tentang memilih. Di desa, orientasi pemilihan hanya sekedar karena uang dan yang dipilih itu lelaki karena dianggap pemimpin itu lelaki. Di bidang pengorganisasian bekerjasama dengan bidang pendidikan politik bahwa sebelum di KPI menginginkan tokoh politik perempuan lebih pada pendidikan politiknya terlebih dahulu. Perlu menyadarkan perempuan bahwa politik bukan hanya urusan lelaki saja tetapi juga urusan perempuan. Apalagi kalo berbicara mengenai kebijakan di pemerintahan orientasinya lebih banyak

pada perempuan dan anak, sehingga siapa yang harus memperjuangkan perempuan jika bukan perempuan itu sendiri. Perempuan yang terpilih atau mengajukan diri ingin menjadi wakil rakyat akan dilatih di bidang pengorganisasi. Perempuan yang ingin menjadi wakil rakyat harus masuk partai, namun pada zaman sekarang juga banyak calon walikota yang berasal dari *independent*. Secara eksternal, Koalisi Perempuan Indonesia selain mendorong anggota namun juga mendorong perempuan pada umumnya atau non anggota yang mempunyai perspektif perempuan serta mempunyai pandangan untuk perempuan dan anak, perempuan non anggota seperti ini yang akan *disupport* oleh kami. Saat pemilihan itu juga, Koalisi Perempuan Indonesia terkadang menjadi tim sukses. Bukan berarti KPI dibeli oleh partai politik, namun titik tekan disini Koalisi Perempuan Indonesia akan melakukan support dan pengawalan kepada calon legislatif yang mempunyai pandangan kepada perempuan dan anak sehingga KPI berorientasi untuk mengenalkan perempuan tersebut bukan pada partai politiknya. Kalau ternyata tidak ada perempuan, maka kami akan melakukan *support* kepada laki-laki yang mempunyai perspektif terhadap perempuan dan anak. Bisa saja perempuan tetapi tidak mempunyai perspektif perempuan dan anak, tetapi juga ada laki-laki berperspektif perempuan dan anak. Namun, KPI akan lebih mendukung perempuan yang mempunyai perspektif perempuan dan anak yang baik. Di KPI, kita pernah mencoba kontrak politik tidak hanya dengan lembaga perempuan saja namun juga dengan lembaga lainnya. Dengan kontrak politik yang tertulis maka akan mampu menunjukkan perjanjian di antara kedua belah pihak. Sehingga ketika calon yang nanti akan menjadi eksekutif ataupun legislatif akan menjalankan kebijakan dengan perspektif perempuan dan anak”.



Gambar 19 : Wawancara dengan Ibu Dwi (Kader KPI Cab Malang)

Sumber: *Dokumentasi Peneliti* (2018)

Staf Pendidikan Politik Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur Saras Dumasari yang pada tahun 2014 menjabat sebagai Bendahara di Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Malang menyampaikan bahwa peran Koalisi Perempuan Indonesia dalam partisipasi politik perempuan di Malang melalui

“Dengan melakukan peningkatan kapasitas pengurus dalam Koalisi Perempuan baik tingkat Balai Perempuan (BP) dan Cabang. Mulai dari membangun jaringan dan melakukan advokasi baik dalam tingkat cabang atau wilayah. Selain itu juga melakukan advokasi terkait draft kebijakan yang disesuaikan dengan visi misi organisasi masyarakat, terutama terkait perlindungan sosial dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bisa jadi draft usulan dalam mekanisme implementasinya. Pemerintah diharap paham dan dapat memberi dukungan pada kebutuhan perempuan dalam kebijakan”. (Hasil wawancara pada tanggal 12 Maret 2018 pada pukul 17.00 WIB)

Pengurus bidang hukum pidana di Women's Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang, Dr. Lucky Endrawarti,SH.,MH menyampaikan bahwa

“*Women's Crisis Center* Dian Mutiara Malang sebenarnya melakukan kegiatan itu di bidang pencegahan melalui kegiatan pendidikan seperti bidang kekerasan seksual dan hukum. Peran kita jika di partisipasi politik perempuan melalui pendidikan politik melalui kampanye di *Car Free Day* Kota Malang seperti kampanye pentingnya perempuan melekat politik. Pilihlah perwakilan yang dapat menyuarakan suara masyarakat”. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Januari 2018 pada pukul 11.28 WIB)

Sementara itu dari Partai Politik yang memang harus menjadi Badan Hukum sesuai Undang-Undang Partai Politik Tentang Partai Politik Pasal 51 ayat 1 maka karakteristik lembaga harus sesuai juga dengan peraturan pemerintah lainnya sehingga peningkatan partisipasi politik perempuan juga harus dilakukan. Rezim yang berkuasa pada setiap partai politik harus mampu mendukung keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sesuai dengan Undang-Undang Pemilu No 8 tahun

2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dan juga terbaru pada Undang-Undang Pemilu NO 7 Tahun 2017. Cara setiap partai politik dalam mengakomodir kepengurusan perempuan di partai politik dan mengakomodir calon legislatif perempuan di partainya akan mampu memperlihatkan setiap karakteristik dan rezim yang berkuasa dalam upaya peningkatan partisipasi politik perempuan. Ketua DPC Partai Hanura Kota Malang Ibu Dr. Ya'qud Ananda Gudban,SS., SST.Par., MM menyampaikan bahwa

“Partai Hanura Kota Malang sangat terbuka, hal ini sesuai dengan Undang-Undang yaitu 30% anggota kami adalah perempuan, kami lebih dari 30% karena kebetulan saja banyak yang berminat. Untuk rekrutmen calon legislatif perempuan pun, kami buka secara terbuka dan harus sesuai dengan aturan dalam tiga nomer ada satu perempuan maka kami pun DPC Partai Hanura Kota Malang juga demikian”. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 14.02).

Wakil Sekretaris I Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Malang Bapak Achmad Anang Fatoni,SE berpendapat bahwa

“Jadi untuk mengakomordir keterwakilan perempuan di lembaga legislatif proses penjaringan harus sama dengan peraturan pemerintah yaitu 30% perempuan. Pada saat nomer urut walaupun saat ini sudah tidak menggunakan sistem terbuka dari Partai Demokrat tetap menggunakannya yaitu penempatan perempuan di sela-sela nomer urut tersebut. Kalau sekarang nomer 10 kan juga bisa jadi bahwa tidak tergantung pada nomer urut, tetapi Partai Demokrat tetap menggunakan sistem tersebut. Jadi misal nomer 1 laki-laki, nomer 2 laki-laki dan nomer 3 perempuan. (Hasil wawancara pada tanggal 12 Januari 2018 pukul 15.38 WIB).

Ketua DPRD Kota Malang Bapak Drs. Abd. Hakim dan juga sebagai Sekretaris DPC PDIP Kota Malang menyampaikan bahwa

“Kita kan ada kader-kader yang siap untuk itu sesuai jenjang. Hal ini dikarenakan di PDIP ada penjenjangan, struktural, pengalaman dll sehingga dalam hal ini ketersediaan dan kemauan untuk bergabung di partai politik. Syarat kuota perempuan 30% harus dipenuhi oleh setiap partai. PDIP pasti memenuhi syarat karena itu adalah syarat untuk didalam pencalonan, pemilihan legislatif dll. Tidak jadi masalah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Semua orang mempunyai hak yang sama untuk terjun di berbagai profesi hanya tergantung pada masing-masing entah itu perempuan atau laki-laki yang memiliki kemampuan, kecerdasan, intelektual, spritual dsb”. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Januari 2018 pada pukul 09.30 WIB)

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang, Ir. Bambang Sumarto dan juga selaku Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Golkar Kota Malang mengemukakan bahwa

“Pada pemilihan legislatif tahun 2014 kuota 30% sudah berlaku di Partai Golkar. Kecamatan blimbing memenuhi 3 orang perempuan, kalau tidak bisa dipenuhi Partai Golkar tidak bisa ikut pemilihan legislatif. Partai Golkar sudah memenuhi kuota 30%, ada usulan bahwa perempuan ada di nomer satu. Namun di Partai Golkar nomer satu harus memenuhi kriteria tersebut. Sanksinya jika tidak memenuhi maka Partai Golkar maka tidak bisa ikut pemilu. Verifikasi ini harus mendatangkan para perempuan langsung di Komisi Pemilihan Umum. Semua keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sudah terpenuhi kuota 30% , karena itu sesuai aturan”. (Hasil wawancara pada tanggal 13 Maret 2018 pada pukul 12.15 WIB).

Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Malang, Ibu Wiwin Indriani, S.Sos menyampaikan bahwa

“Di bidang kepengurusan juga ada kuota 30% untuk perempuan. Struktur paling tinggi DPP (nasional), DPD(provinsi), DPC(kota/kabupaten), PAC (kecamatan), dan ranting (kelurahan). Di Gerindra juga mempunyai badan dan sayap, kalau perempuan masuk di PIRA yaitu Perempuan Indonesia Raya bahwa semua perempuan di Gerindra masuk dalam PIRA. Kebetulan saya dari diundang oleh kementrian perempuan, setiap perempuan dari partai diundang untuk menyiapkan sebagaimana perempuan maju dan menarik suara perempuan di pelatihan itu. Setiap perwakilan harus menceritakan pengalamannya dan diajari *public speaking*. Jika untuk keterwakilan perempuan sendiri seperti dalam ajang pemilihan walikota tahun 2014, kita ikut kampanye dan memakai seragam maka orang-orang akan tanya-tanya

untuk bergabung di partai Gerindra”. (Hasil wawancara pada tanggal 17 Januari 2018 pada pukul 15.54 WIB)

Wakil Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang, Abu Thazid dan juga Juru Bicara Fraksi Persatuan Pembangunan DPRD Kota Malang menyampaikan bahwa

“Kalau PPP bisa dilihat realitasnya, bahwa Ketua PPP adalah perempuan yaitu Dra. Hj. Puji Utami mantan dosen Ikip Budi Utomo dan mantan Ibu Walikota Malang 2 periode, istri dari Bapak Peni. Dilihat dari aspek itu saja, kami memiliki keterwakilan yang sangat signifikan pada pucuk kepemimpinan. Jadi partai kami yaitu partai islam mengakomodir suara wanita sebagai pemimpin. Coba dilihat partai yang lain di Malang semua rata-rata pucuk kepengimpinannya adalah laki-laki, kecuali Hanura dan PPP. Lalu, di fraksi itu ketiga anggota kami yang di DPRD ada dua anggotanya adalah perempuan yaitu Bunda Heri dengan Bu Asia. Ketua Fraksinya di DPRD juga perempuan yaitu Bunda Heri. Jadi baik di partai maupun di fraksi PPP sangat mengakomodir suara perempuan, yang terpenting di PPP adalah kualitas perempuan itu sendiri. Perempuan dilihat secara pendekatan *konstituante*, dengan pengurus-pengurus lainnya. Apalagi pengurus di partai kami itu banyak perempuan. Jadi lebih dari sekitar 45% itu adalah perempuan termasuk bendahara kami. Ketuanya perempuan dan bendaharanya perempuan. Jadi kami sangat membuka peluang bagi perempuan, yang penting perempuan itu berkualitas. Keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang kalau yang kemarin itu kan konstituante, tetap seperti pileg tahun 2014 bahwa PPP mengakomodir sekitar 40%. Mengakomodirnya dimana ? Kembali lagi PPP tidak ingin berwajah partai lama, kita ingin menyesuaikan era seperti anak muda. Saya wakil sekretaris anak muda, rata-rata di kepengurusan anak muda, range antara umur 25 sampai 30 di DPC. Di DPC atau cabang masih banyak yang berumur 25-30. Di PAC atau tingkat kecamatan, memberikan intruksi untuk mengelaborasi antara orang tua dan anak muda. Jadi sistem itu yang dibuat teknis oleh bunda, tolong kolaborasi antara orang tua dan anak muda. Jadi nanti bagaimana antara orang tua, anak muda, akademisi dsb dapat berkolaborasi dengan baik. Perekrutan perempuan di legislatif melihat kualitas, modal sosial, modal *financial* dsb dilihat sangat teliti oleh bunda. Tidak ada diskriminasi usia, tidak ada diskriminasi umur, tidak ada diskriminasi *gender*. (Hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2018 pada pukul 10.47 WIB)

Sementara itu Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang independen juga melakukan peningkatan partisipasi politik melalui sosialisasi peraturan-peraturan. Selain itu KPU juga bertugas untuk melakukan verifikasi jumlah kepengurusan dan jumlah calon legislatif agar bisa mengikuti pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum hanya tunduk pada Undang-Undang, tidak bisa sembarang peraturan memerintahkan KPU kecuali ada *Memorandum of Understanding* ataupun perjanjian. Karakteristik dari Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini dilihat dari cara berkomunikasi Komisi Pemilihan Umum dengan Partai Politik. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Divisi Hukum yaitu Bapak Fajar Santosa, SH.MH menyampaikan bahwa

“Kalau di divisi hukum mempunyai tugas sosialisasi perundang-undangan, khusus di divisi hukum mempunyai tugas khusus untuk sosialisasi peraturan UU dan PKPU. Terkait regulasi peraturan akan kita sosialisasikan ke partai politik melalui undangan dan partai politik bisa melakukan diskusi untuk menanyakan segala hal terkait dengan peraturan. Selain sosialisasi, kita juga siap untuk melakukan konsultasi untuk datang KPU dan mengundang KPU untuk diskusi partai politik. (Hasil wawancara tanggal 7 Maret 2017 Pukul 09.20 WIB)

Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang Ibu Sri Widayati SE.,Msi mengemukakan bahwa

“Kita memberikan sosialisasi kepada perempuan tentang pendidikan berpolitik secara benar untuk memenuhi hak-hak perempuan agar mampu bersaing dan terpilih ketika pemilihan umum untuk lembaga legislatif. Strategi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang dalam keterwakilan perempuan ialah dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia perempuan di bidang politik”. (Hasil wawancara pada tanggal 24 Januari 2018 pada pukul 13.13 WIB)

Pendapat diatas memperlihatkan bahwa bahwa setiap kelembagaan memiliki rezim berkuasa yang berbeda sehingga memiliki karakteristik yang berbeda pula. Koalisi Perempuan Indonesia memiliki peran didalam meningkatkan partisipasi politik melalui bidang pengorganisasian internal dan bidang pendidikan politik. Jika didalam pengorganisasian internal Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Malang melakukan identifikasi kader yang terkait dengan politik sedangkan pada bidang pendidikan politik melalui dorongan anggota dan non anggota perempuan untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif serta mendukung laki-laki berperspektif adil *gender*. Menurut peneliti, dengan adanya bidang yang mampu mewadahi potensi kader akan lebih mempermudah penjangkaran terhadap kader perempuan yang mempunyai minat dan bakat terhadap bidang politik. Sehingga menurut peneliti sudah tepat karakteristik namun perlu ditingkatkan terhadap kaum perempuan diluar kader dalam melakukan penjangkaran Sedangkan *Women's Crisis Center* Dian Mutiara melakukan pendidikan politik. Kegiatan pendidikan politik menurut peneliti sudah tepat walaupun di *Women's Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang tidak ada bidang pendidikan politik namun tetap dilakukan.

Sudut pandang berbeda yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dan DP3AP2KB Kota Malang bahwa peran yang dilakukan adalah melalui sosialisasi perundang-undangan. Menurut pendapat peneliti kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Malang masih kurang dan belum efektif. Selain sosialisasi

tentunya juga perlu adanya pendidikan politik, karena KPU Kota Malang sebagai penyelenggara pemilu tentunya juga perlu melakukan pendidikan politik kepada masyarakat umum dan juga membuat lokakarya untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan partisipasi politik selama ini. Menurut Partai Hanura dan Demokrat mengakomodir partisipasi perempuan dalam bidang politik yaitu melalui rekrutmen anggota ataupun penjurangan. Di DPC PDIP dan di PPP Kota Malang karakteristik dalam mengakomodir perempuan ialah melalui penjurangan, struktural kepengurusan, pengalaman serta kemampuan yang dimiliki. Serta dari hasil wawancara setiap partai politik sudah memenuhi kuota 30% dalam pencalonan perempuan di pemilu tahun 2014. Jika memang setiap partai politik tidak mampu memenuhi kuota 30% maka partai politik tidak akan bisa untuk turut serta dalam pemilihan legislatif. Pemenuhan kuota 30% ini harusnya bukan hanya dijadikan persyaratan saja namun juga keyakinan setiap partai politik untuk bisa meningkatkan partisipasi politik perempuan.

Tabel 5

**Jumlah Peserta Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang
Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014**

No.	Nama Partai	Jenis Kelamin	Jumlah	Total	Kuota Perempuan
-----	-------------	---------------	--------	-------	-----------------

1.	Demokrat	Perempuan	15	44	34%
		Laki-laki	29		
2.	Gerindra	Perempuan	15	45	33%
		Laki-laki	30		
3.	(GOLKAR)	Perempuan	16	45	35%
		Laki-laki	29		
4.	Hati Nurani Rakyat (HANURA)	Perempuan	16	45	35%
		Laki-laki	29		
5.	Nasional Demokrat (NASDEM)	Perempuan	16	45	35%
		Laki-laki	29		
6.	Partai Amanat Nasional (PAN)	Perempuan	15	45	33%
		Laki-laki	30		
7.	Partai Bulan Bintang (PBB)	Perempuan	12	31	38%
		Laki-laki	19		
8.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Perempuan	15	43	35%
		Laki-laki	28		
9.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Perempuan	14	45	31%
		Laki-laki	31		
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Perempuan	13	28	46%
		Laki-laki	15		
11.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Perempuan	16	44	36%
		Laki-laki	28		

12.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Perempuan	17	41	41%
		Laki-laki	24		
Total		Perempuan	180	501	36%
		Laki-Laki	321		

Sumber: *Komisi Pemilihan Umum (2014)*

Tabel diatas menggambarkan bahwa setiap partai politik sudah memenuhi pendaftaran 30% perempuan. Walaupun jumlah keterwakilan perempuan di pendaftaran dengan kuota yang minimal hanya 36% atau hanya 180 orang dari 501 calon pendaftar. Hemat peneliti bahwa rekrutemen anggota dan penjuragan sudah tepat namun belum efektif untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Selain rekrutmen anggota juga perlu dilakukan diskusi, pendidikan, pelatihan dan perlu adanya pemahaman di setiap partai politik tentang pentingnya perempuan di lembaga legislatif. Sementara itu di Partai Golkar melalui penempatan nomer perempuan walaupun harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan, menurut peneliti penempatan nomer atau *zyper system* adalah satu cara untuk dapat memilih perempuan di nomer-nomer tentu namun partai Golkar juga harus memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) dan di Partai Gerindra melalui peningkatan sumber daya di sayap organisasi yaitu di Perempuan Indonesia Raya (PIRA). Adanya sayap organisasi menurut peneliti sangat tetap dan efisien karena adanya wadah tersendiri dalam melakukan kaderisasi terhadap perempuan sehingga bisa lebih fokus terhadap isu-isu dan pengembangan kapabilitas kader perempuan.

c. Responsivitas Pelaksana

Penyusunan kebijakan ketika dilaksanakan di masyarakat tidak selalu berjalan lancar karena adanya kendala-kendala yang terjadi. Kebijakan yang mengalami kendala ini disebabkan oleh berbagai faktor baik dari kejelasan isi kebijakan ataupun keadaan masyarakat yang belum mampu berubah dengan adanya kebijakan baru. Dalam hal ini kepatuhan untuk melaksanakan peraturan tentu saja diperlukan demi kelancaran implementasi peraturan tersebut. Grindle mengemukakan bahwa hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Bentuk kepatuhan salah satunya ditunjukkan ketika suatu lembaga tersebut mampu memenuhi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 yaitu mengenai Panduan Peningkatan Partisipasi Politik di Lembaga Legislatif Kota Malang. Responsivitas kelembagaan tersebut dilihat dari berbagai aspek baik jumlah keterwakilan perempuan, strategi, kebijakan maupun program serta pendanaan. Penentuan kuota 30% bukan suatu kebijakan tetap melainkan sebagai kebijakan tindakan sementara (*affirmative action*) dalam kepengurusan partai politik serta daftar calon anggota legislatif. Hj. Wiwik Hendra Astuti selaku Wakil Ketua DPRD Kota Malang dari partai Demokrat menyampaikan bahwa

“Saya rasa Partai Demokrat Kota Malang masih bagus, kepengurusan kita juga sudah 30% perempuan. Roda kepengurusan kita perempuan juga sudah 32%, sehingga apa yang menjadi tolak ukur tadi 30% sudah dipenuhi. Kalau

bisa laki-laki dan perempuan sejajar. Didalam keluarga yang sukses, pasti ada perempuan yang sukses”. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2018 pada pukul 11.01 WIB)

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Malang Ibu Dr. Ya’qud

Ananda Gudban,SS., SST.Par., MM menyampaikan bahwa

“Kami dari DPC Partai Hanura Kota Malang menyampaikan segala peraturan ini dan termasuk Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 kepada masyarakat dan seperti yang saya sampaikan tadi kami DPC Partai Hanuura Kota Malang membuka *open* rekrutment terhadap caleg”. Hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 14.02)

Sekretaris DPC PDIP Kota Malang yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD

Kota Malang Bapak Drs. Abd. Hakim menjelaskan bahwa

“Di PDIP Kota Malang tidak ada persoalan dengan hal tersebut, monggo. Kita mendorong semuanya, hal yang penting bahwa semua itu adalah amanat peraturan perundangan yang harus kita jalankan. Peraturan kuota 30% juga kita jalankan. Hanya kembali lagi pada kesiapan dari kader-kader perempuan yang saat ini semakin banyak, sehingga tidak ada permasalahan”. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Januari 2018 pada pukul 09.30 WIB)

Pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 di Kota Malang dalam peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif melalui berbagai tahap mulai dari pendidikan, pelatihan dan merekrut anggota sebanyak-sebanyaknya. Pendidikan dan pelatihan ini akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya perempuan itu sendiri. Seluruh dari elemen masyarakat harus

meningkatkan hal tersebut agar tercapai kesetaraan *gender*. Selain pendidikan dan pelatihan juga dapat didorong dengan adanya sayap organisasi di bidang pemberdayaan perempuan. Bapak Achmad Anang Fatoni, SE selaku Wakil Sekretaris I Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Malang menyampaikan bahwa

“Sebenarnya kita menginginkan banyak pelatihan-pelatihan untuk kader perempuan. Respon Partai Demokrat terhadap perempuan bahwa kita menyediakan divisi bidang pemberdayaan perempuan yang *consen* dengan segala isu-isu perempuan di Kota Malang maupun Nasional itu sebagai salah satu implementasi peraturan ini”. (Hasil wawancara pada tanggal 12 Januari 2018 pukul 15.38 WIB)

Ketua Komisi C bidang Pembangunan DPRD Kota Malang Bapak Ir. Bambang Sumarto menyampaikan bahwa

“Responsivitas dari Partai Golkar bahwa ingin selalu mendorong perempuan untuk mau mencalonkan diri di lembaga legislatif. Kegiatan ini nyata dilakukan Partai Golkar dengan mendorong para perempuan yang tergabung dalam Kelompok Perempuan Partai Golkar atau yang disingkat yaitu KPPG berlomba-lomba untuk menjadi calon legislatif”. (Hasil wawancara pada tanggal 13 Maret 2018 pada pukul 12.15 WIB)

Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Malang, Ibu Wiwin Indriani, S.Sos menyampaikan bahwa

“Partai Gerindra sangat senang dengan partisipasi politik perempuan. Apalagi jika kemarin Partai Gerindra mengusung Abah Anton lalu maka berimbas banyak perempuan yang masuk ke Partai Gerindra. Selain itu dengan adanya kelompok Perempuan Indonesia Raya yang disingkat PIRA dan adanya relasi perempuan yang bekerja maka banyak sekali anggota yang bergabung dengan Gerindra. Dalam PIRA juga ada mbak pendidikan dan pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas perempuan”. (Hasil wawancara pada tanggal 17 Januari 2018 pada pukul 15.54 WIB)



Gambar 20: Bakti Sosial Perempuan Indonesia Raya Malang

Sumber: Dokumentasi PIRA (2017)

Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelembagaan terhadap peningkatan partisipasi politik perempuan harus ditunjukkan dengan baik. Mendorong perempuan agar mampu dan mau di lembaga legislatif adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh setiap elemen. Ketika perempuan berada di legislatif maka yang dibicarakan akan lebih luas dan detail seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang Ibu Sri Widayati SE.,Msi menyampaikan bahwa

“Tingkat kepatuhan dan responsivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang melalui peningkatan peran serta perempuan di bidang politik sangat luar biasa”. (Hasil wawancara pada tanggal 24 Januari 2018 pada pukul 13.13 WIB).

Wakil Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan Nasdem DPRD Kota Malang Ibu Asia Iriani, SE yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Ekonomi, Pengembangan Koperasi dan Kewirausahaan menjelaskan bahwa

“Bahwa kita sebagai perempuan terutama anak-anak kita, seorang ibu akan memikirkan anak-anak kita. Pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum diurus oleh politik. Partisipasi politik perempuan itu harus dan wajib hukumnya, bahwa memang perempuan harus berpartisipasi penuh dengan politik. Setelah dikeluarkannya perda kekerasan rumah tangga di Kota

Malang, jumlah pelaporan adanya kekerasan rumah tangga meloncat sampai 2x, hal itu terjadi karena perempuan sadar bahwa jika perempuan mengalami kekerasan itu dilindungi. Dengan adanya peraturan ini maka perempuan berani untuk melapor. Jangan merasa perempuan yang merasa menjadi objek, laki-laki juga bisa menjadi objek”. (Hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2018 pada pukul 16.25 WIB)

Wakil Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang, Abu Thazid dan juga Juru Bicara Fraksi Persatuan Pembangunan DPRD Kota Malang menyampaikan bahwa

“Selama ini Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang terhadap keterwakilan perempuan di lembaga legislatif plural terhadap perempuan dengan terbukti bahwa ada dua anggota dari kami menjadi anggota DPRD Kota Malang. Selain itu ketua DPC PPP Kota Malang juga perempuan yaitu Bunda Heri”. (Hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2018 pada pukul 10.47 WIB)

Peran Kelembagaan pada BAB II Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 bagian organisasi kemasyarakatan menyebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan bisa menjadi mitra partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah, maupun pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga legislatif. Organisasi kemasyarakatan ini akan memberi masukan mengenai permasalahan yang dialami perempuan sehingga nanti para lembaga legislatif mampu untuk melakukan perubahan. *Women's Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang melakukan pengawalan agar nantinya calon anggota DPRD perempuan

mampu menyelesaikan permasalahan satu demi satu. Dr. Lucky Endrawarti,SH.,MH selaku pengurus bidang hukum pidana di Women's Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang menjelaskan bahwa

“Women's Crisis Center tugasnya mengawal. Jadi pengawalan yang dilakukan oleh Women's Crisis Center yang dilakukan adalah misalnya pasangan calon A berfokus pada meningkatkan kesejahteraan pasangan calon B meningkatkan keamanan dan pasangan calon C menstabilkan perekonomian setelah itu kami evaluasi bersama lalu kita kawal mencari isu perempuannya berada dimana. Jika isu perempuannya ini sudah dimasukkan oleh calon maka nanti ketika sudah terpilih, kita evaluasi kembali, Bentuk implementasinya sudah mempunyai peraturan daerah atau tidak, perbedaan dengan lima tahun yang lalu, dampak atau perubahan yang dialami”.(Hasil wawancara pada tanggal 19 Januari 2018 pada pukul 11.28 WIB).

Staf Pendidikan Politik Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur Saras Dumasari yang pada tahun 2014 menjabat sebagai Bendahara di Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Malang menyampaikan bahwa

“Responsivitas yang bisa dilihat dari Koalisi Perempuan Indonesia dengan melakukan identifikasi kader yang berpotensi sebagai pemimpin dalam berbagai tingkatan. Sehingga ada *database* yang digunakan untuk membangun kesadaran berpolitik dan calon legislatif tiap level dalam peningkatan kesejahteraan dalam demokrasi. Selain itu juga membangun jaringan yang memiliki visi misi dan nilai dalam gerakan bersama advokasi perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini diharapkan organisasi masyarakat dapat melakukan internalisasi kesepakatan dalam *management* isu. Membangun jaringan untuk mendukung calon legislatif perempuan dalam memenangkan pemilu”. (Hasil wawancara pada tanggal 12 Maret 2018 pada pukul 17.00 WIB)

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Divisi Hukum yaitu Bapak Fajar Santosa, SH.MH berpendapat bahwa

“Kerja KPU mengacu pada konstitusi bahwasanya pemilu diterjemahkan sebagai pemilihan legislatif, presiden, DPRD, DPRD Provinsi dan DPD. Kalau dalam UU Pemilu, ada UU baru yaitu UU NO 7 Tahun 2017, partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif. Untuk menjadi peserta pemilu itu ada syarat-syaratnya yaitu misalnya ditingkat kabupaten/ kota yaitu 1000 anggota atau per seribu. Di Malang ini ada 834.000 masyarakat, maka harus ada 834 anggota dulu. Kalau membicarakan pemilu jadi harus melihat partai politik terlebih dahulu. Salah satunya adalah lolos verifikasi kepengurusan yaitu ada ketua, sekretaris dan bendahara serta mempenunyai 30% perempuan dalam kepengurusan. Itu adalah sebuah syarat untuk bisa lolos sebagai peserta pemilu. Kalau dulu kuota 30% kepengurusan itu adalah wajib pada UU No 8 Tahun 2012, sedangkan pada UU No 7 Tahun 2017 hanya memperhatikan saja. Dulu ini menjadi syarat menggugurkan, kalau sekarang hanya memperhatikan. Sedangkan di parta politik pusat bahwa kepengurusan 30% itu wajib, jika di DPP atau pusat tidak dipenuhi maka tidak memenuhi syarat. Regulasi akan sempurna jika di pusat dan di daerah sama, sedangkan peraturan yang sekarang tidak sama. Dari peraturan ini saja sudah tidak pro dengan perempuan. Kalau berbicara perempuan itu di syarat dan pencalonan. Di konteks Pencalonan, bahwa memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% perempuan. Kalau nomer urut sekarang kan tidak diatur. Setiap perwakilan pusat, provinsi, kota dan kabupaten bahwa partai politik berhak mengajukan 100% dari jumlahnya. Misalnya di Kota Malang ada 45 caleg harus terdistribusi ke seluruh dapil dan 30% adalah perempuan. Penetapan angka 45 orang ada di peraturan yaitu jika jumlah penduduk Kota/Kabupaten 450.000- 1.000.000 maka lembaga pewakilannya mendapatkan 45 anggota. Kalau Jawa Timur mempunyai penduduk 20.000.000 maka anggota legislatifnya 120 orang maka partai politik bisa mencalonkan 100%”. (Hasil wawancara tanggal 7 Maret 2017 Pukul 09.20 WIB)

Berbagai pendapat diatas menunjukkan bahwa partai politik sudah memenuhi kuota 30% dengan adanya anggota perempuan di DPRD Kota Malang. Responsivitas Pelaksana kebijakan oleh Partai Demokrat, PDIP, dan PPP melalui jumlah kepengurusan yang sudah mencapai 30%. Menurut peneliti walaupun jumlah kepengurusan sudah mencapai 30% namun kader perempuan yang di lembaga legislatif belum banyak hanya sekitar 20% pada proses pemilihan karena dua orang

itu adalah DPRD dari hasil pergantian yaitu Ibu Sulik Lestyowati dari Demokrat dan Ibu Diana Yanti dari PDIP. Sehingga perlu adanya kampanye yang lebih inovatif sehingga masyarakat akan memilih lebih banyak perempuan di lembaga legislatif.

Tabel 6

Kuota Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik Kota Malang

No.	Nama Partai	Jenis Kelamin	Jumlah	Total	Kuota Perempuan
1.	Demokrat	Perempuan	8	15	53%
		Laki-laki	7		
2.	Gerindra	Perempuan	10	30	33%
		Laki-laki	20		
3.	Golongan Karya (GOLKAR)	Perempuan	11	35	30%
		Laki-laki	24		
4.	Hati Nurani Rakyat (HANURA)	Perempuan	9	22	41%
		Laki-laki	13		
5.	Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP)	Perempuan	5	15	30%
		Laki-laki	10		
6.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Perempuan	11	35	30%
		Laki-laki	24		

Sumber: Dokumen dari Partai Politik, diolah (2017)

Tabel diatas memperlihatkan bahwa benar yang disampaikan oleh pendapat diatas, bahwa jumlah kepengurusan 6 partai politik yang mampu mendistribusikan kadernya ke kursi parlemen sudah memenuhi kuota 30% perempuan di kepengurusan sehingga peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD sudah dilakukan. Menurut Ketua DPC Partai Hanura Kota Malang responsivitas pelaksanaan kebijakan dilakukan melalui *open recruitmen* untuk menjaring anggota sebanyak-banyaknya. Menurut peneliti walaupun adanya *open recruitmen* melalui penjangkaran anggota sebanyak-banyaknya jika tidak diberikan ilmu dan pelatihan maka dalam pencalonan legislatif tidak akan mampu bersaing dengan baik. Sehingga Partai HANURA Kota Malang dengan rekrutmen anggota juga perlu mengisi kemampuan dan ketrampilan anggota perempuannya agar mampu membuat kampanye yang inovatif dan mampu menjadi DPRD Kota Malang yang bisa membuat perubahan. Di Partai Demokrat juga responsivitas ditunjukkan dengan adanya bidang pemberdayaan perempuan serta di Gerindra ada organisasi perempuan Perempuan Indonesia Raya (PIRA) dan di Golkar yaitu Kelompok Perempuan Partai Golkar (KPPG). Adanya bidang yang mewadahi perempuan ini menurut peneliti sudah tepat karena ada tempat untuk fokus terhadap pemberdayaan dan peningkatan kemampuan kader perempuan. Sama halnya dengan yang dilakukan Koalisi Perempuan Indonesia Cabang melalui identifikasi kader potensial di bidang politik. Sedangkan di *Women's Crisis Center* Dian Mutiara melalui diskusi dan pengawalan pemilihan umum. Organisasi kemasyarakatan ini menurut peneliti sudah efektif

dengan adanya pengawalan, karena masyarakat akan mampu melihat dan mengawasi proses penyelenggaraan pemilu. Namun juga perlu organisasi kemasyarakatan memberikann pemahaman melaui kampanye melek politik. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen maka responsivitas pelaksanaanya ditunjukkan melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan, verifikasi anggota dan jumlah calon legislatif perempuan. Kegiatan yang dilakukan KPU Kota Malang masih kurang tepat karena sebagai penyelenggara pemilu juga perlu melakukan kegiatan seminar tentang partisipasi masyarakat terhadap pemilu maupun diskusi untuk setiap calon legislatif.

3. Kerangka implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Legislatif Kota Malang berdasarkan model Grindle.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Merilee S.Grindle untuk mendeskripsikan pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik di Lembaga Legislatif Kota Malang. Perlu diketahui bahwa jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Malang hanya 11 orang yaitu 9 orang dari hasil perolehan suara dan 2 orang dari menggantikan DPRD Kota Malang yang meninggal dunia dan terjerat kasus, dari jumlah total anggota DPRD Kota Malang 45

orang. Banyak hal yang mengakibatkan jumlah tersebut sangat minim mulai faktor internal dan eksternal organisasi. Salah satu kebijakan yang berusaha untuk melindungi dan memberikan hak perempuan untuk mampu menjadi calon legislatif adalah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013. Maka untuk menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan tersebut dan partisipasi politik perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang, penulis akan menjelaskan melalui skema berikut:

Tujuan Kebijakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif adalah untuk membantu penyusunan program dan kegiatan peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif agar lebih sistematis, terukur, dan akuntabel”.

Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif dipengaruhi oleh: isi kebijakan peningkatan partisipasi politik perempuan dan lingkungan implementasi

Hasil pelaksanaan kebijakan panduan peningkatan partisipasi politik perempuan:

- a. Pembuatan kebijakan yang berpihak pada perempuan
- b. Peningkatan Kesetaraan Gender
- c. Mendorong sosialisasi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif

A. Isi Kebijakan Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang

a. Kelompok kepentingan ada dari pihak Pemerintah, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan. Sasaran dari berbagai kepentingan ini adalah untuk meningkatkan jumlah partisipasi perempuan di lembaga legislatif sehingga permasalahan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan umum dapat diselesaikan. Selain itu dalam implementasi kebijakan ini perlu adanya pelibatan perguruan tinggi dan pembuatan kontrak politik dalam pemilihan legislatif.

b. Kebijakan ini bermanfaat untuk memberikan ruang kepada perempuan di lembaga legislatif, mendorong lembaga melakukan sosialisasi pentingnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan meningkatkan jumlah perempuan di DPRD Kota Malang. Selain itu setelah pemilu berlangsung para anggota DPRD perempuan diharapkan mampu membuat regulasi pro perempuan namun ternyata belum dilaksanakan secara maksimal. Serta dari segi fungsi anggaran dan pengawasan belum mampu menyerap aspirasi perempuan serta belum bisa meminta kepada pemerintah untuk memberikan bantuan cepat tanggap terhadap korban

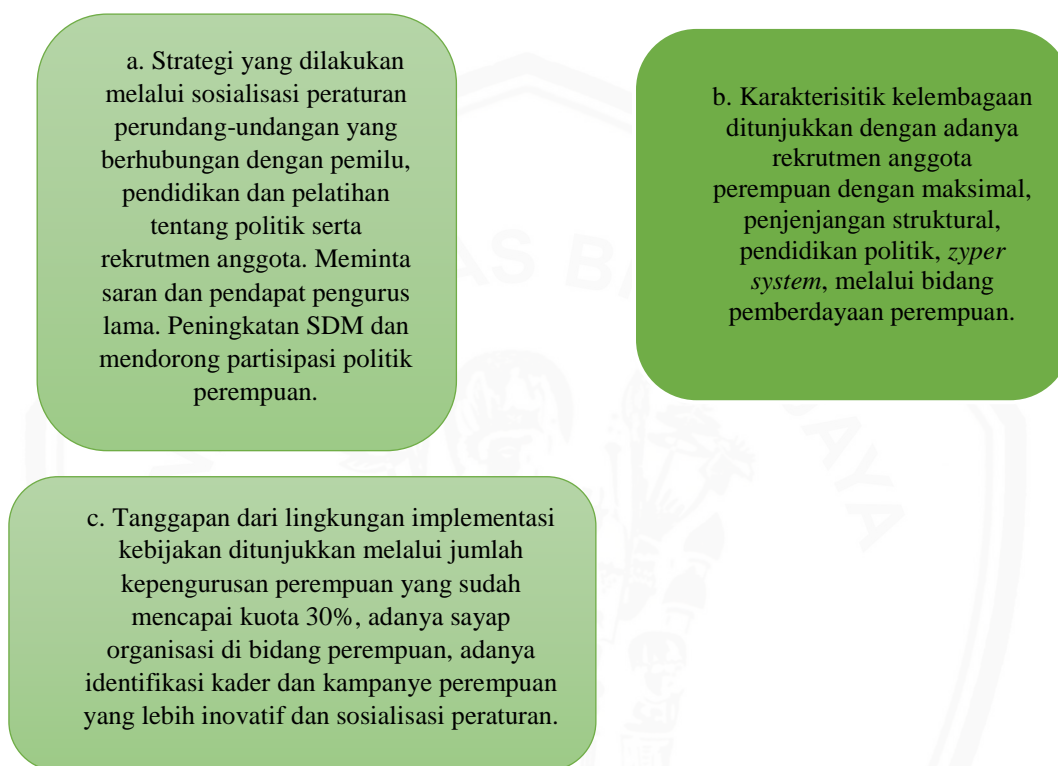
c. Perubahan belum ditunjukkan oleh beberapa lembaga dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan sehingga dari kuantitas jumlah perempuan di legislatif masih sama dengan periode 2009-2014. Selain itu memperjuangkan anggaran kesehatan di RSUD serta memperjuangkan makanan balita ketika di posyandu. Serta memperjuangkan anggaran ibu-ibu honor posyandu. Dari sisi fungsi legislasi, DPRD Kota Malang belum mampu membuat perubahan secara signifikan, walaupun sudah terbentuk "Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan" namun perda tersebut belum mampu memberikan rasa aman dan bantuan cepat tanggap kepada korban.

d. Letak Pelaksanaan kebijakan dilakukan melalui rapat kepengurusan, pengambilan keputusan oleh struktural partai dan para ketua partai politik. Selain itu juga melalui musyawarah untuk mufakat dan *voting*.

f. Sumber daya yang digunakan terdiri dari para *stakeholder* dan sasaran kebijakan. Untuk para *stakeholder* yaitu legislatif dan eksekutif serta perguruan tinggi. Untuk sasaran kebijakan yaitu perempuan dan masyarakat pada umumnya.

e. Pelaksana Kebijakan dalam hal ini melalui pelaksanaan pendaftaran 30% anggota perempuan, menjalankan kebijakan sesuai peraturan, mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dan melakukan diskusi-diskusi

B. Lingkungan Implementasi Kebijakan Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang



Gambar 21: Proses Implementasi Kebijakan Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang

C. Analisis Data

Politik merupakan sebuah studi mengenai kebijakan umum. Dimana politik ini seharusnya merupakan sebuah jembatan dalam sistem kekuasaan yang dipegang oleh kaum aristokrat melalui sistem pemilihan umum dan melaksanakan apa yang diaspirasikan masyarakat. Dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat 2 “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Namun, ternyata politik belum mampu menjadi jembatan untuk melaksanakan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang begitu banyak dan bermacam-macam harus ditampung melalui wadah-wadah yang memenuhi kepentingan mereka yaitu partai politik. Partai Politik sebagai organisasi yang turut serta dalam demokrasi di Indonesia mempunyai peran penting dalam proses pemilihan umum. Partai Politik menjelma sebagai kelompok yang mengumpulkan berbagai aspirasi masyarakat lalu ditampung dalam berbagai bentuk kelompok kepentingan. Partai Politik sesuai yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan hendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Partai politik menjadi salah satu lembaga terpenting dalam Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang dikarenakan partai politik adalah pihak yang mempunyai kewajiban untuk mengikuti segala peraturan yang dibentuk perundang-undangan dan peraturan pemerintah sebagai bentuk badan hukum. Partai politik melakukan kaderisasi dan mendistribusikan kader-kadernya dalam pemilihan umum legislatif maupun eksekutif. Demi mencapai keberhasilan Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014, partai politik adalah satu lembaga yang dibutuhkan selain itu juga diperlukan kerjasama dari Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang dan Organisasi Kemasyarakatan (*Women's Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang dan Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Malang).

Sesuai dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang Bab IV bidang Strategi maka partai politik harus mampu meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam tiga tahapan yaitu sebelum pemilu legislatif, selama pemilu legislatif dan setelah pemilu legislatif. Proses untuk menjalankan tiga tahapan

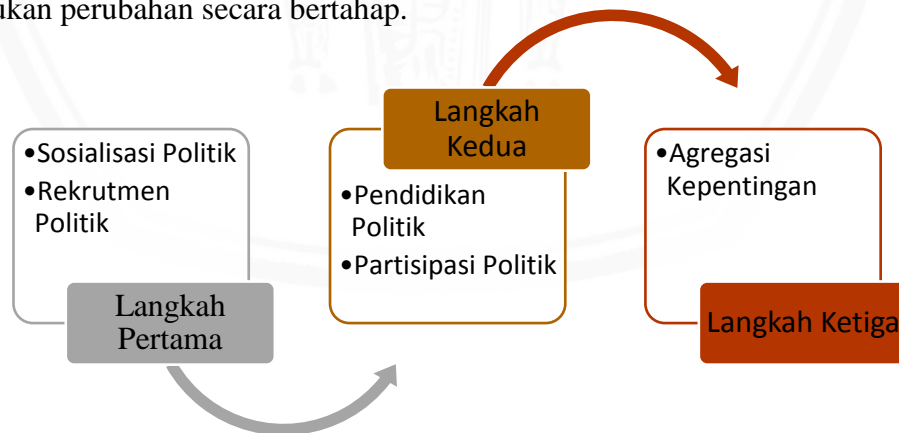
tersebut harus dijalankan oleh Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang dan Organisasi Kemasyarakatan (*Women's Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang dan Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Malang) karena sebagai pihak yang disebut dalam BAB II bagian Peran Kelembagaan. Berbagai kelembagaan tersebut harus mampu menentukan strategi dalam tiga tahapan agar dalam penempatan perempuan di lembaga legislatif bisa melakukan derajat perubahan untuk masyarakat.

Tahapan sebelum pemilu bahwa setiap partai politik di Kota Malang harus mampu melakukan perekrutan anggota baik laki-laki dan perempuan sebanyak-banyak dikarenakan setiap partai politik yang mengikuti Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kota Malang harus memiliki anggota sebanyak 1/1000 jiwa. Pada Peraturan Komisi Pemilu Umum Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Pasal 4 ayat (2) partai politik peserta pemilu memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk. Peraturan ini sama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 172 ayat 2. Oleh kedua belas partai politik peserta pemilu sudah dipenuhi ditingkat pusat maupun ditingkat Kota Malang. Selain itu ditingkat jumlah kepengurusan keenam partai politik yang menjadi situs

penelitian sudah mampu memberikan kuota 30% kepada perempuan. Partai Demokrat dengan jumlah kepengurusan yang hanya 15 orang mampu memberikan 53% kuota kepengurusan kepada perempuan. Menurut pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 dan juga diperbaharui pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa pengurus partai politik adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara pada partai politik sesuai tingkatannya atau sesuai dengan sebutan lain Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan. Sehingga dengan komposisi tersebut maka tidak semua partai politik memiliki kepengurusan yang banyak seperti PDIP dan Demokrat memiliki jumlah kepengurusan ketua, sekretaris, bendahara hanya 15 orang sebagai pengurus harian dan sisanya pada kepengurusan divisi-divisi yang tidak termasuk dalam verifikasi kepengurusan pemilu.

Selama pemilu berjalan maka partai politik harus melakukan pendaftaran, pencalonan dan kampanye dengan baik sehingga pada proses pemungutan suara para calon legislatif bisa dipilih oleh masyarakat. Setiap partai politik mendistribusikan kader perempuannya ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Malang sudah mencapai jumlah 30% perempuan dari keseluruhan peserta yang dicalonkan. Keterwakilan perempuan dengan kuota 30% ini adalah bentuk dari *affirmative action* yang diberikan oleh Pemerintah untuk mampu meningkatkan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 pasal 1 menyebutkan bahwa tindakan khusus sementara (*affirmative*

action) adalah kebijakan sementara yang dikhususkan untuk perempuan dalam usaha mencapai keadilan gender dan kesetaraan gender bidang politik. Sebagai tindakan khusus sementara demi mencapai keterwakilan perempuan di lembaga legislatif maka setiap elemen harus mampu untuk mendorong partisipasi perempuan. Menurut Lovenduski dan Karam (1999) anggota parlemen perempuan akan melalui tiga tahap untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Langkah pertama; yang dilakukan anggota parlemen perempuan adalah memahami cara bekerja anggota dewan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan sehingga dapat bekerja lebih cepat. Langkah kedua, yakni dengan mempelajari cara menggunakan aturan-aturan yang ada, sehingga perempuan dapat meraih peluang untuk ikut serta dalam posisi dan komite-komite kunci, membuat diri mereka didengar dalam pembahasan dan debat. Langkah ketiga adalah mengawal perubahan struktur dan aturan yang ada untuk melakukan regenerasi. Setelah langkah tersebut dapat dilakukan maka akan mampu melakukan perubahan secara bertahap.



Gambar: Tiga Tahap Anggota Parlemen Perempuan Dalam Mewujudkan Perubahan

Ketiga tahapan tersebut harus dilaksanakan calon anggota legislatif perempuan. Langkah pertama melalui sosialisasi politik yaitu partai politik membentuk sikap dan orientasi calon anggota legislatif perempuan mengenai kinerja menjadi anggota parlemen serta melakukan rekrutmen politik yaitu proses seleksi calon anggota legislatif perempuan tersebut. Langkah kedua yaitu melalui pendidikan politik, partai politik, KPU Kota Malang dan Ormas melakukan proses penyadaran tentang pentingnya memahami keikutsertaan dalam pemilihan umum. Partisipasi politik perempuan yaitu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik agar ikut serta melakukan pemilihan. Langkah ketiga untuk melakukan perubahan dan regenerasi dilakukan melalui agregasi kepentingan yaitu mengombinasikan kepentingan masyarakat melalui anggota legislatif perempuan terpilih.

Partisipasi politik perempuan dalam langkah kedua akan membantu mencapai keadilan gender sehingga juga akan bisa melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusataaman Gender dalam Pembangunan Nasional. Pada Instruksi tersebut bagian ketiga untuk Menteri Pemberdayaan Perempuan yaitu “memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan pengarusastamaan gender. Sehingga partai politik harus mampu melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 untuk

meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif dan melaksanakan pengarusataman gender.

Demi mencapai keberhasilan kesetaraan gender tersebut tentu saja kuota 30% itu hanya bersifat sementara jika nantinya sudah mencapai kesetaraan gender maka peraturan tersebut tidak diperlukan. Namun kenyataannya menurut hemat peneliti, Kota Malang belum mampu mewujudkan kesetaraan gender tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD pasal 26 serta peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 191 bahwa “Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45(empat puluh lima) kursi. Sehingga Kota Malang yang memiliki penduduk 851.298 maka memperoleh kursi untuk anggota DPRD Kota Malang sejumlah 45 orang. Jumlah kursi 45 orang tersebut harus diperebutkan dari 501 orang. Maka calon perempuan harus mampu bersaing untuk mendapat kursi tersebut. Namun, di Kota Malang pendaftaran dengan kuota 30% perempuan seolah-olah hanya dipandang sebagai mengikuti aturan saja bukan sebagai bentuk keterwakilan perempuan maupun bentuk partisipasi politik perempuan. Jika memang setiap partai politik ingin mendistribusikan kader perempuannya ke dalam anggota legislatif Kota Malang, seharusnya ada kenaikan jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD dari tahun

periode sebelumnya yaitu 2009-2014. Pada tahun tersebut jumlah legislatif perempuan berjumlah 13 orang sedangkan pada tahun periode 2014-2019 juga sama 11 orang namun yang resmi hasil dari perolehan suara hanya 9 orang perolehan suara dan 2 orang melalui pergantian. Sehingga jika dipresentasikan dari total 45 anggota DPRD Kota Terpilih maka hanya ada 11 ada perempuan (9 orang dari perolehan suara terbanyak dan 2 melalui pergantian) atau hanya sekitar 24,4%. Sebelas perempuan tersebut pun belum mewakili semua dari partai politik, hanya enam partai politik yang menempatkan perempuannya yaitu PDIP dengan 5 anggota perempuan, Demokrat dengan 2 anggota perempuan, PPP dengan 2 anggota perempuan, Hanura dengan 1 anggota perempuan, serta Gerindra dan Golkar dengan 1 anggota perempuan. Disini partai politik mengalami penurunan untuk mampu mendistribusikan perempuan ke lembaga legislatif. Jadi partai politik dan calon legislatif harus mampu berkampanye secara lebih inovatif agar mampu menarik perhatian masyarakat agar terpilih. Jumlah anggota legislatif perempuan yang sedikit ini selaras dengan yang disampaikan oleh Nantri dalam Sastriyani(2009:200) ada dua faktor yang menyebabkan perempuan di partai politik masih kecil yaitu pandangan bahwa politik itu keras tidak sesuai dengan perempuan serta sistem pemilu, peran organisasi politik dan nilai budaya yang belum berpihak pada perempuan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tujuan Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang

adalah untuk membantu penyusunan program dan kegiatan peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif agar lebih sistematis, terukur dan akuntabel. Partai Politik disini memberikan pendidikan politik kepada setiap kader-kader perempuan untuk mampu bersaing dan akuntabel kepada masyarakat. Pendidikan politik yang diberikan oleh PPP, Gerindra dan Demokrat adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas calon perempuan legislatif didalam kursi parlemen sehingga bisa melakukan kinerja dengan baik. Di sisi lain PPP, PDIP dan Demokrat Kota Malang juga memiliki bidang pemberdayaan perempuan sebagai bentuk wadah untuk meningkatkan kemampuan perempuan. Selain itu Golkar dan Gerindra juga memiliki wadah di bidang perempuan yaitu lebih tepatnya sayap organisasi yaitu PIRA (Perempuan Indonesia Raya) dan KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar), adanya sayap organisasi disini dibentuk agar lebih fokus terhadap pengembangan kualitas perempuan.

Setelah pemilu selain penetapan daftar anggota DPRD Kota Malang yang berjumlah 45 orang namun juga perlu dilihat bahwa perubahan yang telah dilakukan oleh anggota legislatif perempuan setelah 3 tahun lebih berjalan. Anggota DPRD Kota Malang telah membuat “Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan”. Namun adanya peraturan tersebut belum mampu memberikan rasa aman dan memberikan perlindungan kepada perempuan yang mengalami kekerasan. Dikarenakan pada peraturan tersebut belum mampu memerintahkan dinas terkait untuk memberikan bantuan cepat

tanggap. Hasil wawancara penelitian menemukan bahwa DP3AP2KB Kota Malang belum mampu memberikan bantuan yang cepat dan pemerintah tidak menyediakan *visum* bagi korban kekerasan perempuan. Adanya perempuan di lembaga legislatif selain melaksanakan fungsi legislasi namun juga harus mampu melaksanakan fungsi penganggaran dan pengawasan kepada pemerintah sehingga peraturan daerah yang dibuat tidak berjalan sia-sia.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang dilakukan oleh banyak lembaga, selain partai politik diatas juga dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang, DP3AP2KB, *Women's Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang dan juga Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Malang. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga independen negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada pasal 22 E ayat (5) 1945 Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasionalis, tetap dan mandiri. Sehingga KPU tidak bisa diperintahkan oleh siapapun kecuali ada *Memorandum of Understanding* atau MOU. Namun pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 di bagian Penyelenggara Pemilu dituliskan bahwa “Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib membuat peraturan

pelaksanaan pemilu yang bisa menjamin terlaksananya kebijakan tindakan khusus sementara sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif yang diajukan oleh partai politik. Hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa KPU Kota Malang tidak mengikuti peraturan menteri tersebut karena tidak ada perjanjian sebelumnya, namun KPU Kota Malang tetap ikut berperan serta dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di legislatif melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang dibuat oleh KPU itu sendiri. Selain itu KPU juga sebagai lembaga yang melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas pencalonan sehingga dalam hal ini KPU juga melakukan tugas untuk memastikan bahwa setiap partai politik memang telah melakukan keterwakilan perempuan di kepengurusan maupun di daftar calon anggota legislatif.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Malang yang juga turut serta untuk mendorong lebih banyak perempuan aktif di dunia politik. Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik perlu dikembangkan secara terencana dan terprogram. Namun penemuan dari lapangan bahwa DP3AP2KB Kota Malang menunjukkan hasil yang tidak sinkron. Disisi lain DP3AP2KB Kota Malang mengemukakan belum menganggarkan dan belum membuat program dalam peningkatan partisipasi politik perempuan. Tapi jawaban lain mengungkapkan bahwa sudah melaksanakan program peningkatan partisipasi politik perempuan. Menurut hasil observasi peneliti bahwa

DP3AP2KB Kota Malang belum bekerja secara maksimal untuk turut serta dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan baik melalui pendidikan, pelatihan maupun sosialisasi. Secara struktural, DP3AP2KB Kota Malang bidang Pemberdayaan Perempuan sudah memiliki beberapa divisi/seksi-seksi untuk melakukan program partisipasi politik perempuan. Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang memiliki 3 seksi yaitu seksi peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan dan pengembangan kelembagaan perempuan serta edukasi dan partisipasi perempuan. Namun belum mampu memaksimalkan tiga seksi tersebut untuk melakukan program peningkatan partisipasi politik perempuan.

Peran kelembagaan dalam peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif juga dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. Pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 Bab II bagian Peran Kelembagaan menyebutkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang berbasis anggota dan yang tidak berbasis anggota (kerja), baik ormas yang peduli /penggiat politik maupun ormas yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dapat mendorong anggota/kader aktif di partai politik. Ormas di Kota Malang yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan dijadikan situs penelitian adalah *Women's Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang dan Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Malang.

Women's Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang adalah lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan terutama pendampingan terhadap

masalah korban kekerasan. *Women's Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang dipilih dikarenakan sudah memiliki akta notaris pada tahun 2005 sehingga lembaga tersebut sudah diakui keberadaanya. Selain itu *Women's Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang memiliki program layanan preventif dan advokasi kebijakan publik. Layanan Preventif yang dilakukan oleh *Women's Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang meliputi sosialisasi perundangan-perundangan sebagai bentuk kampanye agar masyarakat melek politik dan juga advokasi kebijakan publik tentang Peraturan Daerah Kabupaten Malang Kekerasan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan.

Menurut hasil wawancara dan observasi peneliti bahwa *Women's Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang sebenarnya tidak berfokus kepada bidang politik melainkan pada bidang advokasi perempuan. Namun hasil temuan ketika ada korban kekerasan melaporkan kepada WCC Dian Mutiara bahwa adanya hambatan ketika dilapangan misalkan bantuan yang lambat dari pemerintah. Ketika dilakukan pengkajian mendalam maka ditemukan bahwa adanya kurang cepat tanggap pemerintah terhadap perempuan korban kekerasan, sehingga dicari sumber masalahnya kenapa pemerintah lambat. Hasil temuan *Women's Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang menemukan bahwa ada beberapa faktor salah satunya kesalahan memilih kepala daerah atau anggota legislatif. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa perlu adanya sosialisasi kampanye politik agar masyarakat tidak salah memilih eksekutif maupun legislatif. Latar belakang tersebut juga

membuat *Women's Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang memberikan pendapat agar dibuatnya kontrak politik antara eksekutif ataupun legislatif kepada masyarakat sehingga dengan adanya kontrak politik dapat digunakan untuk menagih janji kampanye kepada para eksekutif ataupun legislatif terpilih.

Koalisi Perempuan Indonesia yang memiliki visi “terwujudnya kesetaraan dan keadilan *gender* menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab”. Demi mencapai mewujudkan visi tersebut maka salah satu misinya adalah pemberdaya hak politik perempuan. Tujuan Koalisi Perempuan Indonesia untuk memperjuangkan terpenuhinya hak perempuan di berbagai bidang salah satunya adalah politik. Koalisi Perempuan Indonesia memperjuangkan masyarakat yang demokratis melalui partisipasi perempuan dan keterwakilan kepentingan politik perempuan di lembaga-lembaga yang pengambil keputusan, di semua lingkup kehidupan perempuan mulai dari pribadi bahwa yang pribadi adalah politis (*personal is political*), keluarga, masyarakat hingga negara. Koalisi Perempuan Indonesia mempunyai tujuan yang sesuai dengan penelitian ini yaitu untuk pemberdaya hak politik perempuan, sehingga Koalisi Perempuan Indonesia sesuai untuk dijadikan situs penelitian. Koalisi Perempuan Indonesia juga menjadi salah satu organisasi kemasyarakatan yang juga melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang. Namun menurut peneliti KPI di regional Cabang Malang belum

melaksanakan secara maksimal. Hasil observasi menunjukkan bahwa KPI Cabang Malang tidak berperan aktif dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kota Malang, karena KPI Cabang Malang lebih banyak berinteraksi di daerah Kabupaten Malang. Sehingga menurut peneliti, KPI Cabang Malang kurang mampu melaksanakan regulasi tersebut. Di sisi lain, hasil wawancara dengan anggota KPI Cabang Malang menyebutkan bahwa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif kurang melibatkan satu pihak yaitu perguruan tinggi. Padahal perguruan tinggi adalah salah satu lembaga yang mampu membantu melaksanakan peraturan tersebut, dikarenakan perguruan tinggi adalah lembaga yang mampu membantu untuk membentuk naskah akademik serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum legislatif.

Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang ini dinilai dari unsur-unsur implementasi kebijakan menurut Grindle dalam Agustino (2016:143) terdapat dua unsur yaitu *Content of Policy* atau isi kebijakan dan *Context of Policy* atau lingkungan implementasi kebijakan. Dalam *Content of Policy* terdapat enam hal, yakni kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan

sumber daya yang digunakan. Dalam *Context of Policy* terdapat tiga hal yaitu strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim dan responsivitas pelaksana atau daya tanggap. Berikut ini akan dipaparkan pembahasan mengenai analisis Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle.

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Isi kebijakan atau *Content of Policy* dalam bagian penyajian data akan disesuaikan dengan teori implementasi kebijakan Grindle dengan pendekatan yang dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Teori implementasi kebijakan Grindle dalam Agustino (2016:143-144) meliputi kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, aktor pelaksana dan sumber daya yang digunakan. Berikut pembahasan isi Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang.

a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Menurut Grindle dalam Agustino (2016:142) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Pencapaian ini dilihat dari dua hal yaitu dilihat

dari dua hal yaitu prosesnya dan tujuan kebijakan tercapai. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Selain itu juga dilihat dari apakah tujuan kebijakan tercapai, dimensi ini diukur dengan dua faktor yaitu efeknya pada masyarakat secara individu atau kelompok serta tingkat perubahan yang terjadi melalui penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi. Efek pada masyarakat secara individu ataupun kelompok ini dapat dianalisis dari kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi. Berbagai kepentingan tentunya mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, dan dari kepentingan itu akan melihat sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Pembahasan ini akan menyampaikan kepentingan yang mempengaruhi kebijakan dalam hal ini implementasi kebijakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang.

1) Kelompok Kepentingan Pemerintah

Kelompok kepentingan dari Pemerintah ini dilihat dari dua pihak yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dan DP3AP2KB Kota Malang. Keduanya adalah pihak yang sudah dipaparkan di kebijakan ini. Komisi Pemilihan Umum adalah pihak penyelenggara pemilu yang bertanggungjawab atas pemahaman kader-kader perempuan dalam implementasi kebijakan tindakan khusus sementara dalam pemilu. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sudah

melaksanakan tanggung jawab dalam implementasi kebijakan tindakan khusus sementara yaitu melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum legislatif yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD yang sudah diperbaharui yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga independen negara, hal ini diperkuat pada UUD 1956 pasal 22 E ayat (5) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasionalis, tetap dan mandiri. Sehingga KPU menjadi lembaga mandiri dan tidak diikat oleh lembaga manapun. Dasar ini yang digunakan sebagai Bapak Fajar dari Komisioner KPU Kota Malang bahwa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang tidak digunakan sebagai kebijakan yang disosialisasikan dikarenakan tidak ada perjanjian atau *Memorandum of Understanding* (MOU) diantara KPU dan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun disini lain KPU Kota Malang tetap berusaha untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui sosialisasi kebijakan Undang-Undang Pemilu yang didalamnya mengatur bahwa harus memasukkan perempuan dalam kuota 30% dalam kepengurusan dan daftar calon legislatif.

Selain KPU Kota Malang, kelompok kepentingan dari Pemerintah tentunya juga DP3AP2KB Kota Malang. DP3AP2KB sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang yang bertugas untuk melakukan pemberdayaan perempuan. Namun ternyata DP3AP2KB Kota Malang belum mampu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada perempuan Kota Malang untuk bisa meningkatkan partisipasi politik perempuan. Fungsi dari DP3AP2KB Kota Malang yang salah satunya menyebutkan bahwa DP3AP2KB sebagai “penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan”. Namun ternyata pada implementasinya bahwa Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang belum membuat rencana kerja di bidang politik sebagai usaha pemberdayaan perempuan.

Selain itu DP3AP2KB Kota Malang Bidang Pemberdayaan Perempuan memiliki 3 seksi yaitu seksi peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan dan pengembangan kelembagaan perempuan serta edukasi dan partisipasi perempuan. Sebagaimana diketahui bahwa dengan 3 seksi tersebut padahal DP3AP2KB bisa melakukan pengembangan *softskill* perempuan guna meningkatkan kemampuan dalam pemilihan umum legislatif. Di sisi lain DP3AP2KB Kota Malang juga belum mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan di bidang partisipasi politik perempuan. Padahal pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Nomor 07 Tahun 2013 BAB VI bagian Pendanaan, bahwa dana program dan kegiatan bersumber dari APBN dan APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Peraturan ini sudah menyusun bahwa program pengembangan kualitas bisa dilakukan dengan mencari pembiayaan operasional, tapi DP3APB2KB Kota Malang belum menganggarkan dana tersebut.

Berdasarkan hasil observasi di KPU Kota Malang dan di bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang bahwa kepentingan yang mempengaruhi pada implementasi kebijakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 adalah untuk perempuan di pemilihan umum legislatif tahun 2014 agar lebih di prioritaskan namun kebijakan ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik dikarenakan adanya tindakan memerintah kepada KPU yang seharusnya bukan sebagai bentuk perintah melainkan kerjasama dan belum ada penganggaran yang dilakukan oleh DP3AP2KB. Jika diambil kesimpulan bahwa kepentingan dalam kebijakan ini untuk perempuan agar lebih diprioritaskan di pemilihan umum legislatif tahun 2014. Kepentingan lain untuk adanya pembuatan bentuk kerjasama antara Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Komisi Pemilihan Umum dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan tindakan khusus sementara (*affirmative action*) yang berusaha untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif Kota Malang.

2) Kelompok Kepentingan Partai Politik

Kepentingan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif tentu saja juga melibatkan partai politik. Partai Politik yang berjumlah 12 pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 tidak seluruhnya bisa mendistribusikan kader perempuan ke DPRD Kota Malang pada periode 2014-2019. Hanya 6 partai politik yang mampu mengisi kursi anggota legislatif Kota Malang dengan anggota perempuan yaitu PDIP, Partai Demokrat, PPP, Partai Hanura, Partai Gerindra dan Partai Golkar.

Partai politik yang mampu mendistribusikan kader perempuannya ke lembaga legislatif Kota Malang adalah sebagai bentuk dari fungsi partai politik yaitu agregasi kepentingan. Menurut Gatara (2009:198) fungsi partai politik dalam agregasi kepentingan yakni sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah melalui upaya menampung dan mengombinasikan tuntutan-tuntutan individu-individu dari para anggota masyarakat menjadi usulan kebijakan publik yang signifikan. Dalam pengertian tersebut maka anggota legislatif perempuan yang di DPRD Kota Malang harus bisa menjadi jembatan dalam penyampain aspirasi ke pemerintah dan menjadikan aspirasi tersebut sebagai regulasi.

Namun anggota legislatif perempuan yang ada di DPRD Kota Malang berjumlah sebelas orang tersebut bukan berasal dari perolehan suara semua melainkan juga dari pergantian anggota DPRD Kota Malang yang meninggal dunia dan terkena kasus. Kesebelas orang tersebut 5 dari PDIP, 2 dari PPP, 2 dari

Demokrat, masing-masing 1 dari Hanura, Gerindra dan Golkar. Kepentingan dari sebelas anggota perempuan legislatif tersebut harus bisa menjadi jembatan wakil rakyat. Kepentingan dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 adalah untuk meningkatkan jumlah perempuan di lembaga legislatif, meningkatkan kesetaraan *gender* dan agar perempuan tidak mengalami diskriminasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa keenam partai politik di Kota Malang sudah memahami bahwa kepentingan yang mempengaruhi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang adalah untuk pemberdayaan perempuan itu sendiri. Dengan adanya kebijakan ini partai politik berharap bahwa perempuan tidak dipandang sebelah mata karena kualitas perempuan ketika sudah di lembaga legislatif bisa menunjukkan kualitasnya. Secara khususnya bahwa kepentingan yang mempengaruhi kebijakan ini adalah agar perempuan yang nanti sudah menjadi anggota legislatif di DPRD Kota Malang bisa membuat kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan masyarakat umum seperti pada bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Bila diambil kesimpulan bahwa kepentingan yang mempengaruhi di Partai PDIP, Partai Demokrat, PPP, Hanura, Golkar dan Gerindra Kota Malang dalam implemementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, meningkatkan kesetaraan *gender*, membuat kebijakan yang berpihak kepada pemberdayaan perempuan seperti pada bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan umum.

3) Kelompok Kepentingan Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan atau ormas didirikan secara sukarela, berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pengertian ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 pasal 1 angka 2 tentang organisasi kemasyarakatan. Ormas yang digunakan dalam pembahasan ini *Women Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang dan Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Malang. Ormas tersebut bergerak pada bidang pemberdayaan perempuan di Kota Malang baik tingkat Kabupaten Malang maupun Kota Malang.

Koalisi Perempuan Indonesia yang mempunyai visi pada Anggaran Dasar pasal 9 berbunyi “Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab”. Visi tersebut digunakan sebagai pandangan organisasi di seluruh Cabang KPI demi mencapai perubahan demi membela hak-hak perempuan di berbagai bidang termasuk bidang politik.

Kepentingan yang mempengaruhi Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Malang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 di Kota Malang adalah kurang terlibatnya perguruan tinggi dalam peran kelembagaan yang disebutkan di regulasi tersebut. Padahal perguruan tinggi juga harus dilibatkan karena perguruan tinggi dapat membantu pendidikan partisipasi politik. Menurut Labolo dan Ilham (2017:17) pendidikan politik ialah suatu proses yang mengajarkan kepada masyarakat mengenai nilai-nilai, norma-norma politik. Proses pendidikan politik melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi maupun seminar. Jika dilihat dari pengertian tersebut maka perguruan tinggi juga turut serta dalam memberikan pendidikan politik, hal ini dikarenakan perguruan tinggi bisa memberikan proses pendidikan politik melalui diskusi maupun latihan kepemimpinan di bidang politik.

Selain KPI Cabang, organisasi kemasyarakatan lainnya yang juga turut serta dalam bidang pemberdayaan perempuan adalah *Women Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang. Kepentingan yang mempengaruhi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang adalah partai politik. Disini perlu ditekankan bahwa setiap calon legislatif maupun eksekutif perlu adanya pembuatan kontrak politik dalam kebijakan ini maupun kebijakan pemilu.

Pembuatan kontrak politik ini dijadikan landasan agar masyarakat mampu meminta janji-janji para calon legislatif ketika sudah terpilih. Anggota legislatif mempunyai tugas untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat kemudian membentuk aspirasi tersebut menjadi sebuah kebijakan yang bisa mensejahterahkan masyarakat secara umum. Kontrak politik hingga sampai saat ini belum ada di kebijakan pemilu, sehingga menurut pengurus bidang hukum tata pidana *Women's Crisis Center* Dian kepentingan yang mempengaruhi tentu saja partai politik. Hal ini dikarenakan kader setiap partai politik yang berkampanye memberikan janji-janji kampanye yang belum tentu dilaksanakan ketika sudah terpilih, maka dari itu perlu adanya kontrak perlu sebagai keseriusan para calon legislatif.

Bila diambil kesimpulan bahwa kepentingan yang mempengaruhi ormas KPI Cabang Malang dan WCC Dian Mutiara Kota Malang adalah partai politik dan perguruan tinggi sebagai pihak yang turut serta meningkatkan partisipasi politik perempuan serta bisa memberikan pendidikan politik kepada pemilih dan calon legislatif. Selain itu kepentingan yang mempengaruhi dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 adalah perlu dibuat kejelasan tentang kontrak politik sebagai bentuk upaya keseriusan calon legislatif dalam melakukan kegiatan ketika sudah terpilih.

Berdasarkan kepentingan-kepentingan yang ada antara ketiga belah pihak, bahwa kepentingan yang mempengaruhi agar perempuan agar lebih diprioritaskan

dan pembuatan kerjasama dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan tindakan sementara. Selain itu juga untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan, meningkatkan kesetaraan gender, dan membuat kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan umum. Dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat 2 “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Sehingga kepentingan yang mempengaruhi untuk meningkatkan kesetaraan gender, sesuai dengan pasal 28H ayat 2 bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan untuk mencapai persamaan. Begitu juga perempuan berhak mendapat kemudahan dalam bidang politik untuk mencapai keadilan. Kepentingan yang juga turut berpengaruh adalah perguruan tinggi, karena perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang juga bisa membantu meningkatkan partisipasi politik perempuan.

b. Tipe Manfaat

Kebijakan yang jelas tentu akan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat secara umum sehingga kebijakan tersebut akan lebih muda dalam pelaksanaannya. Grindle dalam Agustino (2016:143) mengemukakan bahwa dalam mencapai keberhasilan implementasi ditentukan oleh salah satu faktor yaitu tipe manfaat. Tipe manfaat ini menjelaskan bahwa dalam suatu implementasi kebijakan harus mampu menunjukkan dampak positif kepada berbagai elemen masyarakat yang sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di partai politik Kota Malang, manfaat yang diperoleh dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 ada tiga tahapan. Sebelum pemilu peraturan ini bermanfaat untuk mendorong beberapa lembaga untuk melakukan sosialisasi pentingnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Hal ini sesuai dengan fungsi partai politik menurut Gatara (2009:198) rekrutmen politik, yaitu proses seleksi calon-calon pemimpin yang akan mengisi berbagai jabatan publik atau jabatan politik. Selama pemilu yaitu pada proses pendaftaran mampu mendorong setiap partai politik untuk mengikutsertakan 30% perempuan dalam daftar calon legislatif dan mendorong terpilihnya 9 perempuan di lembaga legislatif. Ditengah perjalanan jumlah 9 orang bertambah 2 orang perempuan karena adanya proses pergantian DPRD yang meninggal dunia dan terkena kasus.

Kebermanfaatan kebijakan ini tentu saja juga berguna untuk melakukan pemberdayaan perempuan di legislatif, karena nantinya perempuan yang duduk di lembaga legislatif harus mempunyai kualitas sehingga dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Kota Malang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik. Selain hal tersebut dampak positif dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesetaraan gender, melindungi kaum perempuan dari penindasan dan juga untuk memformulasikan peraturan-peraturan di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan umum yang pro terhadap perempuan. Pada Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui penempatan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan’. Sesuai UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, maka perempuan yang juga sebagai sebagai warga negara berhak untuk dipilih dan memilih.

Kebijakan ini bermanfaat untuk meningkatkan kesetaraan gender dikarenakan isu ketidakadilan gender muncul dari kesadaran masyarakat bahwa ada ketimpangan peran antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat. Dalam bidang politik perempuan mengalami ketidakadilan gender dalam bentuk *subordinasi*. Menurut Nugroho (2008:40) subordinasi atau penomerduaan timbul akibat sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting muncul dari adanya anggapan bahwa perempuan itu emosional atau irasional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin. Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 dengan adanya tindakan khusus sementara (*affirmative action*) maka bisa meningkatkan kesetaraan gender sehingga subordinasi tidak bisa dihilangkan secara pelan-pelan di masyarakat.

Berdasarkan pemaparan pembahasan tersebut, dapat diketahui bahwa manfaat yang ditimbulkan dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di lembaga

legislatif dapat dirasakan oleh setiap elemen masyarakat. Kebijakan ini akan berguna mendorong lembaga untuk melakukan sosialisasi pentingnya perempuan di lembaga legislatif, untuk meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan di legislatif dan meningkatkan jumlah partisipasi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Kebijakan ini berjalan sangat bermanfaat agar perempuan di DPRD Kota Malang mampu memformulasikan kebijakan yang pro terhadap perempuan.

c. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Grindle dalam Agustino (2016:143) menyampaikan bahwa *Content of Policy* dalam dimensi derajat perubahan yang ingin dicapai bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Derajat yang ingin dicapai dalam kebijakan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif ditetapkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu bertujuan untuk membantu penyusunan program dan kegiatan peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif agar lebih sistematis, terukur dan akuntabel.

Partai Politik di Kota Malang yaitu PDIP, PPP, Demokrat, Hanura, Gerindra dan Golkar telah memenuhi salah satu tujuan tersebut yaitu melakukan kegiatan peningkatan partisipasi politik perempuan agar lebih akuntabel. Menurut Gatara (2009L198) fungsi partai politik adalah untuk partisipasi politik yaitu mengajak atau mengikutsertakan para anggota masyarakat untuk terlibat dalam berbagai macam dan

tingkatan kehidupan politik. Partai Politik sudah melakukan fungsi partisipasi politik dengan mengajak para kader perempuan partainya untuk bergabung dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014. Hal ini buktikan dengan adanya 180 orang perempuan dalam calon daftar anggota tetap legislatif dari 501 orang atau sekitar 36%. Namun derajat perubahan belum bisa melakukan perubahan secara signifikan dalam jumlah anggota DPRD perempuan di Kota Malang, pada tahun 2009-2014 jumlah anggota legislatif perempuan berjumlah 11 orang dan pada tahun 2014-2019 juga 11 orang namun 2 orang hasil dari pergantian. Menurut Sastriyani (2009:166-167) faktor penyebab diskriminasi keterwakilan perempuan dalam politik salah satunya adalah kekurangan dalam kualitas individu perempuan dan kaderisasi politik. Sehingga dalam hal ini partai politik belum bisa meningkatkan kualitas perempuan dalam kaderisasi politik yang menyebabkan terpilihnya anggota perempuan masih sedikit di pemilihan legislatif tahun 2014.

Selain itu derajat perubahan yang dicapai pada setelah pemilu adalah anggota legislatif perempuan berusaha memperjuangkan anggaran tentang kesehatan di RSUD Kota Malang, mengupayakan para relawan ibu-ibu di posyandu untuk mendapatkan gaji dan pembuatan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok. Pembuatan perda tersebut berguna agar perempuan di lingkungan sekitar tidak terkena asap rokok yang dapat membahayakan kesehatannya. Derajat perubahan juga dilakukan oleh anggota legislatif Kota Malang dengan pembuatan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan". Pada

peraturan tersebut berusaha untuk melindungi perempuan yang mengalami kekerasan selain itu juga memberikan perlindungan perempuan sebagai korban kekerasan. Namun di sisi lain ada juga permasalahan yang belum diselesaikan oleh anggota legislatif DPRD Kota Malang yaitu mengenai makanan yang diberikan kepada balita di posyandu yaitu hanya biskuit maka perlu ada pengawasan kinerja pemerintah serta DPRD Kota Malang juga belum bisa menyerap aspirasi masyarakat terutama perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan bantuan atau penanganan cepat tanggap.

Beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dikarenakan adanya hambatan dari beberapa pihak yaitu kurangnya pengawasan terhadap pemerintah sehingga balita di posyandu tidak mendapatkan makanan yang layak hanya tetap kue biskuit dan lambatnya bantuan serta penanganan perempuan korban kekerasan. Maka dengan hal ini DPRD Kota Malang terutama perempuan harus berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi anggota legislatif perubahan juga melakukan perubahan yaitu adanya Perda Kawasan Tanpa Rokok, Perda Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan, memperjuangkan anggaran kesehatan di RSUD, mengupayakan gaji relawan ibu-ibu posyandu.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Letak pengambilan keputusan akan menentukan sebagaimana pemilihan strategi atau kebijakan yang tepat melalui proses penentuan keputusan. Grindle berpendapa dalam Agustino (2016:144) pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam suatu kebijakan memegang, maka pada bagian pengambilan keputusan dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Pengambilan keputusan ini akan berdampak pada tercapainya keberhasilan suatu sasaran yang sudah ditetapkan dari awal.

Pengambilan keputusan dalam kebijakan panduan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif adalah ditetapkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Partai Politik, KPU Kota Malang, DP3AP2KB, *Women's Crisis Center* Dian Mutiara, dan Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Malang. Pengambilan keputusan dalam kelembagaan tersebut diputuskan dari struktural maupun musyawarah. Dalam pengambilan keputusan harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas sebagai dasar meentukan orientasi kebijakan. Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam kebijakan panduan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan pasal 28H ayat (2)

- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang diratifikasi dari Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita tahun 1979 (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*)
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat (1)
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- 6) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusatamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Pengambilan keputusan yang dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan panduan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif harus adil untuk semua pihak. Maka dari itu untuk pengambilan keputusan yang dilakukan di Partai Demokrat, Golkar dan Gerindra melalui rapat kepengurusan, sehingga bukan hanya pucuk struktural yang mengambil keputusan tapi seluruh pengurus juga dapat memberikan saran maupun pendapat. Cara yang selaras juga dilakukan oleh DPC PDIP dan DPC Hanura pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah atau pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama demi mencapai mufakat.

Hasil wawancara lain menunjukkan bahwa di DPC PPP Kota Malang pengambilan keputusan dilakukan oleh Ketua Partai yaitu Bunda Heri Pudji Utami, untuk diskusi memang dilakukan terlebih dahulu namun disini ada keterangan bahwa Bunda Heri memegang hak yang kuat dalam pemilihan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dilakukan DP3AP2KB dalam implementasi kebijakan panduan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif melalui kemandirian ekonomi. Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013, Pemerintah Daerah Kota dalam peningkatan partisipasi perempuan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, seminar, pendidikan dan pelatihan di bidang politik. Namun dari hasil wawancara, DP3AP2KB Kota Malang dalam pengambilan keputusan hanya melalui kemandirian ekonomi. Ada tidak sinkronisasi ketika DP3AP2KB melakukan peningkatan politik perempuan melalui bidang ekonomi. Lain hal disampaikan oleh *Women's Crisis Center* Dian Mutiara sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjaga keobjektifannya maka pengambilan keputusan dilakukan oleh seluruh kepengurusan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan dalam implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 ditetapkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dinilai sudah tepat dengan hal ini Kementrian sudah berupaya untuk memberi perlindungan hukum dan

memberikan bantuan teknis melalui konsep panduan peningkatan partisipasi politik di lembaga legislatif. Selanjutnya kebijakan ini diserahkan kepada peran kelembagaan sebagai pihak yang diberi tugas untuk melakukan kinerja yaitu partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan. Pengambilan keputusan oleh kelembagaan dilakukan melalui rapat kepengurusan demi mencapai musyawarah untuk mufakat serta oleh pucuk pimpinan.

e. Pelaksana Kebijakan

Pelaksana kebijakan memiliki tupoksi yang penting dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di awal. Menurut Gindle dalam Agustino (2016-144) bahwa dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini. Pelaksana dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif melibatkan banyak aktor. Dalam pembahasan ini akan menyampaikan aktor-aktor kelembagaan yang terlibat dalam pelaksana kebijakan.

Pelaksana utama dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 yang diprakarsai

oleh Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam peran Kelembagaan yang diatur dalam BAB II meliputi partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan organisasi kemasyarakatan. Partai Politik di Kota Malang yang mampu mendistribusikan kader perempuannya yang dipilih sebagai pelaksana kebijakan yaitu PDI Perjuangan, PPP, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra dan Partai Golkar. Penyelenggara Pemilu yang sebagai pelaksana kebijakan ini yaitu KPU Kota Malang. Pemerintah Kota Malang melalui DP3AP2KB Kota Malang serta organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan terutama yang sudah memiliki berbadan hukum yaitu *Women's Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang dan KPI Cabang Malang.

Keseluruhan pelaksanaan secara teknis, di setiap kelembagaan dilakukan oleh masing-masing bidang. Kedua belas partai politik yang terverifikasi menjadi peserta pemilihan legislatif tahun 2014 sudah melaksanakan untuk mendaftarkan 30% anggota perempuan. Namun hanya 6 partai politik yang mampu berjuang sehingga ada perwakilan anggota perempuannya yang berhasil lolos ke DPRD Kota Malang yaitu Partai Demokrat, PPP, PDIP, Gerindra, Hanura dan Golkar. Implementasi Kebijakan Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang di Partai Politik dilakukan oleh setiap bidang perempuan. Di Partai Gerindra terdapat sayap organisasi yaitu Perempuan Indonesia Raya (PIRA), pelatihan pendidikan politik dilakukan di PIRA serta pelatihan di rumah Ketua

Umum Bapak Prabowo di Jakarta. Di Golkar juga pendidikan politikan dilakukan di Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). Untuk di PPP, PDIP, Hanura dan Demokrat pendidikan politik dilakukan oleh setiap bidang pemberdayaan perempuan. Menurut Grindle, syarat yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan yaitu aktor-aktor yang terlibat harus kompeten dan kapabel. Maka pelaksana kebijakan harus mengetahui tupoksi dari implementasi kebijakan. Sehingga secara umum tugas meningkatkan partisipasi politik dilakukan oleh seluruh kader kepengurusan, namun secara khusus tugas tersebut diberikan kepada sayap organisasi serta bidang pemberdayaan perempuan.

Aktor-aktor pelaksana kebijakan selain dari partai politik namun juga dari penyelenggara pemilu yaitu KPU Kota Malang. Komisioner KPU serta pengurus partai KPU dipilih melalui seleksi yang ketat. Sehingga orang-orang di KPU adalah orang yang mempunyai kemampuan. Di KPU Kota Malang memiliki 5 komisioner yaitu divisi SDM dan Parmas, perencanaan dan data, teknis, hukum serta umum, keuangan dan logistik. Latar belakang setiap komisioner memiliki kemampuan yang baik, Bu Aminah Asminingtyas Komisioner bidang Umum, Keuangan dan Logistik sebagai pihak dari KPU yang memang mempunyai keilmuan di bidang partisipasi politik perempuan. Melihat hal tersebut maka pelaksana kebijakan di KPU Kota Malang memiliki kemampuan profesionalitas, akuntabel dan terpercaya untuk melaksanakan tupoksinya masing-masing. Namun, KPU Kota Malang belum melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 karena dalam kebijakan tersebut belum ada kerjasama dengan KPU, sehingga KPU hanya melakukan sosialisasi kebijakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan saja.

Pemerintah Daerah Kota yang diwakilkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yaitu DP3AP2KB Kota Malang. DP3AP2KB memiliki 5 bidang yaitu bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Bidang yang bertugas meningkatkan partisipasi perempuan yaitu Bidang Pemberdayaan Perempuan, yang memiliki 3 divisi yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan dan pengembangan kelembagaan perempuan serta edukasi dan partisipasi perempuan. Berdasarkan komponen bidang dan divisi maka DP3AP2KB memiliki kualifikasi aktor-aktor pelaksana kebijakan yang sudah memiliki kemampuan di tupoksinya. Namun DP3AP2KB sebagai Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan implementasi kebijakan tersebut belum bisa melaksanakan kebijakan tersebut secara maksimal. Hal ini didasarkan karena DP3AP2KB belum melaksanakan kegiatan partisipasi politik dan belum menganggarkan untuk kegiatan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif.

Selain dari partai politik, KPU dan DP3AP2KB juga dari organisasi kemasyarakatan sebagai aktor pelaksana kebijakan panduan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif yaitu WCC Dian Mutiara dan KPI Cabang Malang. Dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan menurut Peraturan Menteri Negara

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 merupakan berbasis anggota dan yang tidak berbasis anggota (kerja), baik ormas yang peduli/penggiat politik maupun ormas yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dapat mendorong dan menyokong perempuan untuk anggota dan kader aktif di partai politik, menyiapkan diri menjadi anggota legislatif guna memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak melalui pembuatan kebijakan di lembaga legislatif. WCC Dian Mutiara dan KPI Cabang Malang juga berupaya untuk melakukan kegiatan serta sosialisasi peningkatan partisipasi politik perempuan di kota Malang. Aktor-aktor dalam WCC Dian Mutiara dan KPI Cabang Malang adalah orang-orang yang kompeten dan kapabel memiliki keilmuan di bidang hukum, politik, ekonomi dsb.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa orang-orang pelaksana kebijakan dari partai politik PDIP, PPP, Gerindra, Demokrat, Hanura dan Golkar serta dari KPU, DP3AP2KB, WCC Dian Mutiara Kota Malang dan KPI Cabang Malang sudah memiliki kemampuan, profesionalitas, akuntabel dan terpercaya dalam melaksanakan implementasi kebijakan partisipasi politik perempuan. Hal ini dibuktikan bahwa Kedua belas partai politik yang terverifikasi menjadi peserta pemilihan legislatif tahun 2014 sudah melaksanakan untuk mendaftarkan 30% anggota perempuan. Walaupun hanya enam politik yang dapat menstribusikan kader perempuannya. Partai politik, KPU, WCC Dian Mutiara Kota Malang dan KPI Cabang Malang bisa dikatakan sebagai pelaksana kebijakan yang cukup kapabel dan kompeten. Namun, di

DP3AP2KB karena tidak ada kegiatan ataupun program serta penganggaran dalam panduan peningkatan partisipasi politik perempuan maka sebagai pelaksana kebijakan belum kapabel dan kompeten.

f. Sumber-Sumber Daya yang Digunakan

Keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat diukur dari sumber-sumber yang berpengaruh, karena sumber daya merupakan salah satu faktor yang mendukung dalam implementasi kebijakan. Grindle dalam Agustino (2016:144) pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaanya berjalan dengan baik. Dalam point ini akan dipaparkan mengenai sumber-sumber daya yang digunakan dalam implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang panduan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif.

Sumber daya yang terlibat dalam implemtasi kebijakan ini sangat beragam. Sumber daya dalam implementasi kebijakan ini dari dua pihak yaitu pihak pengusul kebijakan dan pihak dari sasaran kebijakan. Pihak pengusul kebijakan ini disebutkan oleh Partai Hanura dan DP3AP2KB sebagai sumber daya berpengaruh dalam implementasi kebijakan ini yaitu meliputi para *stakeholder* baik itu eksekutif ataupun legislatif. Bahwa perlu adanya hubungan yang baik antara pengawas kebijakan dan pelaksana kebijakan. DPRD Kota Malang yang mempunyai fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi harus bisa melaksanakan pengawasan terhadap kinerja di

DP3AP2KB Kota Malang sebagai pelaksana kebijakan. Peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif tidak bisa dijalankan hanya oleh satu pihak melainkan perlu adanya kerjasama dari kedua belah pihak dalam penyusunan program maupun kegiatan.

Selain itu sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan panduan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif tentu saja partai politik. Dalam partai politik sendiri dari PPP bahwa sumber daya terlibat adalah Bunda Heri Pudji Utami sebagai pucuk pimpinan dari partai. Dari PDIP sumber daya yang digunakan adalah semua anggota partai sebagai bentuk demokrasi bahwa setiap anggota bisa memberikan saran dan pendapat. Sedangkan Partai Golkar berpendapat bahwa sumber daya yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan adalah pengurus lama partai golkar, ini bisa dilihat bahwa partai golkar masih melakukan hubungan yang baik dengan pengurus lama. Sehingga hubungan antara pengurus lama dan pengurus baru terjaga. Sedangkan di Partai Demokrat belum melihat para sumber daya yang terlibat.

Sebagai bentuk organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan maka KPI Cabang Malang menilai bahwa ada sumber daya yang belum tercantum dalam implementasi kebijakan ini yaitu perguruan tinggi. Padahal perguruan tinggi adalah pihak kelembagaan yang bisa turut serta untuk memberikan pendidikan politik di kampus. Untuk menjaga keobjektifannya maka WCC Dian Mutiara melihat bahwa sumber daya yang digunakan adalah para korban.

Sumber daya yang terlibat ini adalah orang-orang turut berperan serta dalam partisipasi politik perempuan. Partisipasi politik menurut Rosenau dalam Arifin (2015:80) terdiri atas dua bentuk yaitu para pengamat serta aktif dalam diskusi politik dan juga para aktor yang melakukan komunikasi atau melakukan lobby. Maka dalam hal ini para organisasi kemasyarakatan, KPU dan DP3AP2KB adalah partisipasi politik bentuk pertama sebagai para pengamat dan yang melakukan kegiatan partisipasi politik perempuan. Sedangkan bentuk kedua yaitu para aktor yang melakukan komunikasi dan melakukan *lobbying* adalah partai politik itu sebagai pelaku yang mendistribusikan kadernya dalam pemilihan umum. Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang digunakan sudah sebagai para partisipasi politik. Sumber daya para partisipasi politik tersebut meliputi para pengusul kebijakan, perguruan tinggi dan pengurus internal partai.

2. Lingkungan Implementasi Kebijakan (*Context of Policy*)

Selain isi kebijakan yang merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, konteks atau lingkungan implementasi kebijakan (*Context of Policy*) juga menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Isi kebijakan sangatlah penting karena dalam isi kebijakan akan berpengaruh terhadap dampak perubahan dimasyarakat. Dampak perubahan ini juga ditentukan oleh lingkungan atau konteks implementasi kebijakan. Berdasarkan teori Grindle ada tiga komponen yang menjadi bagian dari lingkungan atau konteks implementasi kebijakan (*context of policy*)

yakni: 1) strategi aktor yang terlibat 2) karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa 3) responsivitas pelaksana.

a. Strategi dari Aktor yang Terlibat

Suatu kebijakan perlu dipertimbangkan mengenai kekuatan dan kelemahannya ketika diimplementasikan baik itu internal maupun eksternal. Grindle dalam Agustino (2016:144) mengemukakan bahwa dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program ataupun kebijakan yang hendak diimplementasikan. Sehingga menurut Grindle strategi dari aktor yang terlibat merupakan sebagai bentuk lingkungan implementasi kebijakan yang berpengaruh.

Kebijakan panduan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif membutuhkan kerjasama dari banyak pihak demi mencapai keberhasilan. Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 telah disusun tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif yaitu meliputi peran kelembagaan, kebijakan, strategi, pelaksanaan program dan kegiatan, pendanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Tujuan dari penyusunan ini adalah untuk membantu penyusunan program dan kegiatan peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif agar lebih sistematis, terukur dan akuntabel. Sehingga setiap

kelembagaan perlu melakukan penyusunan panduan peningkatan partisipasi politik perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas dan demokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, perlu keseimbangan peran gender dalam proses pengambilan keputusan politik di lembaga legislatif.

Demi mencapai meningkatkan kualitas dan demokrasi berorientasi pada kesejahteraan maka setiap lembaga perlu menentukan strategi yang inovatif agar implementasi kebijakan panduan peningkatan partisipasi politik perempuan dapat dilaksanakan. Strategi yang digunakan dari sebelum kegiatan, selama pemilu dan setelah pemilu harus melibatkan semua pihak agar memberikan hak berkeadilan dan demokrasi. Menurut Suryakusuma dalam Soetjipto (2015:105) sasaran kebijakan *affirmative action* yaitu memberi dampak positif kepada suatu institusi agar lebih cakap memahami dan sekaligus mengeliminasi bentuk rasisme serta agar institusi tersebut dapat mencegah terjadinya bias gender. Maka dari setiap partai politik harus mampu melaksanakan sasaran kebijakan tersebut agar melekat gender.

Strategi yang digunakan oleh Partai Hanura, Gerindra, PDIP dan PPP ialah melakukan sosialisasi peraturan perundangan-undangan dan perekrutan. Strategi ini benar karena dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 sesuai dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu sosialisasi. Sosialisasi disini merupakan fungsi partai politik. Menurut Gatara (2009:198) fungsi partai politik dalam tahap sosialisasi politik yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota

masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Jika menurut pengertian tersebut maka partai politik bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat secara luas bahwa partai politik memiliki integritas terhadap masyarakat. Kegiatan sosialisasi juga dilakukan oleh WCC Dian Mutiara dan KPU Kota Malang dalam melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan, hal ini perlu dilakukan agar masyarakat melek politik dan ketika pemilihan umum memahami mengetahui tentang aturan-aturan yang digunakan.

Selain sosialisasi tentunya dalam peningkatan partisipasi politik perempuan juga perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dalam menunjang kebutuhan kemampuan dalam kampanye serta ketika sudah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Malang. DP3AP2KB serta KPI Cabang Malang dalam peningkatan partisipasi politik perempuan melalui pendidikan politik. Kegiatan pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan karena tidak semua kader perempuan yang akan mencalonkan memiliki kemampuan yang sangat luas tentang berkampanye. Pendidikan politik dapat dilakukan melalui menjaring pemilih di daerah, kemampuan *lobbying*, mengawasi penghitungan suara, dan meningkatkan terhadap gugatan hasil pemilu.

Berdasarkan pemaparan diatas maka strategi para aktor yang terlibat melalui sosialisasi perundangan-undangan, berkampanye, memberikan pendidikan dan pelatihan politik agar mampu meningkatkan sumber daya perempuan. Strategi ini harus selalu dilakukan dalam proses pemilihan umum untuk melancarkan kegiatan

proses pemilihan umum. Selain itu strategi lain adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat umum bahwa politik itu tidak kotor serta bukan mengajarkan politik uang. Titik tekanan disini bahwa semua peran kelembagaan harus mengajarkan fungsi dari melekat politik.

b. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang berkuasa

Grindle dalam Agustino (2016:144) mengemukakan bahwa lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Pada bagian ini menunjukkan bahwa karakteristik dan rezim yang berkuasa pada kelembagaan merupakan faktor yang penting dalam lingkungan implementasi kebijakan. Faktor ini akan menunjukkan bagaimana budaya organisasi serta karakter setiap organisasi terhadap kebijakan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif.

Karakteristik lembaga disini terdiri dari Partai Demokrat, PDIP, PPP, Golkar, Hanura, Gerindra, KPU Kota Malang, DP3AP2KB Kota Malang, WCC Dian Mutiara dan KPI Cabang Malang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 bagian peran kelembagaan. Lembaga tersebut sebagai pihak yang turut serta dalam implementasi kebijakan. Representasi partisipasi keterwakilan perempuan sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “Segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selain itu juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui penempatan suara yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Kedua peraturan tersebut merupakan landasan yang harusnya digunakan oleh lembaga pemerintah, partai politik maupun organisasi kemasyarakatan dalam membuat karakteristik organisasi yang tepat dalam peningkatan partisipasi politik perempuan.

Karakteristik lembaga dari KPI Cabang Malang yaitu melalui adanya bidang pengorganisasian internal dan bidang pendidikan politik. Sehingga karakteristik dari KPI Cabang Malang ini mempunyai bidang tersendiri yang mengatur dan melakukan kaderisasi tersendiri terhadap para perempuan yang mempunyai minat dan bakat terhadap bidang politik. WCC Dian Mutiara sebagai ormas yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan memang tidak memiliki bidang politik, namun WCC Dian Mutiara dalam meningkatkan partisipasi perempuan dilakukan melalui pendidikan politik yang dilakukan melalui kampanye melek politik perempuan dan diskusi dengan para jejaring mengenai pemilu. Karakteristik keduanya bahwa pemahaman mengenai pentingnya perempuan dalam politik perlu dilakukan secara luas. Hal yang sama juga dilakukan oleh KPU Kota Malang bahwa untuk menjaga independensi nya sebagai lembaga negara yang mandiri maka kegiatan peningkatan

partisipasi politik perempuan dilakukan hanya melalui sosialisasi peraturan perundangan-undangan dan menghimbau partai politik untuk melakukan kewajiban untuk memberikan kuota 30% terhadap perempuan.

Rezim penguasa ini ditunjukkan melalui bagaimana setiap struktural partai dalam pengambilan keputusan untuk menentukan strategi yang tepat dalam peningkatan partisipasi politik perempuan. Partai Hanura dan Demokrat dalam melakukan strategi peningkatan partisipasi politik perempuan melalui rekrutmen anggota perempuan sebanyak-banyaknya. Menurut Gatara (2009:198) fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen politik yaitu proses seleksi calon-calon pemimpin yang akan mengisi berbagai jabatan publik atau jabatan politik. Fungsi ini dilakukan oleh Partai Hanura dan Demokrat yaitu rekrutmen anggota digunakan sebagai kaderisasi di kepengurusan serta pencalonan anggota legislatif.

Sedangkan untuk di PDIP dan PPP peningkatan partisipasi politik perempuan melalui mengakomodir perempuan di kepengurusan agar kuota mencapai 30% perempuan. Karakteristik partai Golkar dalam hal ini melalui *zyper system* namun pemberian nomor ini juga sesuai dengan jenjang karir di Partai Golkar sendiri. Partai Golkar dan Partai Gerindra memiliki karakteristik yang berbeda bahwa penguatan peningkatan partisipasi politik perempuan dilakukan melalui penguatan sayap partai yaitu KPPG dan PIRA. Dari keseluruhan partai peserta pemilu legislatif tahun 2014 sudah memenuhi jumlah 30% perempuan namun hanya 6 partai yang mampu mendistribusikan kadernya ke lembaga legislatif.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik lembaga sangat menentukan terhadap lingkungan implementasi kebijakan. Selain itu rezim penguasa juga akan menentukan setiap pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan yang akan diambil terhadap peningkatan partisipasi politik perempuan. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa sudah cukup berpengaruh terhadap implemtasi kebijakan dikarenakan telah memiliki integritas yang tinggi melalui kegiatan sosialisasi peraturan perundangan-undangan, pendidikan politik, rekrutemen anggota, penguatan sayap organisasi dan mengakomodir perempuan di kepengurusan.

c. Responsivitas Pelaksana

Demi mencapai keberhasilan implelementasi keberhasilan perlu daya dukung dari internal kelembagaan sendiri. Menurut Grindle (2016:145) hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Tingkat responsivitas dari setiap lembaga akan berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Tingkat responsivitas dari setiap kelembagaan cukup baik kecuali DP3AP2KB karena dalam menjalankan perannya sebagai organisasi perangkat daerah dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan belum dijalankan secara maksimal. Selain itu responsivitas KPU Kota Malang dilihat dari sosialisasi,

pemberian konsultasi kepada partai politik mengenai pemahaman peraturan perundangan-undangan serta verifikasi yang ketat terhadap jumlah keterwakilan perempuan. Sehingga respon yang cukup baik dilakukan oleh KPU Kota Malang.

Respon dari partai politik ditunjukkan melalui sudah terpenuhinya kuota kepengurusan 30% perempuan di keenam partai politik yang bisa mendistribusikan kader perempuannya ke lembaga legislatif. Selain itu dari Partai Hanura responsivitas ditunjukkan melalui proses rekrutmen secara terbuka kepada masyarakat umum. melalui penjaringan anggota sebanyak-banyaknya jika tidak diberikan ilmu dan pelatihan maka dalam pencalonan legislatif tidak akan mampu bersaing dengan baik. Responsivitas juga ditunjukkan melalui Gerindra dan Golkar dengan adanya sayap organisasi. Dengan adanya sayap organisasi maka partai benar-benar memberikan respon yang baik dan kuat terhadap peningkatan partisipasi politik perempuan.

Sedangkan KPI Cabang Malang memberikan respon yang baik dengan adanya datanya kader yang berpotensi pada bidang politik sehingga pengurus KPI Cabang Malang bisa mengetahui kira-kira minat dan bakat setiap kader yang menyukai di bidang politik. Respon dari WCC Dian Mutiara sangat baik melalui memberikan lahan untuk masyarakat bisa melakukan tanya jawab dengan para calon legislatif ataupun eksekutif. WCC Dian Mutiara mengadakan diskusi dengan mendatangkan para calon legislatif.

Berdasarkan pemapatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa responsivitas pelaksana kebijakan sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari pelaksana kebijakan yang

sudah melakukan identifikasi kader potensial, diskusi, pengawalan pemilihan umum, dan melakukan sosialisasi perundangan-undangan. Selain itu partai politik sebagai pelaksana kebijakan sebagai yang menampung perempuan dalam ajang pemilihan umum sudah melaksanakan peningkatan partisipasi perempuan melalui rekrutmen, adanya sayap organisasi dan pemberian pelatihan keterampilan.

Demi mencapai Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang tentu saja terdapat faktor –faktor demi menentukan keberhasilan. Dalam peraturan ini sudah memenuhi implementasi kebijakan yang efektif sesuai menurut pendapat Sabatier dalam Parson (2008:487) yaitu:

- a. Teori kasual yang memadai, dan memastikan agar kebijakan itu mengandung teori yang akurat tentang bagaimana cara melahirkan perubahan. Hal ini dibuktikan karena kebijakan, peran kelembagaan, anggaran dan strategi sudah dilibatkan walaupun peran perguruan tinggi belum disebutkan.
- b. Dukungan dan kelompok kepentingan dan ‘penguasa’ di legislatif dan eksekutif. Kelompok kepentingan partai politik, pemerintah, organisasi masyarakat sudah melaksanakan kebijakan tersebut melalui peran serta strategi implementasi kebijakan.

Namun, walaupun dua faktor implementasi kebijakan yang efektif sudah terpenuhi tetapi Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang mengalami keberhasilan yang kurang maksimal atau dengan kata lain ada kegagalan prosedur kebijakan. Sesuai dengan kategori kegagalan kebijakan menurut Hogwood dan Gunn dalam Winarno (2012:102) maka kebijakan ini termasuk kategori *Unsuccessful Implementation*, yang artinya suatu kebijaksanaan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan kebijaksanaan tersebut, tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijaksanaan yang memiliki resiko untuk gagal tersebut disebabkan faktor-faktor pelaksanaannya yang jelek (*bad execution*), kebijaksanaan yang jelek (*bad policy*) dan kebijakan itu bernasib jelek (*bad luck*). Implementasi kebijakan ini dikatakan “*Unsuccessful Implementation*” dikarenakan para aktor yang terlibat belum maksimal, beberapa lembaga belum melaksanakan penyusunan program seperti DP3AP2KB Kota Malang serta KPU Kota Malang tidak menggunakan kebijakan panduan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif sebagai peraturan utama yang disosialisasikan karena belum ada *Memorandum of Understanding*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang dapat dikatakan sudah terimplementasi dengan baik, walaupun belum maksimal. Hal ini didasarkan pada:

1. Ditinjau dari isi kebijakan, meliputi:
 - a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi ada di ketiga belah pihak, bahwa kepentingan yang mempengaruhi agar perempuan lebih diprioritaskan dan pembuatan kerjasama dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan. Selain itu juga untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan, meningkatkan kesetaraan gender, tidak ada diskriminasi perempuan dan membuat kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan umum. Kepentingan yang juga turut berpengaruh adalah perguruan tinggi, karena perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang juga bisa membantu meningkatkan partisipasi politik perempuan.
 - b. Manfaat yang ditimbulkan dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan

Partisipasi Politik Perempuan di lembaga legislatif dapat dirasakan oleh setiap elemen masyarakat. Kebijakan ini akan berguna mendorong lembaga untuk melakukan sosialisasi pentingnya perempuan di lembaga legislatif, memberikan ruang kepada perempuan, menjamin keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan meningkatkan jumlah partisipasi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Kebijakan ini berjalan sangat bermanfaat agar perempuan di DPRD Kota Malang mampu memformulasikan kebijakan yang pro terhadap perempuan.

- c. Derajat perubahan yang dicapai pada setelah pemilu adalah anggota legislatif perempuan berusaha memperjuangkan anggaran tentang kesehatan di RSUD Kota Malang, mengupayakan para relawan ibu-ibu di posyandu untuk mendapatkan gaji dan pembuatan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok. Pembuatan perda tersebut berguna agar perempuan di lingkungan sekitar tidak terkena asap rokok yang dapat membahayakan kesehatannya. Derajat perubahan juga dilakukan oleh anggota legislatif Kota Malang dengan pembuatan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan”.
- d. Pengambilan keputusan dalam implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 ditetapkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dinilai sudah tepat dengan hal ini Kementrian sudah berupaya untuk memberi perlindungan hukum dan

memberikan bantuan teknis melalui konsep panduan peningkatan partisipasi politik di lembaga legislatif. Selanjutnya kebijakan ini diserahkan kepada peran kelembagaan sebagai pihak yang diberi tugas untuk melakukan kinerja yaitu partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan. Pengambilan keputusan oleh kelembagaan dilakukan melalui rapat kepengurusan demi mencapai musyawarah untuk mufakat serta oleh pucuk pimpinan.

- e. Pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan ini meliputi partai politik, organisasi kemasyarakatan, penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah. Dari partai politik PDIP, PPP, Gerindra, Demokrat, Hanura dan Golkar. Penyelenggara pemilu meliputi KPU Kota Malang dan Pemerintah Daerah Kota yaitu DP3AP2KB Kota Malang serta Organisasi Kemasyarakatan meliputi WCC Dian Mutiara Kota Malang dan KPI Cabang Malang sudah memiliki kemampuan, profesionalitas, akuntabel dan terpercaya dalam melaksanakan implementasi kebijakan partisipasi politik perempuan. Hal ini dibuktikan bahwa enam partai politik yang terverifikasi menjadi peserta pemilihan legislatif tahun 2014 sudah melaksanakan untuk mendaftarkan 30% anggota perempuan.
- f. Sumber daya yang terlibat terbagi dua partisipasi politik yaitu, bentuk pertama sebagai para pengamat dan yang melakukan kegiatan partisipasi politik perempuan yaitu KPU, DP3AP2KB dan KPU Kota Malang. Sedangkan bentuk kedua yaitu para aktor yang melakukan komunikasi dan melakukan *lobbying* adalah partai politik itu sebagai pelaku yang

mendistribusikan kadernya dalam pemilihan umum. Sumber daya para partisipasi politik tersebut meliputi para pengusul kebijakan, perguruan tinggi dan pengurus internal partai.

2. Ditinjau dari konteks kebijakan, meliputi:

- a. Strategi para aktor yang terlibat melalui sosialisasi perundangan-undangan, rekrutmen, berkampanye, memberikan pendidikan dan pelatihan politik agar mampu meningkatkan sumber daya perempuan. Selain itu strategi lain adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat umum bahwa politik itu tidak kotor serta bukan mengajarkan politik uang. Titik tekanan disini bahwa semua peran kelembagaan harus mengajarkan fungsi dari melek politik.
- b. Karakteristik lembaga sangat menentukan terhadap lingkungan implementasi kebijakan. Selain itu rezim penguasa juga akan menentukan setiap pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan yang akan diambil terhadap peningkatan partisipasi politik perempuan. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa sudah cukup berpengaruh terhadap implemtasi kebijakan dikarenakan telah memiliki integritas yang tinggi melalui kegiatan sosialisasi peraturan perundangan-undangan, pendidikan politik, rekrutemen anggota, *zyper system*, penjenjangan strukturl, adanya bidang pemberdayaan perempuan dan mengakomodir perempuan di kepengurusan.
- c. Responsivitas pelaksana kebijakan sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari pelaksana kebijakan yang sudah melakukan identifikasi kader

potensial, diskusi, pengawalan pemilihan umum, dan melakukan sosialisasi perundangan-undangan. Selain itu partai politik sebagai pelaksana kebijakan sebagai yang menampung perempuan dalam ajang pemilihan umum sudah melaksanakan peningkatan partisipasi perempuan melalui rekrutmen, adanya sayap organisasi dan pemberian pelatihan keterampilan.

Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan ini dikatakan “*Unsuccessful Implementation*” dikarenakan para aktor yang terlibat belum melaksanakan secara maksimal. Partai Politik Demokrat, PDIP, PPP, Gerindra, Hanura dan Golkar sudah melaksanakan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kota Malang dibuktikan dengan adanya anggota perempuan di DPRD Kota Malang walaupun para anggota legislatif belum melaksanakan perubahan secara maksimal. Beberapa lembaga belum melaksanakan penyusunan program seperti DP3AP2KB Kota Malang serta KPU Kota Malang tidak menggunakan kebijakan panduan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif sebagai peraturan utama yang disosialisasikan karena belum ada *Memorandum of Understanding*.

B. Saran

Dalam rangka agar Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga

Legislatif Kota Malang berjalan dengan lancar, maka peneliti mencoba memberikan masukan dan sasaran sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Saran untuk Partai Politik Kota Malang:

- a. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kepada anggota dan masyarakat umum harus menjadi prioritas, karena SDM yang berkualitas akan mampu mendorong terciptanya kader politik yang kompeten dan kapabel sehingga nantinya dapat menjadi anggota legislatif yang bermanfaat dan dapat melakukan perubahan di masyarakat.
- b. Mengadakan kegiatan atau program yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan politik untuk mengembangkan *skill* seputar politik. Misalnya: seminar pentingnya politik perempuan, pelatihan kampanye yang menarik, *legislator training*, pendidikan perempuan pada kader politik maupun kepada masyarakat umum.
- c. Menciptakan budaya organisasi bahwa perempuan juga bisa terjun ke dalam dunia politik serta bisa menjadi pemimpin di masyarakat, hal ini diperlukan untuk meningkatkan kesetaraan gender.

2. Saran untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang

- a. Memberikan sosialisasi tentang penegakan hukum secara luas kepada masyarakat maupun partai politik tentang adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan porsi terhadap perempuan.

- b. Melakukan *check* kepada setiap kebijakan yang berkaitan dengan pemilihan umum sehingga nantinya bisa melakukan kerjasama di kedua belah pihak untuk meningkatkan partisipasi politik.

3. Saran untuk DP3AP2KB Kota Malang

DP3AP2KB Kota Malang harus lebih menunjukkan kebermanfaatannya di masyarakat melalui edukasi pendidikan dan pelatihan tentang melek politik. Karena keberhasilan peningkatan partisipasi politik perempuan tidak lepas dari bantuan organisasi perangkat daerah. Hal ini harus dilakukan mengingat bahwa fungsi DP3AP2KB Kota Malang juga untuk pemberdayaan perempuan. Serta DP3AP2KB Kota Malang berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melibatkan perguruan tinggi dalam kegiatan partisipasi politik.

4. Saran untuk Organisasi Kemasyarakatan

Hendaknya organisasi kemasyarakatan melakukan pendidikan melek politik dan sosialisasi peraturan perundangan kepada masyarakat umum. Selain itu juga melakukan diskusi dengan anggota legislatif dan masyarakat sehingga penyampaian aspirasi bisa dilakukan oleh masyarakat.

5. Saran untuk masyarakat

Masyarakat belum seluruhnya paham mengenai partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif. Sehingga ketika ada kegiatan sosialisasi, pendidikan maupun pelatihan tentang partisipasi politik maka sebaiknya masyarakat umum datang dan mengikuti rangkaian acara yang berlangsung. Sehingga diharapkan masyarakat muncul kesadaran dalam berpartisipasi dalam politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Salemba Humanika.
- Afandi, Achmad Syaiful. 2012. *Nanda: Politik Bukan Satu-satunya Pilihan Perempuan*. diakses pada 13 November 2017 Pukul 18.30 WIB www.mediacenter.malangkota.go.id
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Aida V.S, Hubeis. 2010. *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa ke Masa*. Bogor: IPB Press
- Arifin, Anwar. 2015. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bagian Umum Sekretaris DPRD Kota Malang
- Budiarto, Miriam. 2007. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Dokumentasi Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang
- Dokumentasi Perempuan Indonesia Raya Kota Malang
- Dokumentasi Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Malang
- Gatara, Sahid. 2009. *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hidajat, Imam. 2009. *Teori-teori Politik*. Malang: SETARA Press.
- Humas Kota Malang. 2018. *Rapat Paripurna Perda Cagar Budaya dan KTR Kota Malang*. Diakses pada 29 Maret 2018 Pukul 21.06 <https://malangkota.go.id/2018.01/04/perda-cagar-budaya-dan-ktr-kota-malang-disahkan/>
- Intruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
- Jurnal Perempuan 50. 2006. *Pengarusutamaan Gender*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah

- Kurniawan, Nalom. 2013. *Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Jurnal Konstitusi*. Volume 11. Nomor 4. Hal 717.
- Komisi Pemilihan Umum. 2015. *Jumlah Anggota DPR RI Periode 1997-2014*. Publikasi Statistik Indonesia. Diakses 13 November 2017. <https://kpud.go.id>
- Komisi Pemilihan Umum. 2014. *Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Malang 2014-2019*. Malang.
- Kurniawan. 2014. *Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Jurnal Konstitusi*. Volume 11 Nomor 4. Hal 717-718.
- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita Tahun 1979
- Labolo, Muhamad dan Teguh Ilham. 2017. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Lovenduski, Joni dan Azza Karam. 1999. *Perempuan di Parlemen: Membuat Suatu perubahan dalam Karam, azza.et.adll. Perempuan di parlemen bukan sekedar jumlah bukan sekedar hiasan*. Jakarta: Yayasan Jurnal.
- Malangtoday. 2017. *Sosialisasi Pendidikan Politik Perempuan Kota Malang Tahun 2017*. Diakses pada 29 Maret 2018 Pukul 20.21 WIB. <https://malangtoday.net/malang-rayakota-malang/pendidikan-politik-perempuan-penting>
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musta'id, Ahmad. *Perempuan dalam Panggung Politik*. diakses pada 13 November 2017 Pukul 18.30 WIB. www.islamcendekia.com
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender Dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi Tahun 1998-2002*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nuzula. 2017. *Peran Politik Perempuan Jelang Pilkada Kota Malang Tahun 2018*. Diakses pada 29 Maret 2018 Pukul 21.02 WIB. kpud-malangkota.go.id
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Utama.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif

- Santoso, Purwo. 2010. Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. POLGOV-Research Centre for Politics and Government.
- Sastriyani, Siti Hariti (Ed). 2009. *Gender and Politics*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dan Penerbit Tiara Wacana.
- Subono, Nur Imam. 2009. Representasi Politik Perempuan Sekadar Ada Pemberi Warna. *Jurnal Sosial Demokrasi*. Jakarta: Pergerakan Indonesia dan Komite Persiapan Yayasan Indonesia Kita.
- Soetjipto, Ani Widayani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Syafri. Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta:Erlangga
- Tachjan . 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung-Puslut KP2W lemlit Unpad.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
- Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2017. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)* Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Wiratama, Zihady Adrian. 2012. *Skripsi: Partisipasi Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi*. Malang: Universitas Brawijaya.



LAMPIRAN

Lampiran 1- Daftar Pertanyaan Wawancara**DAFTAR PERTANYAAN PARTAI POLITIK**

1. Apakah ibu mengetahui mengenai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif ?
2. Bagaimana Partai Politik Kota Malang mengakomodir tentang keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik?
3. Berapa banyak perempuan dalam kepengurusan Partai Politik Kota Malang? Berapa banyak jumlah pengurus partai Kota Malang seluruhnya? Apakah terpenuhi sesuai Undang-Undang ?
4. Bagaimana metode rekrutmen perempuan dalam kepengurusan ?
5. Apa sajakah bidang yang dipimpin oleh perempuan ? Dari berapa bidangnya yang dipimpin oleh perempuan?
6. Bagaimana keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif?
7. Berapa banyak perempuan yang menjadi calon legislatif dalam pemilu 2014 dari keseluruhan total daftar calon tetap ? Berapa perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif?
8. Bagaimana rekrutmen perempuan untuk menjadi caleg ? Apakah melalui pencalonan diri sendiri atau dipilih dari partai politik Bapak?
9. Bagaimana mekanisme pemberian nomor urut caleg dalam pemilu legislatif 2014?
10. Bagaimana cara kampanye calon legislatif berlangsung? Apakah dari partai ada strategi sendiri atau diberikan kepada caleg-caleg untuk berinovasi?.
11. Apakah partai menentukan posisi di komisi DPRD untuk caleg perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif ?
12. Bagaimana strategi dari Partai Politik Kota Malang Kota Malang untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan sebelum, saat dan setelah pemilihan umum legislatif 2014 ?
13. Menurut Bapak, kepentingan apa saja jika Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 ini diimplementasikan dengan baik oleh Dinas?
14. Menurut Bapak, apakah ada kebermanfaatan jika peraturan ini diimplementasikan ?
15. Setelah hampir 3 tahun berjalan, apakah dampak perubahan yang didapatkan oleh Partai Politik Kota Malang dan masyarakat umum dengan diimplementasikannya peraturan ini? Serta apakah anggota legislatif perempuan mampu membuat derajat perubahannya?
16. Apakah Partai Politik Kota Malang turut serta mengimplementasikan peraturan ini? Jika iya dimana letak pengambilan keputusan nya?

17. Menurut Bapak, sumber daya yang berpengaruh dalam peraturan ini siapa saja?
18. Bagaimana strategi dari Partai Politik Kota Malang agar peraturan ini dapat diimplementasikan di masyarakat terutama perempuan?
19. Bagaimana karakteristik Partai Politik Kota Malang Kota Malang terhadap keterwakilan dalam calon legislatif ?
20. Ketika dibuka pintu kuota 30% untuk perempuan, perempuan justru tidak siap memenuhi kuota tersebut. Hal ini dikarenakan ada gugatan terhadap kualitas perempuan. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai perwakilan dari Partai Politik Kota Malang?.
21. Bagaimana responsivitas Partai Politik Kota Malang Kota Malang dalam partisipasi politik perempuan di pemilihan umum legislatif 2014?

DAFTAR PERTANYAAN KPU KOTA MALANG

1. Bagaimana komunikasi antara KPU dan Partai Politik mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu?
2. Bagaimana respon partai-partai menanggapi tentang keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif?
3. Bagaimana posisi nomor urut caleg perempuan dalam daftar caleg?
4. Menurut Bapak dari Komisi Pemilihan Umum, kendala apa yang dihadapi partai politik yang tidak dapat memenuhi kuota 30% perempuan dalam pencalonan anggota legislatif?
5. Bagaimana strategi peningkatan partisipasi politik sebelum, saat dan setelah pemilihan Umum?
6. Menurut Bapak ,kepentingan apa saja jika peraturan ini diimplementasikan dengan baik ?
7. Menurut Ibu apakah ada kebermanfaatan jika peraturan ini diimplementasikan ?
8. Setelah hampir 3 tahun berjalan, apakah masyarakat mengalami perubahan dengan diimplementasikannya peraturan ini dan apakah anggota legislatif perempuan mampu membuat derajat perubahannya?
9. Untuk memberikan pelayanan atau pengambilan keputusan atau pengimplementasian kebijakan ini, dimana letak pengambilan keputusan nya?
10. Menurut Bapak, sumber daya yang berpengaruh dalam peraturan ini siapa saja?
11. Bagaimana strategi dari Komisi Pemilihan Umum agar peraturan ini dapat diimplementasikan ?
12. Bagaimana karakteristik Komisi Pemilihan Umum tentang pandang keterwakilan perempuan ?

13. Bagaimana responsivitas Komisi Pemilihan Umum dalam partisipasi politik perempuan?

DAFTAR PERTANYAAN DP3AP2KB Kota Malang

1. Bagaimana peran dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang dalam meningkatkan posisi perempuan di demokrasi pemilihan umum legislatif tahun 2014?
2. Apakah ibu mengetahui mengenai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif ?
3. Bagaimana strategi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan sebelum, saat dan setelah pemilihan umum legislatif 2014 ?
4. Menurut Ibu Sri Widayati, kepentingan apa saja jika Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 ini diimplementasikan dengan baik oleh Dinas?
5. Menurut Ibu apakah ada kebermanfaatan jika peraturan ini diimplementasikan?
6. Setelah hampir 3 tahun berjalan, apakah dampak perubahan yang didapatkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang dan masyarakat umum dengan diimplementasikannya peraturan ini? Serta apakah anggota legislatif perempuan mampu membuat derajat perubahannya?
7. Apakah DP3AP2KB Kota Malang turut serta mengimplementasikan peraturan ini? Jika iya dimana letak pengambilan keputusan nya?
8. Menurut Ibu Sri Widayati, sumber daya yang berpengaruh dalam peraturan ini siapa saja?
9. Bagaimana strategi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang agar peraturan ini dapat diimplementasikan di masyarakat terutama perempuan?
10. Bagaimana karakteristik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang terhadap keterwakilan dalam calon legislatif ?
11. Ketika dibuka pintu kuota 30% untuk perempuan, perempuan justru tidak siap memenuhi kuota tersebut. Hal ini dikarenakan ada gugatan terhadap kualitas perempuan. Bagaimana tanggapan Ibu sebagai perwakilan dari DP3AP2KB Kota Malang?

12. Bagaimana responsivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang dalam partisipasi politik perempuan di pemilihan umum legislatif 2014?



















DAFTAR PERTANYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1. Bagaimana peran ormas Kota Malang dalam meningkatkan posisi perempuan di demokrasi pemilu Tahun 2014?
2. Apakah ibu mengetahui mengenai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif ?
3. Bagaimana strategi peningkatan partisipasi politik sebelum, saat dan setelah pemilihan Umum Tahun 2014 ?
4. Menurut Ibu Bapak, Kepentingan apa saja jika peraturan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif diimplementasikan dengan baik ?
5. Menurut Ibu apakah ada kebermanfaatan peraturan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif diimplementasikan ?
6. Setelah hampir 3 tahun berjalan, apakah dampak perubahan yang didapatkan oleh ormas diimplementasikannya peraturan ini dan apakah anggota legislatif perempuan mampu membuat derajat perubahannya menurut Ibu ?
7. Untuk memberikan pelayanan atau pengambilan keputusan atau pengimplementasian kebijakan ini, Apakah turut serta mengimplementasikan peraturan? Jika iya dimana letak pengambilan keputusan nya?
8. Menurut Ibu, sumber daya yang berpengaruh dalam peraturan ini siapa saja?
9. Bagaimana strategi dari ormas agar peraturan ini dapat diimplementasikan ?
10. Bagaimana karakteristik ormas terhadap keterwakilan dalam calon legislatif?
11. Ketika dibuka pintu kuota 30% untuk perempuan, perempuan justru tidak siap memenuhi kuota tersebut. Ini belum lagi jika dilakukan gugatan terhadap kualitas perempuan. Bagaimana komentar Ibu?
12. Bagaimana responsivitas ormas dalam partisipasi politik perempuan?
13. Apakah dari peran ormas mempunyai program dalam peningkatan partisipasi politik perempuan ?

Lampiran 2. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Malang Tahun 2014-2019


















DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG DALAM PEMILIHAN UMUM 2014 DAPIL KOTA MALANG I KECAMATAN KEDUNG KANDANG

NOMOR URUT, LAMBAK DAN NAMA PARPOL	SUARA PARPOL	NO URUT CALEG	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TANGGAL LAHIR)
4	 PDI PERJUANGAN	1		SUPRAPTO, SH	L	KEC. KEDUNG KANDANG KOTA MALANG
		10		ARIF HERMANTO, ST	L	KEC. KEDUNG KANDANG KOTA MALANG
2	 SUARA PARPOL	2		H. ABD. RAHMAN	L	KEC. KEDUNG KANDANG KOTA MALANG
		10		SAHRAWI, S.S., M.HUM	L	KEC. KEDUNG KANDANG KOTA MALANG
6	 PARTAI GERINDRA	1		Drs. SALAMET	L	KEC. KEDUNG KANDANG KOTA MALANG
3	 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4		SUGIARTO	L	KEC. KEDUNG KANDANG KOTA MALANG
5	 PARTAI GOLKAR	1		SUKARNO	L	KEC. KEDUNG KANDANG KOTA MALANG
9	 PPP	5		SYAMSUL FAJRIH	L	KEC. KEDUNG KANDANG KOTA MALANG
5	 PAN	4		MOHAN KATELU, SH	L	KEC. KEDUNG KANDANG KOTA MALANG
7	 PARTAI DEMOKRAT	1		Hj. WIWIK HENDRI ASTUTI	P	KEC. KEDUNG KANDANG KOTA MALANG



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
DALAM PEMILIHAN UMUM 2014
DAPIL KOTA MALANG 2
KECAMATAN SUKUN**

NOMOR URUT, LAMBAANG DAN NAMA PARPOL	SUARA PARPOL	NO URUT CALEG	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TANGGAL LAHIR)
4  PDI PERJUANGAN	24.027 (26.71 %)	1.A		<i>Drs. EKA SATRIYA GAUTAMA, SH, MM (ALM)</i> PAW TAHUN 2014 KEPADA : DIANA YANTI, SAB	L	KEC. SUKUN KOTA MALANG
		1.B		DIANA YANTI, SAB		KEC. SUKUN KOTA MALANG
		2		HADI SUSANTO, SH	L	KEC. SUKUN KOTA MALANG
		3		TUTUK HARIYANI	P	KEC. SUKUN KOTA MALANG
5  PARTAI GOLKAR	12.425 (13.81 %)	3		CHOEROEL ANWAR, Sp.	L	KEC. SUKUN KOTA MALANG
2  PKB	10.047 (11.17 %)	1		MULYANTO, SH	L	KEC. SUKUN KOTA MALANG
10  HANURA <small>PARTAI HATI NURANI RAKYAT</small>	8.216 (9.13 %)	1		YA'QUD ANANDA GUDBAN, SS, SST. Par, MM.	P	KEC. SUKUN KOTA MALANG
9  GERINDRA <small>GERAKAN INDONESIA RAKYAT</small>	7.234 (8.04 %)	1		Dra. RM. EEN AMBARSARI	P	KEC. SUKUN KOTA MALANG
7  PARTAI DEMOKRAT	3.364 (7.07 %)	3		DR. H. CHRISTEA F.	L	KEC. SUKUN KOTA MALANG
9. PPP						



9		4.739 (5.27 %)	1		ASIA IRIANI, SE	P	KEC. SUKUN KOTA MALANG
8		4.637 (5.16 %)	4		HARUN PRASOJO, SH	L	KEC. SUKUN KOTA MALANG



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
DALAM PEMILIHAN UMUM 2014
DAPIL KOTA MALANG 3
KECAMATAN KLOJEN**

NOMOR URUT, LAMBAH DAN NAMA PARPOL	SUARA PARPOL	NO URUT CALEG	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TANGGAL LAHIR)
4  PDI PERJUANGAN	9.730(19.82 %)	1		Dr. TEGUH MULYONO	L	KEC. KLOJEN KOTA MALANG
10  HANURA PARTAI HATI RUMAH RAKYAT	1.157 (14.58 %)	1		AFDHAL FAUZA, SE	L	KEC. KLOJEN KOTA MALANG
5  PARTAI GOLKAR	6.658 (13.56 %)	1		RAHAYU SUGIARTI, S.Sos	P	KEC. KLOJEN KOTA MALANG
2  PKB	5.803 (11.82 %)	4		Drs. H. M. ZAINUDDIN, AS.	L	KEC. KLOJEN KOTA MALANG
7  PARTAI DEMOKRAT	5.017 (10.22 %)	1		HERY SUBIANTONO	L	KEC. KLOJEN KOTA MALANG
8  PAN PARTAI PANCA SYANGSI	4.506 (9.18 %)	4		SYAIFUL RUSDI, S.Pd. M.KPd	L	KEC. KLOJEN KOTA MALANG





















**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
DALAM PEMILIHAN UMUM 2014
DAPIL KOTA MALANG 4
KECAMATAN LOWOKWARU**

NOMOR URUT, LAMBAH DAN NAMA PARPOL	SUARA PARPOL	NO URUT CALEG	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TANGGAL LAHIR)
4	 PDI PERJUANGAN	17.243 (22.90 %)	2		L	KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG
			1		L	KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG
7	 PARTAI DEMOKRAT	8.610 (11.43 %)	4		L	KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG
2	 PKB	8.403 (11.16 %)	2		L	KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG
6	 PARTAI KESAMAHAAN RAKHYAT	7.258 (9.64 %)	2		L	KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG
5	 PARTAI GOLKAR	6.562 (8.71 %)	2		L	KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG
10	 HANURA PARTAI HATI NURANI RAKYAT	6.422 (8.53 %)	2		L	KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG
3	 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6.053 (8.04 %)	4		L	KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG
1	 PARTAI NasDem	5.256 (6.98 %)	1		L	KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
DALAM PEMILIHAN UMUM 2014
DAPIL KOTA MALANG 5
KECAMATAN BLIMBING**

NOMOR URUT, LAMBAK DAN NAMA PARTAI	SUARA PARTAI	NO URUT CALEG	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TANGGAL LAHIR)
4  PDI PERJUANGAN	21.719 (25.82 %)	1		Drs. ABD. HAKIM	L	KEC. BLIMBING KOTA MALANG
		2		TRI YUDIANI, S.Sos	P	KEC. BLIMBING KOTA MALANG
		3		ERNI FARIDA	P	KEC. BLIMBING KOTA MALANG
2  PKB	11.816 (14.05 %)	2		H. RASMUJI, SH	L	KEC. BLIMBING KOTA MALANG
7  PARTAI DEMOKRAT	8.694 (10.34 %)	2		SONI YUDIARTO	L	KEC. BLIMBING KOTA MALANG
6  PARTAI GERAKAN MUDA INDONESIA	7.862 (9.35 %)	1		LETKOL(PURN) SUPARNO HW	L	KEC. BLIMBING KOTA MALANG
9  PPP	7.470 (8.88 %)	3		Dra. Hj. HERI PUDJI UTAMI, M.AP	P	KEC. BLIMBING KOTA MALANG
5  PAN	6.750 (8.02 %)	2		H. SUBUR TRIONO, SE	L	KEC. BLIMBING KOTA MALANG
8  PARTAI GOLKAR	7.243 (8.61 %)	3		Ir. BAMBANG SUMARTO	L	KEC. BLIMBING KOTA MALANG
3  PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4.827 (5.74 %)	2		CHOIRUL AMRI, SE	L	KEC. BLIMBING KOTA MALANG

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PERDA KOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2016 (TANGGAL 7 OKTOBER 2016)
PELANTIKAN TGL. 4 MERTUIS 2017

**KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL**

KEPALA DINAS
Dra. Penny Indriani, MM (TV/C),
196304201989032014

SEKRETARIS
Moh. Sulthon, S.Sos, MM (TV/a),
196903131990031011

**KA. SUBBAGIAN
PERENCANAAN**
Lukiana Siswati, SE (III/d)
197011141997032006

**KA. SUBBAGIAN
KEUANGAN**
Nasya Handari, SH (III/d)
196005201990032002

**KA. SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN**
Humaidah, SH (III/d)
196412011990122001

**KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN**
Sri Widayati, SE, Msi
196109131987032008

**KEPALA SEKSI
PENINGKATAN KUALITAS
HIDUP PEREMPUAN**
Wiwik Koesoemaningdijah, SKM (III/D)
196104211983032017

**KEPALA SEKSI
PENGUATAN & PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN PEREMPUAN**
Dra. Sri Lestari, Msi (IV/a)
196905101993032001

**KEPALA SEKSI
EDUKASI DAN PARTISIPASI
PEREMPUAN**
Dra. Maria Angela Dj, Msi (IV/a)
196401141989032008

**KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK**
Erma Wyanarsi, SE, MM (IV/a)
196- 401091992032009

**KEPALA SEKSI
PERLINDUNGAN PEREMPUAN**
Pudji Lestari, BSc (III/d)
196501231987112001

**KEPALA SEKSI
PERLINDUNGAN ANAK**
Dra. Sri Puji Astuti (III/d)
196410051986022005

**KEPALA SEKSI
PEMENUHAN HAK PEREMPUAN
DAN ANAK**
Dwi Sunaryo, Amd (III/d)
196512061985031005

**KEPALA BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK**
Ratih Purnamawati, S.Sos, MM (IV/a)
196603041997032003

**KEPALA SEKSI
SINKRONISASI KEBIJAKAN
KEPENDUDUKAN**
Dra. Peni Wijanarti (III/d)
196510101985032006

**KEPALA SEKSI
PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK**
Drs. Karbi, MM (IV/a)
196005311981111001

**KEPALA BIDANG
KELUARGA BERENCANA**
I Nyoman Sedana, SH (IV/a)
196001011985031067

**KEPALA BIDANG
KELUARGA BERENCANA**
I Nyoman Sedana, SH (IV/a)
196001011985031067

**KEPALA SEKSI
PEMBINAAN DAN KESERTAAN
KELUARGA BERENCANA**
Endang Harianti, S.Sos (III/d)
196302271992032002

**KEPALA SEKSI
PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA DAN DISTRIBUSI
ALAT KONTRASEPSI**
TutiK Istiariini, SH (III/d)
196112231999012001

**KASI PENDAYAGUNAAN
PKB/PLKB DAN IMP**
Diyah Setyatie, SKM (III/D)
196509011989022004

**KEPALA BIDANG
KETAMAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA**
Sapto Wibowo, SH, M.Hum (IV/a)
19690521 199303 1005

**KEPALA SEKSI
PEMBERDAYAAN KELUARGA
SEJAHTERA**
Dra. Endang Purwati (III/d)
196510011992032007

**KEPALA SEKSI
BINA KELUARGA BALITA,
REMAJA DAN LANJUT USIA**
Erna Tri Winaryanti (III/d)
196309211985082002

**KEPALA UPT KB KECAMATAN
SUKUN**
Endang Sulistyowati (III/b)
196607102001122003

**KEPALA UPT KB KECAMATAN
KLOJEN**
Triastuti Rahayati (III/C)
196103111987032010

**KEPALA UPT KB KECAMATAN
BLIMBING**
Muchlishoh, SKM (III/D)
197011271997032003

**KEPALA UPT KB KECAMATAN
KEDUNGKANDANG**
Monike Paalis (III/C)
196505141989032014

**KEPALA UPT KB KECAMATAN
LOWOKWARU**
Linda Sibarani, SE (III/D)
196312271986032009

**KEPALA UPT KB KECAMATAN
KEDUNGKANDANG**
Monike Paalis (III/C)
196505141989032014

**KEPALA UPT KB KECAMATAN
LOWOKWARU**
Linda Sibarani, SE (III/D)
196312271986032009

**KEPALA UPT KB KECAMATAN
KEDUNGKANDANG**
Monike Paalis (III/C)
196505141989032014

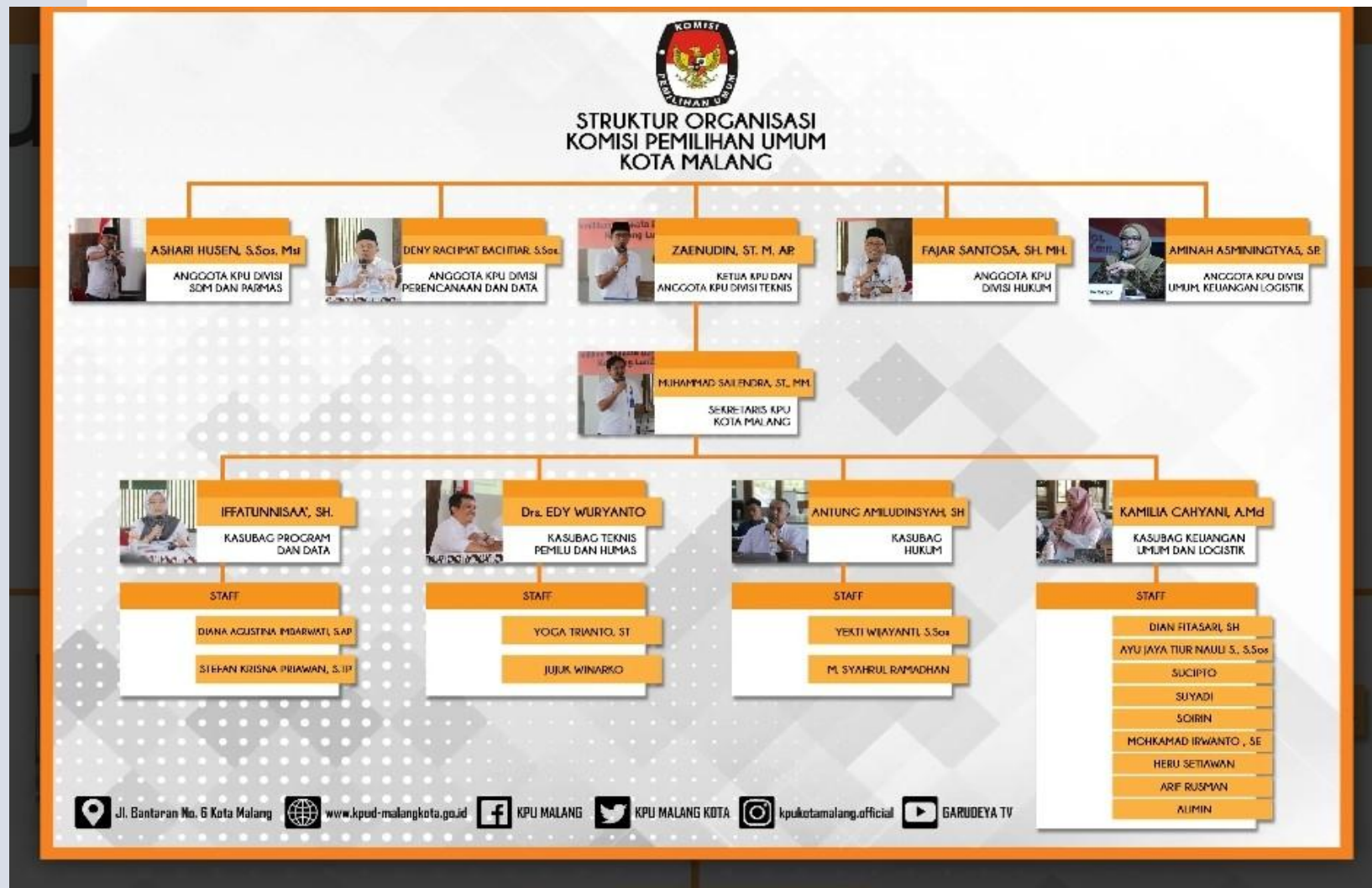
**KEPALA UPT KB KECAMATAN
LOWOKWARU**
Linda Sibarani, SE (III/D)
196312271986032009

**KEPALA UPT KB KECAMATAN
KEDUNGKANDANG**
Monike Paalis (III/C)
196505141989032014

**KEPALA UPT KB KECAMATAN
LOWOKWARU**
Linda Sibarani, SE (III/D)
196312271986032009

**KEPALA UPT KB KECAMATAN
KEDUNGKANDANG**
Monike Paalis (III/C)
196505141989032014

**KEPALA UPT KB KECAMATAN
LOWOKWARU**
Linda Sibarani, SE (III/D)
196312271986032009





STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA
DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA MALANG

Periode Masa Bakti 2015 -2020

NO	N A M A	JABATAN	ALAMAT (NOMOR TELEPON / HP)
1	MOCH. ARIEF WICAKSONO, ST	KETUA	Jl. Vinolia 21 0341 325617 HP. 081333 1212 70
WAKIL KETUA BIDANG INTERNAL :			
2	SUPRAPTO, SH	Wakil Ketua Bidang Kehormatan Dan Organisasi	Jl. Panian Ters III H7/ C8 081 333 286 888
3	I MADE RIAN DIANA KARTIKA, SE	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Komunikasi Politik	Jl. Tlogo Suryo 20 RT.03 / RW.02 082 244 11 666 30
4	ACHMAD ZAKARIA,S.PD	Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi	Jl. Bukit Dieng Blok A/19 081 216 476 760
WAKIL KETUA BIDANG PEMERINTAHAN :			
5	HADI SUSANTO, SH	Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	JL. Pisang Candi Barat 23-C 081 334 546 654
6	IWAN MAHENDRA, S.SOS	Wakil Ketua Bidang Maritim, Ekonomi, Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	Jl. Galunggung III / 12-A 081 333 123 7270
WAKIL KETUA BIDANG KERAKYATAN :			
7	YUSANA INTYASWATI, SE	Wakil Ketua Bidang Nelayan, Petani Dan Buruh	Jl. Kalimantan 70 0341 364126 HP. 087701556722
8	TRI YUDIANI, S.SOS	Wakil Ketua Bidang Perempuan Anak	Jl. Grindulu 36 /Jl. Sulfat Erfina C-2 081233969398 - 087859853737
9	NURUL SETYOWATI, SE	Wakil Ketua Bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Jl. MT. Haryono X/1117 08127509541
10	BUDIDOYO	Wakil Ketua Bidang Pemuda & Olah Raga dan Komunitas Seni Budaya	Jl. MT. Hariono VII / 49 085231814306
SEKRETARIS :			
11	DRS. ABD. HAKIM	SEKRETARIS	Jl. Titan Asri III / CC-56 081 334 526 075
12	DRS. AGOES MARHAENTA,SS	Wakil Sekretaris Bidang Internal	Jl. Danau Paniai H3-C39 081 705 050 86
13	ENDAH ANDAYANI	Wakil Sekretaris Bidang Eksternal	JL. Kol. Sugiono V-F/456 085 655 588 278
BENDAHARA :			
14	SUDI IRIANTO	BENDAHARA	Jl. KH. Tamin I-A / 5 0341 529561 HP. 081216826423
15	DIANA YANTI, SAB	Wakil Bendahara	Jl. Bandulan IX / 615-A 081 252 655 226

Sekretariat : Jl. Panji Suroso No. 5C Telp. (0341) 491918 Kode Pos 65126
 Email : pdipkotamalang@yahoo.com

**DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

Sekretariat : Jl. Raya Kendangsari No. 36 Surabaya 60252 Telp. 031.8432170 Fax. 031.8425466

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Lampiran 1 (satu) Surat Keputusan DPW PPP Jawa Timur Nomor : 03/SK/DPW/C/IX/2016

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
KOTA MALANG MASA BAKTI 2016 – 2021**

Ketua	: Dra. Hj. Heri Puji Utami, MM.
Wakil Ketua Bid. Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi	: Suryo Santoso, ST.
Wakil Ketua Bid. Agama, Dakwah dan Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf	: Abd. Muntolib, S.Ag.
Wakil ketua Bid. Hubungan dan Kerja sama Antar Lembaga	: M. Danial Farafish, SH, M.Hum, M.Ag.
Wakil Ketua Bid. Advokasi Hukum dan HAM	: Bobby Hakim Junior, SH, MH, C.L.A.
Wakil Ketua Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam	: Samsul Huda, SE.
Wakil Ketua Bid. Teknologi, Informasi, Komunikasi dan Media	: Abd. Wahid, S.Pd., M.Si.
Wakil Ketua Bid. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	: Fitri Yudawastuning.
Wakil Ketua Bid. Ekonomi, Pengembangan Koperasi dan Kewirausahaan	: Asia Iriani, SE.
Wakil Ketua Bid. Pendidikan, Seni Budaya dan Pariwisata	: Achmad Iswanto, ST.
Wakil Ketua Bid. Pemuda dan Olah Raga	: Eny Hidayati, S.Pd.
Wakil Ketua Bid. Pemenangan Dapil I	: Syamsul Fajri.
Wakil Ketua Bid. Pemenangan Dapil II	: Achmad Sarip.



**DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

Sekretariat : Jl. Raya Kendangsari No. 36 Surabaya 60292 Telp. 031-8492378 Fax. 031-8421453

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Wakil Ketua Bid. Pemenangan Dapil III	: Gofar Aljafri, Bc.kn.
Wakil Ketua Bid. Pemenangan Dapil IV	: Kentar Wardoyo.
Wakil Ketua Bid. Pemenangan Dapil V	: Achmad.
Sekretaris	: H.Abd.Rozzaq SM.
Wakil Sekretaris Bid. Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi	: Moh. Abu Tazid, S.Sos., M.Si.
Wakil Sekretaris Bid. Agama, Dakwah dan Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf	: Fathmir Reza, S.Ag.
Wakil Sekretaris Bid. Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga	: H. Sarbini, S.Pd.
Wakil Sekretaris Bid. Advokasi Hukum dan HAM	: Romi Fauzi, SH.
Wakil Sekretaris Bid. Teknologi Informasi, Komunikasi dan Media	: Luthfi Anhar, S.Kom.
Wakil Sekretaris Bid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	: Dra.Ec. Din Widiyarsi.
Wakil Sekretaris Bid. Ekonomi, Pengembangan Koperasi dan Kewirausahaan	: Ana Maftuchah, S.Pd.
Wakil Sekretaris Bid. Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam	: Eko Muji Sutrisno, S.Ag.
Wakil Sekretaris Bid. Pendidikan, Seni Budaya dan Pariwisata	: Titik Nur Fajriyah, SE.
Wakil Sekretaris Bid. Pemuda dan Olah Raga	: Iwan Iskandar zaky, s.hum.
Wakil Sekretaris Bid. Pemenangan Dapil I	: Nurahmad, S.Pd.
Wakil Sekretaris Bid. Pemenangan Dapil II	: Joko Supriono.



**DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

Sekretariat : Jl. Raya Kendangsari No. 36 Surabaya 60292 Telp 031-8492378 Fax 031-8421453

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Wakil Sekretaris Bid. Pemenangan Dapil III	: Zara Untari
Wakil Sekretaris Bid. Pemenangan Dapil IV	: Rahmad Hidayat
Wakil Sekretaris Bid. Pemenangan Dapil V	: Winarti, SE
Bendahara	: Isrotul Wahidiyah
Wakil Bendahara	: Rochani Ekowati
Wakil Bendahara	: H. Imam Muhaji

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1437 H
30 September 2016 M

DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
PENGURUS HARIAN

Ketua,

Drs. H.M. MUSYAFFA' NOER, M.Si., MM.



Sekretaris,

NORMAN ZEIN NAHDI, SE.



Lampiran SK DPP Partai Demokrat
 Nomor: /SK/DPP.PD/DPC/ /2017

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
 DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT
 KOTA MALANG
 PROVINSI JAWA TIMUR
 PERIODE 2017-2022**

DEWAN PIMPINAN CABANG

Ketua	: Ir. H. Arif Darmawan
Wakil Ketua I	: Hery Subianto
Wakil Ketua II	: Ir. Indra Tjahyono, MM
Wakil Ketua III	: Hj. Sulik Lestyowati, SH. M Hum
Wakil Ketua IV	: Drs. Teguh Hariyono

Sekretaris	: Adi Sancoko, SE
Wakil Sekretaris I	: Achmad Anang Fatoni, SE
Wakil Sekretaris II	: Cahyo Budianto
Wakil Sekretaris III	: Dian Venny Puspitasari, S.Pd
Wakil Sekretaris IV	: Christina Yossevin, S.Pd

Bendahara	: Hj. Wiwik Hendri Astuti
Wakil Bendahara I	: Dra. Anik Anggraeni
Wakil Bendahara II	: Dewi Komariyah
Wakil Bendahara III	: Dinie Aribawati
Wakil Bendahara IV	: Kartini Ningrum, S.Psi

Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Cabang

Ketua	: Suharno, STp
Wakil Ketua I	: Sony Yudiarto
Wakil Ketua II	: Catur Agung Wibawanto
Sekretaris	: Andhi Widiono, S.Pt
Anggota	: Roch. Sapto Utomo, S.Sos

Komisi Pemenangan Pemilu Cabang

Ketua	: Hari Fajar Kuswardhana, SE
Wakil Ketua I	: Wisnu Murti Wibowo, SH
Wakil Ketua II	: Yudianto Gunawan
Sekretaris	: Puteri Nadya Rachmatica
Anggota	: Yusnita Indriani



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERINDRA**
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 09-0330/Kpts/DPP-GERINDRA/2017

Tanggal : 29 September 2017

Tentang : **Susunan Personalia Pengurus DPC Partai Gerindra Kota Malang**

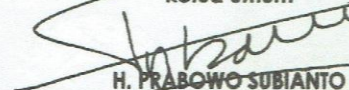
No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	MORENO SOEPRAPTO
2.	Wakil Ketua	Letkol (Purn) SUPARNO
3.	Wakil Ketua	Ir. HARDI PRAJITNO
4.	Wakil Ketua	YUDHO PRIHANTO, SH
5.	Wakil Ketua	Ny. Dr. CANGGI SAKINAH
6.	Wakil Ketua	Ny. Dra. RM EEN AMBARSARI
7.	Wakil Ketua	Ir. NUR PRASTYO
8.	Wakil Ketua	Drs. PRANAJAYA EKA KESUMA
9.	Wakil Ketua	Drs. Ec. R.I. BIMO HERU WAHYONO
10.	Wakil Ketua	SUBANDI, SE
11.	Wakil Ketua	Ir. DIDIK KARSONO
12.	Wakil Ketua	Ny. Dra. SHANTI RATIH DEWANTI
13.	Wakil Ketua	ACHADI BASOEKARNO, SE
14.	Wakil Ketua	Ny. SITI KHOTIJAH, S.Pd
15.	Wakil Ketua	MASROHAN
16.	Wakil Ketua	Ir. JOKO WAHYUDI
17.	Wakil Ketua	ANANG BACHTIAR
18.	Wakil Ketua	IMAM KANAPI, SE
19.	Wakil Ketua	Ny. CLARA LODYA KELLY, SH
20.	Wakil Ketua	Ny. NINUK DARTIWI, SE
21.	Wakil Ketua	BENNY NURCAHYO
22.	Wakil Ketua	RUDI RAJA PARUHUMAN
23.	Sekretaris	Drs. SALAMET
24.	Wakil Sekretaris	DONY KURNIAWAN PS, S.Pi
25.	Wakil Sekretaris	Ny. SRI NURHAYATI
26.	Wakil Sekretaris	Ny. WIWIN INDRIANI, S.Sos
27.	Bendahara	DIDIK SUPRIYANTO
28.	Wakil Bendahara	TEGUH PUJI WAHYONO, SE, MM
29.	Wakil Bendahara	Ny. Dra. ERLIN IRIANI, MM
30.	Wakil Bendahara	Ny. LILIK SETYOWATI

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 September 2017

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(DPP PARTAI GERINDRA)**

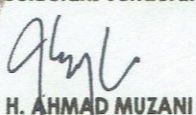
Ketua Dewan Pembina/
Ketua Umum


H. PRABOWO SUBIANTO

SK DPP Nomor : 09-0330/Kpts/DPP-GERINDRA/2017



Sekretaris Jenderal


H. AHMAD MUZANI





Lampiran : Surat Keputusan DPD Partai GOLKAR
Provinsi Jawa Timur
Nomor : Kep-17/DPD I/PG/IX/2016
Tanggal : 13 September 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA
DPD PARTAI GOLKAR KOTA MALANG MASA BAKTI 2016-2021
HASIL MUSDA IX PARTAI GOLKAR KOTA MALANG

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ir. SOFYAN EDI JARWOKO	Ketua
2.	NUGROHO AGUS WIDJANARKO, S.Pd	Wakil Ketua Bidang Organisasi
3.	Ir. BAMBANG SUMARTO	Wakil Ketua Bidang Kaderisasi & Keanggotaan
4.	RUDY NUGROHO, S.Pd	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu
5.	AGUS ENDRA SUHARNO H, MM	Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat
6.	ANDI REZA JANUAR	Wakil Ketua Bidang, Koperasi, Wiraswasta & UMKM
7.	Drs.H. RAHMAN NURMALA, MM	Wakil Ketua Bidang Pendidikan & Cendekiawan
8.	ANA ROKHMATUS SA'DYAH, SH, MH	Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan & Perempuan
9.	Drs. RIBUT HARIANTO, MM	Wakil Ketua Bidang Seni & Budaya
10.	Drs.H. SAPARDI, M.Pd	Wakil Ketua Bidang Kerohanian
11.	AHSAN ISMAIL	Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan
12.	DIDIK HARIYANTO	Wakil Ketua Kelurahan, Daerah Tertinggal dan Hubungan antar Lembaga
13.	WAHYUDI HIDAYAT, SH	Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM
14.	CHOEROEL ANWAR, SP	Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga
15.	Hj. LILIK MEGAWATI, SH	Wakil Ketua Bidang Komunikasi, Media dan Penggalangan Opini
16.	SUKARNO, SE	Sekretaris
17.	Drs. YULIONO, M.Sc	Wakil Sekretaris Bidang Organisasi
18.	AGUS SULISTINA, SE	Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi & Keanggotaan
19.	Hj. RETNO SUMARAH, SE, MM	Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu
20.	UMIATI, SH	Wakil Sekretaris Bidang Pengabdian Masyarakat
21.	SURYA DARMADI PRATIKNJO	Wakil Sekretaris Bidang, Koperasi, Wiraswasta & UMKM

NO	NAMA	JABATAN
22.	Drs.H. SOENARITANTO, MM	Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan & Cendekiawan
23.	SRI RACHMAWATI, SH	Wakil Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan
24.	Dra. UMI HANIK SUPRIYO	Wakil Sekretaris Bidang Seni & Budaya
25.	SAMSUL EFENDI, SE	Wakil Sekretaris Bidang Kerohanian
26.	H. AGUS SUJANTO	Wakil Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan
27.	YUDI HANARDI	Wakil Sekretaris Bidang Kelurahan, Daerah Tertinggal dan Hubungan Antar Lembaga
28.	MUSOLLI, SH	Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan HAM
29.	HANDIK PURWANTORO, SE	Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga
30.	MIMIN SULISTYONINGSIH, SH, M.Hum	Wakil Sekretaris Bidang Komunikasi, Media dan Penggalangan Opini
31.	RAHAYU SUGIARTI, S.Sos	Bendahara
32.	Dra.Hj. YEKTI SUGIARTI	Wakil Bendahara
33.	NUR LAILY	Wakil Bendahara
34.	MOCH. JUNAIDI	Wakil Bendahara
35.	JOKO PRIHATIN	Wakil Bendahara
36.	Drs. MUHAMAD ALI HS	Ketua Bagian Organisasi
37.	SURYADI, S.Pd	Anggota Bagian Organisasi
38.	Drs. BAMBANG AGUS RIANTO	Anggota Bagian Organisasi
39.	Drs. SAMSUL ARIFIN	Ketua Bagian Kaderisasi & Keanggotaan
40.	Dra. YUSMIN SN, M.Si	Anggota Bagian Kaderisasi & Keanggotaan
41.	AGUNG BASUKI RAHMAD, S.St	Anggota Bagian Kaderisasi & Keanggotaan
42.	PAULINA IKE SIWI R, ST, MT	Ketua Bagian Pemenangan Pemilu
43.	SAIFUL ROCHMAN	Anggota Bagian Pemenangan Pemilu
44.	PONCO AGUS YUNianto	Anggota Bagian Pemenangan Pemilu
45.	M. ARIEF BUDIARSO, ST	Ketua Bagian Pengabdian Masyarakat
46.	EDI WIDJANARKO, SAP	Anggota Bagian Pengabdian Masyarakat
47.	H.M. IKSAN	Anggota Bagian Pengabdian Masyarakat
48.	SUHARIADI	Ketua Bagian Koperasi, Wiraswasta & UMKM
49.	DOROTHEA SOELISTYANING DEWI SURYO	Anggota Bagian Koperasi, Wiraswasta & UMKM
50.	AHMAD ARIEF, ST	Anggota Bagian Koperasi, Wiraswasta & UMKM
51.	Drs. IMAM BAKRI	Ketua Bagian Pendidikan & Cendekiawan
52.	Dra.Hj. RETNO SULISTYOWATI, M.Si	Anggota Bagian Pendidikan & Cendekiawan

NO	NAMA	JABATAN
53.	PUJI RAHAYU, S.Pd	Anggota Bagian Pendidikan & Cendekiawan
54.	ENDANG SURYATI, S.Si, M.Pd	Ketua Bagian Pemberdayaan Perempuan
55.	Dra. TRINIL SRI WAHYUNI	Anggota Bagian Pemberdayaan Perempuan
56.	PURWATININGSIH, S.Sos	Anggota Bagian Pemberdayaan Perempuan
57.	BUDI HARIADI	Ketua Bagian Seni & Budaya
58.	YULI SUHARTATIK, SE	Anggota Bagian Seni & Budaya
59.	NURUL IDAYATI, SE	Anggota Bagian Seni & Budaya
60.	Drs. DAUD	Ketua Bagian Kerohanian
61.	BUDIARTO DIBYO, S.Pd	Anggota Bagian Kerohanian
62.	IDA KADE SUMBERJAYA	Anggota Bagian Kerohanian
63.	ANJAS SASANA BAHRI, SP, MP	Ketua Bagian Tani dan Nelayan
64.	Ir. SRI WIDJAJATI	Anggota Bagian Tani dan Nelayan
65.	SRI DJUMA' ATININGSIH	Anggota Bagian Tani dan Nelayan
66.	FUAD ARDIANSYAH, SE	Ketua Bagian Kelurahan, Daerah Tertinggal dan Hubungan antar Lembaga
67.	SUGENG HARTONO	Anggota Bagian Kelurahan, Daerah Tertinggal dan Hubungan antar Lembaga
68.	SISWO HARYOKO	Anggota Bagian Kelurahan, Daerah Tertinggal dan Hubungan antar Lembaga
69.	ERVIN RINDA YANTO, SH, MH	Ketua Bagian Hukum dan HAM
70.	IRAWAN SUKMA, SH	Anggota Bagian Hukum dan HAM
71.	DIMAS FASCHO ADHYAKSA	Anggota Bagian Hukum dan HAM
72.	SAHMAWI, S.Psi	Ketua Bagian Pemuda dan Olahraga
73.	URIP LAKSANA DKP, SE	Anggota Bagian Pemuda dan Olahraga
74.	FONY	Anggota Bagian Pemuda dan Olahraga
75.	MUHAMMAD ANAS MUTTAQIN, M.Si	Ketua Bagian Komunikasi, Media dan Penggalangan Opini
76.	Dra. NOOR HANDAJANINGSIH, MM	Anggota Bagian Komunikasi Media dan Penggalangan Opini
77.	SUMADI	Anggota Bagian Komunikasi Media dan Penggalangan Opini

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada Tanggal : 13 September 2016

Ketua,

Sekretaris,



Drs. Ec. H. NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Ir. H. GESANG BUDIARSO, MH

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN
 Nomor : SKEP/146 /DPP-HANURA/IX/2017
 Tanggal : 28 September 2017

SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG
 PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
 KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

DEWAN PENASEHAT CABANG

Ketua : H. Sujai
Wakil Ketua : Habib Rofiq Abdulrahman Al Maghrobi
Wakil Ketua : KH. M. Ridwan
Anggota : Imam Jazuli

DEWAN PIMPINAN CABANG

Ketua : Ya'Qud Ananda Gudban, SS, S.ST.Par, MM
Wakil Ketua : Rully Sugiono, SH
Wakil Ketua : Gatot Eko Sulasmono, SE
Wakil Ketua : Rina Kencanasari, SH
Wakil Ketua : Hasan Priyo Widodo, ST
Wakil Ketua : Ir. Nikmatul Choiriah, MP
Wakil Ketua : Moch. Nasir Amin, SH, M.Hum
Wakil Ketua : Sugeng
Wakil Ketua : Fitna Apriliani
Wakil Ketua : Mario David Tobing, ST
Wakil Ketua : Idawati
Wakil Ketua : Ririn Eli Susanti

Sekretaris : Ahmad Ilman Gama
Wakil Sekretaris : Drg. Anisha Giantini
Wakil Sekretaris : Jianto
Wakil Sekretaris : Milky
Wakil Sekretaris : M. Alfadin Zuhri, Amd
Wakil Sekretaris : Femi Diah Safira

Bendahara : Siti Chosiyah, SE
Wakil Bendahara : Randy Gaung K.I.
Wakil Bendahara : Nicolita Mundzir, ST, MM
Wakil Bendahara : Briza Arshandy M



Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 28 September 2017

Ketua Umum
 COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
 30/09/17
 Sekretaris Jenderal
 DR. OESMAN SAPTA
 SARIFUDDIN SUDDING, SH, MH

SURAT KETETAPAN

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA WILAYAH JAWA TIMUR
NO: / S-KEP KPI JATIM / IV / KPI JATIM / 2013
TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS CABANG MALANG
KOALISI PEREMPUAN INDONESIA
WILAYAH JAWA TIMUR



Mengingat

1. Ketentuan Bab I Pasal 1 ayat 5 Anggaran Dasar
2. Ketentuan Bab V Anggaran Rumah Tangga tentang Pengambilan Keputusan Pasal 18 Status dan Wewenang ayat (5)
3. Ketentuan Bab V Anggaran Rumah Tangga tentang Pengambilan Keputusan Pasal 19 Status dan Wewenang ayat (3)
4. Hasil Musyawarah Muafakat Untuk Pengurus Periode 2013-2016

Memutuskan

Umamah sebagai Sekretaris Cabang Malang, Sunarlin sebagai Koordinator Dewan Kelompok Kepentingan Perempuan Cabang Malang, Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Timur periode 2013-2016.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki kemudian.

Salam Keadilan dan Demokrasi,
 Surabaya, April 2013

Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.
 Sekretaris Wilayah Jawa Timur

Lampiran

SUSUNAN PENGURUS PERIODE 2013-2016
CABANG MALANG
KOALISI PEREMPUAN INDONESIA WILAYAH JAWA TIMUR

Sekretariat Cabang
 Sekretaris Cabang : Umamah
 Administrasi Kesekretariatan : Saras Dumasari
 Bendahara : Endahing N.I.P.

Dewan Kelompok Kepentingan Cabang
 Koordinator Dewan Kelompok Kepentingan : Sunarlin
 Dewan Kelompok Kepentingan Nelayan : Suharti
 Dewan Kelompok Kepentingan Lansia : Sunarti
 Dewan Kelompok Kepentingan Profesional : Sri Asih
 Dewan Kelompok Kepentingan Pemuda, Pelajar, Mahasiswa : Septy Putri E.N.

Salam Keadilan dan Demokrasi,
 Surabaya, April 2013

Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.
 Sekretaris Wilayah Jawa Timur

STRUKTUR ORGANISASI DIAN MUTIARA WOMEN'S CRISIS CENTER



Lampiran 4- Dokumentasi

1. Dokumentasi di DP3AP2KB Kota Malang



Kantor DP3AP2KB Kota Malang
Jalan Ki. Ageng Gribig No 5 Malang



Gambar dengan Ibu Sri Widayati

Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan

2. Dokumentasi di KPU Kota Malang



Kantor Komisi Pemilihan Umum
Kota Malang

Jl. Bantaran No 6 Malang



Gambar dengan Bapak Zaenudin, S.T.M.Ap
Ketua KPU Kota Malang



Gambar dengan Ibu Aminah
Komisioner Divisi Logistik

3. Dokumentasi Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Malang



Konfercab KPI Cabang Malang



Temu Jejaring KPI Cab Malang

4. Dokumentasi *Women's Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang



Sekretariat WCC Cabang Malang



Aksi Bersama Women Internasional Day

5. Dokumentasi DPC PDIP Cabang Malang



Kantor DPC PDIP Cabang Malang

Jl.Panji Suroso No 5C Kota Malang



Gambar dengan Bapak Abd Hakim

Ketua DPRD Kota Malang/Sekretaris DPC PDIP

6. Dokumentasi DPC PPP Cabang Malang



Kantor DPC PPP Cabang Malang
Jl. Panji Suroso No 5A



Gambar dengan Ibu Asia

7. Dokumentasi DPC Demokrat Cabang Malang



Kantor DPC Demokrat Kota Malang
Jl. Bantaran VE no.5



Gambar dengan Bapak Anang
Sekretaris DPC Partai Demokrat

8. Dokumentasi DPC Gerindra Kota Malang



Kantor DPC Gerindra Kota Malang
Jalan Setaman No 15



Gambar dengan Ibu Wiwin
Sekretaris DPC Gerindra Kota Malang

9. Dokumentasi DPC Hanura Kota Malang



Kantor DPC Hanura Kota Malang

Jl. Simpang Coklat No 4 Malang



Gambar dengan Ibu Nanda

Ketua DPC Partai Hanura Malang

10. Dokumentasi DPD Golkar Kota Malang



Kantor DPD Golkar Kota Malang

Jalan Panglima Sudirman 91 Malang



Gambar dengan Bapak Bambang Sumarto

Lampiran 5- Surat Keterangan



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Ki Ageng Gribig No. 5 Malang Telp./Fax : 0341 - 717744 email : dp3ap2kb.kotamalang@gmail.com

Kode Pos : 65137

SURAT KETERANGAN

Nomor: 019 / *96* /35.73.309/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. PENNY INDRIANI, MM
NIP : 19630420 198903 2 014
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MERRY AMILIA
NIM : 145030101111036
Fakultas/Jurusan : Ilmu Administrasi /Administrasi Publik
Universitas : Brawijaya Malang

Bahwa nama tersebut diatas pernah melakukan Riset/Penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang sejak tanggal 2 Januari s.d 24 Januari 2018 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Januari 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA,



Dra. PENNY INDRIANI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630420 198903 2 014





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

Alamat : Jl. Bantaran 6 Malang 65112
Telp/Fax : (0341) 408898 - 409909

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (diisi petugas)*:/PPID-B KPU KOTA MALANG/...../2018

Nama

Merry Amigliano

Alamat

Jl. Warkudoro II No. 7 P.O. Box RW.02
Bekohon

Pekerjaan

Mahasiswa di Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Prawijaya

Nomor Telepon/E-mail

089610026925 / merryamirada@gmail.com

Rincian Informasi yang dibutuhkan
(tambahkan kertas bila perlu)

- Daftar Nama Caleg Pilkada 2019
- Struktur Organisasi

Tujuan Penggunaan Informasi

Untuk keperluan Data Strip:

Cara Memperoleh Informasi**

: 1. Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi**

2. Mendapatkan salinan informasi(hardcopy/softcopy)***

1. Mengambil Langsung *Flash disk*

2. Kurir

3. Pos

4. Faksimili

5. E-mail

Pemohon Informasi

James

(.....) Nama dan Tanda Tangan

Malang, 04 - Januari 2018

**Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)**

(Penerima Permohonan)

YOGA TRIANTO
(.....)
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

** Pilih salah satu dengan cara mengklik salah satu tombol



**DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(DPC PDI PERJUANGAN)
KOTA MALANG JAWA TIMUR**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 354/DPC-73/EX/II/2018

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Malang dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lengkap : MERRY AMILIA
NIM : 145030101111036
Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK
Fakultas : ILMU ADMINISTRASI
Universitas : BRAWIJAYA

Telah melakukan tugas penelitian di kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Malang.

Sejak tanggal 04 Januari 2018 Sampai dengan 16 Januari 2018 dan telah melakukan wawancara kepada Struktur DPC PDI Perjuangan Kota Malang dan Anggota Fraksi PDI Perjuangan Kota Malang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Februari 2018
**DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA MALANG**

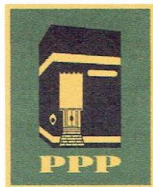
Pelaksana Harian Ketua,

Drs. EDDY PARIPURNA, M.Si



Sekretaris,

Drs. ABD HAKIM



**DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
KOTA MALANG**

Sekretariat : Jl. Panji Suroso No. 5A Blimbing Malang ☎ 0341 - 7797084

SURAT KETERANGAN

Nomor : 068/DPC-PPP/MAKOTA/A/B/III/2018

Pada hari Rabu dan Kamis, Tanggal 24-25 Januari 2018, menerangkan, bahwa Mahasiswa yang beridentitas dibawah ini :

Nama Mahasiswa : **MERRY AMILIA**
NIM : 145030101111036
Alamat : Jl. Werkudoro III No. 1 RT 05 RW 02 Kelurahan Polean, Blimbing
Jurusan : **ADMINISTRASI PUBLIK**
Program Studi : **ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**
Fakultas : **ILMU ADMINISTRASI**
Asal Kampus : **UNIVERSITAS BRAWIJAYA**
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan
Partisipasi Politik di Lembaga Legislatif Kota Malang.

Benar-benar telah melakukan wawancara terhadap, yaitu :

1. **Abu Tazid, S. Sos., M.Si** (Wakil Sekretaris DPC PPP Kota Malang/Staf Ahli Fraksi PPP)
2. **Asia Iriani, SE., MM** (Wakil Ketua Bid. PPA/Anggota DPRD Fraksi PPP Kota Malang)

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 07 Maret 2018

**DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
KOTA MALANG**


Dra. Hj. Heri Pudji Utami, MAP




H. Abd. Rozag, SM



**DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRAT
KOTA MALANG**

Sekretariat : Jl. Bantaran VE – No. 5. Malang
Tlp / No. Hp : 081334617000 – 081235256669
Email : dpcdemokratmalang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

NAMA : ACH. ANANG FATONI, SE
JABATAN : WAKIL SEKRETARIS I DPC. PARTAI DEMOKRAT
KOTA MALANG
ALAMAT SEKREATARIAT : Jl. Bantaran VE – No. 5. Malang

Menerangkan bahwa :

NAMA : MERRY AMILIA
ALAMAT : Jl. Werkudoro III No. 1 Rt. 05 Rw. 02 Kel. Polehan
Kec. Blimbing - Kota Malang
NIM : 145030101111036
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
JUDUL : Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Panduan
Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif
Kota Malang

Benar – benar melakukan wawancara pengambilan data di Sekretariat DPC. Partai Demokrat Kota Malang. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Januari 2018



ACH. ANANG FATONI, SE
Wk. Sekretaris



**DEWAN PIMPINAN CABANG
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
KOTA MALANG**

SURAT KETERANGAN


Yang bertanda tangan di bawah ini sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Malang menerangkan

Nama : Merry Amilia
Nim : 145030101111036
Jurusan : Administrasi Publik
Alamat : Jl. Werkudoro III no 1 Rt 05 Rw 02 Kel Polehan Kec. Blimbing
Judul skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak nomor 7 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi
Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Malang .

Benar – benar telah melakukan penelitian di DPC Partai Gerindra Partai Gerindra Kota Malang.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Malang 27 Februari 2018


(Drs.Salamet)
PARTAI
GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PIMPINAN CABANG
KOTA MALANG



DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
KOTA MALANG

JL. PANGLIMA SUDIRMAN 91 MALANG 65111 Telp. (0341) 326954, FAKSIMILE (0341) 320161
Email golkarmkg@gmail.com website www.golkarkotamalang.or.id

Surat Keterangan

Nomor B.24/DPD-II/Golkar/ III/2018

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Malang menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MERRY AMILIA
Alamat : Jl.Werkudoro III No 1 RT5 RW2 Kelurahan Polehan
Kecamatan Blimbing Kota Malang
NIM : 145030101111036
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Administrasi
Universitas : Brawijaya Malang

Telah melakukan penelitian di Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Malang dan pada tanggal 13 Maret telah melakukan wawancara dengan Pengurus DPD Partai Golkar Kota Malang dengan tema Implementasi Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2013 Sebagai Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Proses Pencalonan Anggota Legislatif di Kota Malang.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Malang, 21 Maret 2018

DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA KOTA MALANG

Ketua

Sekretaris


Ir. SOFYAN EDI JARWOKO
NPAPG: 3573040512120003


SUKARNO, SE
NPAPG: 6573030511990005





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 07 TAHUN 2013

TENTANG
PANDUAN PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN
DI LEMBAGA LEGISLATIF

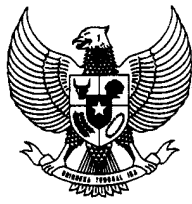
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, perlu keseimbangan peran gender dalam proses pengambilan keputusan politik di lembaga legislatif;
- b. bahwa jumlah keterwakilan perempuan minimal 30 (tiga puluh) persen di lembaga legislatif belum tercapai;
- c. bahwa masih sedikit Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Kompensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653;

2. Undang-Undang ...





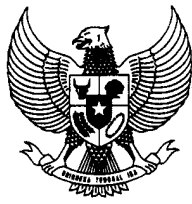
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan ...





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANDUAN PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF.

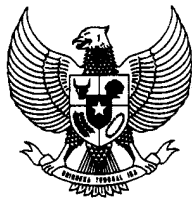
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tindakan khusus sementara (*affirmative action*) adalah kebijakan sementara yang dikhususkan untuk perempuan dalam usaha mencapai keadilan gender dan kesetaraan gender bidang politik.
2. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
3. Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan

Negara ...





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Lembaga legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
6. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini disusun Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

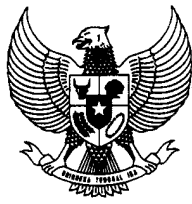
Maksud penyusunan Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif adalah sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar program dan kegiatan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif mencapai hasil yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Tujuan Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif adalah untuk membantu penyusunan program dan kegiatan peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif agar lebih sistematis, terukur, dan akuntabel.

Pasal 5 ...





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

- (1) Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif meliputi :
 - a. Peran kelembagaan;
 - b. Kebijakan;
 - c. Strategi (sebelum pemilu, selama pemilu, dan setelah pemilu);
 - d. Pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. Pendanaan; dan
 - f. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Ruang lingkup Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif ini menjelaskan tentang program dan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di kepengurusan partai politik, pencalonan dalam pemilu legislatif, dan pelaksanaan fungsi-fungsi legislatif.

Pasal 6

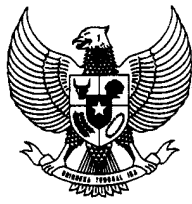
- (1) Pendanaan program dan kegiatan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif dapat bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan/atau APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 7

SKPD yang melaksanakan program dan kegiatan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif membuat laporan dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud.

Pasal 8 ...





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2013

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
LINDA AMALIA SARI

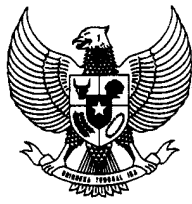
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1482





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2013
TENTANG
PANDUAN PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK
PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF

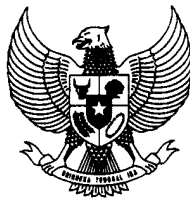
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur kebijakan tindakan khusus sementara (*affirmative action*) yang berguna untuk meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik. Namun sejauh ini usaha-usaha pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk meningkatkan partisipasi perempuan tersebut belum optimal. Meskipun laki-laki dan perempuan sama-sama mencalonkan diri, mengikuti kampanye, dan memberikan suara dalam pemilu, tetapi jumlah perempuan terpilih menjadi anggota legislatif belum mencapai 30% sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan pemilihan umum.

Hasil Pemilu 2009, perempuan meraih 101 (18%) kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 36 (27%) kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Untuk DPRD Provinsi, perempuan meraih kursi DPRD rata-rata 16% dari 33 provinsi, dan kursi DPRD Kabupaten/Kota rata-rata 12% dari 487 kabupaten/kota se Indonesia. Gambaran jelas dari komposisi perolehan kursi legislatif untuk perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat dipetakan: *pertama*, keterwakilan perempuan di 33 DPRD Provinsi, hanyalah Provinsi Maluku yang mencapai target 30% kursi DPRD-nya. Sedangkan di 32 provinsi lainnya dapat dikategorikan: kluster satu di 5 provinsi meraih kursi antara 21% - 25%, kluster dua di 16 provinsi meraih kursi 11% - 20%, dan kluster tiga di 11 provinsi meraih kursi 2% - 10%. *Kedua*, keterwakilan perempuan DPRD di 488 Kabupaten/Kota dapat diidentifikasi: hanyalah 7 kota yang dapat meraih kursi diatas 30%; sedangkan di 481 kabupaten/kota lainnya dapat diklusterkan sebagai berikut:

kluster ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

kluster satu terdapat di 35 kabupaten/kota perempuan meraih kursi DPRD 21% - 29%; kluster dua di 192 kabupaten/kota perempuan meraih kursi DPRD 11% - 20%, kluster tiga di 210 kabupaten/kota perempuan meraih kursi DPRD 2% - 10%, dan kluster empat di 44 kabupaten/kota (9,03%) perempuan tidak meraih kursi DPRD-nya. Selain itu terdapat di 68 dari 488 Kabupaten/Kota hanya satu keterwakilan perempuan DPRD-nya yang rentan kosong karena setiap terjadi pergantian antarwaktu yang mengganti bukan perempuan.

Semua itu memperlihatkan, bahwa penerapan kebijakan tindakan khusus sementara dalam bentuk kuota keterwakilan 30% perempuan di kepengurusan partai politik dan lembaga legislatif, belum berhasil baik. Padahal angka 30% itu merupakan batas minimal di mana suara dan kepentingan perempuan baru didengar dan dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Di kepengurusan partai politik, jika keterwakilan 30% perempuan tidak terpenuhi, akan sulit melahirkan kebijakan partai politik yang pro perempuan dan anak; demikian juga di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, apabila kuota keterwakilan 30% perempuan tidak mencukupi, suara dan kepentingan perempuan sulit diakomodasi dalam pembuatan kebijakan.

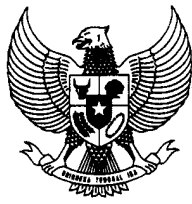
Jumlah perempuan di lembaga legislatif yang sedikit berkorelasi dengan keterpinggiran perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi sehari-hari, seperti tercermin dari tingkat kesehatan, pendidikan, dan pendapatan yang rendah. Hal ini diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum responsif gender bahkan banyak kebijakan yang cenderung kurang melindungi dan menguntungkan perempuan dalam kehidupan sosial ekonomi sehari-hari sebagai akibat dari sedikitnya perempuan yang terlibat dalam pengambilan kebijakan di legislatif.

Dengan demikian, menambah jumlah perempuan di lembaga legislatif merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi perempuan dan anak secara keseluruhan. Namun penambahan jumlah perempuan di lembaga legislatif harus dibarengi dengan peningkatan kualitas perempuan anggota legislatif sehingga mereka mampu menjalankan peran dan fungsi politiknya secara maksimal.

Untuk itu diperlukan panduan penyusunan program dan kegiatan peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif, agar usaha-usaha untuk meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga legislatif tersebut berjalan sistematis, terprogram dan terukur.

B. Maksud ...





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

B. Maksud dan Tujuan

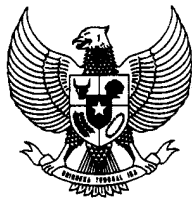
Maksud penyusunan Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif adalah sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar program dan kegiatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif mencapai hasil yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif adalah untuk membantu penyusunan program dan kegiatan peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif agar lebih sistematis, terukur, dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini menjelaskan tentang program dan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di kepengurusan partai politik, pencalonan dalam pemilu legislatif, dan pelaksanaan fungsi-fungsi legislatif. Sedangkan bentuk kegiatan meliputi sosialisasi, seminar, diskusi terbatas, lokakarya, dan pelatihan.





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB II
PERAN KELEMBAGAAN

A. Partai Politik

Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa partai politik yang memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilu berhak mengajukan daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk dikompetisikan dalam pemilu. Partai politik juga berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Dengan demikian partai politik merupakan pintu utama untuk memasuki lembaga politik formal, legislatif maupun eksekutif.

Undang-undang partai politik mengharuskan partai politik melakukan pendidikan politik bagi anggota dan kader-kadernya baik laki-laki maupun perempuan agar mereka dapat diandalkan di organisasi kepartaian, lembaga legislatif, maupun eksekutif. Apalagi undang-undang partai politik mewajibkan sedikitnya 30% pengurus diisi oleh perempuan; sedang undang-undang pemilu mewajibkan sedikitnya 30% calon anggota legislatif diisi oleh perempuan. Dengan demikian partai politik wajib melakukan mendidik kader-kader perempuan secara sistematis dan terencana agar mereka berperan aktif di bidang politik meningkat secara maksimal.

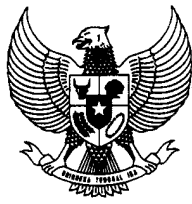
B. Penyelenggara Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib membuat peraturan pelaksanaan pemilu yang bisa menjamin terlaksanannya kebijakan tindakan khusus sementara sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif yang diajukan oleh partai politik. Kepastian peraturan pelaksanaan ini penting agar kader-kader perempuan memiliki pegangan kuat dalam menjaga posisinya sebagai calon anggota legislatif. Kejelasan peraturan pelaksanaan ini juga akan memudahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan jajarannya untuk melakukan pengawasan agar hak-hak politik kader perempuan tetap terjaga dengan baik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya maupun Bawaslu dan jajarannya harus mensosialisasikan ketentuan pelaksanaan kebijakan tindakan khusus sementara dalam sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan calon legislatif, agar para kader perempuan memiliki wawasan cukup sehingga mereka lebih percaya diri dalam menghadapi proses

persaingan ...





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

persaingan pencalonan (internal partai) maupun perebutan suara di setiap daerah pemilihan (Dapil). KPU dan Bawaslu bertanggungjawab atas pemahaman kader-kader perempuan dalam implementasi kebijakan tindakan khusus sementara dalam pemilu.

C. Pemerintah

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang merupakan bagian dari Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mempunyai kewajiban memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik. Melalui sosialisasi, seminar, diskusi terbatas, lokakarya, serta pendidikan dan pelatihan, KPP-PA dan Kemendagri mendorong perempuan-perempuan berpotensi untuk menjadi anggota partai politik dan menjadi calon anggota legislatif. Kedua lembaga perlu meningkatkan kemampuan para calon anggota DPR dan DPD untuk berkompetisi yang sehat dalam pemilu, lalu meningkatkan kemampuannya sebagai legislator jika terpilih.

D. Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

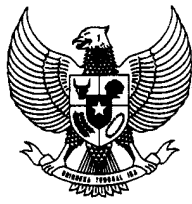
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk mendorong lebih banyak perempuan aktif di dunia politik. Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik perlu dikembangkan secara terencana dan terprogram secara berkesinambungan sehingga mereka siap menjadi anggota partai politik, pengurus partai politik, menjadi calon anggota legislatif dan menjadi anggota legislatif. Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik bisa dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, seminar, diskusi terbatas, lokakarya, serta pendidikan dan pelatihan, baik dengan koordinasi dan kerjasama dengan KPP-PA dan Kemendagri, maupun dilaksanakan sendiri secara mandiri.

E. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang berbasis anggota dan yang tidak berbasis anggota (kerja), baik Ormas yang peduli/penggiat politik maupun Ormas yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dapat mendorong dan menyokong perempuan untuk anggota dan kader aktif di partai politik, menyiapkan diri menjadi anggota legislatif guna memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak melalui pembuatan kebijakan di lembaga legislatif.

Organisasi ...





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

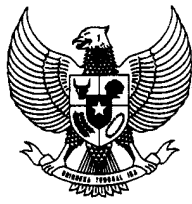
- 12 -

Organisasi kemasyarakatan bisa menjadi mitra partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah, maupun pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga legislatif.



BAB III ...





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB III
KEBIJAKAN

A. Landasan Konstitusional

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai warga negara adalah setara. Namun para perumus konstitusi menyadari, kesetaraan itu tidak serta merta terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Ini terlihat dari catatan sejarah nasional maupun sejarah banyak negara lain, di mana hanya sedikit perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan di lembaga legislatif.

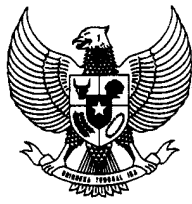
Banyak faktor yang menyebabkan hal itu. Pertama, perempuan memiliki keterbatasan ekonomi sehingga tidak cukup modal untuk berkompetisi dalam pemilu. Kedua, perempuan tidak menguasai struktur politik sehingga gampang dikalahkan dalam persaingan memasuki daftar calon dan meraih suara. Ketiga, perempuan hidup dalam budaya patriarki yang cenderung menolak (resisten) calon perempuan menjadi anggota legislatif. Keempat, perempuan memiliki standar moral tertentu sehingga berhati-hati dan tidak mau menghalalkan segala cara demi meraih suara sebanyak-banyaknya.

Para perumus konstitusi membuat ketentuan khusus bagi kelompok masyarakat tertentu yang terpinggirkan, termasuk perempuan, untuk mendapatkan jaminan keadilan dan kesetaraan. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Ketentuan konstitusional itulah yang menjadi landasan bagi lahirnya kebijakan tindakan khusus sementara (*affirmative action*) bagi perempuan. Kebijakan tindakan khusus sementara adalah kebijakan khusus dalam kurun waktu tertentu untuk meningkatkan jumlah perempuan di jabatan-jabatan publik. Kebijakan tindakan khusus sementara ini diimplementasikan dalam bentuk adanya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan partai politik dan daftar calon anggota legislatif. Kebijakan sementara yang bertujuan untuk mencapai persamaan senyatanya antara laki-laki dan perempuan ini tidak dianggap sebagai diskriminasi.

B. Konvensi ...





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

B. Konvensi Internasional

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 sesungguhnya telah menegaskan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Namun masyarakat internasional menyadari, untuk mewujudkan hak-hak perempuan dalam kehidupan sehari-hari memerlukan kebijakan khusus. Kesadaran ini didasarkan pada kenyataan bahwa perempuan di seluruh dunia masih mengalami nasib buruk: pertama, perempuan dianggap lebih rendah kedudukannya daripada laki-laki; kedua, perempuan lebih sulit mengakses pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja daripada laki-laki.

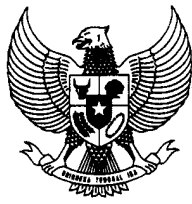
Realitas sosial tersebut membuat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sangat peduli pada isu perempuan. Pada 7 Juli 1954 Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan atau *Convention on the Political Right of Women (CPRW)*. Lalu, pada 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*.

Implementasi dari dua dokumen itu selama beberapa dasawarsa belum mengalami kemajuan yang signifikan, sehingga Konferensi Dunia IV tentang Perempuan 1995 di Beijing China, mengeluarkan Deklarasi Beijing Platform for Action (BPFA). Deklarasi ini menegaskan, demi meningkatkan kesadaran akan hak perempuan, perlu dilakukan pendidikan tentang hak-hak perempuan dan dibentuk badan-badan yang bertugas melindungi perempuan dari pelanggaran hak-haknya. Selanjutnya memasuki Abad ke-21, Sidang Umum PBB yang dihadiri oleh 189 negara di dunia membuat deklarasi Delapan Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*), yang dalam tujuan ke-3 adalah Pemberdayaan Perempuan dan Promosi Kesenjaraan Gender dalam berbagai aspek pembangunan.

C. Kebijakan Nasional

Pemerintah Indonesia meratifikasi CPRW melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita, dan CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Sebelum meratifikasi CEDAW, sejak 1978 pemerintah telah membentuk Kementerian Negara Urusan Wanita, yang secara khusus mengkoordinasi usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan melalui program pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

Kebijakan ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

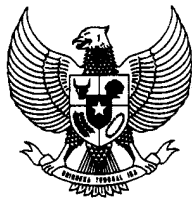
- 15 -

Kebijakan tindakan khusus sementara bagi perempuan di bidang politik baru diterapkan pasca pemilu 1999. Pada tahap awal, kebijakan tindakan khusus sementara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Undang-Undang ini menyatakan, bahwa kepengurusan partai politik harus memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Meski rumusan “memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender” itu sangat abstrak dan tidak terukur, namun undang-undang itu merupakan pijakan pertama untuk mengembangkan kebijakan tindakan khusus sementara lebih lanjut.

Dalam mengadopsi kebijakan tindakan khusus sementara, undang-undang berikutnya menggunakan rumusan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan. Angka 30% itu merupakan kesimpulan dari studi *United Nations Divisions for the Advancement of Women (UN-DAW)*, bahwa suara dan kepentingan perempuan baru diperhatikan dalam kehidupan publik, apabila mencapai 30%. Atas dasar ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menggunakan rumusan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif untuk Pemilu 2004.

Lima tahun kemudian, kebijakan tindakan khusus sementara dalam bentuk kuota minimal 30% keterwakilan perempuan diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-Undang ini menyatakan, bahwa pendirian dan kepengurusan partai politik memperhatikan sedikitnya 30% keterwakilan perempuan. Selanjutnya, kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif juga diperbaiki komposisinya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Ketentuan ini dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Tentu saja implementasi undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu legislatif tersebut masuk dalam kerangka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

BAB IV
STRATEGI

Masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah lima tahun; demikian juga dengan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota selaku kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota. Presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilu presiden, sedangkan gubernur dan wakil gubernur serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota dipilih melalui pemilu kepala daerah. Secara nasional terdapat dua lembaga perwakilan, yaitu DPR dan DPD; sedangkan di provinsi dan kabupaten/kota terdapat DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dipilih melalui pemilu legislatif yang diselenggarakan setiap lima tahun.

Sesuai masa jabatan masing-masing, setiap lima tahun sekali diselenggarakan pemilu legislatif, lalu pemilu presiden dan wakil presiden, dilanjutkan pemilu kada yang di setiap daerah dengan jadwal berbeda-beda. Inilah agenda politik lima tahunan yang menjadi patokan melaksanakan program dan kegiatan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif. Berdasarkan agenda politik tersebut, kegiatan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik menuju menjadi anggota lembaga legislatif meliputi tiga tahapan: sebelum pemilu legislatif, selama pemilu legislatif, dan setelah pemilu legislatif.

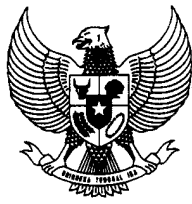
A. Sebelum Pemilu

Syarat calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah menjadi anggota partai politik. Syarat ini sesuai dengan ketentuan, bahwa daftar calon anggota legislatif diajukan partai politik melalui ketua dan sekretaris partai politik. Karena pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan secara bersamaan setiap lima tahun sekali, maka setiap lima tahun sekali partai politik mengajukan daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Dalam menyusun daftar calon, partai politik harus menyeleksi para peminat yang jumlahnya lebih banyak daripada kursi yang diperebutkan di setiap daerah pemilihan. Setiap partai politik memiliki kriteria tertentu untuk menetapkan seseorang masuk dalam daftar calon anggota legislatif. Yang jelas mereka bukan sekadar anggota biasa, melainkan seorang kader yang telah teruji dedikasi dan loyalitasnya. Kemampuan menjalankan tugas-tugas legislatif tentu saja menjadi pertimbangan, selain faktor peluang keterpilihan.

Yang ...





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Yang pasti pengurus partai politik akan lebih mudah masuk dalam daftar calon, sebab yang menyeleksi calon sesungguhnya adalah pengurus partai politik.

Apabila perempuan ingin menjadi anggota legislatif, langkah pertama adalah menjadi anggota partai politik. Lalu menjadi kader yang baik dengan mengikuti semua peraturan partai politik dan mempercayai nilai-nilai yang dikembangkan partai politik. Selanjutnya, terlibat aktif dalam kegiatan partai politik dan menjadi pengurus partai politik. Di sinilah dedikasi, loyalitas, dan kepemimpinan kader diuji dan dinilai untuk dipastikan bisa masuk dalam daftar calon anggota pemilu legislatif. Tentu saja partai politik juga mempertimbangkan kekuatan kader dalam meraih kursi dan kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas legislatif.

Masalahnya, banyak perempuan tidak tertarik kegiatan politik sehingga enggan menjadi anggota partai politik. Mereka menganggap politik adalah kotor dan merupakan dunia laki-laki. Padahal politik bukan sekadar kompetisi memperebutkan kekuasaan, tetapi juga arena untuk membuat kebijakan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan secara inklusif. Di sinilah diperlukan langkah-langkah yang bertujuan mendorong perempuan untuk terjun ke dunia politik dengan menjadi anggota partai politik, menjadi kader yang aktif dalam kegiatan partai politik, dan menjadi pengurus partai politik.

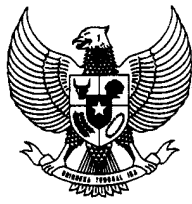
B. Selama Pemilu

Proses pemilu legislatif berjalan berdasarkan tahapan-tahapan: pendaftaran partai politik peserta pemilu, pencalonan anggota legislatif, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, penetapan calon terpilih, dan pelantikan calon terpilih. Setiap tahapan, menuntut keaktifan para kader dan pengurus partai politik dalam upaya meraih suara sebanyak-banyaknya. Dalam tiga tahapan ini, yaitu pencalonan, kampanye, dan penghitungan, menuntut konsentrasi tinggi. Sebab pada tiga tahapan itu keberhasilan kader dalam meraih kursi anggota legislatif ditentukan.

Pertama, pencalonan. Pada tahap ini kader perempuan harus memastikan diri hendak menjadi calon anggota legislatif di daerah pemilihan (Dapil) mana. Dua faktor harus dipertimbangkan: pertama, dukungan pengurus partai politik; dan kedua, potensi meraih suara. Dukungan pengurus akan memuluskan proses pencalonan sehingga nama kader masuk dalam daftar calon anggota

legislatif ...





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

legislatif. Sedangkan potensi meraih suara akan memperbesar peluang partai politik untuk meraih kursi dan memperbesar peluang calon untuk menjadi calon terpilih. Oleh karena itu, para kader perempuan partai politik jauh-jauh harus mengambil langkah-langkah guna mendapatkan dukungan pengurus dan memperbesar potensi meraih suara.

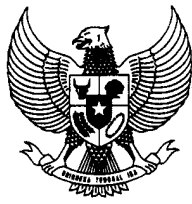
Kedua, kampanye. Kampanye adalah upaya meyakinkan pemilih yang dilakukan partai politik dan calon anggota legislatif. Di sini ruang dan waktu tersedia bagi calon untuk meyakinkan pemilih agar mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Persaingan antarcalon dalam satu partai tidak terhindarkan dalam upaya meraih suara terbanyak, tetapi kerjasama antarcalon dalam satu partai politik juga penting guna memastikan partai politik meraih kursi. Kampanye bukan sekadar memajang baliho, membenteng spanduk, menyebar poster, dan membagi-bagi kartu nama, tetapi juga menawarkan program dan kegiatan yang masuk akal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Strategi kampanye yang efektif perlu disusun oleh calon agar kampanye lebih terarah dan lebih memastikan perolehan suara.

Ketiga, penghitungan suara. Penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara selesai dilakukan di setiap TPS. Penghitungan suara ini berlangsung berjenjang: TPS, PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU. Di satu pihak, kelelahan petugas pemilu memungkinkan terjadinya kesalahan penghitungan suara; di lain pihak, kompetisi ketat antarpolitical partai politik dan antarcalon anggota legislatif dalam satu partai politik, memungkinkan terjadinya kecurangan dalam penghitungan suara. Oleh karena itu setiap calon harus menjaga perolehan suaranya agar tidak jatuh ke partai politik atau calon lain, baik karena faktor kesalahan maupun kecurangan.

C. Setelah Pemilu

Setelah KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota mengumumkan hasil pemilu dan menetapkan calon anggota legislatif terpilih, maka calon terpilih tidak cukup hanya mempersiapkan kelengkapan persyaratan administrasi pelantikan anggota legislatif, tetapi juga harus menyiapkan mental untuk menghadapi tekanan-tekanan politik. Mereka yang menjadi calon terpilih bisa dibujuk rayu dengan iming-iming uang atau dipaksa dengan kekerasan, oleh orang-orang tertentu untuk mengundurkan diri dari status calon terpilih, agar posisinya bisa digantikan oleh calon lain.

Sebelum ...

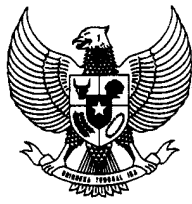


MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Sebelum pelantikan, para calon anggota legislatif terpilih harus membekali diri dengan pengetahuan dan ketrampilan dalam menjalankan fungsi-fungsi legislatif: legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Penguasaan fungsi-fungsi tersebut tidak hanya akan menunjukkan penampilan bagus anggota legislatif di mata pemilih, tetapi juga akan memudahkan perjuangan kepentingan rakyat. Bagaimanapun tujuan dari berpolitik adalah memperjuangkan aspirasi, tuntutan dan hak-hak rakyat guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB V
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan dan sasaran jelas, sedangkan kegiatan adalah pelaksanaan program dalam kerangka ruang dan waktu yang telah direncanakan. Dengan demikian program dan kegiatan peningkatan partisipasi politik perempuan menuju anggota legislatif terdiri dari sosialisasi, seminar, diskusi terbatas, lokakarya, serta pendidikan dan pelatihan politik.

A. Sosialisasi

Sosialisasi adalah pertemuan yang menghadirkan narasumber untuk menjelaskan hal-hal baru yang perlu diketahui oleh kelompok tertentu yang berkepentingan. Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif, kegiatan sosialisasi misalnya dapat digunakan untuk menjelaskan peraturan-peraturan baru yang harus dipahami oleh perempuan yang berminat menjadi anggota partai politik, anggota partai politik perempuan, atau calon anggota legislatif perempuan. Sosialisasi diperlukan agar mereka tidak salah dalam menjalankan rencana kerjanya untuk menjadi anggota partai politik dan calon anggota legislatif.

B. Seminar

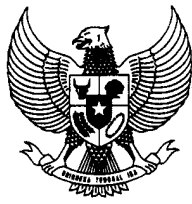
Seminar adalah pertemuan ilmiah yang menghadirkan dua narasumber atau lebih dari para pakar dan praktisi untuk membahas topik tertentu. Peserta seminar adalah mereka yang menaruh perhatian pada masalah tertentu. Hadirnya pembicara yang kompeten akan memberi pemahaman yang komprehensif atas topik yang dibahas. Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif, seminar bisa digunakan untuk membahas sesuatu masalah aktual terkait dengan mengeksplorasi ide-ide baru, implementasi peraturan baru, membahas persiapan pencalonan, membahas strategi dan persiapan kampanye, membahas proses penghitungan suara, membahas peluang politik perempuan untuk menjadi calon terpilih, membahas persiapan pelantikan anggota legislatif, dan membahas fungsi-fungsi legislatif.

C. Sarasehan

Sarasehan adalah pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat prasaran tentang berbagai hal/masalah dalam bidang tertentu.

Sarasehan ...





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Sarasehan politik para pakar (akademisi) dan praktisi politik serta pejabat publik guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif sangat penting untuk mengetahui berbagai kekuatan dan kelemahan yang dihadapinya. Masalah-masalah aktual politik perempuan dibicarakan secara kritis konstruktif untuk mencari kesepakatan (musyawarah) atau solusi alternatif yang dapat disumbangkan oleh berbagai pihak yang berkompeten untuk ditindaklanjutinya.

D. Diskusi Terbatas

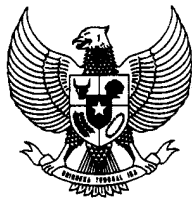
Diskusi terbatas atau biasa disebut dengan *focus group discussion* (FGD) adalah pertemuan untuk membahas masalah tertentu yang sedang menjadi perhatian banyak kalangan. Dalam diskusi terbatas, tidak hanya topiknya yang dibatasi, tetapi pesertannya juga terbatas, yakni orang-orang yang dianggap memahami duduk masalah yang sedang dibahas. Diskusi terbatas perlu dipandu oleh seorang fasilitator agar pembahasan tetap terarah sesuai tujuan. Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif, diskusi terbatas bisa digunakan untuk membahas kesulitan kader perempuan masuk dalam daftar calon anggota legislatif, tantangan calon perempuan dalam menghadapi persaingan internal maupun eksternal partai politik, dan pelanggaran-pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara.

E. Lokakarya

Lokakarya (*workshsop*) adalah forum untuk mencari solusi alternatif atas masalah tertentu, dipimpin oleh seorang fasilitator, kadang kala menghadirkan satu atau dua narasumber dari para pakar dan praktisi yang kompeten. Hasil lokakarya biasanya berupa rumusan-rumusan kongkrit untuk memecahkan masalah di lapangan. Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif, lokakarya bisa digunakan untuk memilih daerah pemilihan dalam pencalonan, meredam ketegangan dan konflik pencalonan, menyusun strategi kampanye, mengumpulkan dana kampanye, menggalang kerjasama antarcalon dalam kampanye, menjaga proses pemungutan dan penghitungan suara, menghadapi gugatan hasil pemilu, dan menghadapi tekanan politik pengunduran diri.

F. Pendidikan ...





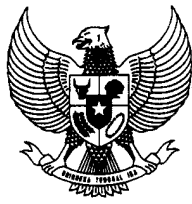
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

F. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tertentu. Pendidikan dan Pelatihan bagi orang dewasa (andragogi) biasanya dipandu oleh seorang fasilitator yang bertugas mendorong peserta latih untuk belajar sendiri. Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif, pendidikan dan pelatihan bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan menjaring pemilih di daerah pemilihan, meningkatkan kemampuan lobi politik, meningkatkan kemampuan berkampanye, meningkatkan kemampuan mengawasi proses penghitungan suara, dan meningkatkan kemampuan menghadapi gugatan hasil pemilu.



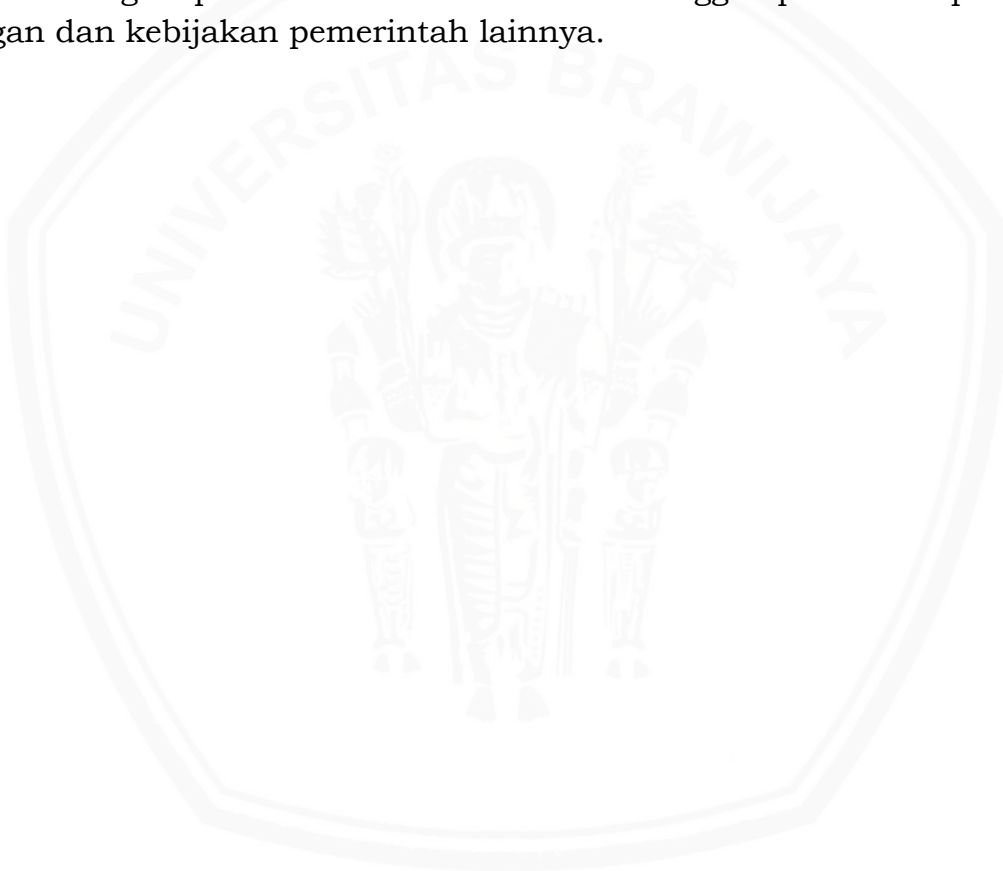


MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

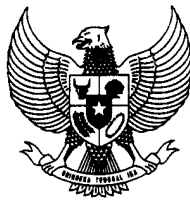
BAB VI
PENDANAAN

Pendanaan program dan kegiatan peningkatan partisipasi politik perempuan bersumber dari APBN dan APBD, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pembiayaan operasional menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga. Demi efektivitas dan efisiensi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama dalam bentuk *joint finance* atau *finance sharing* dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga bisa menjalin kemitraan dengan pihak lain selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah lainnya.



BAB VII ...





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pemantauan

Pejabat yang membawahi Badan/Biro/Bagian Pemberdayaan Perempuan melakukan pemantauan langsung atau tidak langsung terhadap program dan kegiatan peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik secara horisontal maupun vertikal. Secara horisontal, pemantauan dilakukan pada instansi/SKPD yang sejajar baik pada tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Secara vertikal, pemantauan dilakukan pada instansi/SKPD setingkat lebih rendah (Badan PP Provinsi memantau Badan PP di tingkat Kabupaten/Kota). Pemantauan langsung dengan cara datang langsung ke tempat kegiatan, sedangkan tidak langsung dengan cara minta laporan/informasi. Pemantauan perlu dilakukan agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan.

B. Evaluasi

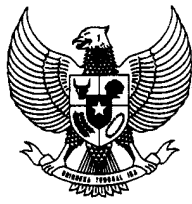
Pimpinan dan staf Badan/Biro/Bagian Pemberdayaan Perempuan yang melaksanakan program dan kegiatan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, setiap kali program dan kegiatan selesai dilaksanakan. Evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan setiap pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga bisa menjadi bahan masukan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan berikutnya.

C. Pelaporan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik Badan/Biro/Bagian Pemberdayaan Perempuan atau sebutan lain membuat dokumen laporan pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif. Laporan disampaikan kepada instansi di atasnya mulai dari SKPD Kabupaten/Kota kepada SKPD Provinsi dan SKPD Provinsi membuat rekapitulasi laporan untuk disampaikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA). Selain untuk dokumentasi, laporan juga menjadi bahan evaluasi secara keseluruhan demi perbaikan program dan kegiatan serupa di kemudian hari.

BAB VIII ...





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

BAB VIII
PENUTUP

Tujuan dari program dan kegiatan peningkatan partisipasi politik perempuan untuk menjadi anggota legislatif adalah menambah jumlah perempuan di lembaga legislatif dan meningkatkan kualitas anggota legislatif perempuan agar mampu menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal. Kombinasi peningkatan jumlah dan kualitas itu akan mengefektifkan perjuangan perempuan dalam mengatasi keterpinggiran perempuan, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi serta di berbagai bidang lainnya. Kemajuan aksesibilitas perempuan diberbagai bidang pembangunan akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih adil sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di legislatif disertai turut aktifnya dalam proses pengambilan keputusan legislasi, budgeting dan pengawasan akan melahirkan kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang responsif gender sebagai instrumen strategis guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI



LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2013
TENTANG
PANDUAN PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF

KEGIATAN PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN SEBELUM MASA PEMILU

No.	Tujuan	Sasaran	Kegiatan	Narasumber/Fasilitator	Waktu	Keterangan
01.	Meningkatkan kesadaran politik perempuan tentang politik berbangsa dan bernegara	Pengurus ormas perempuan, partai politik, Korpri, akademisi	Pendidikan Politik Kebangsaan Perspektif Gender	Kementerian PP-PA, Kemendagri, Kesbangpol Provinsi, Badan PP dan KB Provinsi, tokoh politik, LSM penggiat politik	2-3 hari	Tersedia 9 Modul Pendidikan Politik Kebangsaan Perspektif Gender
02.	Mendorong perempuan aktif di partai politik	Pengurus ormas perempuan, kader muda partai politik	Sarasehan: Membangun kebangkitan perempuan di bidang politik	Kementerian PP-PA, Badan PP dan KB Provinsi, akademisi, tokoh politik, tokoh masyarakat	1 hari	
03.	Mendorong perempuan menjadi calon anggota legislatif	Pengurus ormas perempuan, perempuan anggota/kader partai politik	Lokakarya: Meningkatkan kualitas demokrasi yang berwawasan gender dalam menghadapi Pemilu Legislatif	Kementerian PP-PA, Badan PP dan KB Provinsi, akademisi, KPU, KPU Provinsi, tokoh politik	1 hari	
04.	Meningkatkan pemahaman tentang UU Paket Politik	Pengurus ormas perempuan, dan perempuan kader partai politik	Sosialisasi: Sosialisasi UU Paket Politik (UU Parpol, UU Penyelenggara Pemilu, dan UU Pemilu) dan kaitannya dengan 30% keterwakilan perempuan.	Kementerian PP-PA, Kemendagri, Kesbangpol Provinsi, Badan PP dan KB Provinsi, KPU, KPU Provinsi, Bawaslu, Panwaslu Provinsi	1 hari	

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
LINDA AMALIA SARI

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2013
TENTANG
PANDUAN PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF

KEGIATAN PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN SELAMA MASA PEMILU

No.	Tujuan	Sasaran	Kegiatan	Narasumber/Fasilitator	Waktu	Keterangan
01.	Meningkatkan kesadaran tentang arti penting pemilu	Pengurus ormas perempuan, kader partai politik	Seminar: Pemilu dan Masa Depan Politik Perempuan	Kementerian PP-PA, Badan PP dan KB Provinsi, KPU, KPU Provinsi, Bawaslu, Panwaslu Provinsi	1 hari	
02.	Meningkatkan kemampuan perempuan dalam pencalegan	Pengurus ormas yang bersiap menjadi caleg, kader partai politik	Fokus Grup Diskusi: Peta dan Lobi Politik dalam Pencalonan Pemilu Legislatif	Kementerian PP-PA, Badan PP dan KB Provinsi, Kemendagri, Kesbangpol Provinsi, praktisi politik, KPU, KPU Provinsi, akademisi	1 hari	
03.	Meningkatkan kemampuan perempuan caleg dalam kompetisi pemilu	Caleg perempuan	Lokakarya: Strategi Perempuan dalam Meraih Kemenangan pada Pemilu	Kementerian PP-PA, Badan PP dan KB Provinsi, Kemendagri, Kesbangpol Provinsi, KPU, KPU Provinsi, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, tokoh politik	1 hari	
04.	Meningkatkan kemampuan perempuan caleg dalam berkampanye	Caleg perempuan	Pelatihan: Kampanye Pemilu yang Santun, Cerdas, Efisien, dan Efektif	Kementerian PP-PA, Badan PP dan KB Provinsi, tokoh politik, konsultan pemilu	2 hari	

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
LINDA AMALIA SARI

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2013
TENTANG
PANDUAN PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF

KEGIATAN PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN SETELAH MASA PEMILU

No.	Tujuan	Sasaran	Kegiatan	Narasumber/Fasilitator	Waktu	Keterangan
01.	Meningkatkan pemahaman tentang posisi dan fungsi lembaga legislatif	Perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif (Aleg)	Seminar: Peran Perempuan Legislator dalam Perumusan Kebijakan Publik yang pro gender, perempuan, dan anak	Kementerian PP-PA, Badan PP dan KB Provinsi, Kemendagri, Kesbangpol Provinsi, Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, akademisi	1 hari	
02.	Merumuskan isu-isu strategis gender, perempuan dan anak yang harus diperjuangkan di legislatif	Anggota DPR/DPRD perempuan, pengurus ormas dan LSM perempuan, kader partai, birokrat perempuan	Lokakarya: Agenda Politik Perempuan Legislator	Kementerian PP-PA, Badan PP dan KB Provinsi, Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, tokoh masyarakat	1-2 hari	
03.	Meningkatkan kualitas perempuan legislator	Perempuan anggota DPR dan DPRD kabupaten/kota	Lokakarya: Peningkatan Kualitas Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Penganggaran yang perspektif gender	Kementerian PP-PA, Badan PP dan KB Provinsi, Kemendagri, Kesbangpol Provinsi, Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, tokoh masyarakat	1-2 hari	
04.	Meningkatkan kualitas komunikasi publik dalam mengemas isu gender, perempuan, dan anak	Perempuan anggota legislatif pusat, provinsi dan kabupaten/kota; Perempuan kader parpol dan pimpinan ormas perempuan	Pelatihan: Peningkatan kualitas komunikasi publik bagi perempuan	Pakar komunikasi politik, pakar gender, tokoh pers	1-2 hari	

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
LINDA AMALIA SARI

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

- Nama : Merry Amilia
- Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 21 Maret 1996
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Status : Belum Menikah
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Jl. Werkudoro III No 1 RT 05 RW 02
Kelurahan Polehan, Kec Blimbing, Malang
- No. HP : 089610026929
- Email : merryamiliaaa@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

- 2001-2002 : TK Dharma Wanita Malang
- 2002-2008 : SD Negeri Polehan 4 Malang
- 2008-2011 : SMP Negeri 10 Malang
- 2011-2014 : SMA Islam Malang
- 2014-2018 : S1 Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas
Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

PENDIDIKAN NON FORMAL

- 2014 : *Basic Training* Latihan Kader (LK) 1 HMI
Komisariat Hukum Brawijaya
- 2014 : Legislator Training DPM Fakultas
Pertanian Universitas Brawijaya
- 2015 : Latihan Kepemimpinan Manajemen
Mahasiswa Eksekutif Mahasiswa UB
- 2016 : Pelatihan Kewirausahaan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja,
Transimigrasi dan Kependudukan
- 2016 : Pusat Studi Gerakan Kepemimpinan EMUB

- 2016 : Pelatihan Kader Dasar Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Malang
- 2016 : Pelatihan HAM Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Malang
- 2017 : Latihan Khusus Kohati (LKK) tingkat Nasional

- 2014 : Staff Magang SEC FIA UB
- 2014 : Kader HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat Ilmu Administrasi Brawijaya Cabang Malang
- 2015 : Staff Sosial Masyarakat BEM FIA UB
- 2015 : Staff Sosial Masyarakat EM UB
- 2015 : Staff Informasi Komunikasi SEC FIA UB
- 2016 : Staff Sosial Masyarakat EM UB
- 2016 : Dirjen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) BEM FIA UB
- 2016 : Departemen Pengembangan SDM Bidang Pemberdayaan Perempuan HMI Komisariat Ilmu Administrasi Brawijaya
- 2017 : Anggota Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Malang
- 2017 : Anggota Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam Cabang Malang
- 2017 : Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan HMI Komisariat Ilmu Administrasi Cabang Malang

PENGALAMAN KERJA

- 2017 : Praktek Kerja Lapangan di Kantor Sekretariat DPRD Kota Malang

PENGALAMAN KE

- Bahasa Indonesia : ★ ★ ★ ★ ★
- Bahasa Inggris : ★ ★ ★ ☆ ☆
- Microsoft Office : ★ ★ ★ ☆ ☆
- Internet : ★ ★ ★ ☆ ☆
- Administrasi : ★ ★ ★ ★ ★